

Laporan
Tahunan
2017

BUMN
Hadir untuk negeri


biofarma



Change and Acceleration
Towards a Leading
Lifescience Company



Change and Acceleration Towards a Leading Lifescience Company

*Ilustrasi Virus dan Bakteri



“Tantangan global bidang kesehatan baik kebutuhan pengembangan vaksin baru akibat munculnya wabah penyakit baru (*emerging diseases*) dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging diseases*) mendorong kami untuk melakukan percepatan dan perubahan.

Pada 2017 Indonesia dipercaya menjadi pemimpin *Center of Excellence* Riset Vaksin dan Produk Bioteknologi bagi negara-negara Islam. Kepercayaan ini merupakan pengakuan atas kinerja Indonesia melalui Bio Farma sebagai industri vaksin dan produk bio-teknologi yang lebih maju dibandingkan di negara-negara anggota OKI. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota OKI yang memiliki industri vaksin lengkap yang diakui *World Health Organization* (WHO).

Sejalan dengan program Nawacita nomor enam yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar Internasional, industri vaksin Indonesia mampu dipasarkan secara masif di dunia sekaligus mendorong kemajuan negara-negara berkembang lainnya. Tahun 2017 ini dengan semangat perubahan dan percepatan, kami percaya langkah menuju perusahaan *lifescience* akan terwujud nyata untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik”.

Kesinambungan Tema

2016



BIOTECH INNOVATION FOR A GLOBAL COMPETITIVENESS

Bio Farma memiliki keahlian dan pengalaman selama lebih dari 126 tahun, dengan sejarah panjang tersebut, Kami siap untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa di Indonesia dan dunia. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Bio Farma, kami telah menjadi produsen Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis pertahun. Kami yakin akan terus dapat meningkatkan kinerja kini dan masa depan. Kami menyelaraskan seluruh proses produksi sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kami terus melakukan inovasi bioteknologi, berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin, untuk kebutuhan program imunisasi nasional dan menyelamatkan jutaan kehidupan manusia.

2015



BIOTECH INNOVATION FOR A BETTER FUTURE

Dengan dedikasi dari seluruh insan Bio Farma, sejak tahun 2011 kami telah bertekad dan berkomitmen menghasilkan berbagai inovasi bioteknologi, karena Inovasi adalah budaya kami. Implementasi Bisnis Proses Ramah Lingkungan serta Inovasi bidang lingkungan dan CSR, menjadikan Bio Farma satu-satunya industri Farmasi Indonesia yang meraih PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2015 ini, Inovasi Bioteknologi telah membuahkan hasil yaitu pengembangan produk Biologi Eritopoetin (EPO) serta pengembangan produk *Lifescience* lainnya. Kini saatnya Bio Farma terus berinovasi di bidang Bioteknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2014



BIO FOR LIFE

Didukung kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 125 tahun, kami hadir sebagai bagian dari perjuangan, dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, berperan penting dalam membangun kesehatan bangsa, sehingga keberadaannya dipertahankan dari masa ke masa. Dengan filosofi "*Dedicated to Improve Quality of Life*" kami siap mendedikasikan kerja keras kami untuk keamanan kesehatan global (*Global Health Security*), sehingga melalui Bio for Life memberikan solusi untuk kemakmuran global.

2013



DEDICATED TO GLOBAL ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH

Dedikasi untuk Lingkungan Global dan Kesehatan Masyarakat

Dengan kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 123 tahun, kami terus berinovasi, dalam riset dan pengembangan produk untuk menemukan vaksin-vaksin baru, yang dapat mengatasi berbagai penyakit yang terus berkembang dan mengancam kesehatan manusia. Kami dedikasikan kerja keras kami untuk lingkungan global dan kesehatan masyarakat, memberikan solusi untuk kemakmuran global.

2012

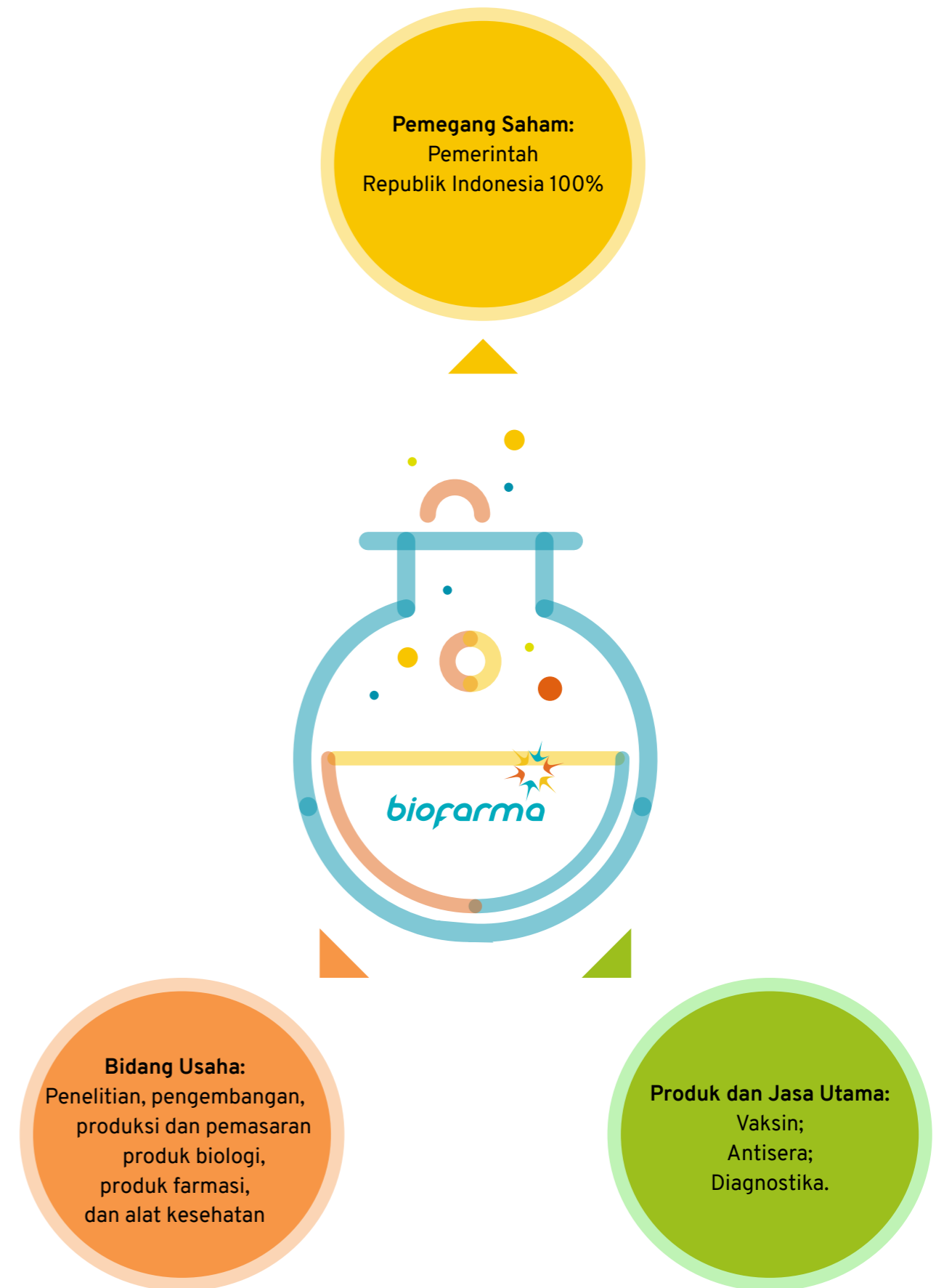


TOWARDS LIFESCIENCE INDUSTRY

Menuju Industri Lifescience

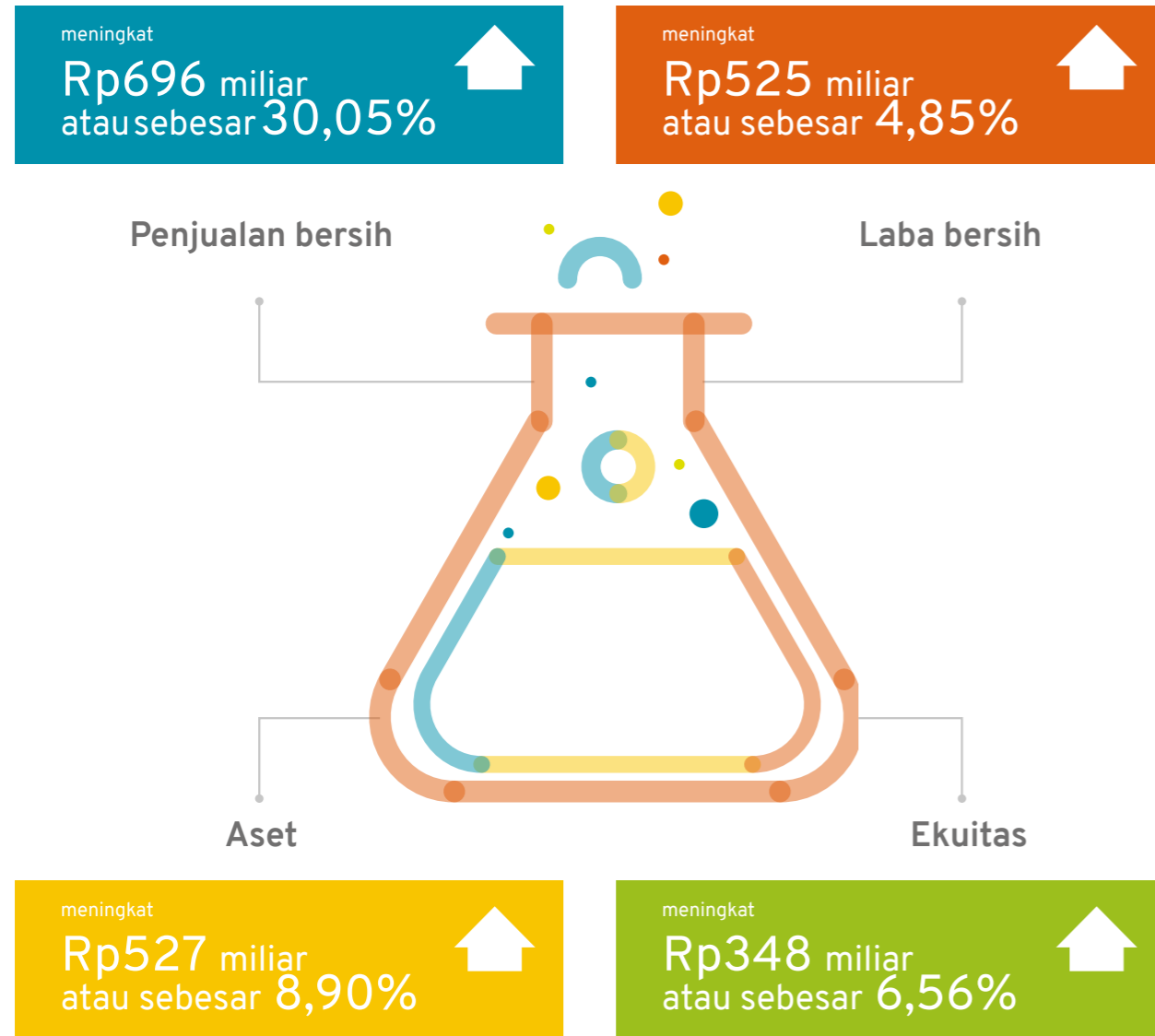
Tahun 2012 Bio Farma melakukan peningkatan visi perusahaan, yaitu "menjadi Produsen vaksin dan antisera kelas dunia yang berdaya saing global." Dengan semangat untuk memberikan solusi kemakmuran secara global, kini saatnya Bio Farma melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan *repositioning* Perusahaan Produsen Vaksin menjadi *Lifescience Industry*, melalui perubahan sistem budaya korporasi baru, efisiensi proses bisnis, pembaharuan teknologi serta peningkatan kualitas SDM kelas dunia.

Sekilas Tentang Perusahaan



Ringkasan Keuangan

KINERJA KEUANGAN



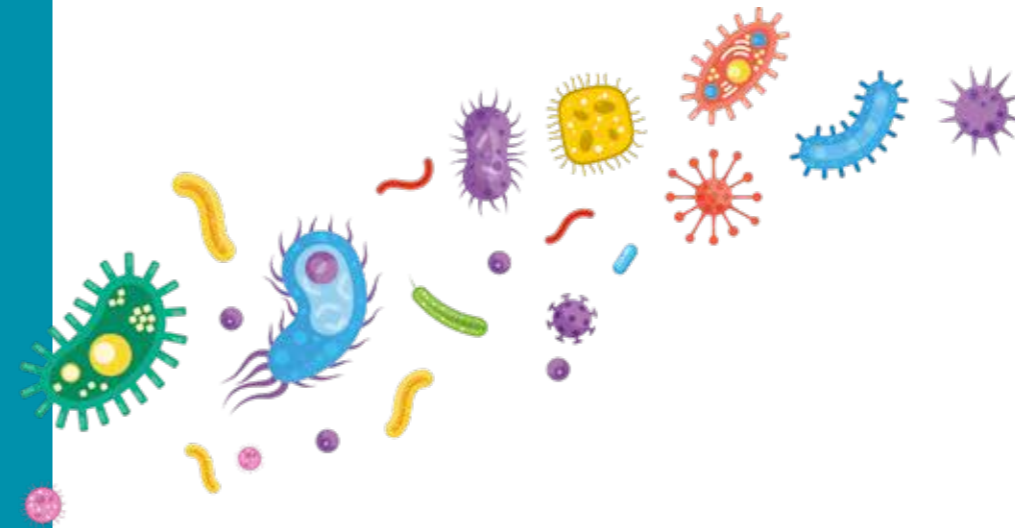
KINERJA NON KEUANGAN:

- ✓ Center of Excellence Research Vaccine Organization Islamic Cooperation (OIC)
- ✓ Penambahan empat negara tujuan ekspor menjadi 136 negara.
- ✓ PROPER EMAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- ✓ Penilaian tingkat kesehatan perusahaan tahun 2017 mendapat skor 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA",



Jejak Langkah





Keunggulan Kami

“

Dengan kapasitas produksi sekitar 2 miliar dosis per-tahun, Bio Farma tercatat sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Bio Farma terus berperan di kancah global melalui pemenuhan produk vaksin ke lebih dari 130 negara di dunia.

Peran Bio Farma Di Dunia

Collaborating Partner



World Health
Organization



unicef

BILL & MELINDA
GATES foundation



Organization of Islamic
Cooperation (OIC) Vaccine
Manufacturer Group



Islamic Development Bank's Self
Reliance in Vaccine Programs (IDB-
SRVP) Center of Excellence for
Biological

dcvmmn

Developing Countries
Vaccine Manufacturers
Network



International Vaccine
Institute (IVI)

Bio Farma merupakan Aset Nasional, yang mendapat tugas dari pemerintah sebagai BUMN produsen Vaksin dan Antisera. Saat ini berkembang menjadi perusahaan *Lifescience*. Selama 128 tahun pendiriannya Bio Farma telah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, berperan penting dalam pencegahan penyakit baik di Indonesia maupun dunia. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Vaksin Bio Farma terutama negara - negara berkembang, dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Bio Farma memiliki peran di kancah global dengan pemenuhan produk vaksin ke lebih dari 130 negara di dunia, dan lebih dari 13 produk vaksin saat ini telah memiliki pra kualifikasi dari WHO BF di global (WHO PQ)

Dengan kapasitas produksi sekitar 2 miliar dosis per-tahun, Bio Farma merupakan terbesar di Asia Tenggara, untuk itu, kami sangat memprioritaskan kebutuhan dalam negeri

dengan memenuhi kebutuhan vaksin Nasional, termasuk kebutuhan vaksin untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri beberapa waktu lalu, penyediaan vaksin untuk Jemaah Haji dan Umrah, serta kebutuhan vaksin lainnya untuk dunia melalui WHO dan UNICEF.

Bio Farma memiliki peran strategis untuk pemenuhan vaksin dan menjaga ketersediaan vaksin di kancah global dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga Internasional antara lain : *Organization of Islamic Cooperation* (OIC), IDB, *Bill & Melinda Gates Foundation*, *Developing Countries Vaccine Manufacturers Network* (DCVMN), *International Vaccine Institute* (IVI), *World Health Organization* (WHO) serta UNICEF.

Indonesia Melalui Bio Farma Sebagai *Center of Excellence* Vaksin Dunia



Pada tanggal 7 Desember 2017, Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan Organisasi Kerja Sama Islam (KTM OKI) ke-6 di Jeddah mengesahkan penetapan Indonesia sebagai *Centre of Excellence on Vaccine and Bio-technology Products*. Penetapan ini ditegaskan dalam Resolusi OKI mengenai "*Self-Reliance in Supply and Production of Medicines, Vaccines and Medical Technologies*". Resolusi antara lain menyetujui kerangka acuan pembentukan *Centre of Excellence* di Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pendirian *Centre of Excellence* dimaksud. Kepercayaan ini merupakan pengakuan atas kinerja pemerintah Indonesia terkait industri vaksin dan produk bio-teknologi yang lebih maju dibandingkan umumnya di negara-negara anggota OKI. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota OKI yang memiliki industri vaksin imunisasi lengkap yang diakui WHO.

Sejumlah negara mengapresiasi upaya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan menilai bahwa pendirian *Centre of Excellence on Vaccine and Bio-technology Products* ini sangat penting untuk kemandirian negara-negara OKI dalam penyediaan vaksin dan produk bioteknologi. Melalui *Centre of Excellence* ini diharapkan dapat dilakukan riset bersama vaksin dan sediaan bioteknologi untuk dalam jangka panjang dapat mengembangkan bersama vaksin dengan teknologi yang mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi atau yang mungkin timbul di masa mendatang di negara-negara OKI.

KTM OKI ke-6 membahas tema *Health in All Policies* (HiAP) menghasilkan 5 resolusi mengenai implementasi *Strategic Health Program of Action* (SHPA) OKI dan situasi kesehatan di Palestina, serta Deklarasi Konferensi. Dalam kesempatan

Konferensi tersebut, Indonesia juga menampilkan beberapa praktik terbaik Pembangunan Indonesia Sehat, pelayanan kesehatan haji dan industri farmasi Indonesia, dalam pameran yang diselenggarakan pada konferensi ini.

Melalui KTM OKI ini, Menteri Kesehatan mendorong negara-negara OKI untuk lebih memperkuat kerjasama kesehatan di antara negara-negara OKI, khususnya dalam implementasi Program Aksi Strategis Kesehatan OKI (*Strategic Health Programme of Action/SHPA*) 2014-2023 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2030.

Menteri Kesehatan juga memaparkan berbagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia sejalan dengan SHPA OKI, antara lain implementasi *International Health Regulation* (2005) dan pelaksanaan *Joint External Evaluation*, program kesehatan ibu dan anak serta gizi, upaya menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta kesiapan Indonesia menjadi *Centre of Excellence on Vaccines and Biotechnology Products* OKI, penyelenggaraan Istithaah kesehatan haji, kesiapan menghadapi ancaman kesehatan global dan penanganan krisis kesehatan.

Negara-negara OKI mengapresiasi peran aktif Indonesia sebagai Ketua Tematik untuk kerjasama kesehatan ibu, anak dan gizi selama 2 periode dari tahun 2013-2015 dan 2015-2017. Di bawah kepemimpinan Indonesia telah dilakukan berbagai kegiatan, antara pelatihan mengenai Buku KIA bagi negara-negara anggota OKI. Pada periode 2017-2019, Indonesia akan mengambil peran baru sebagai ketua untuk area kerjasama vaksin, obat, dan alat kesehatan bersama Malaysia.

Memprioritaskan Kebutuhan Vaksin Dalam Negeri



Bio Farma sebagai BUMN produsen Vaksin dan Antisera, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan vaksin, khususnya Difteri. Dengan kapasitas produksi total sekitar 2 miliar dosis pertahun, merupakan terbesar di Asia Tenggara. Bio Farma telah memenuhi kebutuhan vaksin Nasional, Bio Farma berperan aktif dalam meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi Vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan kesehatan global (*Global Health Security*).

Dalam upaya menghadapi *Outbreak Response Immunization (ORI)* atau tindakan vaksinasi setelah merebaknya suatu penyakit, Bio Farma terus memproduksi vaksin yang

mengandung difteri, dengan memaksimalkan kapasitas yang ada. Vaksin dengan kandungan difteri yang terdiri dari DT, Td dan DTP-HB-Hib. Jumlah tersebut, sudah termasuk untuk kebutuhan imunisasi nasional dan untuk kebutuhan ORI.

Bio Farma siap untuk memenuhi kebutuhan vaksin yang mengandung difteri, dengan jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah, baik untuk program imunisasi rutin maupun untuk pencegahan KLB difteri. Dengan kemampuan dan kapasitas yang ada, kami siap untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk mencegah KLB difteri menyebar. Total produksi vaksin dengan kandungan difteri yang akan kami produksi pada tahun 2018 akan ditingkatkan kapasitasnya dari 15 juta vial menjadi 19,5 juta vial per tahun, dengan menambah jumlah hari kerja.

Nawacita dan Kemandirian Industri Vaksin di Indonesia

Dengan filosofi "*Dedicated to Improve Quality of Life*", Bio Farma berperan aktif dalam meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi Vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan kesehatan global atau *Global Health Security*.

Sesuai dengan visi Bio Farma "menjadi Perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global" dan misi untuk "menyediakan dan mengembangkan Produk *Lifescience* berstandar Internasional untuk meningkatkan kualitas hidup".

Sejalan dengan nawacita dan Inpres No 6 tahun 2016, mengenai percepatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan, dalam 5 tahun ke depan, kami memiliki rencana untuk melakukan pengembangan bisnis antara lain di bidang pengembangan dan produksi Produk Plasma (*blood product*). Produk Plasma (*blood product*) yang akan diproduksi adalah Albumin, Immunoglobulin dan Faktor VIII yang dibutuhkan untuk kasus penyakit kronis dan keganasan, pengobatan pemeliharaan pasien hemofili dan penyembuhan infeksi maupun kegagalan sistem kekebalan tubuh.

INPRES No. 6 Tahun 2016
Percepatan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan



Kawasan Geopark Ciletuh Resmi Memenuhi Kriteria Sebagai Taman Bumi Dunia

Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh Palabuhanratu, yang mejadi binaan Bio Farma resmi ditetapkan memenuhi kriteria sebagai Taman Bumi Dunia (*Global Geopark*). Terkait penetapan tersebut, pada 3 Januari 2018, Bio Farma telah menerima apresiasi dalam bentuk surat resmi dari *Global Geopark Network (GGN)* yang ditanda tangani oleh Guy Martini selaku Sekjen GGN yang berkantor pusat di Paris.

Dalam pemberdayaan masyarakat lokal, Bio Farma mensubstitusi pekerjaan penambang ilegal yang kemudian berkecimpung dan berprofesi dalam bidang Geo Wisata, sedangkan dalam pengembangan aspek keanekaragaman budaya oleh Bio Farma diimplementasikan melalui Batik Ramah Lingkungan, Batik Pakidulan, promosi dan sosialisasi *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu, pendampingan proses pengajuan dan evaluasi *Global Geopark Network*, serta pengembangan masyarakat yang bersinergi dengan komunitas lokal. Dalam aspek *biodiversity* Bio Farma juga berperan aktif dalam pelestarian Flora dan Fauna di kawasan Ciletuh seperti penanaman pohon mangrove, penanaman pohon kepuh, serta program konservasi dalam bentuk peningkatan keanekaragaman hayati di Suaka Marga Satwa Cikepuh.



Daftar Isi

TEMA DAN ARTI TEMA 3

PENGANTAR 4

Kesinambungan Tema	4
Sekilas tentang Perusahaan	5
Ringkasan Keuangan	6
Jejak Langkah	8
Keunggulan Kami	10

PROFIL PERUSAHAAN 56

Profil Perusahaan	58
Riwayat Singkat Perusahaan	60
Brand Perusahaan	62
Bidang Usaha	64
Produk dan Jasa	65
Sebaran Vaksin	68
Struktur Organisasi	70
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	72
Profil Dewan Komisaris	74
Profil Direksi	82
Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan	90
Komposisi Pemegang Saham	94
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi	94

KILAS KINERJA 20

Ikhtisar Keuangan	22
Ikhtisar Operasional	27
Informasi Harga Saham	29
Aksi Korporasi	29

LAPORAN MANAJEMEN 38

Sambutan Dewan Komisaris	40
Sambutan Direksi	46
Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017	54

Struktur Grup Perusahaan	94
Kronologis Penerbitan Saham	94
Kronologis Penerbitan dan/atau pencatatan Efek Lainnya	95
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	95
Penghargaan	96
Sertifikasi	102
Nama dan Alamat Jaringan Kantor Bio Farma	104
Informasi Yang Tersedia di Website	104
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	105

SUMBER DAYA MANUSIA 110

ROADMAP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 112

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)	29
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi	29
Informasi Sumber Pendanaan lainnya	29
Peristiwa Penting	30

Strategi Manajemen <i>Human Capital</i>	113
Pengembangan Organisasi	113
Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia	114
Manajemen <i>Human Capital</i>	115
Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen	115
Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	116
Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja	118
Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir	119
<i>Engagement</i> Karyawan	119
Kebijakan Hubungan Industrial	120
Kebijakan dan Program Pensiun	120
Profil <i>Human Capital</i>	121
Internalisasi <i>Corporate Culture</i>	121

TEKNOLOGI INFORMASI 123

Master Plan Teknologi Informasi	124
Struktur Pengelola Teknologi Informasi	125
Manajemen Teknologi Informasi	126
Strategi Manajemen Teknologi Informasi	126
Kebijakan Teknologi Informasi	127
Infrastruktur Teknologi Informasi	128
Tata Kelola Teknologi Informasi	130
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ke Depan	130

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 134

Analisis dan Pembahasan Manajemen	136
Tinjauan Perekonomian	136
Analisis Perekonomian Global	136
Analisis Perekonomian Nasional	137
Analisis Industri Farmasi	138
Analisis Posisi Perusahaan dalam Industri Farmasi Global dan Nasional	139
Peran Bio Farma dalam Pemberantasan Tetanus	142
Peran Bio Farma dalam Pemberantasan Polio	143
Kontribusi Bio Farma di Dunia	144

Tinjauan Operasional	146
Strategi Perusahaan	146
Aspek Pemasaran	146
Kinerja Segmen Usaha	148
Prospek Usaha	158
Strategi ke Depan	159
Tinjauan Keuangan	160
Kinerja Keuangan	160
Laporan Posisi Keuangan	160
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	168
Laporan Arus Kas	175
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	178
Kolektibilitas Piutang	179
Struktur Modal	180
Kebijakan Struktur Modal dan Dasar Pemilihan	180
Ikatan Material Investasi Barang Modal	181
Investasi Barang Modal	184
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal	187
Pencapaian Target dan Target ke Depan	187
Pencapaian Target 2017	187
Proyeksi 2018	189
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan	190
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	190
Kebijakan Dividen	190
Pengumuman dan Pembayaran Dividen	191

CORPORATE GOVERNANCE 200

Komitmen Perusahaan dalam Menerapkan <i>Corporate Governance</i> dan <i>Governance Outcome</i>	202
Arti Penting GCG Bagi Bio Farma	203
Manfaat Penerapan GCG	203
Prinsip-Prinsip GCG	204
Dasar Penerapan GCG	204
Roadmap GCG	205
Strategi dan Rencana Penerapan GCG di Bio Farma	206
<i>Governance Outcome</i>	207
Penerapan GCG Secara Berkelanjutan	207
Penetapan Standar Kualitas Implementasi GCG	208
Penerapan Prinsip-Prinsip GCG	209
Monitoring Penerapan GCG	209
Penilaian GCG (GCG Assessment)	209

Peningkatan Kualitas Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	220	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	250	Pengembangan Kompetensi Direksi	280
Struktur dan Mekanisme GCG	220	Komisaris Independen	251	Kebijakan Remunerasi Direksi	280
Struktur Organ Perusahaan	220	Rapat Dewan Komisaris	251	Pendelegasian Wewenang Direksi	282
GCG <i>Soft Structure</i>	222	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	255	Penilaian Kinerja Direksi	282
Mekanisme GCG	223	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris	255	Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi	287
Rapat Umum Pemegang Saham	223	Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	257	Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris	289
Referensi Peraturan	223	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	258	Sekretaris Dewan Komisaris	289
Pemegang Saham	223	Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris	261	Komite Audit	291
Tahapan Penyelenggaraan RUPS	224	Direksi	263	Organ dan Komite di bawah Direksi	310
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	224	Referensi Peraturan	263	Sekretaris Perusahaan	310
Dewan Komisaris	239	<i>Board Manual</i>	263	Internal Audit	312
Referensi Peraturan	239	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	263	Akuntan Publik	321
<i>Board Manual</i>	239	Kewajiban Direksi	263	Manajemen Risiko	322
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	240	Hak dan Wewenang Direksi	266	Dasar Penerapan Manajemen Risiko	322
Kewajiban Dewan Komisaris	240	Kriteria Direksi	267	Struktur Organisasi Manajemen Risiko	322
Wewenang Dewan Komisaris	241	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Komisaris	268	Sistem Manajemen Risiko	323
Kriteria Dewan Komisaris	242	Program Orientasi Bagi Direksi Baru	269	Profil Risiko dan Pengelolannya	323
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris	243	Pembidangan Tugas Direksi	270	Penilaian Risiko	330
Program Orientasi Bagi Komisaris Baru	244	Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi dan Penerapannya	271	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko	330
Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	245	Hubungan Afiliasi Direksi	272	Sistem Pengendalian Internal	330
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Penerapannya	246	Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi	273	Kesesuaian dengan COSO	334
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris	248	Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi	274	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal	334
Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	249	Kepemilikan Saham Direksi	274	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	335
Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris	250	Rapat Direksi	275	Perkara Penting	335
				Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan, Entitas Anak, serta Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang Menjabat pada Periode Laporan Tahunan	335

Sanksi Administrasi	335
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	335
Akses Informasi dan Data Perusahaan	336
Kode Etik	338
Kepatuhan Terhadap Kode Etik	339
Penyebarluasan Kode Etik	339
Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik	340

Kebijakan Gratifikasi	342
Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi	342
Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi	344
Laporan Gratifikasi Tahun 2017	344
<i>Whistleblowing System</i>	344
Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>	346
Sosialisasi <i>Whistleblowing System</i>	350

Jumlah Pengaduan di Tahun 2017 Tindak Lanjutnya	350
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali	350
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	350
Benturan Kepentingan	351

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

354

Pendekatan Holistik Terintegrasi dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Bio Farma	357
Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	358
Tanggung Jawab Sosial Terkait dengan Lingkungan Hidup	358
Kebijakan	354
Target Kegiatan	358
Kegiatan dan Dampak Kuantitatif	358
Penghargaan di Bidang Lingkungan	361

Sertifikasi di Bidang Lingkungan	361
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	362
Kebijakan	362
Target Kegiatan	362
Kegiatan dan Dampak Kuantitatif	362
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	364
Kebijakan	365

Target Kegiatan	365
Kegiatan dan Dampak	366
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen	370
Kebijakan	370
Target Kegiatan	370
Kegiatan dan Dampak	370

LAPORAN KEUANGAN

375

REFERENSI PERATURAN OJK DAN KRITERIA ARA

429



Kilas Kinerja

“

Terdapat perubahan komposisi penjualan bersih perusahaan pada tahun 2017. Penjualan yang biasanya didominasi oleh sektor ekspor, pada tahun 2017 justru didominasi oleh sektor dalam negeri yaitu mencapai 58,73% dari total pendapatan Bio Farma atau mencapai Rp1,77 triliun, melebihi target dari RKAP 2017 sebesar 148,54% yang diperkirakan akan mencapai Rp1,19 triliun, dan meningkat 65,70% dibandingkan dengan total penjualan dalam negeri di tahun 2016 yang tercatat Rp1,06 triliun

Kilas Kinerja

IKHTISAR KEUANGAN

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam juta rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
LAPORAN POSISI KEUANGAN						
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	369.546	325.830	447.950	555.939	971.717	891.251
Efek Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	25.600	-
Piutang Usaha	313.138	224.511	288.626	507.746	257.260	288.246
Piutang Lain-Lain	122	1.012	446	822	850	346
Persediaan	712.912	947.409	708.564	462.557	326.600	204.899
Uang Muka	27.734	504.119	54.052	102.353	50.412	38.624
Pajak Dibayar Dimuka	359.948	288.404	298.817	242.720	154.008	96.972
Biaya Dibayar Dimuka	12.474	24.632	12.137	10.163	4.767	1.591
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	14	42.236	800	1.592	2.726	3.104
Aset Lancar Lainnya	168.198	-	38.162	111.888	30.698	17.870
Jumlah Aset Lancar	1.964.087	2.358.153	1.849.555	1.995.781	1.824.639	1.542.901
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan	30.214	30.416	23.585	22.087	17.874	14.447
Aset Tetap	4.394.231	5.851.363	3.998.187	3.605.537	1.163.473	1.126.085
Aset Tak Berwujud	32.522	22.843	38.634	36.005	37.855	20.214
Aset Tidak Lancar Lainnya	28.395	10.191	12.493	21.253	766	956
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.485.362	5.934.762	4.072.899	3.684.882	1.219.969	1.161.703
JUMLAH ASET	6.449.449	8.292.915	5.922.454	5.680.663	3.044.608	2.704.604
LIABILITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang Usaha	371.253	492.512	259.234	233.417	145.095	158.098
Utang Pajak	57.801	84.083	47.624	46.518	38.919	86.916
Biaya yang Masih Harus Dibayar	107.859	153.040	113.405	145.489	128.280	112.781

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Pendapatan Diterima Dimuka	1.008	-	44	899	1.366	5.405
Liabilitas Lancar Lainnya	41.635	7.942	32.861	30.341	26.009	26.437
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	579.556	737.577	453.169	456.663	339.668	389.637
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	219.937	185.337	167.133	152.022	136.368	48.371
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	27.846	-	27.846	24.882	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	219.937	1.485.333	167.133	179.868	161.250	48.371
JUMLAH LIABILITAS	799.493	2.222.910	620.302	636.532	500.919	438.008
EKUITAS						
Modal Saham	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.250.000	750.000
Modal Donasi	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba (Rugi)	-	-	-	-	-	-
Dicadangkan	1.250.552	1.413.092	899.824	816.422	786.075	941.920
Belum Dicadangkan	-	-	-	(2.484)	-	675
Labanya Periode Berjalan	525.356	747.313	501.041	670.593	577.590	572.468
Komponen Ekuitas Lainnya	1.874.049	1.909.600	1.901.287	1.909.600	(69.976)	-
JUMLAH EKUITAS	5.649.956	6.070.005	5.302.152	5.044.132	2.543.689	2.265.062
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.449.449	8.292.915	5.922.454	5.680.663	3.044.608	2.703.070

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
PENJUALAN BERSIH						
Produk Perusahaan	1.872.113	2.452.728	1.927.724	2.329.624	2.028.988	1.848.452
Produk <i>Partnership</i>	1.111.028	385.789	358.956	-	-	-
<i>Trading Partnership</i>	20.120	93.099	23.764	11.436	10.287	1.848
Jasa	8.310	8.599	5.315	4.858	4.805	3.382
Jumlah Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.216	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA						
Produk Perusahaan	(923.185)	(899.855)	(763.398)	(852.361)	(767.609)	(718.463)
Produk <i>Partnership</i>	(710.318)	(266.662)	(215.497)	-	-	-
<i>Trading Partnership</i>	(16.766)	(89.452)	(21.437)	-	-	-
Jasa	(6.861)	(6.285)	(4.962)	(3.962)	(3.654)	(3.986)
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.657.130)	(1.262.254)	(1.005.294)	(867.488)	(780.090)	(723.596)
LABA (RUGI) KOTOR	1.354.440	1.677.962	1.310.465	1.478.430	1.263.991	1.130.085
Penghasilan lain-lain	115.158	1.520	164.728	129.064	118.630	152.838
Beban Administrasi dan Umum	(409.734)	(128.830)	(402.002)	(421.759)	(349.010)	(304.313)
Beban Penjualan	(137.478)	(402.122)	(133.996)	(126.818)	(99.182)	(72.830)
Beban Penelitian, Pengembangan dan <i>Surveilans</i>	(124.570)	-	(114.481)	(93.443)	(88.779)	(68.318)
Beban Bunga Pinjaman	(124.570)	(3.674)	(9.343)	-	-	-
Beban Lain-lain	(84.182)	(130)	(139.745)	(66.201)	(69.748)	(58.873)
Jumlah	(640.807)	(671.999)	(625.497)	(579.157)	(488.089)	(351.496)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	1.005.963	684.968	899.274	775.902	778.589
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Pajak Kini	(194.907)	(263.158)	(185.425)	(232.893)	(197.136)	(207.288)
Pajak Tanggihan	6.629	4.508	1.498	4.213	3.427	1.166
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(188.278)	(258.650)	(183.927)	(228.681)	(193.709)	(206.121)
LABA (RUGI) BERSIH	525.356	747.313	501.041	670.593	582.193	572.468
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi						
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	1.980.782	-	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(27.238)	-	(8.313)	828.226	(21.701)	-

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	(27.238)	-	(8.313)	1.979.954	(21.323)	1.979.954
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	498.117	747.313	492.728	2.650.547	560.870	572.468
LAPORAN ARUS KAS						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.111.408	3.004.396	2.334.948	2.106.478	2.108.672	1.800.735
Penerimaan (Pembayaran) Pajak	(369.722)	(349.775)	(267.037)	(297.534)	(314.959)	(151.969)
Penerimaan Bunga	3.558	-	7.960	37.422	35.395	12.823
Penerimaan Hibah/Donasi WHO	1.917	-	13.588	800	4.989	1.278
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	613	1.520	1.238	(23.774)	11.673	(19.156)
Penerimaan Klaim Asuransi	575	-	-	-	107	-
Pembayaran Bunga	(8.071)	(3.674)	(9.343)	-	-	-
Pembayaran Tantiem	(11.021)	(14.750)	(14.750)	(13.737)	(9.727)	(6.980)
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(2.362.898)	(2.065.122)	(1.519.679)	(1.584.191)	(1.330.310)	(1.003.850)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	366.360	572.595	546.926	225.465	505.839	632.880
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Pembelian Aset Tetap	(293.309)	(1.782.105)	(393.170)	(535.175)	(163.149)	(192.644)
Penyertaan pada Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	(25.000)	-
Penyertaan pada Perusahaan Vial	-	(19.950)	-	-	-	-
Pembelian Aset Tak berwujud	(3.245)	(6.681)	(11.173)	(3.962)	(20.578)	(6.671)
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	-	(38.850)	-	25.000	-	138
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(296.554)	(1.847.586)	(404.343)	(514.137)	(208.727)	(199.176)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	-	-	235.000	-	-	-

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	-	(235.000)	-	-	-
Pembayaran Dividen dan PKBL	(150.313)	(128.317)	(234.707)	(149.727)	(228.987)	(113.938)
Modal Donasi dari WHO	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	1.200.000	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	-	-	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(150.313)	1.071.683	(234.707)	(149.727)	(228.987)	(113.938)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(80.507)	(203.308)	(92.123)	(438.398)	68.125	319.765
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	2.103	-	(15.865)	22.621	12.341	72.988
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	447.950	529.138	555.939	971.717	891.251	498.498
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	369.546	325.830	447.950	555.939	971.717	891.251

RASIO KEUANGAN

RASIO KEUANGAN						
Likuiditas (%)						
Rasio Kas	63,76	44,18	98,85	121,74	286,08	228,74
Rasio Lancar	338,90	319,72	408,14	437,04	537,18	395,98
Rentabilitas (%)						
Gross Profit Margin	44,97	57,07	56,59	63,02	61,84	60,96
Operating Margin	22,67	34,29	28,50	35,65	35,57	36,93
Net Profit Margin	17,44	25,42	21,64	28,59	28,48	30,88
Return on Equity (ROE)	12,97	20,46	12,47	17,14	31,93	37,81
Return on Investment (ROI)	16,93	17,62	16,53	20,27	31,15	34,81
Return on Assets (ROA)	8,62	10,23	8,80	15,37	20,26	24,11
Solvabilitas (%)						
Debt to Equity	14,15	36,62	11,70	12,62	19,69	19,34
Turnover (times)						

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Turnover Persediaan	2,33	1,53	1,72	2,20	2,94	3,95
Turnover Piutang	10,08	11,46	5,87	6,17	7,54	7,29
Pertumbuhan (%)						
Penjualan	130,05	113,64	98,71	114,77	110,27	128,94
Laba Usaha	103,44	112,37	78,91	115,05	106,19	139,92
Laba Sebelum Pajak	104,18	116,37	76,17	115,90	99,65	149,41

IKHTISAR OPERASIONAL

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT OPERASI

Tabel Kinerja Operasional Segmen Vaksin Bakteri

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Produksi Vaksin Bakteri (Juta Dosis)	392,70	880,98	536,98	531,50	457,13	361,76
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	215,05	309,27	236,93	263,67	229,64	187,21

Tabel Kinerja Operasional Segmen Vaksin Virus

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Produksi Vaksin Virus (Juta Dosis)	2.898,95	3.740,04	3.937,41	3.406,32	3.094,21	2.630,18
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	532,84	663,03	529,54	506,16	457,44	430,33

Tabel Kinerja Operasional Segmen Vaksin Kombinasi

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Produksi Vaksin Kombinasi (Juta Dosis)	25,85	25,87	20,72	15,79	312,98	15,29
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	205,28	105,76	148,74	159,72	163,49	95,46

Tabel Kinerja Segmen Serum dan Diagnostika

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013
	1	2	3	4	5	6
Produksi Vaksin Serum dan Diagnostika (vial/ampul)	460.403	615.057	697.818	507.420	456.733	658.975
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	58,57	39,04	38,26	33,06	32,20	30,59

Tabel Kinerja Segmen Produk Partnership

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015*	2014*	2013*
	1	2	3	4	5	6
Produksi Produk Partnership (Juta Dosis)	87,05	36,98	27,36	-	-	-
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	713,27	265,69	218,47	-	-	-

* Produk Partnership baru dilaksanakan di tahun 2016

INFORMASI HARGA SAHAM

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebanyak 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.000.000.000.000.

	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Saham	Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)
Tahun 2017			
Triwulan I	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan II	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan III	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan IV	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Tahun 2016			
Triwulan I	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan II	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan III	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000
Triwulan IV	1,000,000	2,000,000	2,000,000,000,000

Catatan: Grafik tidak disajikan karena tidak ada perubahan nilai saham.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai harga saham, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan.

AKSI KORPORASI

Bio Farma per 31 Desember 2017 merupakan salah satu BUMN *non-listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai Aksi Korporasi.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan Desember 2017, Bio Farma tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*Outstanding*), tingkat bunga/imbilan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma tidak memiliki pendanaan lainnya yang bersumber dari publik.

Peristiwa Penting

Januari ▶



Rapat Kerja Tahunan 2017 Bio Farma

Rapat Kerja Tahun 2017 Bio Farma, tahun 2017 menjadi momen penting Bio Farma untuk memulai strategi *partnership* untuk meningkatkan pangsa pasar

Februari ▶



Uji Emisi Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua

Uji emisi pada kendaraan roda empat dan roda dua sebagai bentuk upaya Bio Farma dalam melestarikan lingkungan di kota Bandung



Sosialisasi Assessment GCG 2016/2017

Sosialisasi *assessment Good Corporate Governance* (GCG) oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Sertifikasi ISO 14001 : 2004

Bio Farma memperoleh sertifikasi ISO 14001 : 2004 atas tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan



Penghargaan untuk karyawan 100 (seratus) kali donor

Sebanyak 129 warga Jawa Barat mendapatkan penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela (DDS) dari Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, salah satunya adalah Kepala Bagian Pengadaan Umum PT Bio Farma (Persero) Dede Wanda yang sudah sebanyak 105 kali melakukan donor darah

Maret ▶



Sosialisasi Etika Medsos

Dirut Bio Farma menyampaikan Sosialisasi Etika Penggunaan Media Sosial kepada seluruh karyawan



Sosialisasi Penerapan "Good Corporate Governance" Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Perusahaan, dan Penandatanganan Pakta Integritas

Bio Farma gelar Sosialisasi Gratifikasi di Gedung Serba Guna Bio Farma yang dihadiri oleh seluruh karyawan dengan mendatangkan Giri Suprardiono, Direktur Gratifikasi KPK, dilanjutkan dengan Sosialisasi Kebijakan Perusahaan, dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan Perusahaan



Media Gathering

Bio Farma menggelar "Media Gathering dan Workshop" di Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Acara ini bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan media tentang industri vaksin dan *lifescience*



Coffee Morning 2017

Corporate Communications Bio Farma kembali menyelenggarakan acara "Coffee Morning" pertama di Tahun 2017

April ▶



Refreshment Training dan Soft Live Aplikasi Enterprise Risk Management

Bio Farma mengadakan *Refreshment Training dan Soft Live Aplikasi Enterprise Risk Management*. Dihadiri Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Bagian, Acara diawali dengan Pemaparan mengenai sejarah *Enterprise Risk Management* (ERM) di Bio Farma yang disampaikan oleh Basuki Harjo, Kepala Bagian ERM dan GCG Bio Farma



Pertemuan Nasional Koordinasi untuk Intensifikasi Imunisasi Rutin Tahun 2017

Bio Farma dengan Kementerian Kesehatan gelar Pertemuan Nasional Koordinasi untuk Intensifikasi Imunisasi Rutin Tahun 2017 diikuti 100 orang petugas imunisasi dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia



UKM Bio Farma ikuti pameran Adiwastra Nusantara 2017

Bio Farma mengikutsertakan Mitra binaan PKBL Narista (Kerajinan Sepatu), Nira Fashion (Produksi Busana Muslim), dan Wayang Dewi (Kerajinan Miniatur Wayang) pada pameran di Jakarta Convention Center pada 5-9 April 2017. Pameran yang mengangkat tema ADIWASTRA NUSANTARA 2017 Warisan Budaya Tak Lelang Zaman ini untuk mempromosikan aneka ragam produk kain unggulan warisan budaya Indonesia sebagai bagian dari Pesona Indonesia



Sosialisasi Konsep Edukasi dalam Pengembangan Geopark Ciletuh

Bio Farma dan Dinas Pariwisata Sukabumi sosialisasikan Konsep Edukasi Pengembangan Geopark pada *stakeholder* Ciletuh Palabuhan Ratu



Seminar media Pekan Imunisasi Dunia 2

Bio Farma sebagai Produsen Vaksin di Indonesia mendukung acara Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2017 salah satunya dengan ikut serta dalam kegiatan seminar media PID 2017 di kantor IDAI yang mengangkat tema *Vaccines Work* (Vaksin efektif untuk seluruh usia) untuk menyampaikan informasi penting bahwa vaksinasi berguna bagi seluruh usia, terutama untuk balita dan anak



Mei ▶



4 Mei 2017

Penandatanganan MOU Bio Farma dan Osaka University

Bio Farma Indonesia dan Osaka University Jepang menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman, dari Osaka University Jepang oleh Prof Fukusaki, selaku pimpinan Fukusaki Laboratory Jepang, dan Iskandar, selaku Direktur Utama Bio Farma



17 Mei 2017

Vaksin Flubio Untuk 325 Petugas Kebersihan Kecamatan Sukajadi

Bio Farma, melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*, memberikan vaksinasi dan pengobatan gratis bagi para petugas kebersihan, Kader PKK, Linmas, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berada di Kecamatan Sukajadi kota Bandung



24 Mei 2017

Bio Farma Menerima Kunjungan MUI NTB

Bio Farma dikunjungi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, kunjungan ini merupakan tindak lanjut Sosialisasi Imunisasi di Mataram beberapa waktu lalu oleh Bio Farma dan Kementerian Kesehatan

Juli ▶



4 Juli 2017

Pre Event Forum Riset Lifescience Nasional

Bio Farma akan kembali gelar Forum Riset *Lifescience* Nasional ke-tujuh pada 30-31 Agustus 2017 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari Simposium Forum Riset *Lifescience* Nasional (FRLN) 2016, Simposium FRLN 2017 ini mengusung tema Kemandirian Bangsa Dalam Riset dan Inovasi Bidang *Lifescience*. Simposium ini bertujuan untuk percepatan kemandirian riset *Lifescience* di dalam negeri



11 Juli 2017

Entry Meeting Assessment GCG

Bio Farma melaksanakan *Entry Meeting Assessment* untuk kegiatan penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) 2017, pada tanggal 11 Juli 2017 di Gedung Serbaguna Bio Farma

Juni ▶



29 Mei - 4 Juni 2017

Bincang Pagi Kelahiran Pancasila: "Saya Indonesia, Saya Pancasila"

Bio Farma menyelenggarakan Pekan Pancasila yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan serentak oleh Kementerian BUMN



9 Juni 2017

Bio Farma Beri Santunan Anak Yatim dalam Acara Buka Shaum Bersama

Bio Farma memberikan bantuan dan santunan senilai total Rp30 juta, santunan untuk 182 anak yatim senilai total Rp91 juta dan bantuan untuk DKM An-Nuur sebesar Rp500 juta



13 Juli 2017

Bio Farma Salurkan Dana Kemitraan Sinergi

Bio Farma, PT PN X dan PT PN XI menandatangani kesepakatan kerjasama dalam program sinergi kemitraan senilai Rp11 miliar untuk membantu program pemerintah dalam kemandirian ketahanan pangan khususnya gula



16 Juli - 24 Juli 2017

BUMN Hadir Untuk Negeri PIC Jawa Barat

Sebanyak 27 siswa SMA/SMK asal Jawa Barat siap mengikuti program pertukaran pelajar ke Provinsi Bangka Belitung selama seminggu mulai 16 Juli-24 Juli 2017. Pada waktu yang sama, kunjungan serupa dilakukan siswa Bangka Belitung di Jawa Barat



16 Juni 2017

Bio Farma Gelar Pasar Murah Ramadhan 1438 H

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangkaian acara kegiatan CSR Bio Farma untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1438 H. Kegiatan yang diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dari kedua Kecamatan tersebut, menjual kebutuhan pokok berupa 10 Kg beras, 2 Liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir, seharga Rp25.000,- per paket



22 Juni 2017

Mudik Bareng BUMN Bersama Bio Farma

Mudik Bareng BUMN bersama Bio Farma Tahun 2017 bagi warga masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah yang paling dekat dengan Perusahaan



7 Juli 2017

Pergantian Direksi

Pengangkatan M. Rahman Rustan sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma, dan Juliman sebagai Plt. Direktur Utama disamping menjalankan tugasnya sebagai Direktur Produksi sampai dengan diangkatnya Direktur Utama yang definitif



13 Juli 2017

Pisah Sambut Direksi

Persembahan terima kasih karyawan kepada Direktur Utama, Iskandar, Direktur SDM, Andjang Kusumah, dan Direktur Pemasaran, Mahendra



Agustus ▶



1 Agustus 2017
Bio Farma Paparkan Pengembangan Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu

Bio Farma diundang untuk mempresentasikan peran sektor industri pada pengembangan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhan Ratu (GNCP) pada saat visitasi pihak UNESCO Global



3 Agustus 2017
Vaksinasi Gratis 2.200 Petugas Gorong-Gorong Kota Bandung

Bio Farma Vaksinasi gratis Hepatitis B sebanyak 2.200 petugas gorong-gorong dan kebersihan se-Kota Bandung di Gedung Serba Guna Bio Farma



8 Agustus 2017
Bio Farma dan Bank Mandiri Kerjasama Bedah Rumah Veteran di Jawa Barat

Penandatanganan kerjasama/MoU program Bedah Rumah Veteran (BRV) tahun 2017 antara Bio Farma dengan Kodam III Siliwangi bertempat di Makodam III Siliwangi Bandung



10 Agustus 2017
Bio Farma Raih Skor Sangat Baik 90.494 Pada Asesmen Penerapan GCG Tahun 2016

Dilaksanakan *Exit Meeting Assessment* penerapan GCG di Bio Farma tahun 2016, penyerahan dilakukan oleh Iman Achmad Nugraha, Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat kepada Juliman, Plt. Direktur Utama Bio Farma dan disaksikan Purnomo Sinar Hadi, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi II Kementerian BUMN serta Komisaris Bio Farma, Heridadi



10 Agustus 2017
Bio Farma Raih Peringkat 1 Anugerah IPTEK 2017
PT Bio Farma (Persero) meraih penghargaan Anugerah IPTEK Abyudaya dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)



29 - 30 Agustus 2017
Forum Riset Lifescience Nasional (FRLN) 2017

Bio Farma bersama Kementerian Kesehatan RI, Kemristekdikti, serta 20 lembaga yang terdiri dari 400 peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset kembali berdiskusi dalam acara tahunan Forum Riset Lifescience Nasional di Jakarta, membahas mengenai Kemandirian Bangsa Dalam Riset dan Inovasi Bidang Lifescience



30 Agustus 2017
Bio Farma dan LIPI lakukan Kerjasama Pembuatan Serum Anti Bisa Ular
Bio Farma dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk pengembangan Serum Anti Bisa Ular Hijau. Penandatanganan ini dilakukan oleh Juliman selaku Plt. Direktur Utama dengan Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, Dr. Ir. Witjaksana, M.Sc dalam acara Forum Riset Lifescience Nasional 2017, di Jakarta

September ▶



19 September 2017
Bio Farma Raih Juara II Annual Report Award 2016

PT Bio Farma (Persero) mendapatkan anugerah sebagai Juara ke 2 untuk kategori BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL) dalam acara *Annual Report Award 2016* (ARA 2016), di Gedung Dhanapala Jakarta

Oktober ▶



11 Oktober 2017
Bio Farma sepakati kerjasama dengan UNISBA

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Islam Bandung (Unisba), pada tanggal 11 Oktober 2017 di GSG Bio Farma dalam acara *Bandung Meeting on Global Medicine and Health* (BaMGH)



19 Oktober 2017
Bio Farma Berikan Bantuan Sarana MCK dan Elektrifikasi Untuk Mewujudkan Kota Bandung Sehat

Bio Farma kembali melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PKBL pada hari Kamis, 19 Oktober 2017. Bantuan yang diberikan, berupa bantuan Sarana MCK dan Elektrifikasi Rumah Tangga di Kota Bandung



28 Oktober 2017
Tiga BUMN Berikan Bantuan Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Lampung

Tiga BUMN terdiri dari, PT Bio Farma (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT ASDP (Persero), secara bersama – sama menyerahkan bantuan pendidikan kepada sembilan mahasiswa tingkat akhir Universitas Lampung, pada tanggal 28 Oktober 2017, di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung. Bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari acara BUMN Hadir di Kampus, yang diselenggarakan secara serempak di 28 Perguruan Tinggi terpilih di Indonesia, untuk memperingati hari sumpah pemuda ke-89



28 Oktober 2017
Bio Farma, ASDP dan KAI Gelar Direksi Mengajar di Kampus Universitas Lampung

3 BUMN (Bio Farma, ASDP dan KAI) gelar BUMN Mengajar di kampus Universitas Lampung pada 28 Oktober 2017 yang diikuti oleh sekitar 1500 peserta, program ini merupakan kegiatan "BUMN Hadir di kampus" yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN di 28 kampus di seluruh Indonesia secara serentak, dalam rangka hari Sumpah Pemuda.



31 Oktober 2017
Bio Farma Raih Penghargaan TOP IT & Telco 2017

PT Bio Farma (Persero) mendapatkan penghargaan TOP IT Implementation on Pharmacy Sector dari Majalah ITeC, dalam acara Top IT & Telco 2017, acara tersebut juga didukung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong kalangan bisnis, insitusi pemerintah dan BUMN serta lembaga lain untuk lebih peka terhadap menyikapi tren perkembangan IT & Telco, dengan selalu memperbaharui dan mengembangkan inovasi dan solusi IT & Telco.



6 November 2017
Bio Farma Raih BUMN Performance Excellence Award 2017

Bio Farma bersama BUMN lainnya, meraih penghargaan BUMN *Performance Excellence Award 2017*, dari Forum Ekseleksi BUMN (FEB). Penghargaan diserahkan oleh Staff Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol dan diterima langsung Plt Direktur Utama Bio Farma, Juliman pada tanggal 6 November 2017, di Jakarta

Desember ▶



9 November 2017

Apresiasi Penghargaan Karya Anak Bangsa di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

Pada Hari Kesehatan Nasional 2017, Bio Farma diberikan apresiasi Penghargaan Karya Anak Bangsa di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek, kepada Juliman PIt Direktur Utama Bio Farma, bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran



12 November 2017

Peringati HKN ke-53 : Bio Farma Sediakan 1000 Vaksin Flu Gratis

PT Bio Farma (Persero) ikut meramaikan acara puncak Hari Kesehatan Nasional ke 53 untuk Provinsi Jawa Barat, dengan memberikan 1000 vaksin flu secara gratis untuk masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman parkir Gedung Sate, Bandung



5-7 Desember 2017

Konferensi Menteri Kesehatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah

Kementerian Kesehatan dan Bio Farma hadir *The 6th Islamic Conference Ministry of Health* atau Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Kesehatan Negara Islam pada tanggal 5 - 7 Desember 2017, di Jeddah Saudi Arabia



5 Desember 2017

Bio Farma Sosialisasikan e-LHKPN

Bio Farma selenggarakan sosialisasi penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara secara elektronik atau e-LHKPN sesuai peraturan KPK-07 Tahun 2016. e-LHKPN ini wajib dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, lebih transparan, dan lebih mudah diakses



5 Desember 2017

Komunitas Thalasemia Kunjungi Bio Farma

Komunitas pasien Thalasemia yang tergabung dalam "Thaller B227" mengunjungi Bio Farma pada saat pelaksanaan donor darah rutin yang diselenggarakan oleh Keluarga Donor Darah Bio Farma



18 Desember 2017

Bio Farma Kembali Raih PROPER EMAS untuk ke 4 Kalinya

Bio Farma untuk keempat kalinya mendapatkan penghargaan tertinggi dalam Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER) predikat Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diserahkan langsung di Istana Wakil Presiden, oleh Jusuf Kalla diterima oleh Disril Revolvin Putra, Direktur SDM dan Umum Bio Farma.



21 Desember 2017

Keterbukaan Informasi Publik

Bio Farma tetap masuk dalam 10 besar ajang penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).





Laporan Manajemen

“

Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk kedalam kategori “Sehat AA” dengan skor 86, penambahan pangsa pasar dapat terwujud dengan baik, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung Bio Farma menuju perusahaan *lifescience* terus diintensifkan.



Sambutan Dewan Komisaris



Pada tahun 2017 Perusahaan berhasil mencetak penjualan bersih sebesar Rp3,01 triliun naik sebesar 30,05% jika dibandingkan dengan tahun 2016, dan mencapai 102,43% dari RKAP 2017. Terdapat perubahan komposisi penjualan bersih, yang biasanya didominasi oleh sektor ekspor, pada tahun 2017 justru didominasi oleh sektor dalam negeri dengan kontribusi yang mencapai 58,73% dari total penjualan bersih tahun 2017, atau mencapai Rp1,77 triliun.

Farid Wajdi Husain

Komisaris Utama

Pemangku Kepentingan dan Pemegang saham yang kami hormati,

Assalamualaikum Warrohmatalahi Wabarokatuh,

Perkenalkan kami Dewan Komisaris Bio Farma, menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Perusahaan Tahun 2017, yang baru saja berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Serangkaian peristiwa ikut mengantar Bio Farma dalam menjajaki usianya yang ke 127 tahun. Antara lain, Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Riset dengan beberapa Universitas dan Lembaga Riset dalam dan Luar Negeri, Pencanaan Vaksinasi Measles Rubella (MR) oleh Presiden RI Joko Widodo di Yogyakarta,

Penjualan produk *partnership* yang sudah mulai menunjukan peningkatan, Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma, serta munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri pada akhir tahun di beberapa provinsi di Indonesia. Namun, serangkaian peristiwa tersebut telah mengajarkan kami arti dari kebersamaan dan kekompakan, sehingga kami dapat melewatinya dengan langkah yang gemilang.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris, ingin menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang secara konsisten menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2017). Instrumen keuangan Perusahaan menunjukan angka positif, Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk ke dalam kategori "Sehat AA" dengan skor 86, penambahan pangsa pasar dapat terwujud dengan baik, dan kerjasama dengan pihak – pihak yang dapat mendukung Bio Farma menuju perusahaan *lifescience* terus diintensifkan.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Pada tahun 2017, terdapat perubahan komposisi penjualan bersih perusahaan. Penjualan yang biasanya didominasi oleh sektor ekspor, pada tahun 2017, justru didominasi oleh sektor dalam negeri yang mencapai 58,73% dari total pendapatan bersih Bio Farma, atau mencapai Rp1,77 triliun. Pencapaian ini, melebihi target dari RKAP 2017 sebesar 102,43% yang diperkirakan akan mencapai Rp2,94 triliun, dan meningkat 30,05% dibandingkan dengan total penjualan bersih dalam negeri di tahun 2016 yang tercatat Rp2,32 triliun.

Pencapaian penjualan bersih Bio Farma untuk dalam negeri yang terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor pemerintah dan swasta, merupakan pencapaian terbesar selama lima tahun terakhir. Bahkan, untuk sektor pemerintah, memberikan kontribusi sebanyak 45,14% dari total pendapatan tahun 2017, atau mencapai Rp1,36 triliun, dan meningkat 99,49% dari penjualan bersih tahun 2016, sedangkan jika dibandingkan dengan RKAP 2017, mencapai 170,86% yang tercatat Rp795,57 miliar. Sedangkan untuk sektor swasta, penjualan bersih mengalami peningkatan penjualan bersih sebesar 6,05% menjadi Rp409,38 miliar dari Rp386,01 miliar pada tahun 2016, dan berhasil mencatatkan pencapaian RKAP 2017 sebesar 103,60%.

Peningkatan penjualan untuk sektor dalam negeri berdasarkan adanya peningkatan nilai kontrak dari pemerintah untuk pembelian vaksin rutin yang mencapai 170,86% dari RKAP 2017. Selain pembelian rutin dari pemerintah, Bio Farma sudah memulai menjual produk *partnership* sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar. Penjualan produk *partnership* tersebut antara lain, vaksin BCG Bayi dan Anak 20ds impor, *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) 5ds, Vaksin *Measles Rubella* (MR) 10ds dan Vaksin *Live Japanese Encephalitis*, yang realisasi penjualannya mencapai 209,52%.

Pencapaian penjualan bersih dari sektor ekspor yang mencapai Rp1,24 triliun atau hanya 71,04% dari RKAP 2017 yang diperkirakan akan mencapai Rp1,75 triliun. Pencapaian penjualan sektor ekspor ini mengalami penurunan sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2016 yang mencapai Rp1,25 triliun. Penurunan ini merupakan efek dari dinyatakan eradikasi penyakit polio tipe 2, pada medio Mei 2016 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tentu saja hal ini menyebabkan semua penjualan vaksin dengan komponen polio untuk ekspor, mengalami penurunan sekitar 20%. Namun demikian, pangsa pasar penjualan ekspor untuk vaksin lainnya seperti Campak 10ds, DTP 10ds, Td 10ds, TT 10 ds masih menunjukan perkembangan pangsa pasar yang positif.

Laba bersih Bio Farma tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, sebesar 4,85% menjadi Rp525,36 miliar. Namun demikian, pencapaian laba bersih pada tahun 2017 hanya mencapai 70,30% dari RKAP 2017, yaitu Rp743,31 miliar. Pencapaian laba bersih yang masih di bawah RKAP 2017, dipengaruhi oleh peningkatan Beban Pokok Penjualan dan Jasa sebesar 64,84% yang berasal dari produk *partnership*. Sedangkan untuk aset, mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai Rp6,45 triliun atau mencapai 108,90% jika dibandingkan dengan tahun 2016, seiring pertambahan fasilitas produksi.

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2017 mendapat skor 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA", sedangkan tahun 2016 mendapat nilai 81,60 dengan kriteria "Sehat AA", dan pencapaian *Key Performance Indicator* memperoleh nilai 91,21 dari total nilai 100.



Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk menyeimbangkan komposisi penjualan antara sektor dalam negeri dan luar negeri. Hal ini berdasarkan fakta, bahwa penduduk Indonesia sudah mencapai 261 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 40% *market share* produk farmasi dari seluruh penduduk ASEAN. Oleh karenanya produk vaksin, kesehatan dan *lifescience*, akan sangat terbantu dengan jumlah penduduk yang besar, karena akan memiliki pasarnya sendiri, oleh karenanya kita harus berinovasi, apabila tidak, potensi pangsa pasar tersebut akan direbut oleh perusahaan asing.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada Direksi yang telah dengan semangat untuk terus melanjutkan riset dan pengembangan untuk vaksin baru dan produk lainnya seperti yang ada pada *Pipeline* Perusahaan seperti; Heksavalent, produk biosimilar, vaksin generasi baru OPV (nOPV), Erythropoietin (EPO), Pneumokokus Whole Cell, Hepatitis A, TB, Thyphoid Konjugat, Rotavirus, s-IPV, Adjuvant R4/E8 Pam2Cys, Hepatitis B Konsorsium, Acellular Pertusis dan Trastuzumab.

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dunia tercatat sebesar 3,7%. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri, karena pencapaian ini, merupakan pertanda bahwa perekonomian dunia sudah mulai menggeliat sejak krisis ekonomi dunia tahun 2008, ekspansi global kembali bergulir, masyarakat dunia sudah mulai percaya diri untuk melakukan konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan merata di hampir seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 pertumbuhan perekonomian di Indonesia tercatat 5,07%. Walaupun masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, yaitu sebesar 5,03% bahkan pencapaian 2017 merupakan yang terbaik sejak tahun 2011.

Industri farmasi nasional terus menunjukkan kinerja positif yang positif, jika dibandingkan dengan industri non migas lainnya. Meski pertumbuhannya tidak sebesar yang diperkirakan, Industri farmasi diperkirakan akan menjadi salah satu industri unggulan di Indonesia, ditandai dengan terbitnya Inpres No 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk menjadikan industri farmasi, secara umum, sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia, sehingga produk farmasi buatan anak bangsa bisa lebih bersaing sehingga Indonesia akan terbebas dari ketergantungan bahan baku farmasi yang sampai saat ini masih diimpor.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Inisiatif pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam bidang bahan baku farmasi dan alat kesehatan pada tahun 2025, telah membagi industri farmasi nasional menjadi 4 (empat) pilar berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing - masing BUMN Farmasi antar lain: Bioteknologi, Herbal, Kimia dan Alat - alat kesehatan.

Untuk Bio Farma yang sudah bergerak dalam industri Bioteknologi selama 127 tahun, tentu saja hal ini akan menjadi dorongan yang positif dari pemerintah untuk dapat segera menciptakan produk - produk baru seperti ; *stemcell*, produk plasma, vaksin terapeutik dan produk bioteknologi lainnya.

Beberapa strategi untuk mencapai *global lifescience company* diantaranya mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan melalui percepatan *time to market*, produk diversifikasi seperti vaksin dan antisera, produk plasma dan biosimilar, telah dituangkan dalam RJPP 2017 - 2021. sehingga Direksi mempunyai *guideline* untuk mempercepat proses transformasi bisnis Bio Farma.

Dewan komisaris bersama organ pendukungnya, berupa komite - komite, akan menjadi mitra strategis untuk mengawal Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan dan mendukung percepatan pencapaian kemandirian industri farmasi nasional.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pemegang saham yang kami hormati,

Persaingan industri farmasi khususnya industri vaksin, telah mengalami pergeseran sejak beberapa tahun terakhir. Semua produsen vaksin di dunia berlomba - lomba untuk melakukan diversifikasi produknya. Selain memproduksi vaksin jenis baru atau pengembangan vaksin yang sudah ada untuk penyakit yang masuk ke dalam kategori *emerging disease*, mereka sudah mulai berinovasi untuk membuat produk yang dapat juga berfungsi sebagai pengobatan/terapeutik.



Dewan Komisaris menyadari, dengan mengimplementasikan GCG yang merata kepada semua insan Bio Farma, akan membawa perusahaan yang kini bertransformasi menjadi perusahaan *lifescience* kelas dunia, mendapatkan daya dorong untuk bersaing, sehingga perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif dalam dunia industri *lifescience*

Oleh karenanya, Bio Farma sebagai BUMN yang kini bertransformasi menjadi perusahaan *lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global, dituntut untuk tetap dapat bertahan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu caranya adalah melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Bagi Bio Farma, dengan menerapkan GCG, memberikan makna bahwa Direksi dan Karyawan memiliki kesiapan dan pandangan yang sama untuk memenangkan kompetisi Global, dengan cara yang sehat, jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terhindar dari benturan kepentingan, sehingga keberadaan Bio Farma dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar Perusahaan dan dalam perekonomian nasional.

Dewan komisaris sebagai pengawas, dan juga insan Bio Farma, memiliki keyakinan yang penuh bahwa penerapan GCG di perusahaan ini sudah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang terus menunjukkan peningkatan, bahkan pada tahun 2017 ini, skor GCG Bio Farma mencapai angka 90,49 yang merupakan kategori "Sangat Baik", berdasarkan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

MANAJEMEN RISIKO

Para pemegang saham yang kami hormati;

Dengan perluasan visi perusahaan menjadi perusahaan *lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global, akan melahirkan risiko - risiko yang merupakan suatu penyimpangan dari rencana kerja. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan seluruh karyawan Bio Farma untuk terus mengkaji kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi dari setiap keputusan bisnis yang diambil. Walaupun tidak semua risiko dapat dihindari, namun setidaknya dengan adanya manajemen risiko, kita dapat memperhitungkan dan mengambil langkah mitigasi yang komprehensif, sehingga risiko yang terjadi pada perusahaan tidak akan berdampak signifikan pada perusahaan.

Semua mitigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja, harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, regulasi dan standar internasional yang berkaitan dengan aktivitas dan produk yang dihasilkan perusahaan.

Manajemen risiko yang dibuat oleh setiap unit kerja di Bio Farma, tidak hanya sekedar melindungi suatu perusahaan dari ketidakpastian bisnis, tetapi membantu Bio Farma mengantisipasi perubahan kebijakan baik nasional maupun internasional, keterlambatan investasi, keluar atau pindahnya SDM Bio Farma yang berkualitas, pencapaian kinerja yang tidak mencapai KPI, pemalsuan produk, dan munculnya berita - berita negatif dari media massa *mainstream*. Dewan komisaris meminta Direksi dan unit kerja untuk terus melakukan *review*, pemutakhiran dan sosialisasi atas kebijakan/Pedoman dan SOP tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko sesuai aturan yang berlaku.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam upaya penerapan GCG secara menyeluruh oleh setiap insan Bio Farma, Perusahaan memiliki suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran atau dikenal dengan istilah *Whistleblowing System* (WBS). Sistem pelaporan yang sudah diterapkan sejak tahun 2013 bertujuan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja untuk pemberantasan KKN, praktik *fraud*, atau tindakan lain yang melawan hukum yang dapat merugikan Perusahaan. Kemudian sistem ini dapat memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Sistem ini diimplementasikan berlandaskan pada nilai budaya perusahaan yang PRO-Active (*Professional, Customer Oriented, Teamwork, Integrity dan Innovation*), sehingga WBS merupakan bukti nyata pelaksanaan nilai budaya perusahaan. Hasil dari penerapan WBS adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan, berupa sistem pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan yang dapat mendeteksi kejadian risiko operasional khususnya kejadian kecurangan (*fraud*) secara dini (*early warning system*) sehingga potensi kerugian dapat diketahui sedini mungkin, sehingga kesempatan untuk menanggapi masalah pelanggaran secara dapat diatasi secara internal terlebih dahulu sebelum meluas ke publik. Hasil akhir dari penerapan WBS adalah meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Masing - masing dari organ pendukung ini terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Anggota Komisaris, serta beberapa anggota komite berasal dari eksternal.

Pembentukan komite - komite ini sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris untuk memberikan masukan dan nasihat Kepada Direksi. Masing - masing komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris memiliki Anggota paling tidak dua orang yang berasal dari Dewan Komisaris yang menduduki Jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua, juga 2 (dua) orang lain yang profesional yang berasal eksternal perusahaan.

Selama tahun 2017, Komite Audit sudah melakukan fungsi sebagaimana mestinya yaitu bersama Dewan Komisaris mengawasi Direksi agar menjalankan bisnis sesuai dengan RKAP yang sudah diputuskan dan disetujui pada RUPS pada tanggal 4 Januari 2017. Demikian juga dengan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG membantu Direksi untuk memitigasi risiko - risiko yang mungkin muncul dalam industri farmasi, terlebih Bio Farma akan melangkah ke industri *lifescience*, yang regulasi - regulasinya masih terlalu luas.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas dedikasi, kontribusi untuk Bio Farma dan tidak lupa kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Ahmad M. Ramli, Nizar Yamani, Parulli Lubis dan Ihan Setiadi Latief, yang masing - masing masa jabatannya telah berakhir pada tanggal, 12 April 2018, 28 Mei 2017, 5 November 2017 dan 20 April 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 102/MBU/04/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero), telah mengakhiri masa tugasnya sebagai Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.

Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris per April 2018 adalah sebagai berikut : Farid Wajdi Husain Sebagai Komisaris Utama, Yuni Suryanto, Made Arya Wijaya, Heridadi, Moh Subuh, Saud Usman Sebagai Komisaris.

Diharapkan dengan susunan baru dari Dewan Komisaris yang berasal dari multi disiplin, dan beragam kompetensi, dapat mempercepat dan mempertajam strategi bisnis Perusahaan, sehingga Bio Farma bisa menjadi perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawasan dan memberikan nasihat atas jalannya perusahaan, baik dari sisi bisnis, kebijakan, maupun secara umum yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan saat pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Untuk itu, Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat pengawasan dan konsultatif dengan Direksi (rapat gabungan) sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan Perusahaan.

Rapat tersebut membahas hal – hal yang sifatnya strategis yang menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris maupun rapat yang sifatnya rutin, yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2017 (RKAP 2017) Kegiatan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan secara rutin, kecuali apabila ada hal mendesak untuk segera dilakukan rapat.

PENUTUP

Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi sepanjang tahun 2017 kepada Direksi dan seluruh karyawan Bio Farma. Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, atas kepercayaan, masukan dan kerjasamanya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.

Penguatan strategi serta penajaman nilai – nilai Bio Farma, harus kembali digaungkan kepada seluruh elemen Bio Farma, agar kita semua mengetahui peran dan fungsi masing – masing dan memiliki persepsi yang sama untuk membawa Bio Farma menjadi perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, sehingga program kerja tahun 2018 dari Bio Farma *Towards a leading lifescience company*, berjalan dengan lancar dan berhasil, jaga selalu kekompakan dan selamat menjalankan Program Kerja Tahun 2018.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Mei 2018
Atas nama Dewan Komisaris



Farid Wajdi Husain
Komisaris Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Sambutan Direksi



Kondisi perekonomian global dan nasional yang telah membaik dan peluang di industri farmasi serta efektifnya pelaksanaan strategi usaha Perusahaan, telah menghasilkan kinerja yang gemilang di tahun 2017. Bio Farma mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di sepanjang tahun 2017. Peningkatan kualitas aset juga diimbangi dengan peningkatan kinerja keuangan Bio Farma. Total aset Bio Farma tahun 2017 meningkat menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,92 triliun di tahun 2016. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp526,99 miliar atau sebesar 8,90%.

M. Rahman Roestan Direktur Utama

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Perkenalkan kami, menyampaikan Laporan Tahunan Bio Farma Tahun 2017,

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

TINJAUAN INDUSTRI

Vaksin adalah salah satu cara yang paling *cost-effective* atau hemat biaya untuk melindungi jutaan orang dari berbagai penyakit menular. Melalui kekebalan komunitas (*herd*

immunity), vaksin bahkan dapat melindungi mereka yang tidak divaksinasi. Vaksin telah terbukti mengurangi angka kecacatan, kematian, menyelamatkan nyawa hingga tiga juta anak setiap tahun.

Meskipun cakupan imunisasi global meningkat, hampir satu dari lima anak pada tahun 2015 tidak menerima vaksin dasar untuk imunisasi rutin yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, termasuk sistem kesehatan yang lemah, rantai pasokan, penyediaan vaksin yang tidak mencukupi, kendala pembiayaan, dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin.

Pada penghujung tahun 2017 Indonesia ditetapkan mengalami kejadian luar biasa (KLB) Difteri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sampai dengan pertengahan Desember, terdapat 714 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 38 orang. Alhamdulillah Pemerintah Indonesia cukup cepat dalam penanganan KLB Difteri ini, disertai meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin, baik pada berbagai kementerian, lembaga pemerintah, BUMN, sektor swasta, perguruan tinggi serta masyarakat pada umumnya.

Jika dibandingkan dengan Yaman, sesuai data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Februari 2018, menyebutkan bahwa 66 orang meninggal dunia karena difteri, jumlah korban yang banyak, salah satunya dikarenakan kesulitan akses terhadap vaksin, daerah konflik serta keterlambatan dalam penanganan dan pemberian vaksin.

Dalam konteks ini, perusahaan vaksin memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan akses pada vaksin. Bio Farma sebagai produsen vaksin Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat berperan aktif di berbagai lembaga internasional, dan berkomitmen untuk menghasilkan produk vaksin yang berkualitas dan terjangkau, perencanaan produksi, riset dan pengembangan vaksin, serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta mendukung kemandirian merupakan keniscayaan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Global Vaccine Action Plan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menetapkan target yang jelas untuk meningkatkan akses terhadap vaksin di seluruh dunia. Pencapaian target ini membutuhkan kerangka kerja yang terkoordinasi dari berbagai lembaga donor atau pemberi dana, lembaga riset dan pengembangan vaksin, serta produsen vaksin. Hal ini sangat penting mengingat diperlukan sinergi dan kolaborasi baik pada aspek produksi maupun aspek pembelian vaksin untuk menjaga ketersediaan vaksin di dunia.

Menurut laporan *Access to Vaccine Index* 2017, secara keseluruhan, pasar vaksin global mengalami perkembangan: sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2014, tumbuh dari 6 miliar USD menjadi 33 miliar USD. Penjualan vaksin ke negara-negara maju dan berpenghasilan tinggi sekitar 65% dari total nilai pasar vaksin, negara-negara berpenghasilan menengah atas 23%, negara berpendapatan menengah bawah 8%, dan negara-negara berpenghasilan rendah sebesar 4%.

Nilai pengadaan vaksin UNICEF meningkat dua kali lipat antara 2010 dan 2014 menjadi USD 1,5 miliar. Mengingat program imunisasi nasional terus berkembang - baik meningkatkan cakupan untuk vaksin yang sudah ada maupun memperkenalkan vaksin baru.

Dengan penerapan program vaksin baru ini tentunya, memerlukan akses dan tantangan baru untuk memastikan akses tersebut. Ini sangat penting bagi negara-negara dengan pertumbuhan pendapatan yang sedang jika mengalami transisi dan tidak mendapatkan bantuan dari negara donor, sehingga pengadaan program vaksin dibiayai melalui anggaran belanja pemerintah di setiap negaranya. Pada Tahun 2017 Pemerintah Indonesia juga melakukan Pencanangan Vaksinasi *Measles Rubella* (MR) kedalam program imunisasi nasional oleh Presiden RI Joko Widodo di Yogyakarta.

ANALISIS KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN

Bio Farma menutup Tahun 2017 dengan cukup baik, raih penjualan bersih sebesar Rp3,01 triliun naik sebesar 30,05% jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan mencapai 102,43% dari RKAP 2017.

GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja perusahaan tahun 2017 dari aspek penjualan mencapai Rp3,01 triliun naik sebesar 30,05% dibandingkan realisasi tahun 2016 dan mencapai 102,43% dari anggarannya, sedangkan beban pokok penjualan dan jasa sebesar Rp1,66 triliun meningkat 64,84% dibandingkan realisasi tahun 2016 dan mencapai 131,28% dari anggarannya, perolehan laba bersih perusahaan naik sebesar 4,85% dari realisasi tahun 2016 menjadi sebesar Rp525,36 miliar atau mencapai 70,30% dari anggarannya.

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan tahun 2017 mendapat skor 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA", tahun sebelumnya 81,60 dengan kriteria "SEHAT AA" untuk pencapaian *key performance indicator* (KPI) memperoleh nilai 91,27 dari total nilai 100.

PENCAPAIAN TARGET 2017 DAN KENDALA YANG DIHADAPI

PENCAPAIAN TARGET 2017

Pada tahun 2017, Bio Farma mampu mencapai target sebagai berikut:

- Peningkatan penjualan bersih perusahaan sektor dalam negeri, yang mencapai 58,73% dari total pendapatan bersih Bio Farma, atau mencapai Rp1,77 triliun. Pencapaian ini, melebihi target dari RKAP 2017 sebesar 148,54% yang diperkirakan akan mencapai Rp1,19 triliun, dan meningkat 65,70% dibandingkan dengan total penjualan bersih dalam negeri di tahun 2016 yang tercatat Rp1,06 triliun.
- Pencapaian penjualan bersih Bio Farma untuk dalam negeri yang terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor pemerintah dan swasta. Sektor pemerintah memberikan kontribusi sebanyak 45,14% dari total pendapatan tahun 2017, atau mencapai Rp1,36 triliun, dengan meningkat 99,49% dari penjualan bersih tahun 2016, dan mencapai 170,86% dari RKAP 2017 yang tercatat Rp795,57 miliar. Sedangkan untuk sektor swasta, penjualan bersih mengalami peningkatan penjualan bersih sebesar 6,05% menjadi Rp409,38 miliar dari Rp386,01 miliar pada tahun 2016, dan berhasil mencatatkan pencapaian RKAP 2017 sebesar 103,60%.
- Peningkatan penjualan untuk sektor dalam negeri berdasarkan adanya peningkatan nilai kontrak dari pemerintah untuk pembelian vaksin rutin yang mencapai 170,86% dari RKAP 2017.
- Penjualan dari produk *partnership* sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar. Penjualan produk *partnership* tersebut antara lain, vaksin BCG Bayi dan Anak 20ds impor, *Inactivated Polio Vaccine (IPV) 5ds*, Vaksin *Measles Rubella (MR) 10ds* dan Vaksin *Live Japanese Encephalitis*, yang realisasi penjualannya mencapai 209,52%.
- Pencapaian penjualan bersih dari sektor ekspor yang mencapai Rp1,24 triliun atau hanya 71,04% dari RKAP 2017 yang diperkirakan Rp1,75 triliun atau menurun sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2016 yang mencapai 1,25 triliun, masih disebabkan oleh eradikasi penyakit polio tipe 2, pada medio Mei 2016 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tentu saja hal ini menyebabkan semua penjualan vaksin dengan komponen polio untuk ekspor mengalami penurunan sekitar 20%. Namun demikian pangsa pasar penjualan ekspor untuk vaksin lainnya seperti Campak 10ds, DTP 10ds, Td 10ds, TT 10 ds masih menunjukkan perkembangan pangsa pasar yang positif.
- Kinerja laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, sebesar 4,85% menjadi Rp525,36 miliar pada tahun 2017.
- Pencapaian laba bersih pada tahun 2017 hanya mencapai 70,30% dari RKAP 2017, yaitu Rp743,31 miliar. Laba bersih perusahaan tahun 2017 mencapai 104,85% jika dibandingkan tahun 2016.

- Peningkatan aset perusahaan pada tahun 2017 mencapai Rp6,45 triliun atau mencapai 108,90% jika dibandingkan dengan tahun 2016, seiring bertambahnya peralatan produksi.

KENDALA YANG DIHADAPI

Pada tahun 2017 kami menghadapi kendala baik secara internal dan eksternal, Kendala utama kami, adalah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Kecepatan perubahan regulasi vaksin internasional tersebut masih belum sejalan dengan kecepatan riset dan pengembangan vaksin. Belum terintegrasinya kegiatan riset vaksin, pelaku kegiatan riset vaksin di Indonesia antara lain Lembaga Riset Universitas, lembaga penelitian pemerintah sehingga hasil riset mengalami keterlambatan untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Bio Farma berperan aktif dan turut serta dalam berbagai lembaga Internasional seperti DCVMN, GAVI, OIC sehingga dapat mempersiapkan diri apabila terjadi perubahan kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Selain itu, di dalam negeri kami bekerja sama dengan Kemenristek, Kementerian Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan serta berbagai Universitas dan lembaga riset tanah air untuk melakukan percepatan riset vaksin dan produk *lifescience* melalui Forum Riset *Lifescience* Nasional (FRLN).

Kendala lainnya yang dihadapi oleh industri farmasi secara umum terkait kesiapan dalam penerapan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Industri Farmasi memiliki regulasi yang ketat dan rumit, dengan regulasi yang mengutamakan aspek *quality, safety* dan *efficacy*, sedangkan bio farmasetikal ini menjadi tantangan ke depan karena bahan baku yang bersumber dari *biological sources*. Bagaimana *biological source* ini sesuai dengan kriteria tersebut, termasuk didalamnya tantangan produk *plasma/blood product* yang sangat diperlukan untuk masa depan kesehatan Indonesia seperti Albumin, globulin, dan faktor 8.

Percepatan pengembangan produk yang berkualitas, aman dan ampuh serta terjangkau oleh masyarakat disertai dengan pemenuhan aspek yang sesuai dengan jaminan produk halal menjadi tantangan bagi seluruh industri farmasetikal dan *biological* di Indonesia.

Namun demikian, Bio Farma senantiasa berkomitmen dan berusaha agar sesuai dengan regulasi, termasuk kami melakukan beberapa inisiatif seperti melaksanakan *Workshop* Penyusunan manual halal, mengundang tokoh ulama untuk mengunjungi fasilitas produksi, melakukan *review* produk produk baru yang melibatkan, serta beberapa produk vaksin kami sedang dalam proses persiapan pengajuan ke LPPOM MUI.

Adapun saat ini, organisasi kerjasama Islam (OKI) sudah mengakui Indonesia sebagai *vaccine innovation* dan Indonesia dipercaya oleh negara OKI dengan membentuk *vaccine manufacturers group (VMG - OIC)*, mendapat kepercayaan sudah dipercaya memberikan *training* dan *workshop vaccine management product* untuk beberapa negara Islam serta pada Desember 2017, Indonesia ditetapkan sebagai *Center of Excellence* untuk riset dan produksi vaksin bagi negara Islam.



PROSPEK USAHA

KIBARKAN MERAH PUTIH DI KANCAH GLOBAL

Kami memandang bahwa posisi Bio Farma sebagai produsen vaksin dalam negeri memiliki beberapa prospek usaha yang sangat strategis. Indonesia berperan untuk mengamankan penyediaan vaksin nasional dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan vaksin untuk program imunisasi nasional di dalam negeri. Dengan jumlah kapasitas produksi yang besar, sehingga kami memiliki kapasitas lebih yang dapat digunakan untuk membantu negara-negara lain yang tidak memiliki pabrik vaksin terutama di negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara berkembang yang tergabung dalam *Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN)*, sehingga mampu mengibarkan merah putih di kancah global.

Peta produsen vaksin global saat ini terdapat sekitar 100 industri vaksin di dunia, yang mana Bio Farma menjadi satu-satunya produsen vaksin atau Biotek di Indonesia saat ini Bio Farma, kami termasuk ke dalam sekitar 30 produsen vaksin *global player* yang mendapatkan pra-kualifikasi sehingga mendapatkan peran penting dalam menyediakan suplai vaksin pada badan kesehatan dunia (WHO) dan UNICEF.

Market industri vaksin sangat berkembang, *emerging market* selalu naik sekitar 30%, dengan pertumbuhan di negara berkembang termasuk Indonesia sekitar 14-17%, dimana di negara Amerika, Jepang masih jauh di bawah Indonesia.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan dalam persaingan global dituntut untuk *sustain* oleh *stakeholders* dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Faktor Utama penentu daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan publik dalam sistem tata kelola berbagai sektor. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara fundamental menjadi landasan yang kuat bagi Bio Farma dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global.

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh insan Bio Farma menjunjung tinggi komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap Insan Bio Farma. Dengan GCG, Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul dan bermartabat dengan budaya Perusahaan yaitu *Professional, Customer Oriented, Teamwork, Integritas, Innovation*.

Dengan terwujudnya GCG, Bio Farma mampu mengoptimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

ASESMEN PENERAPAN GCG

Asesmen penerapan GCG di Bio Farma mengacu pada pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN Bab XII tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang mewajibkan BUMN untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan melakukan evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian yang menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 (enam) periode. Pada tahun 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2016 telah dilakukan *self assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi. Adapun hasil *assessment* GCG periode tahun 2016 mencapai skor 90,494 yang termasuk ke dalam predikat kategori "Sangat Baik".

Pada tahun 2017, Kami telah melaksanakan berbagai sosialisasi terkait *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Penandatanganan Pakta Integritas, Sosialisasi Gratifikasi dari KPK, Sosialisasi Pengisian LHKPN, *Refreshment Training and Soft Live* Aplikasi *Enterprise Risk Management*.

PROPER EMAS

Pada tahun 2017 kami juga dapat tetap mempertahankan untuk keempat kalinya mendapatkan penghargaan tertinggi dalam Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER) predikat Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diserahkan langsung di Istana Wakil Presiden, oleh Jusuf Kalla.

Tentu mempertahankan PROPER Emas bukan hal yang mudah dari sekitar 2.000 perusahaan, dan kami dituntut senantiasa untuk menghasilkan inovasi di bidang lingkungan dan kinerja sosial serta melakukan kepatuhan yang bersifat *beyond compliance*.

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

SINERGI BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kami turut serta mendukung program Pemerintah melalui kementerian BUMN. Pada tahun 2017 ini kami telah melakukan sinergi dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain :

- Menyalurkan dana kemitraan sinergi untuk PT PN X dan PT PN XI dengan kesepakatan kerjasama dalam program sinergi kemitraan untuk membantu program pemerintah dalam kemandirian ketahanan pangan khususnya gula.
- Memberikan bantuan sarana fasilitas lingkungan bagi masyarakat Bandung, dengan penyediaan MCK dan Elektrifikasi untuk Mewujudkan Kota Bandung Sehat.
- Dalam bidang pendidikan, kami memberikan bantuan kepada mahasiswa dari Universitas Lampung bersinergi dengan PT ASDP, PT KAI dengan total sekitar Rp500 juta, dalam rangka Sumpah Pemuda.
- Program pertukaran pelajar Siswa Mengenal Nusantara (SMN) Sebanyak 27 siswa SMA/SMK asal Jawa Barat ke Provinsi Bangka Belitung selama seminggu mulai 16 Juli-24 Juli 2017. Pada waktu yang sama, kunjungan serupa dilakukan siswa Bangka Belitung di Jawa Barat.
- Bio Farma dan Bank Mandiri bersinergi untuk program Bedah Rumah Veteran di Jawa Barat.
- Melakukan pertemuan silaturahmi dengan Pemimpin Redaksi Nasional dengan tema Tantangan Dan Kemandirian *Biotech* Masa Depan Di Indonesia, untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi dalam pengembangan produk, bahan baku, vaksin, produk bioteknologi dan alat kesehatan.

PENETAPAN GEOPARK CILETUH SEBAGAI TAMAN BUMI DUNIA

Geopark Ciletuh Palabuhanratu, pada 16 April 2018, telah resmi ditetapkan sebagai Taman Bumi Dunia (*Global Geopark*), penetapan dilakukan dalam sidang *Executive Board* pada tanggal 4-17 April 2018. Pencapaian tersebut tidak lepas dari pihak-pihak yang terlibat aktif dari sejak awal pengembangan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu seperti: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bio Farma, Universitas Padjadjaran, Masyarakat dan Komunitas Lokal di kawasan *Geopark*.

Terkait penetapan tersebut, pada 3 Januari 2018, Bio Farma telah menerima apresiasi dalam bentuk surat resmi dari Sekretaris Jenderal *Global Geopark Network* (GGN) yang berkantor pusat di Paris yang menyampaikan apresiasi kepada Bio Farma atas dukungan pada UNESCO *Global Geopark Project* di Indonesia, khususnya ide mengenai kerjasama sektor swasta dengan masyarakat sekitar, melalui pemberdayaan dan pengembangan kawasan *Geopark* tersebut sangat penting.

Bentuk kerjasama antara Bio Farma dengan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu dapat dijadikan sebagai percontohan, bagaimana perusahaan terlibat aktif dalam menciptakan dan mengembangkan *Geopark* yang sehat di Indonesia.

Peran Bio Farma dalam pengembangan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu sejak awal dengan Berbagai program CSR dan pengembangan masyarakat di *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu antara lain, dalam pemberdayaan masyarakat lokal, kami mensubstitusi pekerjaan penambang ilegal yang kemudian berkecimpung dan berprofesi dalam bidang Geo Wisata, melakukan pengembangan lingkungan di kawasan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu, seperti pengembangan Geo Wisata, pengembangan desa binaan, pengembangan *home stay*.

Pengembangan aspek keanekaragaman budaya oleh Bio Farma melalui Batik Ramah Lingkungan, Batik Pakidulan, promosi dan sosialisasi *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu, pendampingan proses pengajuan dan evaluasi *Global Geopark Network*, serta pengembangan masyarakat yang bersinergi dengan komunitas lokal.

Dalam aspek *Biodiversity* Bio Farma juga berperan aktif dalam pelestarian Flora dan Fauna di kawasan Ciletuh seperti penanaman pohon mangrove, penanaman pohon kepuh, serta program konservasi dalam bentuk peningkatan keanekaragaman hayati di Suaka Marga Satwa Cikepuh.

Semua upaya bidang CSR yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan filosofi perusahaan yaitu *dedicated to improve quality of Life*, Kami selaku Direksi dan seluruh insan Bio Farma sangat bangga dan menyambut dengan sukacita atas penetapan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu resmi ditetapkan sebagai Taman Bumi Dunia oleh UNESCO.

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam bidang keterbukaan informasi, pada tahun 2017 kami konsisten dalam penerapan undang-undang KIP No. 14 tahun 2010 serta melengkapi perangkat KIP baik secara langsung maupun melalui sistem informasi yang terintegrasi dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT DAN TINDAK LANJUTNYA

Sepanjang tahun 2017, belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2017, tidak terdapat pelaporan atas penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor, dan yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK. Ketentuan terkait laporan penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor dan diteruskan kepada KPK tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 telah kami tindak lanjut, laporan tindak lanjut dimuat pada pembahasan Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite yang bersifat gugus tugas atau tim khusus yang berada di bawah Direksi telah berperan dengan baik dan profesional, sesuai dengan kebutuhan baik secara strategik maupun komite yang bekerja sesuai ketentuan regulasi aspek kualitas, lingkungan dan *safety*. Komite di bawah Direksi menyampaikan laporan kinerja yang disampaikan secara rutin kepada Direksi sehingga tugas dan peran dapat di lakukan secara optimal.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2017 terdapat perubahan komposisi Direksi Bio Farma, antara lain Direksi yang telah menyelesaikan tugasnya adalah Bapak Iskandar - Direktur Utama. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja Bapak Juliman, Direktur Produksi Bio Farma yang telah merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama pada periode Juli 2017 sampai dengan penunjukan definitif Direktur Utama.

Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Disril Revolin Putra, Direktur SDM, menggantikan Bapak Andjang Kusumah, Bapak M. Rahman Roestan sebagai Direktur Pemasaran menggantikan Bapak Mahendra Suhardono.

Pada 23 Januari 2018 telah ditetapkan Direktur Utama definitif yaitu Bapak M. Rahman Roestan, yang sebelumnya sebagai Direktur Pemasaran, serta menyambut Ibu Sri Harsi Teteki, sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma menggantikan Bapak M. Rahman Roestan.

Kami berharap dengan komposisi Direksi saat ini yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, kompetensi dan pengalaman yang tepat, dapat terus membawa Bio Farma untuk berkinerja dan berkontribusi yang positif pada tahun berikutnya, kami laporkan pula bahwa Direksi Bio Farma saat ini mampu dipercaya untuk berperan aktif baik di forum nasional maupun lembaga Internasional.

PENUTUP

Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan. Kami sampaikan penghargaan kepada seluruh insan Bio Farma yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam bekerja serta konsistensi dalam menjaga nilai-nilai perusahaan. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, di masa mendatang Bio Farma senantiasa mampu mewujudkan BUMN hadir untuk negeri serta meningkatkan kolaborasi kibarkan merah putih di kancah global, sehingga semakin meningkatkan nilai bagi pemegang saham, memberi manfaat bagi masyarakat, mendorong solusi bagi kehidupan, untuk kemakmuran yang berkelanjutan.

April 2018
Atas nama Direksi



M. Rahman Roestan
Direktur Utama

Direksi



1. M. Rahman Roestan
Direktur Utama

2. Juliman
Direktur Produksi

3. Disril Revolin Putra
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

4. Sri Harsi Teteki
Direktur Pemasaran

5. Adriansjah Azhari
Direktur Perencanaan dan Pengembangan

6. Pardiman
Direktur Keuangan

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017

Laporan Tahunan 2017 ini termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Dewan Direksi yang bertanda tangan di bawah ini.

DIREKSI



M. Rahman Roestan
Direktur Utama



Juliman
Direktur Produksi



Pardiman
Direktur Keuangan



Adriansjah Azhari
Direktur Perencanaan dan Pengembangan



Disril Revolin Putra
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum



Sri Harsi Teteki
Direktur Pemasaran

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017

Laporan Tahunan 2017 ini termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Dewan Komisaris yang bertanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS



Farid Wajdi Husain
Komisaris Utama



Heridadi
Komisaris



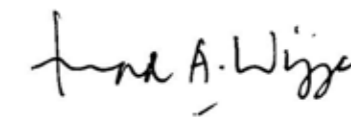
H.M. Subuh
Komisaris



Saud Usman Nasution
Komisaris



Yuni Suryanto
Komisaris



Made Arya W.
Komisaris



Profil Perusahaan

“

Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 29 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakuilifikasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 130 negara

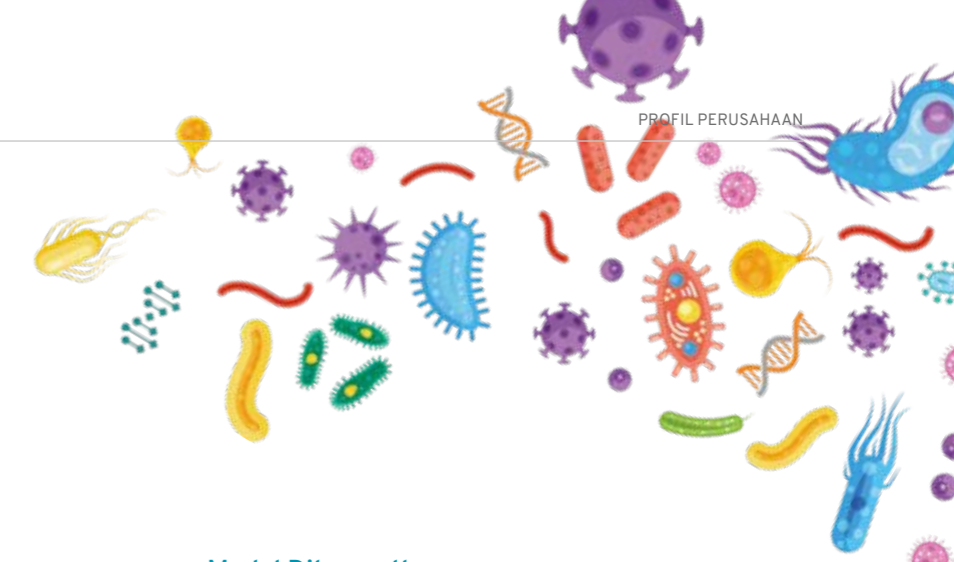
Profil Perusahaan



Contact Address

Corporate Communication
Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia.
Telp +62 22-2033755 (37412)
Fax: +62 22 - 2041306
Contact Center (whatsapp): 082121511511
Email: corcom@biofarma.co.id

Twitter: @biofarmaid
Instagram: @biofarmaid
Youtube: @biofarmaid
Facebook: biofarmaid



Nama Perusahaan

PT Bio Farma (Persero)

Brand

Bio Farma

Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan: Penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi dan alat kesehatan

Tanggal Pendirian

6 Agustus 1890

Dasar Hukum Pendirian

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1998 dengan Nomor C2-1423HT.01.01. Tahun 1998

Kepemilikan

Pemerintah Republik Indonesia 100%

Modal Dasar

Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham

Modal Ditempatkan

Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham

Data Jaringan Kantor

Kantor Pusat: 1
Kantor Penunjang Produksi: 1
Kantor *Representative*: 1
Layanan Pemasaran (*marketer*): 63 area

Jumlah Pegawai

1.187

Alamat Kantor Pusat

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia. Telp +62 22-2033755 Fax: +62 22 - 2041306 email: mail@biofarma.co.id

Situs Web

www.biofarma.co.id



Riwayat Singkat Perusahaan

“ Perjalanannya panjang Bio Farma hingga kini telah bertransformasi menjadi produsen vaksin dan antisera kelas dunia. Bermula ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan “Parc-vaccinogène” (Lembaga Pengembangan Vaksin Negara) pada tanggal 6 Agustus 1890. Lembaga tersebut menempati sebuah gedung di daerah Weltevreden - Batavia, yang kini menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.



Sejak awal berdirinya, Parc-vaccinogène fokus pada berbagai penelitian untuk memberantas penyakit menular hingga akhirnya Parc-vaccinogène menjalin kerja sama dengan Institut Pasteur untuk melakukan penelitian mengenai mikrobiologi, sehingga lembaga ini berubah nama menjadi Parc-vaccinogène en Institut Pasteur. Sejalan dengan perkembangan jaman, Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan badan hukum hingga pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1997 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama PT Bio Farma (Persero).

Akta pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah diaktakan dengan Akta Notaris Muhani Salim SH., No. 1 tanggal

3 Februari 1997, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1423HT.01.01. tanggal 5 Maret 1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2009 No. 65 Tambahan No. 21702. Susunan Direksi terakhir telah dimuat dalam Akta No. 45 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen

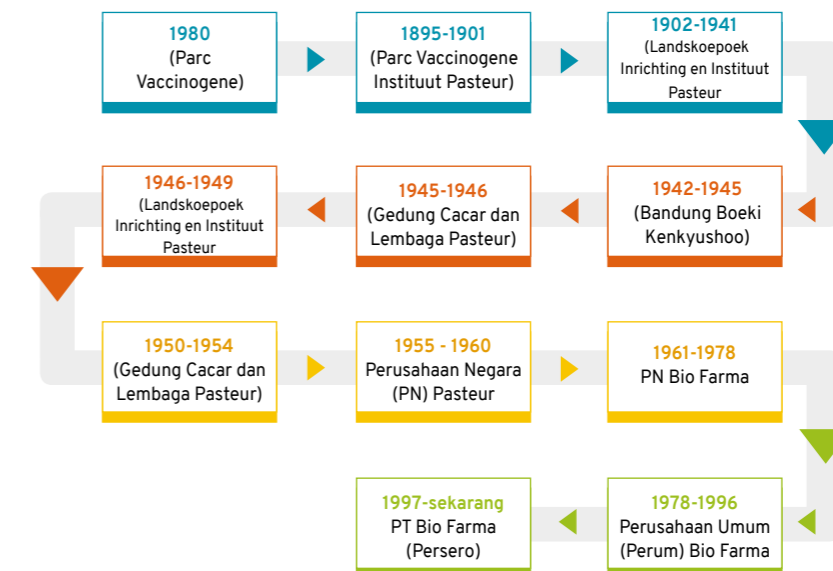
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-19828 tanggal 9 November 2009, dan perubahan modal disetor yang telah dimuat dalam Akta No. 26 tanggal 18 Juli 2012 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. Sampai hari ini, Bio Farma telah memainkan peran signifikan dalam sejarah pengembangan vaksin dan serum. Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi vaksin dan antisera. Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan *world class standard* antara lain ISO 26000 *guidance for CSR*, *Enterprise Risk Management* ISO 31000, *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Kiprah Bio Farma telah diakui di tingkat global. Sejak tahun 1997, Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 29 produsen vaksin/22 negara di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 130 negara. Bekerja sama dengan jaringan internasional berskala global, lembaga penelitian, organisasi profesional tingkat regional dan juga perusahaan multinasional, Bio Farma ikut aktif mengupayakan kesehatan masyarakat dunia, baik secara langsung dengan menyediakan vaksin, transfer teknologi, perusahaan dan pemerintahan yang menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Saat ini, kegiatan usaha Bio Farma berpusat di Jalan Pasteur No. 28 Bandung yang menempati lahan seluas 91.058 m² yang digunakan untuk fasilitas produksi, penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta administrasi. Disamping itu, Perusahaan memiliki fasilitas penunjang di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat di atas lahan seluas 282.441 m² yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan di Gedung Pakarti Centre Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sejalan dengan perkembangan jaman, Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan badan hukum hingga pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1997 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama PT Bio Farma (Persero).



Brand Perusahaan

2008
- sekarang



Tahun 2008, perubahan logo Bio Farma yang mencerminkan semangat dan optimisme untuk menuju industri vaksin kelas dunia.

DEFINISI LOGO

Bio Farma adalah sebuah Perusahaan yang adaptif dalam mengantisipasi *trend* bisnis dan teknologi di bidang vaksin dan antisera. Salah satu bentuk antisipasinya adalah dengan memiliki logo yang merupakan identitas Perusahaan.

FILOSOFI LOGO

1. Logo merupakan adaptasi bentuk pencitraan dari "Crystal Protein" dan "Glicoprotein". Hal ini merefleksikan bahwa Bio Farma adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang vaksin dan serum.
2. Mencitrakan ilusi pendar bintang (*sparkling*) yaitu artinya sebagai semangat dan dinamika Bio Farma yang memiliki masa depan yang cemerlang.
3. Warna dominan hijau, secara psikologis menyiratkan suatu nilai higienitas dan kesehatan.
4. Warna jingga dan kuning, secara terpadu menyiratkan semangat progresif dan keberanian untuk berinovasi agar selalu menjadi yang terdepan.

1961-2007



BIO FARMA

1955-1960



Bidang Usaha



Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi, dan alat kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bio Farma dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bio Farma antara lain adalah:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

KEGIATAN USAHA UTAMA

- Penelitian dan pengembangan produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan klinik.
- Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c dan d.

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

- Layanan laboratorium mikrobiologi industri
- Layanan vaksinasi korporasi dan umum
- Layanan Apotek Bio Farma

Produk dan Jasa



VAKSIN, ANTISERA DIAGNOSTIKA

Produk yang dihasilkan terdiri dari vaksin dan antisera bagi manusia, sebagai berikut.

• VAKSIN VIRUS



1. Vaksin Oral Polio (Monovalent) Tipe 1

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1.

2. Vaksin Poliomyelitis Oral Bivalen Tipe 1 & 3

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1 dan 3.

3. Vaksin Campak (Beku Kering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Campak.



4. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

Untuk pencegahan terhadap penyakit Hepatitis B.



5. Vaksin Flubio (Influenza HA)

Untuk pencegahan terhadap penyakit influenza musiman (*seasonal influenza*)

• **VAKSIN BAKTERI**



1. Vaksin TT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Tetanus Neonatal (Tetanus pada bayi baru lahir).

2. Vaksin Jerap DT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus.

3. Vaksin DTP

Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus dan Pertusis.



4. Vaksin BCG (Bekukering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis



5. Vaksin Jerap Td (10 Dosis)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri pada orang dewasa dan anak mulai usia 7 tahun.



6. Vaksin Bio Td

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri pada orang dewasa dan anak mulai usia 7 tahun.



7. Vaksin Bio TT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan perlindungan terhadap Tetanus Neonatorum pada wanita usia subur.

• **VAKSIN KOMBINASI**



Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B dan Haemophilus Influenza tipe B.

• **ANTISERA**



1. BIOSAT (Serum Anti Tetanus)

Untuk pencegahan dan pengobatan terhadap Tetanus yang disebabkan oleh infeksi *clostridium tetani*.



2. BIO ADS (Serum Anti Difteri)

Untuk pengobatan terhadap penyakit Difteri.



3. Biosave (Serum Anti Bisa Ular Polivalen)

Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa dari jenis ular kobra (Naja Sputatrix), ular belang (Bungarus fasciatus) dan ular tanah (Ankyrodon rhodostoma).

• **DIAGNOSTIKA**



TUBERCULIN PPD RT 23

Uji mantoux untuk menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh *Mycobacterium tuberculosis*.

• **PRODUK PARTNERSHIP**



Vaksin Menivax ACYW (Meningitis)

Untuk pencegahan terhadap penyakit radang selaput otak.

Selain produk Bio Farma, saat ini kami memasarkan produk lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di antaranya:

- Vaksin Varicella
- Vaksin MR
- Serum Anti Bisa Ular
- Vaksin Meningitis

Sebaran Vaksin



Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun terakhir

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Penunjang Produksi	1	1	1	1	1
Kantor Representative	1	1	1	1	1
Layanan Pemasaran (marketer)	63	70	81	40	18

LIST OF COUNTRIES FOR BIO FARMA VACCINES DISTRIBUTION

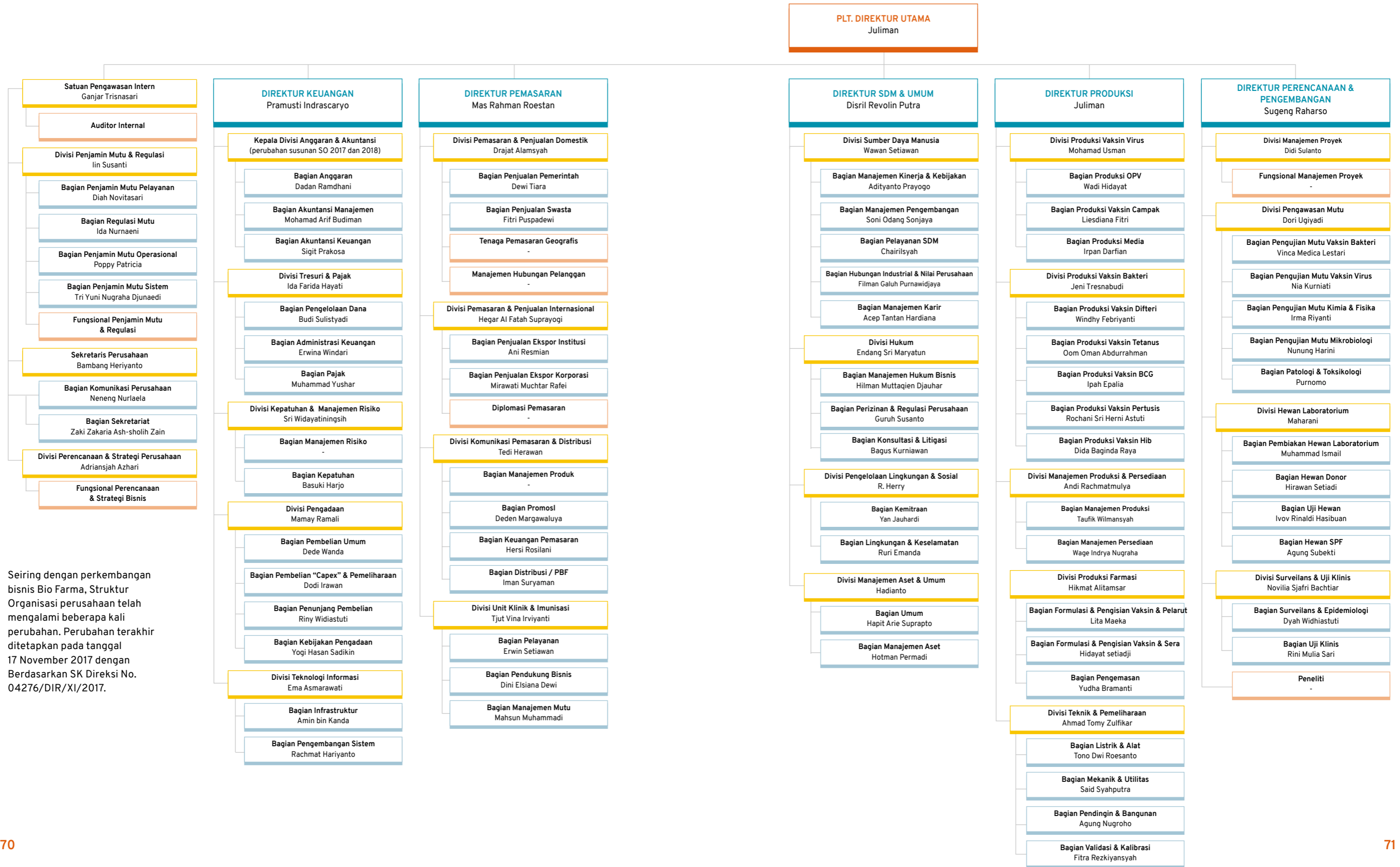
- 1. Afghanistan
- 2. Albania
- 3. Algeria
- 4. Angola
- 5. Antigua
- 6. Argentina
- 7. Australia
- 8. Azerbaijan
- 9. Bahamas
- 10. Bangladesh
- 11. Barbados
- 12. Belgium

- 13. Belize
- 14. Benin
- 15. Bhutan
- 16. Bolivia
- 17. Bosnia and Herzegovina
- 18. Botswana
- 19. Brazil
- 20. Brunei Darussalam
- 21. Burkina Faso
- 22. Burundi
- 23. Cabo Verde
- 24. Cambodia
- 25. Cameroon
- 26. Central Africa
- 27. China
- 28. Colombia
- 29. Comoros
- 30. Congo
- 31. Cuba
- 32. Curacao
- 33. Djibouti
- 34. East Timor
- 35. Ecuador
- 36. Egypt
- 37. El Salvador
- 38. Equatorial guinea
- 39. Eritrea
- 40. Ethiopia
- 41. Fiji
- 42. France
- 43. Gabon
- 44. Gambia
- 45. Georgia
- 46. Germany
- 47. Ghana
- 48. Grenada
- 49. Guam
- 50. Guatemala
- 51. Guinea
- 52. Guinea Bissau
- 53. Haiti
- 54. Honduras
- 55. Hong kong
- 56. India
- 57. Iran
- 58. Iraq
- 59. Israel
- 60. Ivory Coast

- 61. Jamaica
- 62. Kenya
- 63. Kosovo
- 64. Kuwait
- 65. Kyrgyzstan
- 66. Laos
- 67. Lebanon
- 68. Lesotho
- 69. Liberia
- 70. Libya
- 71. Macau
- 72. Madagascar
- 73. Malawi
- 74. Malaysia
- 75. Maldives
- 76. Mali
- 77. Mauritania
- 78. Mauritius
- 79. Mexico
- 80. Micronesia
- 81. Mongolia
- 82. Montserrat
- 83. Morocco
- 84. Mozambique
- 85. Myanmar
- 86. Namibia
- 87. Nepal
- 88. Netherlands
- 89. Netherlands Antilles
- 90. New Zealand
- 91. Nicaragua
- 92. Niger
- 93. Nigeria
- 94. North Korea
- 95. Pakistan
- 96. Panama
- 97. Papua New Guinea
- 98. Paraguay
- 99. Peru
- 100. Philippines
- 101. Rep. Dominican
- 102. Rwanda
- 103. Saint Kitts & Nevis
- 104. Sao Tome and Principe
- 105. Saudi Arabia
- 106. Senegal
- 107. Seychelles
- 108. Sierra Leone
- 109. Singapore
- 110. Solomon Island
- 111. Somalia
- 112. South Africa
- 113. South Korea
- 114. South Sudan
- 115. Srilanka
- 116. St.Lucia
- 117. Sudan
- 118. Suriname
- 119. Swaziland
- 120. Syria
- 121. Tchad
- 122. Tajikistan
- 123. Tanzania
- 124. Thailand
- 125. The British Virgin Island
- 126. Togo
- 127. Trinidad
- 128. Tunisia
- 129. Turkey
- 130. Turkmenistan
- 131. Turks & Caicos
- 132. Uganda
- 133. Uruguay
- 134. Uzbekistan
- 135. Vietnam
- 136. Yemen
- 137. Zambia
- 138. Zimbabwe

■ OIC Members

Struktur Organisasi



Seiring dengan perkembangan bisnis Bio Farma, Struktur Organisasi perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir ditetapkan pada tanggal 17 November 2017 dengan Berdasarkan SK Direksi No. 04276/DIR/XI/2017.



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

DASAR HUKUM FILOSOFI, VISI, MISI DAN VALUE (BUDAYA PERUSAHAAN)

Berdasarkan hasil *review* dari Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma maka pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma menyetujui perubahan Filosofi, Visi, Misi dan Value (Budaya Perusahaan) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero), Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) Pasal I Butir 1.5 dan 1.6.

VISI

Menjadi Perusahaan *Lifescience* Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global adalah Visi Kami.

Visi Bio Farma diatur dalam Dokumen: MBF-01 revisi 12, tanggal 30 Juni 2014. yaitu menjadi perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang berdaya saing global, visi tersebut menekankan peran Bio Farma dalam memenuhi ketersediaan vaksin nasional dan global, *repositioning* dari produsen vaksin ke *Lifescience* merupakan perubahan ke arah yang lebih baik, penambahan kelas dunia diiringi dengan inovasi pada berbagai segmen, efisiensi proses bisnis yang ramah lingkungan, pembaharuan teknologi, penerapan CSR berkelas dunia serta peningkatan kualitas SDM kelas dunia.

MISI

Menyediakan dan Mengembangkan Produk *Lifescience* Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.

Misi Bio Farma untuk mewujudkan visi, disusun dengan mempertimbangkan kompetensi utama Perusahaan dan tantangan strategis yang akan dihadapi, Bio Farma terus menerus melakukan inovasi dengan memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan vaksin dan antisera yang berkualitas internasional. Untuk menjaga kualitas Bio Farma menerapkan berbagai sistem secara terintegrasi seperti memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 17025: 2016, CPOB, ASEAN GMP, WHO GMP dan mengikuti perkembangan persyaratan GMP secara global.

Sosialisasi Visi, Misi Filosofi dan Value dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada seluruh karyawan, untuk tahun 2017 sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, bertempat di Hotel Crown Plaza, Bandung. Sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan untuk jajaran Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Bagian dilaksanakan pada 18 Januari 2017 yang bertempat di hotel Harris Ciumbuleit.

Berpegang pada visi dan misi perusahaan, Bio Farma memiliki 9 kebijakan perusahaan yaitu:

1. Produk bermutu tinggi.
2. Produk ramah lingkungan.
3. Berdaya saing global.
4. Kepuasan pelanggan.
5. Perbaikan berkesinambungan
6. Pengendalian pencemaran.
7. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
8. Penghematan energi dan sumber daya alam.
9. Patuh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.

BUDAYA PERUSAHAAN

Setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen. Pada tahun 2017 dilakukan sosialisasi dan penyebutan 5 *value* perusahaan yaitu *Profesional, Customer Oriented, Teamwork, Integritas, Innovation* menjadi **PROACTION**. Adapun budaya perusahaan Bio Farma adalah sebagai berikut.



Profesional
Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif berorientasi ke depan, dan taat prosedur.

Customer Oriented
Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada *customer*.

Teamwork
Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.

Integritas
Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.

Innovation
Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk menghasilkan gagasan baru.

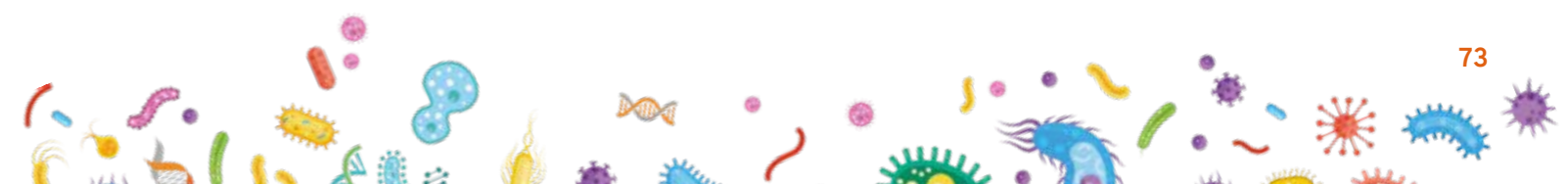
FILOSOFI

“Mengabdikan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup yang Lebih Baik”

“Dedicated to Improve Quality of Life”

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan, berbagai pencapaian telah berhasil direalisasikan hingga tahun 2017. Indikator utama dapat dilihat dari kinerja keuangan sebagaimana tergambar dalam *financial highlight*. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Perusahaan masih relevan dengan kondisi dan tujuan Bio Farma. Pencapaian visi dan misi sampai dengan tahun 2017 telah sesuai dengan arah dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.



Profil Dewan Komisaris

Ahmad M. Ramli

12 April 2013 – April 2018

Komisaris Utama



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Bandung, tanggal 4 Juli pada tahun 1961, berusia 56 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada tahun 1985; Magister Hukum dalam Program Pasca Sarjana Studi Hukum Internasional pada tahun 1992; Doktor dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, lulus dengan Predikat Cum Laude pada tahun 1999.
Pelatihan/ Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> pakar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan <i>cyber law</i> (hukum siber) Certificate on Industrial Property Rights, Japan Institute of Invention and Innovation
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Asisten Dosen di Fakultas Hukum Unpad tahun 1986; Anggota Tim Penyusun RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan anggota Tim Penelaahan Perundang-undangan (Tim Reformasi Hukum) Departemen Kehakiman RI (1998-1999); Dosen Pascasarjana di Universitas Padjadjaran (1995-sekarang), Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Teknologi Sistem Informasi ITB (1998); Pembantu Dekan II (1999-2001); Pembantu Dekan I (2001-2004); Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2002-sekarang); Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2004-2007); Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 2004 – sekarang); anggota Badan Regulasi Telekomunikasi – BRTI (2005-2007); Ketua Tim Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika – Departemen Hukum dan HAM (2006); Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum & HAM (2007-2010); Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (2010); Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (2010 – 2015); Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkumham (2015 – 2016); Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo (Oktober 2016 - saat ini).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat pertama kali sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 8 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-231/MBU/2007, diangkat untuk kedua kalinya sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 12 April 2013 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-220/MBU/2013. Kemudian Pada tanggal 23 Januari 2014 beralih tugas menjadi Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-17/MBU/2014 dengan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya yaitu yang dimulai pada tanggal 12 April 2013.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	12 April 2013 – April 2018

Farid Wadji Husain

April 2018 – saat ini

Komisaris Utama



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, tanggal 09 Maret pada tahun 1950, berusia 67 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin; Gelar Spesialis Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 1981; Gelar Spesialis Bedah Digestif di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 1984.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan pada institusi sebelumnya.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Staf Pengajar/Dosen Staf pengajar/Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar (1978-2002); Direktur Utama Rumah Sakit Islam Faisal Makassar (1995-2002); Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat Bidang Peran Serta Masyarakat (2001-2002); Deputi Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup (2002-2005); Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (2005-2010); Komisaris Utama PT Askes (Persero); Utusan Khusus Presiden RI untuk Misi Perdamaian Papua; Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2013-2015); Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2015 – 2018).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat pertama kali sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK – 102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo sejak tahun 2016, selain itu Beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat PMI Jakarta sejak tahun 2015.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 – saat ini.

Yuni Suryanto

April 2018 – saat ini

Komisaris



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Yogyakarta, tanggal 03 Juni pada tahun 1964, berusia 53 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1990; Master of Business Administration Oklahoma City University, USA pada tahun 1993.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan pada institusi sebelumnya.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Pj.Kasi Semen Departemen Keuangan (1999); PPT Kasubdit Perusahaan Jasa Konsultan Kementerian BUMN (2000); PPT Kasubdit Perkebunan II Kementerian BUMN (2001); Pj.Kabid Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2002); Kabid Usaha Perkebunan 1A Kementerian BUMN (2006); Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur di tahun (2013); Logistik II Kementerian BUMN (2013); Komisaris PT Jasa Raharja (Persero) (2013); Komisaris PT LEN Industri (2013).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat pertama kali sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK – 102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 – saat ini

Made Arya W.

April 2018 – saat ini

Komisaris



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Singaraja, tanggal 17 Agustus pada tahun 1965, berusia 52 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III , Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1987; Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Jakarta, pada tahun 1995; Master of Science in Finance dari University of Colorado at Denver, USA pada tahun 2001.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan pada institusi sebelumnya.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana, Direktorat Anggaran Lain-lain, Ditjen Anggaran (1988-1990); Koordinator Pelaksana, Direktorat Anggaran lain-lain, Ditjen Anggaran (1990-1996); Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran (2008-2011); Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran pada September (2014 – November 2015).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat pertama kali sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK – 102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Saat ini Beliau masih menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran sejak November 2015.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 – saat ini

Saud Usman Nasution

April 2018 – saat ini

Komisaris



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Sigalangan, tanggal 25 Februari pada tahun 1958, berusia 59 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum pada tahun 1994; • Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Jakarta, pada tahun 1995; • Magister Hukum pada tahun 2002; • Doktor Hukum pada tahun 2015.
Pelatihan/ Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan Pendidikan Kejuruan sebagai Sus Jab Kapolres (1999); • Sus Pasen Reserse (1998); • Sus Gati Bintel ABRI (1994);
Riwayat Jabatan	
• Pengalaman Kerja	Menduduki berbagai jabatan struktural dan strategis di POLRI.
• Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kali sebagai Anggota Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK – 102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.
• Jabatan Rangkap	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 – saat ini

23 Januari 2014 – saat ini

Komisaris Independen



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Tanjung Karang, tanggal 24 Juli pada tahun 1952, berusia 65 tahun per Desember 2017
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1977; • Sekolah Pewira Wajib Militer ABRI, Dinas pertama sebagai Perwira TNI AD di Kesdam II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur); • Master di bidang Perencanaan dan Manajemen Kesehatan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1985 – 1987. • Program Doktor di bidang Biodefense, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013.
Pelatihan/ Sertifikasi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.
Riwayat Jabatan	
• Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad (1990-1992); • Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad; • Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina (1994-1995); • Kepala Kesehatan Kostrad; • Kepala Kesehatan Kodam Jaya; • Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD; • Direktur Kesehatan TNI AD (2004 – 2008); • Pendidikan Lemhannas; • Kepala Pusat Kesehatan TNI (2008 – 2010).
• Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Anggota Komisaris pada tanggal 23 Januari 2014, berdasarkan keputusan Menteri BUMN No: SK-17-MBU/2014. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 dikukuhkan menjadi komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-97/MBU/06/2015 dengan meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya yaitu yang dimulai pada tanggal 23 Januari 2014.
• Jabatan Rangkap	Saat ini masih aktif sebagai Dosen S2 di Universitas Pertahanan; Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta; Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD; dan Ketua Ikatan Alumni FKUI angkatan 1977.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	23 Januari 2014 – saat ini.

H.M. Subuh

22 Juni 2015 – saat ini

Komisaris



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pontianak, tanggal 19 Januari pada tahun 1962, berusia 55 tahun per Desember 2017
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1988; Gelar <i>Magister School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM)</i> di University of Southern California pada tahun 1999.
Pelatihan/ Sertifikasi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat (2004-2009); Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (2009-2010); Direktur Pengendalian Penyakit Menular (2010-2013); Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2013-2014); Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI (2014-2016).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Anggota Dewan Komisaris pada tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-97/MBU/06/2015.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI sejak 2016.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	22 Juni 2015 – saat ini.

Ihsan Setiadi Latief

01 Mei 2013 – April 2018

Komisaris



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Bandung, tanggal 14 Juli pada tahun 1972, berusia 45 tahun per Desember 2017
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Jurusan Aqidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1996; Master Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran pada tahun 2004; Doktor pada Program Pascasarjana S3 Unpad Kajian Utama Ilmu Komunikasi dengan Predikat Cum Laude pada tahun 2016.
Pelatihan/ Sertifikasi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis), Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis) (1998 – 2002); Ketua STKIP Persis; Dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung; Dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al- Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno; Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan.
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Anggota Dewan Komisaris pada tanggal 01 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-235/MBU/2013.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	01 Mei 2013 – April 2018.

Profil Direksi

M. Rahman Roestan

10 Juli 2017 – saat ini

Direktur Utama



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Bandung, tanggal 05 Agustus pada tahun 1970. Berusia 47 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Farmasi dan Apoteker dari Universitas Padjajaran Bandung; Master of Business Administration (MBA) dari Institut Teknologi Bandung; Program Doktorat Management Strategic dari Universitas Padjajaran;
Pelatihan/ Sertifikasi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Formulasi Bio Farma; Kepala Bagian Pengemasan Bio Farma; Kepala Bagian Quality Assurance System Bio Farma; Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi Bio Farma; Corporate Secretary Bio Farma pada tahun 2008-2017; Direktur Pemasaran Bio Farma Juli 2017 - Januari 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Diangkat pertama kali sebagai Direktur Pemasaran Pada tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-127/MBU/07/2017. Kemudian beralih tugas menjadi Direktur Utama pada tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-27/MBU/01/2018 dengan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur Pemasaran yaitu dimulai tanggal 10 Juli 2017.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	10 Juli 2017 – saat ini

Sri Harsi Teteki

22 Januari 2018 - saat ini

Direktur Pemasaran



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Yogyakarta, tanggal 28 Juni pada tahun 1964, berusia 53 tahun per Desember 2017
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Kedokteran dari Universitas Diponegoro pada tahun 1989; Magister Kesehatan dari Universitas Diponegoro pada tahun 2002.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan pada institusi sebelumnya.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Pemasaran PT Bio Farma (Persero) (2018-saat ini) Direktur Utama PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa (TelkoMedika) (2017-2018) Direktur Marketing dan Operasional PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa (TelkoMedika) (2016-2017) Direktur Operasional PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa (TelkoMedika) (2015-2016) Direktur Operasional PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa (TelkoMedika) (2013- 2015) Manager Area II Jakarta Yayasan Kesehatan Telkom (2012-2013) Manager Area IV Yayasan Kesehatan Telkom (2007-2012) Kepala Puskesmas Perawatan Puskesmas Mijen Demak Puskesmas Perawatan Mijen Demak (1990-1993)
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untk pertama kalinya sebagai Direktur Pemasaran pada tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-27/MBU/01/2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	22 Januari 2018 - saat ini

Disril Revolin Putra

14 Juli 2017 – saat ini

Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Tanjung Pinang, tanggal 18 Desember pada tahun 1965. Berusia 52 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta pada tahun 1989; Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.
Pelatihan/ Sertifikasi	Pelatihan dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Legal Officer Divisi Sumber Daya Manusia di BNI (1991-1995); Manager Pengelolaan Kebijakan Divisi Sumber Daya Manusia di BNI (1995-2000); Wakil Pemimpin Cabang Wonogiri di BNI (2000-2002); Wakil Pemimpin Cabang Utama Tangerang di BNI (2002-2004); Pemimpin Cabang Jembatan Ampera Palembang di BNI (2004-2005); Pemimpin Cabang Utama Tebet Utara Jakarta di BNI (2005- 2006); Wakil Pemimpin Divisi Hukum di BNI (2006-2008); Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia di BNI (2008-2010); Pemimpin Divisi Organizational Learning di BNI (2010-2011); Pimpinan Divisi Hukum di BNI (2011 – 2015); Pemimpin Wilayah Jakarta Kota di BNI (2015-2016); SEVP Jaringan dan Layanan di BNI (2016); Direktur SDM dan Hukum di PT Pelindo II (Mei 2016 - Juli 2017).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur SDM dan Umum pada tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-131/MBU/07/2017.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	14 Juli 2017 – saat ini.

Juliman*

12 April 2013 – saat ini

Direktur Produksi



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pangkalpinang, tanggal 23 September pada tahun 1962, berusia 55 tahun per Desember 2017
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Jurusan Farmasi dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1988 dan gelar Apoteker pada tahun 1989 di almamater yang sama; Master di bidang Manajemen Operasi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2005.
Pelatihan/ Sertifikasi	<p>Kerap kali menjadi nara sumber di acara seminar, wawancara dan audiensi di bidang produksi vaksin dan <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i></p> <p>Sering terlibat diberbagai kegiatan tingkat Internasional, antara lain pernah aktif sebagai Trainer dalam program WHO <i>Global Training Network (GTN) on Quality Assurance of Live Attenuated Poliomyelitis and Measles Vaccines</i> dan menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk mengikuti Forum <i>World Health Assembly</i> yang diselenggarakan oleh <i>World Health Organization (WHO)</i>. Beliau juga aktif mengikuti <i>Annual General Meeting</i> yang diadakan oleh <i>Developing Countries Vaccines Manufacturer Network (DCVMN)</i>, yaitu organisasi kerja sama para produsen vaksin dari negara-negara berkembang.</p> <p>Saat ini beliau juga menjabat sebagai <i>Board Alternate Global Alliance for Vaccine Immunisation (GAVI)</i> mewakili Organisasi DCVMN untuk hadir dalam GAVI Board Meeting yang rutin diadakan tiga kali dalam setahun tahun untuk membahas dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil GAVI Board terkait program Imunisasi Global.</p>
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Penunjang Vaksin Polio dan Campak; Kepala Bagian Produksi Vaksin Campak; Kepala Divisi Teknik dan Pemeliharaan; Kepala Divisi Pemasaran Ekspor; Kepala Divisi Logistik.
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Diangkat pertama kali sebagai Direktur Produksi pada tanggal 12 April 2013 diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-221/MBU/2013. Kemudian ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama pada tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-127/MBU/07/2017 sampai dengan ditetapkannya Jabatan Direktur Utama Definitif yaitu pada tanggal 22 Januari 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	12 April 2013 – saat ini.

* menjabat sebagai Plt Direktur Utama sejak 10 Juli 2017 sampai 22 Januari 2018

Pardiman

April 2018 - saat ini

Direktur Keuangan



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Boyolali, tanggal 14 Februari tahun 1960, berusia 57 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi bidang Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987; Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 2002.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan bidang keuangan dan <i>strategic business</i> .
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur <i>Funding and Consumer</i> PT Bank BRI (2015-2016); Direktur Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas (Pit) Direktur SDM dan Umum PT Petrokimia Gresik (2016-2017); Direktur Keuangan pada Perum Bulog (2017-2018).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan periode kedua adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 - saat ini

Pramusti Indrascaryo

12 April 2013 - saat ini

Direktur Keuangan



Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Semarang, tanggal 23 Agustus pada tahun 1965, berusia 52 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1989; Master di bidang Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1998.
Pelatihan/ Sertifikasi	Pelatihan dapat dilihat pada tabel pelatihan Direksi.
Riwayat Jabatan	
<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Cabang di Bank Ekspor Impor Indonesia sebelum penggabungan empat Bank; Senior Manager Corporate Risk Management di Bank Mandiri; Senior Manager Corporate Banking Bank Mandiri (2003); Assistant Vice President di Bank Mandiri (2009); Vice President di Bank Mandiri (2012).
<ul style="list-style-type: none"> Dasar Hukum Pengangkatan 	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan pada tanggal 12 April 2013 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-221/MBU/2013.
<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Rangkap 	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	12 April 2013 - saat ini.

Adriansjah Azhari

April 2018 - saat ini

Direktur Perencanaan
dan Pengembangan

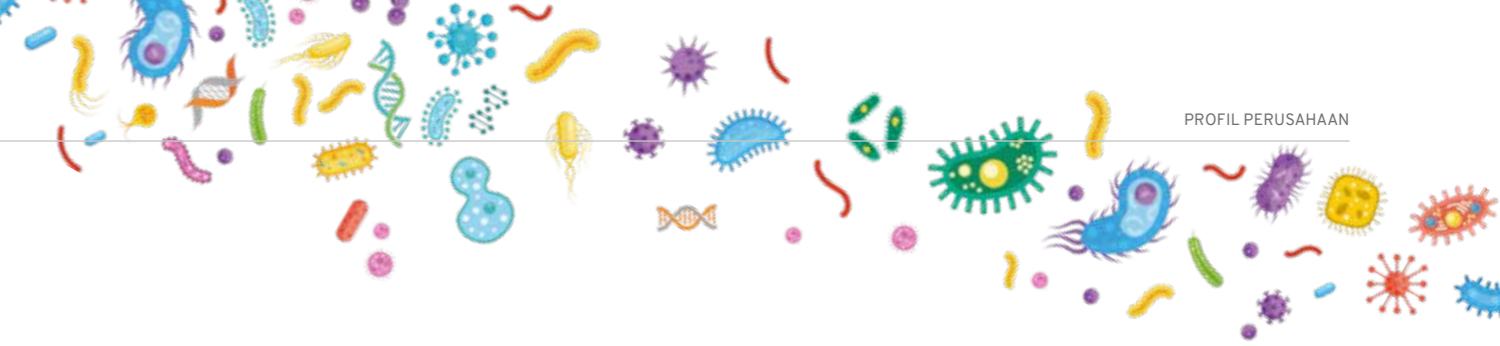
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, tanggal 05 September tahun 1963, berusia 54 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988; Master di bidang Manajemen Operasional dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2005.
Pelatihan/ Sertifikasi	Telah mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan di luar negeri antara lain: Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network (DCVMN), World Health Organisation (WHO) dan International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) selain itu Beliau juga aktif sebagai narasumber pada berbagai kegiatan dalam dan luar negeri antara lain Annual General Meeting of Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network (DCVMN), Rio de Janeiro, Brazil; World Health Organisation (WHO) QC course on Hib vaccine, NVI, The Netherlands; ISPE Indonesian Affiliate annual conference 2012, Jakarta; National Vaccine Research Forum, Jakarta; Rotavirus symposium, Bangkok, Thailand; Proteomic Avian Flu Vaccine Seminar, Avian Influenza Research Center (AIRC), Airlangga Univ, Surabaya; WHO briefing for manufacturers WHO prequalification programme" Beijing, China; Global Health Regulatory Meeting on PDPs organized by PATH, Hanoi, Vietnam dan lain-lain.
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Bisnis (2017-2018); Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (2012-2017) Kepala Divisi Quality Assurance (2007-2012); Kepala Divisi Vaksin Bakteri (2004-2007); Kepala Divisi Produksi Farmasi (2002-2004); Berbagai posisi strategis (1989-2002). Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor:SK - 101/MBU/04/2018. Jabatan Rangkap Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	April 2018 - saat ini

12 April 2013 – April 2018

Direktur Perencanaan
& Pengembangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Surabaya, tanggal 20 Desember pada tahun 1959, berusia 58 tahun per Desember 2017.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1983; Pendidikan Profesi Dokter Hewan dari almamater yang sama pada tahun 1984; Master di bidang Manajemen konsentrasi Manajemen Operasi dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2004.
Pelatihan/ Sertifikasi	Certified Professional Internal Auditor (CPIA) dari Center for Development of Accountancy and Finance – The Association of Internal Auditor.
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Pemeliharaan Hewan di Bio Farma (1985-1989); Staf Direksi di Bio Farma (2002-2007); Kepala Satuan Pengawasan Intern di Bio Farma (2007-2010); Kepala Divisi Hewan Laboratorium di Bio Farma (2010-2012). Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan pada tanggal 12 April 2013 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-221/MBU/2013. Jabatan Rangkap Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham di Bio Farma	-
Periode Jabatan	12 April 2013 – April 2018

* jabatan berakhir di April 2018



Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

(dalam satuan orang)

Level Organisasi	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kepala Divisi	16	10	26	17	9	26
Ahli Utama	4	1	5	5	2	7
Kepala Bagian	44	26	70	42	26	68
Ahli Madya	26	10	36	30	9	39
Kepala Seksi	97	37	134	107	55	162
Ahli Muda	31	42	73	24	24	48
Staf	68	50	118	66	53	119
Staf Muda	116	49	165	114	49	163
Pelaksana	474	29	503	477	29	506
Peneliti						
Portfolio Management Team	-	-	-	-	-	0
Project Integration Mng	1	2	3	1	2	3
Research Coordinator	6	-	6	3	-	3
Research S.O.	1	-	1	1	-	1

Level Organisasi	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Researcher	6	5	11	2	3	5
Junior Researcher	9	10	19	3	7	10
Operation Staff	16	-	16	11	-	11
Jumlah			1.186			1.171

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Direktorat

(dalam satuan orang)

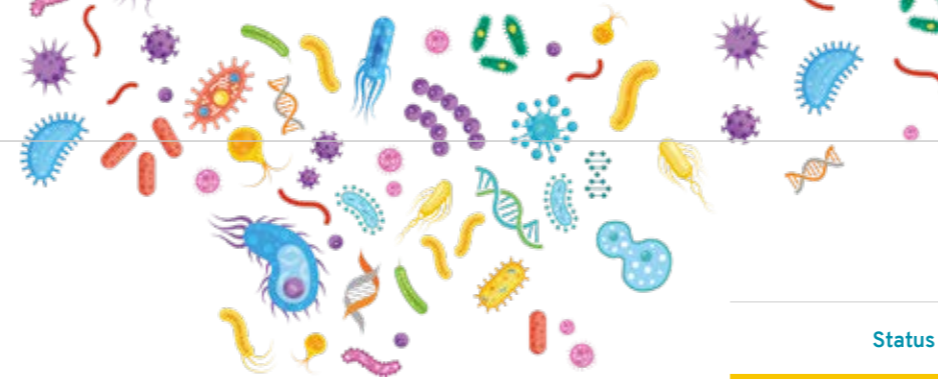
Direktorat	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Utama	41	57	98	50	51	101
Keuangan	73	37	110	43	24	67
Pemasaran	52	33	85	56	35	91
Sumber Daya Manusia	116	19	135	133	30	163
Produksi	460	46	506	447	54	501
Perencanaan dan Pengembangan	173	79	252	174	74	248
Jumlah			1.186			1.171

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Pendidikan	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
S3	1	3	4	1	2	3
S2	80	51	131	77	50	127
S1	277	118	395	246	115	361
D3	145	67	212	144	68	212
SMA	412	32	444	435	33	468
Jumlah			1.186			1.171



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
21-25	31	26	57	42	33	75
26-30	179	60	239	197	56	253
31-35	188	55	243	179	58	237
36-40	162	42	204	154	40	194
41-45	130	31	161	142	32	174
46-50	143	35	178	118	29	147
>51	82	22	104	71	20	91
Jumlah	1.186			1.171		

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
0-5	333	88	421	354	89	443
6-10	166	72	238	147	78	225
11-15	150	42	192	146	38	184
16-20	114	26	140	125	26	151
21-25	75	19	94	70	17	87
26-30	42	12	54	33	9	42
>31	35	12	47	28	11	39
Jumlah	1.186			1.171		

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2017		2016	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Laki-laki	915		903	
Perempuan		271		268
Jumlah	1.186		1.171	

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Karyawan Tetap	915	271	1.186	903	268	1.171

Status Kepegawaian	2017			2016		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tenaga Kontrak	71	59	130	79	65	144
Outsource	467	29	496	437	28	465
Jumlah	1.812			1.780		

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

KEBIJAKAN

Kebijakan internal mengenai pengembangan kompetensi karyawan (Pendidikan dan pelatihan) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 03971 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Kompetensi PT Bio Farma (Persero).

Bio Farma merancang program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan kompetensi. Bio Farma juga memastikan bahwa seluruh karyawan pada setiap level jabatan memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Perusahaan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara *in-house* maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selama tahun 2017 diselenggarakan sejumlah *training* terkait standarisasi kompetensi sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2017

No.	Level Jabatan	Topik Pelatihan	Program Pelatihan/Kompetensi	Jumlah Peserta
1	Kepala Seksi/Ahli Muda	Balanced Scorecard	Business Acumen and Management	214
2	Kepala Divisi/Ahli Utama	Business Leadership Coaching	Team Leadership	36
3	Kepala Divisi/Ahli Utama	Strategic Business Plan	Team Leadership	37
4	Kepala Bagian/Ahli Madya	Leadership for Manager	Managing and Developing Others	105
5	Staf	Leadership: Character Building Training	Readiness to Change	30
6	Staf Muda dan Staf	Core Values Internalization Training	Core Values	308
7	Staf Muda dan Staf	Customer Service for New Employee	Core Values	30
8	Staf Muda dan Staf	Financial Management for New Employee	Financial Management	30
9	Staf	K3 (Safety Behaviour)	Safety and Hygiene	30
10	Tim Tanggap Darurat	Pelatihan Tim Tanggap Darurat	Safety and Hygiene	85
11	Tim Tanggap Darurat	Sertifikasi P3K	Safety and Hygiene	20
12	Staf	Teamwork	Core Values	25

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sesuai dengan penerapan manajemen yang baik, setiap program pengembangan dilakukan evaluasi atas proses pelaksanaan program baik pada level kepuasan layanan (Level 1), peningkatan pengetahuan/keterampilan (Level 2), dan penerapan hasil pengembangan kompetensi di tempat kerja (Level 3). Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, diperoleh indeks evaluasi sebesar 3,91 pada skala 5 yang menyatakan bahwa program pengembangan selama tahun 2017 dinyatakan dan "sangat memuaskan".

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Manusia sebagai faktor kesuksesan dibalik proses berjalannya metode (sistem), pengolahan material, pengoperasian mesin, dan pengelolaan moneter, Perusahaan memberikan perhatian terhadap aspek *Human Capital* sebagai *strategic partner* dengan berinvestasi untuk meningkatkan nilai dari *Human Capital*. Pada tahun 2017 jumlah biaya/investasi yang telah dikeluarkan oleh Bio Farma adalah sebesar Rp11,1 miliar yang terdiri dari biaya pelatihan/*training* sebesar Rp9 miliar dan biaya pendidikan formal pasca sarjana sebesar Rp2,1 miliar.

Komposisi Pemegang Saham

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada PT Bio Farma (Persero).

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Nilai Nominal	Kepemilikan Saham	Total
Pemerintah Republik Indonesia	2.000.000	Rp1.000.000	100%	Rp2.000.000.000.000

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham dikarenakan saham Bio Farma 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi komposisi 20 pemegang saham terbesar.

Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan informasi komposisi Pemegang Saham, maka Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham di Bio Farma.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham dikarenakan saham Bio Farma 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Bio Farma telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma merupakan perusahaan BUMN Non Listed Non Keuangan yang belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang:

- Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*Corporate Action*).
- Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*Corporate Action*).
- Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.
- Kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (*Corporate Action*) yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, dan persentase kepemilikan saham.

Struktur Grup Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma tidak memiliki Struktur Grup Perusahaan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan Struktur Grup Perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Per 31 Desember 2017, Bio Farma tidak menerbitkan dan/atau pencatatan efek lainnya. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang:

- Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya.
- Nilai penawaran efek lainnya.

- Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan.
- Peringkat efek.
- Kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NOTARIS	KONSULTAN HUKUM
<p>Djoermarma, Wahyudin & Rekan Jalan Dr. Slamet No. 55 Bandung Tel : (62-22) 2034044 Fax : (62-22) 2037466 Email: kapdw@yahoo.com Jasa yang diberikan: Jasa Audit atas Laporan Keuangan tahun 2016</p>	<p>Fathiah Helmi, S.H. Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 BI X-1 Graha Irama Lt 6-C, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta, 12950 Tel : (62-21) 5261136, 52907304, 52907305, 52907306 Fax : (62-21) 5261136 Jasa yang diberikan: Penyusunan akta risalah RUPS Tahunan Periode penugasan: Januari – Desember 2017</p>	<p>Rahayu & Partners in association with HFW Plaza Asia 18 Floor Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Indonesia Tel: (62-21) 515 2477 Website : http://rahayuandpartners.com/ Jasa yang diberikan: Jasa konsultasi hukum Periode penugasan: Januari – Desember 2017</p> <p>A Hakim G. Nusantara, Harman & Partners (NHP) Office 8, 12 Floor Jl. Senopati Raya No. 8 B Jakarta 12190 Indonesia Tel: (62-21) 2933 3122, 2933 3123, 2933 3124 Fax: (62-21) 2933 3125 Website: http://nhplaw.com/ Jasa yang diberikan: Jasa konsultasi hukum Periode penugasan: Januari – Desember 2017</p>

Penghargaan



05 APRIL 2017

Nama Penghargaan:
Top CSR 2017 on Pharmaceutical Industry 2017

Acara:
Anugerah TOP CSR 2017

Penyelenggara:
Majalah *Business News*, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Indonesia CSR Society

05 APRIL 2017

Nama Penghargaan:
Iskandar as a Top Leader on CSR Commitment 2017

Acara:
Anugerah TOP CSR 2017

Penyelenggara:
Majalah *Business News*, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Indonesia CSR Society

19 MEI 2017

Nama Penghargaan:
Indonesia Most Admired Company category Pharmacy

Acara:
IMACO Awards 2017

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

14 JULI 2017

Nama Penghargaan:
Penghargaan Kecelakaan Nihil

Acara:
Zero Accident Award 2017

Penyelenggara:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

10 AGUSTUS 2017

Nama Penghargaan:
Abyudaya 2017

Acara:
Anugerah IPTEK Abyudaya

Penyelenggara:
Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)



11 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
 Bio Farma as Social Business Innovation Award 2017 category Pharmaceuticals
Acara:
 Social Business Innovation Award 2017
Penyelenggara:
 Warta Ekonomi

11 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
 The Best Green CEO 2017 category Pharmaceuticals
Acara:
 Green CEO Award 2017
Penyelenggara:
 Warta Ekonomi

19 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
 Juara 2 kategori BUMN Non Keuangan Non listed
Acara:
 Annual Report Award 2017
Penyelenggara:
 Panitia Annual Report Award 2017

19 SEPTEMBER 2017

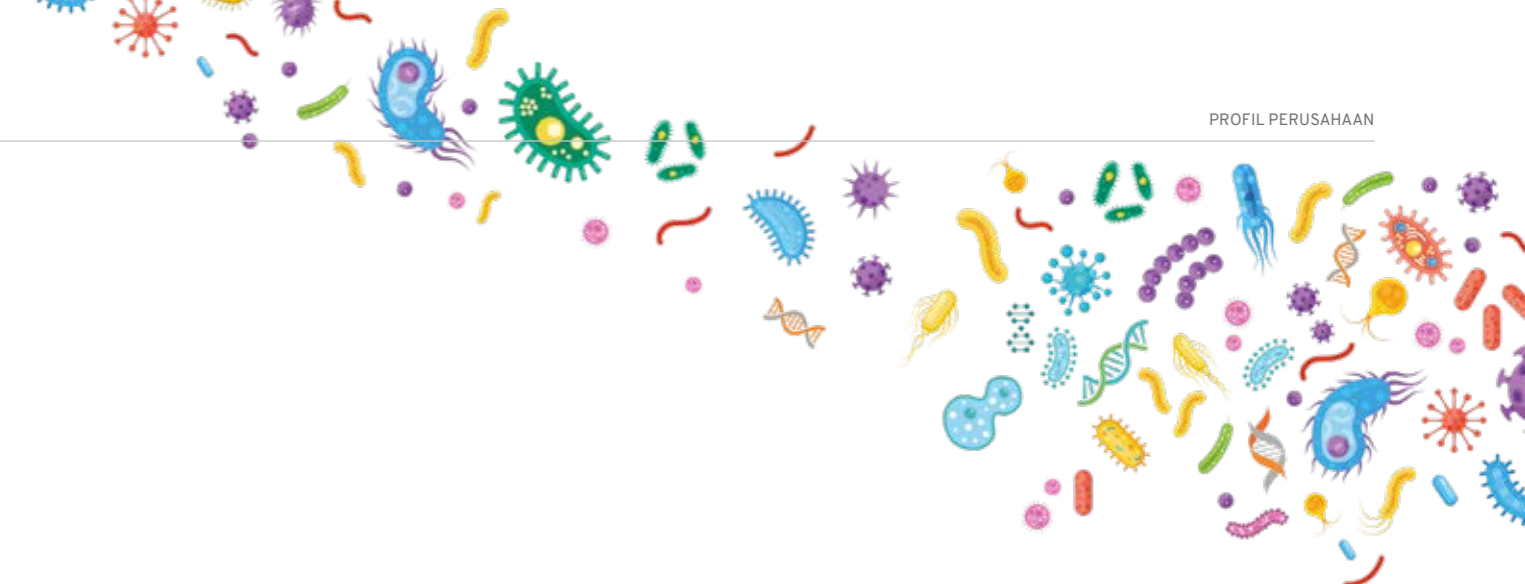
Nama Penghargaan:
 Bio Farma as Indonesia Living Legend Companies 2017
Acara:
 Indonesia Living Legend Companies 2017
Penyelenggara:
 SWA

29 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
 The Most Popular Company category Pharmacy
Acara:
 International Public Relations Association (IPRA)
Penyelenggara:
 Warta Ekonomi

31 OKTOBER 2017

Nama Penghargaan:
 TOP IT Implementation on Pharmacy Sector
Acara:
 Top IT & Telco Award 2017
Penyelenggara:
 Majalah ITech



06 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
BUMN *Performance Excellence Award* 2017
Acara:
Forum Ekselen BUMN (FEB)
Penyelenggara:
Kementerian BUMN Republik Indonesia

09 SEPTEMBER 2017

Nama Penghargaan:
Penghargaan Karya Anak Bangsa di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan
Acara:
Kemenkes Award 2017
Penyelenggara:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

06 DESEMBER 2017

Nama Penghargaan:
Mitra Kepabeanaan Favorit
Acara:
Evaluasi MITA Semester II Tahun 2017
Penyelenggara:
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok

08 DESEMBER 2017

Nama Penghargaan:
Wajib Pajak Terbaik tahun 2017 kategori Pajak Bumi dan Bangunan
Acara:
Anugerah Pajak Daerah Kota Bandung
Penyelenggara:
Pemerintah Kota Bandung

18 DESEMBER 2017

Nama Penghargaan:
Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER) predikat Emas
Acara:
Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER)
Penyelenggara:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

21 DESEMBER 2017

Nama Penghargaan:
Bio Farma sebagai Peringkat IV Kategori Badan Usaha Milik Negara
Acara:
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017
Penyelenggara:
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Sertifikasi



Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2015

No. Sertifikasi:
JKT0403953

Validasi:
26 Juni 2019

Diterbitkan Oleh:
PT Lloyd's Register Indonesia, for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited, United Kingdom (LRQA - UK)

Jenis Sertifikasi:
ISO 14001:2004

No. Sertifikasi:
JKT0500340

Validasi:
12 Juli 2018

Diterbitkan Oleh:
PT Lloyd's Register Indonesia, for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited, United Kingdom (LRQA - UK)

Jenis Sertifikasi:
OHSAS 18001:2007

No. Sertifikasi:
JKT0500339

Validasi:
12 Juli 2018

Diterbitkan Oleh:
PT Lloyd's Register Indonesia, for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited, United Kingdom (LRQA - UK)

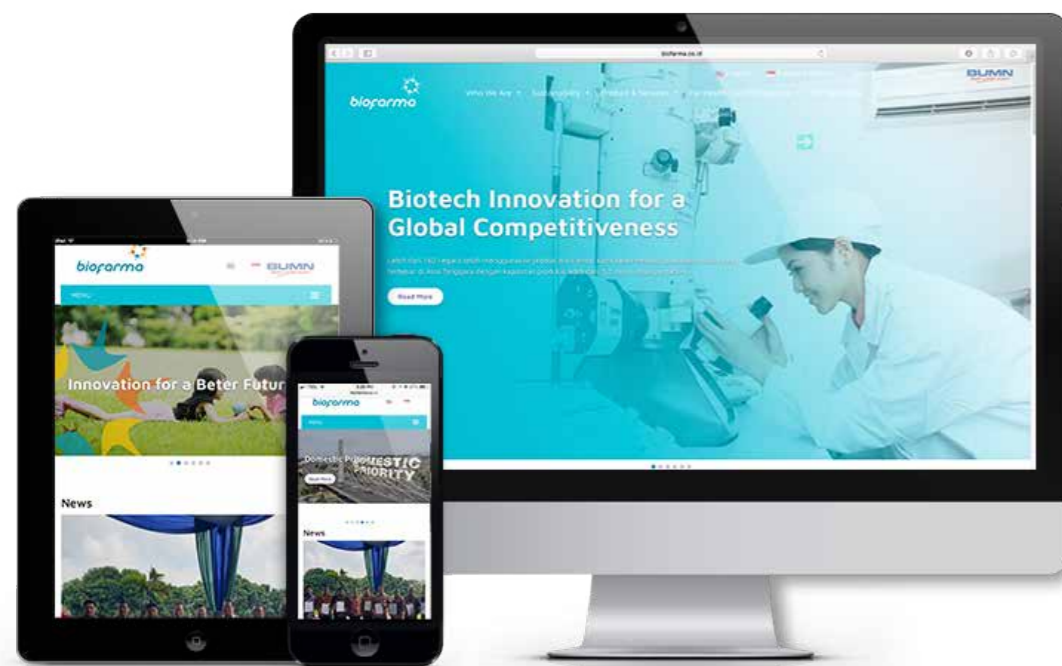


Nama dan Alamat Jaringan Kantor Bio Farma

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bio Farma memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Penunjang Produksi, 1 Kantor Perwakilan dan 61 Layanan Pemasaran (*marketer*). Informasi mengenai alamat jaringan kantor Bio Farma adalah sebagai berikut.

Keterangan	Alamat
Kantor pusat	Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia
Kantor penunjang produksi	Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat 40551.
Kantor perwakilan	Gedung Pakarti Centre Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta
Layanan pemasaran (<i>marketer</i>)	Tersebar di beberapa kota besar seperti: Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Cirebon, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Jogjakarta, Purwokerto, Madiun, Jember, Denpasar, Mataram, Palu, Pontianak, Palangkaraya, Manado, Makassar, Kendari, Banjarmasin, Balikpapan.

Informasi yang Tersedia di Website



Bio Farma telah melengkapi *website* perusahaan dengan memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, diantaranya:

- Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
- Kode Etik;
- Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;
- Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.
- Serta informasi penting dan terkini.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017, anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
Mohammad Subuh	Komisaris	Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
		Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
Heridadi	Komisaris Independen	Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
		Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
		Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, anggota Direksi Bio Farma telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
M. Rahman Roestan	Direktur Utama	Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
Juliman	Direktur Produksi	Edukasi Obat dan Halal Vaksin (sebagai pembicara)	11 Oktober 2017, Bandung	Inhouse, Bio Farma
		Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI		

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	"Analytical Method in Development and Manufacture of Drugs and Biologics"	21 Maret 2017, Bandung	Inhouse, Bio Farma
		Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Inhouse, Pricewater House Coopers
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
Disril Revolin Putra	Direktur SDM dan Umum	Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Executive Gathering	2017, Medan	Inhouse
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI
		Media Sosial Untuk Karyawan	08 November 2017, Bandung	Inhouse, Mediawave

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Audit Bio Farma telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Priyatno	Anggota (eksternal)	Sinergi BUMN/Anak Perusahaan dan <i>governance</i> dalam pengadaan barang dan jasa	2 - 3 November 2017, Bandar Lampung	Human Capital BUMN
		Instrumen keuangan PSAK 50, 55, 60 & PSAK 26	28 - 29 November 2017, Bandung	IAI Jabar
M. Asawir Harahap	Anggota (eksternal)	Instrumen keuangan PSAK 50, 55, 60 & PSAK 26	28 - 29 November 2017, Bandung	IAI Jabar

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui forum diskusi internal maupun eksternal.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2017, Sekretaris Perusahaan Bio Farma telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Bambang Heriyanto	Sekretaris Perusahaan	Transformasi Bisnis Lifescience	16 Januari 2017, Bandung	Pricewater House Coopers
		Sosialisasi <i>Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
		Forum Riset Lifescience Nasional 2017	30 - 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse,
		Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT INTERNAL AUDIT

Sepanjang tahun 2017, Unit Internal Audit Bio Farma telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Gandjar Trisnasari	Auditor Talks "Re-Branding Internal Audit untuk Peningkatan Efektivitas Peran di Perusahaan"	25 Oktober 2017, Jakarta
	National Anti Fraud Conference 2017 "Strategy Anti Fraud berbasis Nilai (Value Based)"	05-08 November 2017, Yogyakarta
Amar Yuliar S	Audit Intern Tingkat Manajerial	28 Agustus - 07 September 2017, Jakarta
	Pelatihan Persiapan Pensiun (<i>Financial Planning Training</i>)	07-08 September 2017, Bandung
Satia Permadi	Laporan Keuangan Konsolidasi	31 Jul - 01 Agustus 2017, Bandung
	National Anti Fraud Conference 2017 "Strategy Anti Fraud berbasis Nilai (Value Based)"	05-08 November 2017, Yogyakarta
Edi Iskandar	Sharing Session Review Certification (AAPM Indonesian Chapter- Jakarta)	07 Februari 2017, Jakarta
	Information Technology Infrastructure Library V.3 Foundation	25-28 Juli 2017, Jakarta
Sigit Prakosa	Professional Auditor Forum (PAF)	06 Maret 2017, Jakarta
	Pendidikan profesional Berkelanjutan	16-17 Maret 2017, Jakarta
	IAI International Seminar	29 Maret 2017, Jakarta
Johnny H. Gultom	Activity Based Costing (ABC) Method	28-29 Agustus 2017, Bandung
	Pemantapan ERP	25-26 September 2017, Bandung
Leni Lestari	Auditor Talk "Fraud In Procurement : Prevent, Detect and Correct"	05 - 06 Desember 2017, Jakarta

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Ai Sukarni	Pelatihan Persiapan Pensiun (<i>Financial Planning Training</i>)	07 - 08 September 2017, Bandung
	Balance Score Card	15 - 16 November 2017, Bandung
	Auditor Talk "Fraud In Procurement : Prevent, Detect & Correct"	05 - 06 Desember 2017, Jakarta
Emillina	Balance Score Card	15 - 16 November 2017, Bandung
Ahmad Agus R	Laporan Keuangan Konsolidasi	31 Jul - 01 Agustus 2017, Bandung
	Activity Based Costing (ABC) Method	28-29 Agustus 2017, Bandung
	PSAK 71 dan Implementasi PerMenBUMN No. PER-09/2013 dan SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang Transaksi Nilai Lindung	28 - 29 November 2017, Bandung
	Training Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE)	06 - 07 Desember 2017, Makassar
Dedi Mulyadi	Balance Score Card	13 - 14 Desember 2017, Bandung
	Training Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE)	29 - 30 November 2017, Bandung
Nurdin Wijaya	Legal Drafting Training	06 - 07 Desember 2017, Makassar
	Public Training Interpretasi Penilaian KPKU BUMN	10 - 12 Juli 2017, Jakarta
	Penerapan Whistleblower System dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD	26 - 28 Juli 2017, Jakarta
	Pelatihan Audit Internal Tk. Dasar I	28 September 2017, Surabaya
Dani Matias	Balance Score Card	23 Oktober - 03 November 2017, Jakarta
	Pemantapan ERP	29 November 2017, Bandung
	Penerapan Whistleblower System dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD	25 - 26 September 2017, Bandung
Benny Emerald H	Balance Score Card	28 September 2017, Surabaya
	PSAK 71 dan Implementasi PerMenBUMN No. PER-09/2013 dan SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang Transaksi Nilai Lindung	18 - 19 Desember 2017, Bandung
Yanuar Rasyid	Legal Drafting Training	28 - 29 November 2017, Bandung
		10 - 12 Juli 2017, Jakarta





Sumber Daya Manusia

“

Bio Farma mewujudkan implementasi membangun budaya inovasi yang telah menjadi *corporate value*. Bio Farma memiliki sistem pengelolaan inovasi (produk, proses maupun strategi) yang setiap tahunnya dievaluasi dan diberikan *Innovation Award* untuk inovasi dengan nilai kontribusi bisnis tertinggi.

Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan visi Perusahaan untuk Menjadi Perusahaan *Lifescience* Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global, maka strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia didasarkan pada pembangunan budaya kerja melalui implementasi nilai-nilai perusahaan, menyempurnakan struktur organisasi, penataan SDM, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan serta penyempurnaan tata kelola perusahaan.



ROADMAP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM di Bio Farma mengacu pada konsep manajemen *Human Capital* (HC), dimana karyawan sebagai mitra Perusahaan didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi individu agar mampu mencapai kinerja yang optimal. Bio Farma secara sistematis melakukan berbagai inisiatif untuk menyongsong era *Bioeconomy* atau *Lifescience Industry* di tahun 2030 era dimana bioteknologi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi *Human Capital*, Perusahaan menyusun *Roadmap* Pengembangan *Human Capital* menuju *Lifescience Industry* dengan tahapan sebagai berikut.



HUMAN CAPITAL SYSTEMS FIT IN INFRASTRUCTURE

Bio Farma merancang, mengembangkan dan menyelaraskan seluruh sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi mulai dari sistem organisasi, pengelolaan pekerjaan dan posisi, pengelolaan kompetensi, pengelolaan kinerja, pengelolaan *talent*, pengelolaan *reward and punishment* pada seluruh elemen proses bisnis yang meliputi aspek finansial, *good corporate governance*, internal proses dan pembelajaran serta pengembangan yang didukung oleh teknologi informasi serta hubungan industrial dengan karyawan yang baik serta memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

HUMAN CAPITAL SYSTEMS AND OPERATION IMPLEMENTATION

Bio Farma mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi tersebut dalam seluruh kegiatan pengelolaan SDM.

HUMAN CAPITAL SYSTEMS AND OPERATION SUSTAINABILITY

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi berjalan secara konsisten, *reliable* dan dapat digunakan sebagai dasar/basis untuk pengembangan karyawan yang sesuai dengan bisnis perusahaan.

EXCELLENCE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi berjalan secara konsisten, valid dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk seluruh kegiatan pengelolaan SDM.

EXCELLENCE HUMAN CAPITAL WITHIN SUPPORT TO BUSINESS

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dimana berperan sebagai *strategic partner* perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.

STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Untuk mencapai sasaran pengembangan *Human Capital* sesuai *Roadmap* yang telah disusun, maka Perusahaan menetapkan Strategi Pengembangan SDM (*Human Capital*) Bio Farma sebagai berikut:

1. Mendudukan kembali fungsi-fungsi organisasi yang berada di Bio Farma.
2. Mendudukan kembali pekerjaan dan posisi sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.
3. Menerapkan sistem pengelolaan dan pengembangan kompetensi karyawan baik secara *technical*, *soft* dan *managerial*.
4. Menerapkan penilaian kinerja karyawan berbasis KPI yang terintegrasi mulai dari KPI korporasi hingga individual.
5. Menerapkan sistem pengelolaan dan pengembangan karir karyawan dengan menggunakan pendekatan *talent management systems* yang berbasis pada kinerja dan kompetensi.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.
7. Menerapkan program *Work Life Balance* dalam berbagai aktivitas.
8. Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pencapaian hasil dan kinerja.
9. Menyiapkan aplikasi *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dengan ERP.
10. Menyederhanakan seluruh sistem dan kebijakan pengelolaan SDM.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan organisasi difokuskan pada aktivitas disain dan kajian struktur organisasi, evaluasi jabatan, disain dan kajian model pengembangan karir serta perencanaan kebutuhan *Human Capital* Perusahaan secara menyeluruh. Kegiatan pengembangan organisasi Perusahaan diarahkan untuk mendukung strategi dan pengembangan bisnis jangka Panjang Bio Farma sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Bio Farma terkait dengan pengembangan organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemetaan fungsi –fungsi dalam unit kerja;
- Melakukan analisis terhadap beban kerja masing – masing job posisi;
- Menata ulang kesesuaian antara fungsi, job posisi dan unit kerja serta individual; dan
- Menetapkan klasifikasi dan formasi *job position*.

STRUKTUR PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan *Human Capital* Perusahaan dijalankan oleh Divisi SDM yang dipimpin oleh Wawan Setiawan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Adapun struktur organisasi Divisi SDM adalah sebagai berikut.



Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Bagian di dalam Divisi SDM adalah sebagai berikut.

No.	Bagian	Job Description
1.	Bagian Manajemen Kinerja dan Kebijakan	Memastikan tersedianya kesisteman/kebijakan dan terkelolanya <i>Human Capital Management System</i> , terselenggaranya <i>performance management</i> dan budaya kerja yang terintegrasi dengan bisnis perusahaan melalui <i>review</i> , analisa, dan desain kebijakan, inisiatif strategis guna mendukung pertumbuhan bisnis sesuai dengan RJPP.
2.	Bagian Manajemen Pengembangan	Memastikan dan mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Internal, Eksternal, <i>On Job Training</i> , <i>Knowledge Sharing</i> , menyusun <i>Plan of Action</i> , Anggaran Biaya Pelatihan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pendidikan formal perusahaan, melalui pengelolaan kompetensi yang terintegrasi berdasarkan strategi yang ditetapkan dalam RJPP, peraturan GCG, regulasi WHO dan rumusan strategi perusahaan.
3.	Bagian Pelayanan SDM	Memastikan terkelolanya Administrasi SDM secara tepat dan akurat melalui implementasi aturan kepegawaian dan pelayanan SDM yang efektif guna mendukung tercapainya tujuan Divisi SDM dan kepuasan Karyawan berdasarkan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
4.	Bagian Hubungan Industrial dan Nilai Perusahaan	Memastikan implementasi program kerja berjalan dengan baik melalui optimalisasi sistem hubungan Industrial dan Nilai Perusahaan sesuai dengan strategi perusahaan guna mendukung pencapaian sasaran Divisi SDM berdasarkan peraturan pemerintah, Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam <i>Good Corporate Governance</i> .
5.	Bagian Manajemen Karir	Memastikan tersedianya data dan informasi yang akurat terkait dengan pemenuhan kebutuhan karyawan, karir, dan terminasi melalui analisa karir dan rekrutmen yang efektif guna mendukung terimplementasinya kebijakan rekrutmen, karir, dan terminasi berdasarkan sistem dan strategi SDM.



MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Bio Farma memiliki kebijakan perlakuan yang sama bagi seluruh karyawan. Bio Farma membuka kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan dalam meningkatkan kompetensi, pengembangan karir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender* dan kondisi fisik sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Perusahaan melaksanakan rekrutmen berdasarkan pada manajemen formasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) seiring dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. Bio Farma membuka kesempatan yang setara bagi para pelamar kerja, baik pria atau wanita.

Secara bertahap, mulai tahun 2014 Bio Farma telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang difabel sesuai dengan Surat Edaran No. SE 01/MBU/2014 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Dalam melaksanakan

rekrutmen calon karyawan, Perseroan memiliki beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan rekrutmen berbasis pada formasi yang tersedia pada unit kerja sesuai dengan hasil analisa organisasi dan *job position*;
- Menetapkan kebijakan sistem evaluasi berjenjang untuk penetapan sebagai Karyawan;
- Menetapkan *staffing* indeks sesuai dengan pertumbuhan bisnis perusahaan;
- Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan seleksi Karyawan; dan
- Melakukan evaluasi berjenjang untuk penetapan sebagai Karyawan.

Proses rekrutmen bersifat terbuka tanpa diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk menjaring dan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, proses rekrutmen diumumkan secara terbuka melalui berbagai media cetak nasional dan lokal (Harian Pikiran Rakyat, Kompas, Media Indonesia), media elektronik (website Perusahaan, media sosial Facebook dan Twitter, portal BUMN, radio) serta melalui acara *job fair* serta *roadshow* ke beberapa perguruan tinggi.

Setelah calon tersedia, langkah berikutnya adalah penyeleksian. Jenis tes yang diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan pekerjaan yang dibutuhkan. Adapun prosedur rekrutmen karyawan baru di Bio Farma adalah sebagai berikut:

- Lowongan pekerjaan dipublikasikan di media massa.
- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pendidikan.
- Pendaftaran kandidat dilakukan melalui *website*: www.biofarma.co.id pada menu tautan karier.
- Pemilahan kandidat terkait persyaratan akademis dilakukan oleh sistem secara otomatis.
- Verifikasi dan wawancara.
- Seleksi Tes Psikologi berupa psikotes dilakukan oleh pihak independen.
- Tes kesehatan yang komprehensif menjadi penentu akhir kelulusan kandidat.

Proses rekrutmen dan seleksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan atau yang diinginkan Perusahaan dengan apa yang didapat secara tepat.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh karyawan berupa pengetahuan, sikap, perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dan menduduki suatu jabatannya untuk mencapai *performance* standar yang ditetapkan. Aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi adalah: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Kompetensi merupakan tindakan yang disengaja yang mendorong sejumlah motif, karakter pribadi untuk melakukan suatu aksi menuju terbentuknya suatu hasil.

Dalam upaya menstandarisasi kemampuan, perusahaan menyusun Manual/Kamus Kompetensi yang digunakan sebagai standarisasi kompetensi untuk setiap *job position* yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 03971/DIR/X/16. Setiap kompetensi diturunkan menjadi matriks *training* untuk setiap *job position* yang bersifat *mandatory* sebagai usaha yang sistematis untuk mencapai suatu kompetensi. Kompetensi dan *training* yang telah diikuti menjadi prasyarat dalam proses promosi karyawan.

Melalui pelaksanaan pengembangan SDM, diharapkan terjadi peningkatan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga terlaksananya tugas-tugas secara efisien, efektif dan produktif yang imbangi dengan moral kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kualitas pribadi karyawan.

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

Perusahaan merancang program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan kompetensi. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Perusahaan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara *in-house* maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar. Jenis pendidikan dan pelatihan yang diterapkan oleh Bio Farma antara lain adalah sebagai berikut:

- Pelatihan Kompetensi;**
Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi matriks kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing Jabatan (*Role*).
- Keterampilan Teknis/Fungsional;**
Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis (*hard competency*) yang telah ditetapkan untuk masing-masing *Job Position*.
- Sertifikasi Keahlian;**
Pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi pemerintah (Kemenakertrans) atau regulator internasional untuk suatu posisi atau jabatan tertentu di area kerja tertentu.
- Pelatihan Manajerial;**
Pelatihan tentang kepemimpinan dan manajerial yang ditujukan bagi posisi pimpinan di perusahaan.
- Knowledge Sharing; dan**
Salah satu bentuk aktivitas *knowledge management* yang mengelola setiap karyawan yang telah menyelesaikan suatu pelatihan dan atau berpengalaman untuk memberikan *knowledge sharing* kepada karyawan yang lainnya.
- Pendidikan Formal Pasca Sarjana.**
Program pendidikan pasca sarjana yang diberikan kepada karyawan yang potensial dan berprestasi untuk meningkatkan kompetensi akademis dengan pendekatan berbasis riset terapan.

Jenis pengembangan dan biaya pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

BEASISWA PENDIDIKAN FORMAL PASCA SARJANA

Bio Farma memberikan beasiswa kepada karyawan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bio Farma untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-2 dan Strata-3. Penjurusan yang dipilih disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan baik dari sisi pengembangan organisasi, manajemen maupun rencana pengembangan produk sehingga tesis atau disertasi yang dihasilkan bukan bersifat riset dasar, tetapi sudah merupakan sebuah penelitian praktis yang bernilai bisnis.



Agar program Pendidikan formal sejalan dengan tuntutan dan strategi bisnis, Perusahaan mengirim karyawan untuk mengikuti program pascasarjana di perguruan tinggi yang menjalin kerja sama riset sehingga hasilnya memiliki nilai jual dan berkontribusi terhadap percepatan riset.

Sampai dengan tahun 2017 tercatat 20 (dua puluh) orang karyawan yang sedang menjalani program beasiswa pendidikan formal dengan rincian 15 (Lima belas) orang pada jenjang Strata-2 dan 5 (Lima) orang pada jenjang Strata-3. Proses seleksi peserta pendidikan formal pasca sarjana adalah sebagai berikut:

- Seleksi administrasi dengan kriteria: Masa kerja minimal 5 tahun, Penilaian Prestasi Kerja minimal B, memiliki ijazah S-1 yang relevan dengan rencana studi program beasiswa.
- Tes Potensi Akademik (TPA) melalui Pihak Independen, dalam hal ini BAPPENAS.
- Tes kemampuan Bahasa Asing untuk program beasiswa di luar negeri.
- Wawancara terhadap visi, misi dan rencana penerapan hasil studi.
- Evaluasi dan keputusan penugasan belajar (beasiswa).

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Pengelolaan pengetahuan atau *knowledge management* dilakukan untuk mengamankan aset pengetahuan (*knowledge asset*) yang dimiliki Perusahaan. Proses ini meliputi pengidentifikasian sumber pengetahuan, penyimpanan dan diseminasi pengetahuan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses *Knowledge Management* adalah sebagai berikut:

- Knowledge exchange**
Proses berbagi pengetahuan (*sharing*) antar karyawan dari suatu keahlian yang telah diterapkan di Perusahaan melalui sesi presentasi atau *coaching*. Dalam kegiatan ini juga ada *interview exit* bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerusnya. Selama tahun 2017, kegiatan *Knowledge Exchange* dilakukan sebanyak 5 (lima) event.

- **Community of Practice (CoP)**
Proses *sharing* di dalam komunitas praktisi internal untuk membahas suatu masalah teknis tertentu dengan tujuan menghimpun pengetahuan antar disiplin ilmu untuk merumuskan solusi. Selama tahun 2017, kegiatan CoP dilakukan sebanyak 5 (lima) *event*.
- **Lesson Learned Sharing**
Proses *sharing* pengetahuan pasca mengikuti suatu sesi pelatihan di luar Perusahaan (*public training*) atau *benchmarking* agar terjadi distribusi atau pemerataan pengetahuan khususnya di unit kerja masing-masing. Partisipasi karyawan dalam program ini adalah sebanyak 92% dari realisasi *public training*.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

PERFORMANCE MANAGEMENT

Perseroan senantiasa merujuk pada hasil yang dapat diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI) dalam membentuk pola manajemen kinerja. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi *human capital*, perlu segera dibangun, dibenahi dan dipelihara sistem *database* kepegawaian; sistem dan prosedur kerja, pola karir yang mendorong motivasi karyawan untuk bekerja; sistem kepegawaian dan remunerasi yang *fair* dan transparan; sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan yang menunjang dan memacu kemampuan teknis dan manajerial *human capital* sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.

REMUNERASI

Bio Farma memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan level pengupahan pada industri sejenis, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Kemampuan Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa besaran upah minimum yang diberikan kepada semua karyawan berada di atas upah minimum provinsi.

Selain itu, tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan. Remunerasi yang kompetitif akan mempertahankan karyawan yang mempunyai kompetensi tinggi. Remunerasi diberikan kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja yang adil. Perusahaan terus mengembangkan sistem remunerasi sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Sejak tahun 2014 Divisi SDM mengembangkan sistem remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja, *total reward* yang diterima karyawan terdiri dari:

1. *Pay for Person* (kompensasi terhadap kompetensi);
2. *Pay for Position* (kompensasi terhadap pekerjaan);
3. *Pay for Performance* (kompensasi terhadap kinerja);
4. Insentif.



Sistem penggajian karyawan dinyatakan dalam *grade* dan level jabatan, dari *grade* 17 (terendah) hingga *grade* 2 (tertinggi).

Jumlah Remunerasi yang Diterima oleh Karyawan per Bulan (*Take Home pay*) Selama 2 Tahun Terakhir

Level Jabatan	Grade	2017		2016		Kenaikan/Penurunan (%)	
		min	maks*	min	maks*	min	maks*
		1	2	3	4	3/1	6/2
Kepala Divisi	6-2	24.964.040	32.671.310	24.860.040	32.586.257	0,42	0,26
Kepala Bagian	8-3	14.967.042	24.024.157	16.311.229	23.989.161	(8,24)	0,15
Kepala Seksi	12-3	10.356.260	20.122.698	11.007.054	19.548.659	(5,91)	2,94
Staf	9-5	6.908.530	10.955.685	6.855.330	11.046.718	0,78	(0,82)
Staf Muda	13-5	5.378.450	13.903.432	5.762.871	13.801.195	(6,67)	0,74
Pelaksana	17-7	5.170.749	11.719.400	5.184.660	11.962.839	(0,27)	(2,03)

* besarnya remunerasi maksimal ditetapkan berdasarkan masa kerja

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Bio Farma memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi. Tunjangan tersebut berupa Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kesejahteraan, uang cuti tahunan, uang cuti panjang, uang pakaian dinas dan bonus tahunan (jasa produksi). Selain tunjangan tersebut, karyawan mendapatkan fasilitas seperti pengobatan (rawat jalan dan rawat inap), kantin, sarana olah raga, sarana ibadah dan rekreasi.

Dalam memberikan hak normatif kepada Karyawan, Bio Farma menetapkan:

- a. Jenis cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti panjang, cuti sakit, cuti bersalin, cuti haid, cuti gugur kandungan, cuti ibadah, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan perusahaan. Karyawan berhak mengambil cuti dan memperoleh ijin meninggalkan pekerjaan karena alasan penting sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan tunjangan hari tua dalam bentuk iuran pasti dengan *benefit* diperoleh pada saat pensiun berupa penghasilan bulanan, tabungan hari tua, asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya seluruh karyawan baik yang berstatus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (tenaga kontrak) mendapatkan seluruh fasilitas tunjangan dan insentif/bonus, kecuali uang pakaian dinas dan uang cuti panjang yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

Pengembangan karir adalah proses yang diciptakan untuk membantu karyawan agar lebih meningkatkan karirnya. Kesuksesan karir di Bio Farma dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Kebutuhan dan rencana bisnis perusahaan.
- b. Keuletan dan rencana dari karyawan.
- c. Kinerja dan *output* dari karyawan.

Pengembangan karir adalah untuk memperoleh jenjang karir dengan tujuan: memberikan kepastian arah karir jabatan, meningkatkan daya organisasi untuk menarik karyawan yang berkualitas, memudahkan manajemen dalam menyelenggarakan program pengembangan karir dan memudahkan administrasi kepegawaian dalam promosi, rotasi maupun demosi jabatan.

ENGAGEMENT KARYAWAN

Terkait dengan *engagement* karyawan, Perseroan telah menyusun beberapa kebijakan antara lain:

- Menetapkan kebijakan program *work life balance*;
- Menetapkan kebijakan penghargaan karyawan;
- Menetapkan kebijakan pengukuran kepuasan karyawan;
- Melakukan penerapan program *work life balance* yang mengacu pada *employee well being*;

- Melakukan penerapan program *recognition* Karyawan baik dalam bentuk penghargaan maupun bentuk *coaching*, *mentoring* dan penugasan khusus;
- Merancang kebijakan *reward* berdasarkan kompetensi, posisi dan kinerja.

Untuk meningkatkan *level of engagement* karyawan terhadap perusahaan, Bio Farma telah mengupayakan perubahan baik dari sisi organisasi perusahaan, kesisteman pengelolaan SDM dan program *reward and recognition* yang berbasis pada kinerja dan *output* karyawan dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing karyawan.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Hasil Survei Kepuasan karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa karyawan telah "Puas" dengan pengelolaan *Human Capital*, meskipun pada beberapa aspek masih ada yang harus diperbaiki. Survei kepuasan karyawan dilaksanakan pada Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga independensi.

TINGKAT TURNOVER KARYAWAN

Tingkat *turnover* karyawan di Bio Farma disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain. Pada tahun 2017, tingkat *turnover* karyawan di Perseroan mencapai 0,51%. Besarnya tingkat *turnover* karyawan khususnya disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun.

Tabel Tingkat *Turnover* Karyawan

Keterangan	2017	2016
Jumlah Karyawan <i>Resign</i>	5	1
Jumlah Seluruh Karyawan	1.186	1.171
Tingkat <i>Turnover</i> Karyawan	0,51%	0,09%

KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bio Farma mengakui kebebasan bagi para karyawan untuk berorganisasi di dalam lingkungan Perusahaan. Kebebasan berserikat bagi karyawan merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan internasional, yaitu ILO Convention 87 dan 98. Pada tanggal 1 April 1999, karyawan PT Bio Farma (Persero) membentuk organisasi bernama Himpunan Karyawan (HIKA) PT Bio Farma (Persero) dan pada tanggal 5 April 2010, berdiri organisasi bernama Forum Komunikasi Karyawan (Forwan).

Perusahaan mendorong serikat pekerja yang ada untuk dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antara karyawan dan Perusahaan agar menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak. Perundingan antara Serikat Pekerja dengan perusahaan terakhir telah dilakukan pada tahun 2012 yang menyepakati dan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2012-2014 yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 568/07/PKB/Perlind/2012 yang diperpanjang hingga tahun 2017.

Terkait dengan pelaksanaan hubungan industrial, Perseroan telah menyusun beberapa kebijakan antara lain:

- Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja (SP) dengan Bio Farma (Manajemen);
- Menetapkan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit untuk melakukan komunikasi rutin antara Bio Farma dan Serikat Pekerja (SP);
- Menetapkan tim pemeriksa/investigasi dari pihak perusahaan dan Serikat Pekerja terhadap berbagai kasus hubungan industrial;
- Menetapkan kebijakan disiplin dan tata tertib kerja;
- Menetapkan kebijakan waktu kerja;
- Melakukan penerapan disiplin untuk waktu kerja.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Terkait dengan pelaksanaan program pensiun, Perseroan telah menyusun beberapa kebijakan antara lain:

- Menetapkan kebijakan program transisi karir;
- Menetapkan kebijakan pensiun termasuk didalamnya peningkatan kesejahteraan pasca pensiun;
- Merencanakan kebijakan program manfaat pensiun;
- Melakukan program – program pelatihan untuk persiapan pensiun.

Program transisi karir dimulai dari 5 (lima) tahun sebelum pensiun. Program ini dilaksanakan salah satunya dalam bentuk Pelatihan Perubahan Paradigma untuk mempersiapkan mentalitas dari karyawan yang akan menghadapi masa pensiun. Satu tahun sebelum pensiun, karyawan dibebastugaskan dari pekerjaannya dan diberikan kewajiban untuk melakukan *knowledge sharing* baik pengetahuan maupun pengalaman kepada rekan kerja atau personil yang akan menggantikannya.

Hak-hak pensiun (pesangon, uang jasa pengabdian, DPLK, Tunjangan Hari Tua), Kedepannya dalam upaya meningkatkan *engagement level*, Perusahaan telah mempersiapkan sistem Kesejahteraan Pasca Pensiun, contohnya uang pensiun bulanan dan kesehatan pensiunan.

Sepanjang tahun 2017, Bio Farma telah melaksanakan program pelatihan untuk persiapan pensiun yang diberi nama Pelatihan Perubahan Paradigma dengan total peserta sebanyak 74 orang dan besaran biaya yang dikeluarkan sebesar Rp180 juta, adapun tema pelatihannya adalah pembelajaran masa persiapan pensiun dan *financial planning for career transition*.

PROFIL HUMAN CAPITAL

Penjelasan mengenai profil karyawan Bio Farma dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

INTERNALISASI CORPORATE CULTURE

Dalam upaya meningkatkan internalisasi *corporate culture*, Perusahaan menyelenggarakan program pelatihan tentang *corporate value* yang pada tahun 2017 di khususkan untuk karyawan pada level staf. Untuk menunjang pencapaian pengembangan SDM, Perusahaan akan melakukan internalisasi *corporate culture* secara masif, sistematis dan berkelanjutan yang berdasarkan pada semangat inovasi, sinergi dan efisiensi pada seluruh karyawan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang mengakomodir pengelola perubahan, *change agent* dan *culture festival*.



Innovation Award

Bio Farma mewujudkan implementasi membangun budaya inovasi yang telah menjadi *corporate value*. Bio Farma memiliki sistem pengelolaan inovasi (produk, proses maupun strategi) yang setiap tahunnya dievaluasi dan diberikan *Innovation Award* untuk inovasi dengan nilai kontribusi bisnis tertinggi.



Teknologi Informasi

“

Bio Farma memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) tidak hanya sebagai pendukung bisnis, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk melakukan percepatan bisnis Perseroan melalui perencanaan pengembangan TI.

Teknologi Informasi

Bio Farma telah menyusun *Master Plan (Roadmap) Teknologi Informasi* sebagai pedoman dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI) Perusahaan. Penyelarasan *roadmap* dan strategi manajemen TI juga selalu dilakukan agar pengembangan TI Perusahaan dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnis, dan mampu mengakomodir perubahan sesuai tuntutan pasar sehingga mendukung visi Bio Farma.



MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi (TI) sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha Perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di Bio Farma guna mendukung strategi bisnis Bio Farma sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh Perusahaan.

Agar Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di Perusahaan harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, termuat dalam sebuah *master plan*, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN.

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI Bio Farma menyusun *Master Plan (Roadmap) Teknologi Informasi*:

1. *Master plan* teknologi informasi disusun dan ditetapkan oleh Direksi.
2. *Master plan* teknologi informasi disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan.
3. *Master plan* teknologi informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Direksi melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *master plan* teknologi informasi secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan *master plan* teknologi informasi.

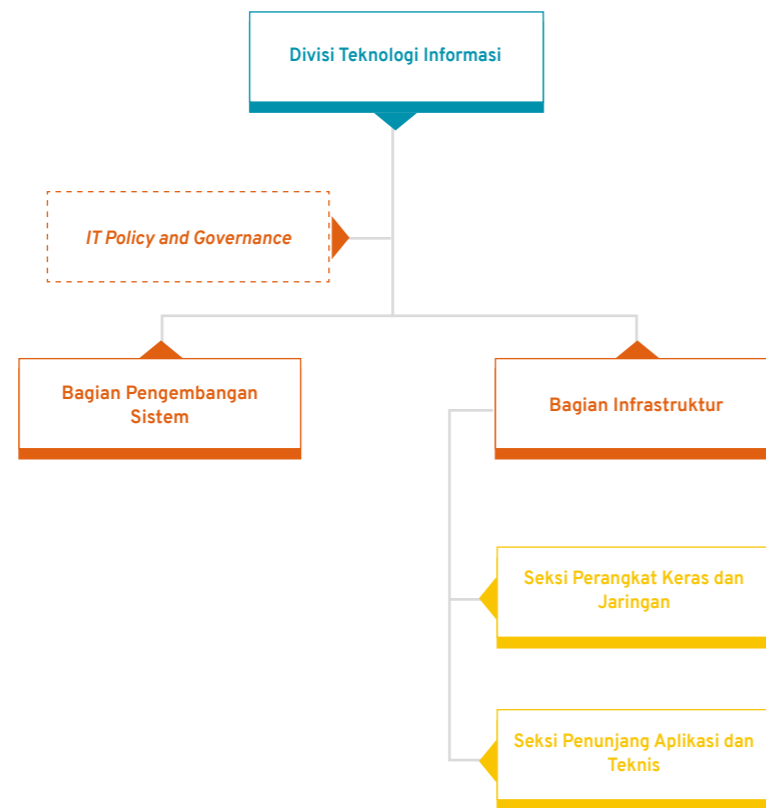
5. Hasil *monitoring* dan evaluasi berkala menjadi bagian dari Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan kepada RUPS setiap triwulan dan hasil evaluasi tahunan.
6. Direksi melakukan pengkajian ulang dan melakukan perubahan *masterplan* teknologi informasi yang telah ditetapkan apabila diperlukan untuk mengantisipasi perubahan bisnis dan perkembangan teknologi informasi.

Sebagai panduan kerja 5 tahunan Divisi Teknologi Informasi Bio Farma telah menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi tahun 2017-2021.



STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan dijalankan oleh Divisi Teknologi Informasi yang dipimpin oleh Hikmatullah Insan Purnama sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama. Adapun struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.



Adapun ruang lingkup tugas dari masing-masing Bagian di dalam Divisi Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.

IT Policy and Governance	Pengembangan Sistem	Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan teknologi informasi sesuai regulasi dan kebutuhan perusahaan. Menyusun/me-review <i>Information Technology Master Plan</i>. Menyusun dan me-review <i>Validasi Master Plan (VMP)</i>. Memastikan implementasi semua kebijakan, pedoman dan prosedur baku Teknologi Informasi sesuai regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Menyusun/me-review dokumen validasi sistem. Menyempurnakan aplikasi yang sudah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola perangkat keras, data/informasi dan infrastruktur teknologi informasi (sistem jaringan, komunikasi dan fasilitas pendukung lainnya). Mengelola layanan teknologi informasi.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

STRATEGI MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana induk teknologi informasi didefinisikan inisiatif strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan infrastruktur dan perangkat pendukung pengembangan karyawan melalui penataan organisasi berbasis produk dan Kemitraan Strategis
 - IT Infrastructure and IT System Based on Product*
 - IT Infrastructure and IT System for e-Learning*
 - IT for Bio Farma Strategic Partnership (Managed Service or Invest by Subsidiary)*
 - IT for Project Management and Collaboration Research (BioInformatics)*

- Menerapkan Kepatuhan terhadap regulasi internasional dan dalam negeri serta sistem mutu sesuai standar internasional
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 82 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 mengenai Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
 - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
 - External Quality Framework: GAMP, COBIT, TOGAF, ITIL, PMBOK, ISO-27001, ISO-38500, ISO-20000, ISO-31000*
- Pengendalian Capex dan Opex
 - IT for Green Office*
 - IT for Project Management*
 - IT for Cost Monitoring*
- Pertumbuhan Revenue dan Menguasai Pasar
 - Improve Customer Relationship Management*
- Percepatan pengembangan Kapasitas Produksi/Manufaktur dengan menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas produk serta mengefektifkan pemanfaatan aset
 - Improve Infrastructure Quality with Redundant Infrastructure and Optimize Cost*
 - Integrate Production System with Business System*

- masukkan dan menghasilkan suatu keluaran yang akan digunakan sebagai informasi.
 - Sistem *Komputerisasi (Computerized System)*. Merupakan gabungan beberapa *software*, perangkat keras (*hardware*), jaringan komputer (*networking*), sistem prosedur (Prosedur Standar Pengoperasian - SOP), *User*, interkoneksi proses masukan dan keluaran informasi yang digunakan dalam pelaporan atau kontrol sistem informasi.
 - Validasi Sistem *Komputerisasi atau Computer System Validation (CSV)*. Proses pengujian *software* atau sistem komputerisasi untuk memastikan *software* atau sistem komputerisasi telah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna.
 - Kualifikasi *Hardware*. Proses untuk memastikan *hardware* yang akan digunakan pada sistem komputerisasi sudah dijamin konfigurasi dan performansinya.
 - Pembuatan dan pengembangan perangkat lunak atau *Software* dikelola dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan konsep *System Development Life Cycle (SDLC)*.
 - Proses validasi *software* atau sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memberi jaminan kualitas.
- Kebijakan Keamanan Informasi:
 - Perusahaan memiliki wewenang penuh terhadap penerapan keamanan sistem informasi untuk melindungi aset informasi perusahaan dan menjamin kelangsungan bisnis perusahaan.
 - Aset informasi Bio Farma adalah milik Perusahaan yang diadakan untuk keperluan usaha/operasional Perusahaan dan untuk menjamin *kefidsensialitas*, integritas, dan ketersediaan informasi serta efektivitas, dan efisiensi layanan TI.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Kebijakan Pengembangan Perangkat Lunak dan Validasi Sistem *Komputerisasi*:
 - Perangkat lunak atau *Software*. Yaitu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. *Software* dapat mengolah



- c. Risiko TI dikelola oleh perusahaan untuk menjamin keamanan pada tata kelola TI Bio Farma.
3. Kebijakan Data Elektronik (*Electronic Record*) dan Tanda Tangan Elektronik (*Electronic Signature*):
 - a. Data Elektronik (*Electronic Record*). Data elektronik merupakan kombinasi dari teks, grafik, angka, audio, gambar, atau informasi lain dalam bentuk digital yang dapat dibuat, dimodifikasi, diperbaharui, disimpan, diambil atau didistribusikan oleh sistem komputer.
 - b. Tanda Tangan Elektronik (*Electronic Signature*). Tanda Tangan Elektronik merupakan kompilasi data komputer dari simbol-simbol yang dieksekusi, diadopsi atau diotorisasi yang dilegalisasi setara dengan tanda tangan manual.
 - c. Data atau informasi berupa data elektronik (*electronic record*) yang merupakan *output* pengolahan dari sistem komputerisasi dan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) di Bio Farma diberlakukan penggunaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan data proses manual dan tanda tangan manual yang selama ini berlaku.

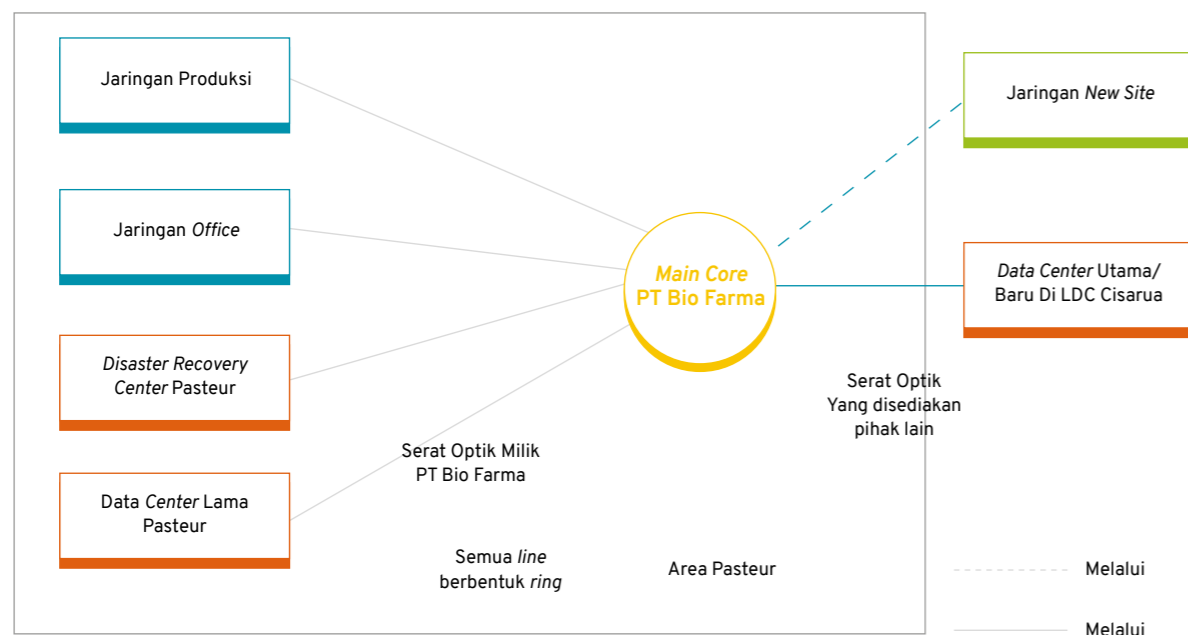
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Infrastruktur teknologi merupakan pondasi yang mendukung perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnisnya. Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data (*data center*), atau mungkin terdesentralisasi dan tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Infrastruktur TI Bio Farma saat ini sudah menjadi sarana dan prasarana TI yang mendukung jalannya bisnis perusahaan.

Sesuai dengan tatakelola BUMN dalam pengelolaan Infrastruktur ini dibagi dalam kelompok besar:

1. Pengelolaan Jaringan komputer.
2. Pengelolaan *Hardware*.
3. Pengelolaan *Software*.
4. Pengelolaan data dan Informasi.

Diagram blok infrastruktur Bio Farma dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Adapun blok modul tersebut terdiri dari:

1. Blok Modul *Main Core*: Merupakan penghubung ke semua blok modul jaringan yang ada di PT Bio Farma (Persero).
2. Blok Modul Jaringan Produksi: Merupakan jaringan yang menghubungkan setiap piranti yang berhubungan dengan produksi. Meliputi jaringan komputer produksi, jaringan IP camera Produksi (CCTV), jaringan terkait peralatan dan Telemetry, dan SCADA.
3. Blok modul jaringan *Office*: Merupakan jaringan yang menghubungkan setiap piranti yang berhubungan dengan aplikasi *Office* atau bisnis. Meliputi jaringan telekomunikasi data dan suara.
4. Blok modul *back up data center/transit*: Merupakan jaringan *data center* yang berfungsi sebagai cadangan/replikasi data dari *data center* Pasteur, dan merupakan *data*

center transit untuk penghubung ke DC Cisarua, dalam kondisi darurat ataupun replikasi Data.

5. Blok modul *data center* Pasteur: Merupakan jaringan *data center* yang berfungsi sebagai *data center* untuk area Pasteur PT Bio Farma (Persero) meliputi *server office* dan produksi.
6. Blok modul *data center* Utama di *Learning Development Center* (LDC): Merupakan jaringan *data center* yang berfungsi sebagai *data center* utama untuk seluruh aktivitas data PT Bio Farma (Persero). Semua jaringan di PT Bio Farma (Persero) yang dibangun harus tersambung dengan *backbone* berbasis serat optik dan berbentuk topologi *bus-star* baik yang berada di area Pasteur ataupun di Area Cisarua. Beberapa aktivitas terkait pengelolaan Infrastruktur meliputi:
 1. Pengelolaan Jaringan.
 - a. Pengelolaan Rutin Perangkat Jaringan.
 - b. Pengelolaan *Problem* jaringan.
 - c. Pengelolaan Administrasi Jaringan.
 - d. *Network Security*.
 - e. Pemeliharaan serat optik (*multi-mode* dan *single mode*).
 - f. Pengujian koneksi Jaringan.
 - g. Pemeliharaan *Core Switch* dan *Access Switch*.
 - h. Pemeliharaan *Firewall*.
 - i. Pemeliharaan *WiFi*.
 - j. Perancangan jaringan Produksi.
 - k. Perancangan Jaringan untuk gedung baru.
 2. Pengelolaan *Software*.
 - a. Pengelolaan Aplikasi *Live*: Mengelola aplikasi-aplikasi yang sudah *live* yang selesai dikembangkan serta pengelolaan *change request* (CR) atas aplikasi yang sudah *live* yang dikelola menggunakan *helpdesk* (aplikasi *Customer Care*).
 - b. Pengelolaan Lisensi *Software*: Mengelola lisensi-lisensi terkait *software original* yang sudah dibeli mulai dari *update data* dan perpanjangan lisensi. Serta *monitoring* penggunaan lisensi tersebut.
 3. Pengelolaan *Hardware*.
 - a. *Preventive Maintenance Server*: *Preventive maintenance server* ini dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuatkan dalam 1 (satu) tahun. Meliputi *server Domain Controller* (DC), *server Database*, *Mail Server*, *File Server* dan *DMZ Server*. Hasil *preventive maintenance* ini dilaporkan juga ke Divisi *Quality Assurance*.



- b. *Maintenance Storage.*
- c. Pengelolaan Komputer PC, *Notebook* dan perangkat lainnya.
- 4. Pengelolaan Data dan Informasi.
 - a. Pengelolaan *Mail box.*
 - b. Pengelolaan Penggunaan Internet.
 - c. *Backup* dan *Restore* data.
 - d. *Monitoring Data File Server.*
 - e. Pengelolaan *Antivirus.*

Terkait pengelolaan infrastruktur di atas berdasarkan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Baku yang berlaku di Bio Farma dan aturan tata kelola dari pihak eksternal.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

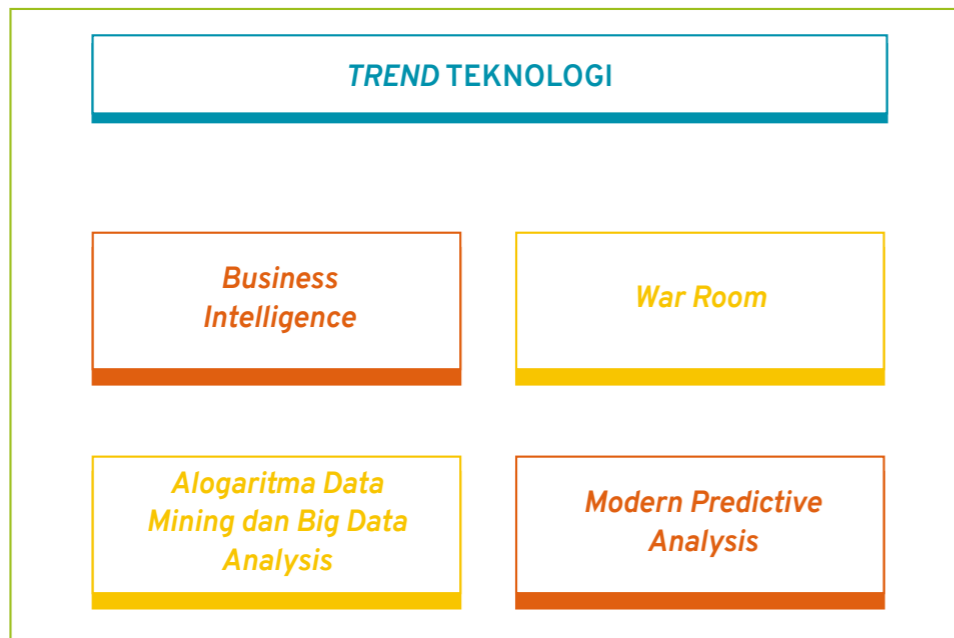
Tata kelola teknologi informasi merupakan tanggung jawab Direksi dan manajemen eksekutif organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.

Investasi teknologi informasi saat ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan kerja, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan TI tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke unit yang hanya khusus menangani TI secara teknis (*IT Function*), melainkan juga harus menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen.

Hal ini merupakan paradigma baru dalam mengelola teknologi informasi yang disebut dengan tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*). Tata kelola TI merupakan suatu komitmen, kesadaran dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap seluruh sumber daya TI, yang mencakup sumber daya komputer (*software, brainware, database* dan sebagainya) hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN/Internet.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

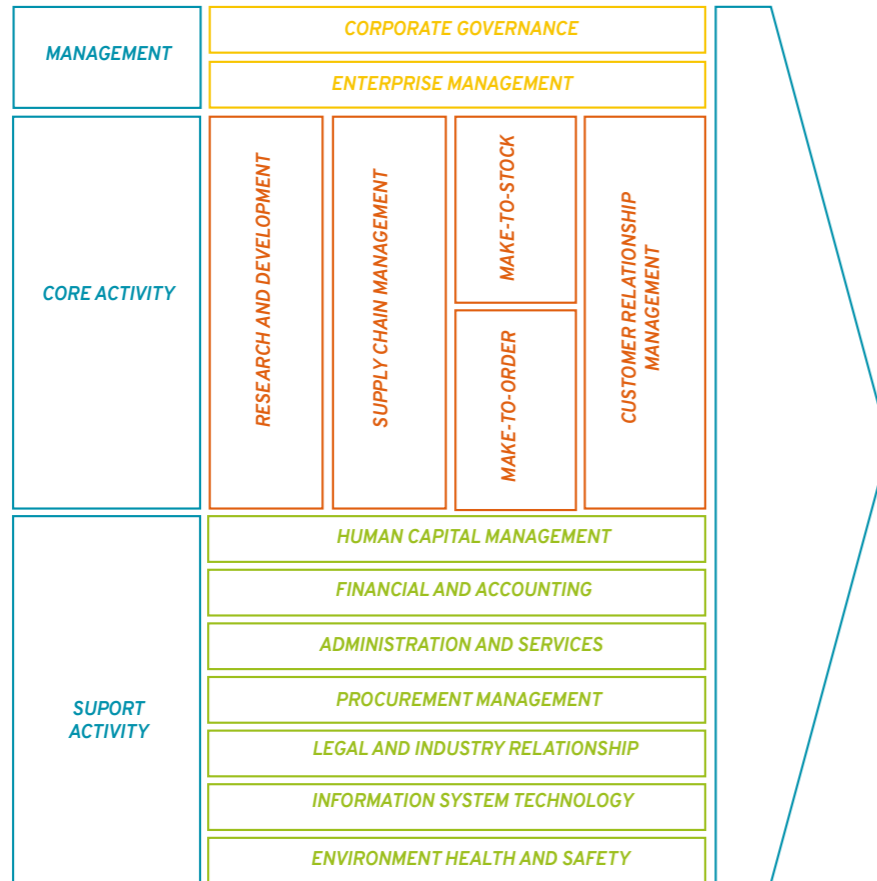
Sejalan dengan tren teknologi, Bio Farma memiliki rencana untuk menerapkan teknologi sesuai dengan tren yang sedang berkembang saat ini.



Adapun beberapa *trend* teknologi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- *Business Intelligence* (BI) sebagai sarana untuk menggali data internal dan eksternal Bio Farma, mengolahnya menjadi suatu informasi yang bernilai dan berguna dalam pengambilan keputusan yang efektif;
- *War Room* berfungsi sebagai sarana pengumpulan berbagai informasi pada waktu yang sebenarnya dan berkaitan dengan kinerja Bio Farma;
- *Modern predictive analysis* merupakan cara analisis mutakhir berdasarkan informasi yang diterima, dikumpulkan dan dianalisis sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi Bio Farma;
- Perolehan Informasi yang berasal dari *business intelligence* dan *war room* menghasilkan informasi yang mudah dipahami, dapat dipercaya dan akurat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, *excellence decision* dapat di lakukan secara cepat dan tepat serta menjadi keunggulan Bio Farma;
- Penggunaan algoritma *data mining* dan *big data analysis* sudah menjadi kebutuhan perusahaan kelas dunia.

Secara umum pengembangan aplikasi yang akan dikembangkan dan disempurnakan sampai tahun 2021 berdasarkan arsitektur bisnis sebagai berikut.



Sesuai arsitektur bisnis tersebut aplikasi-aplikasi yang dibangun dan disempurnakan tidak hanya mendukung aktivitas inti (*core activity*) perusahaan, namun mendukung keperluan pendukung pengambilan keputusan manajemen, dan aktivitas pendukung lainnya.

Modul-modul aplikasi yang harus tersedia sesuai dengan arsitektur bisnis tersebut adalah sebagai berikut.

CORPORATE GOVERNANCE													
ENTERPRISE MANAGEMENT													
Strategic Analysis		Corporate Planning		Quality Assurance		Dashboard Management		Business Intelligence		Corporate Social Responsibility			
RESEARCH AND DEVELOPMENT	Research Inquiry	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	Regulatory Agency Approval	Animal Production	MAKE-TO-STOCK		MAKE-TO-ORDER		CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Clinics & Vaccine Services	Prospecting Marketing	Selling	Retaining
	Clinical Trials				Customer Inquiry								
	Classification and Registration				Demand Management		Sales order Procecomh						
	Regulatory Agency Approval				Manufacturing Executing System								
					QC								
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT			People Development				Union-HR Industrial Mangement						
FINANCIAL AND ACCOUNTING			General ledger	Taxation	Cost Accounting	Account Receivable & Account Payable		Treasury & Cash Flow Management		Account Asset Management			
ADMINISTRATION AND SERVICES			Office & Workflow Management		Global Business Relationships		Infrastructure & Facility Management		Helpdesk Management				
PROCUREMENT MANAGEMENT			Third Party/Vendor Management		Purchase Order Processing			Invoicing					
LEGAL AND INDUSTRY RELATIONSHIP			Legal Law & Industrial Disputes		Patent, Intellectual Property and Capital Management			Industrial and Government Relationships					
INFORMATION SYSTEM TECHNOLOGY			IT Planning and Organisation		IT Project and Implementation		IT Control and Monitoring		IT Audit and Governance				
ENVIRONMENT HEALTH AND SYSTEM			Health and Waste Management		Safety Management			Security Management					





Analisis dan Pembahasan Manajemen

“

Bio Farma telah memperkokoh keunggulan kompetitif yang dimiliki dengan tetap konsisten berkontribusi di bidang pengembangan dan produksi vaksin baik di tingkat nasional maupun global yang fokus untuk produk-produk Biologi dan saat ini bertransformasi menuju Bio Farma *Lifescience*.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

“ Selama tahun 2017 Bio Farma berhasil membukukan Laba Bersih mencapai Rp525,36 miliar mengalami peningkatan sebesar 4,85% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp501,04 miliar.



TINJAUAN PEREKONOMIAN

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan ekonomi global berlanjut semakin kuat dan merata pada 2017. PDB dunia tumbuh 3,7% pada 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2016 sebesar 3,2%. Pertumbuhan global ditopang oleh akselerasi pemulihan ekonomi negara maju dan berlanjutnya pemulihan ekonomi negara berkembang. Sumber pertumbuhan ekonomi juga mulai meluas ke investasi, dari sebelumnya yang lebih terfokus pada konsumsi. Perbaikan investasi selanjutnya mendorong volume perdagangan dunia tumbuh meningkat hingga 4,5%, lebih tinggi dari capaian tahun 2016

sebesar 1,5%. Perkembangan tersebut juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas global, terutama komoditas energi dan logam. Perkembangan global yang kondusif pada gilirannya berkontribusi positif pada perbaikan di pasar keuangan global, termasuk dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Respons kebijakan yang ditempuh oleh berbagai negara secara umum diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga kesinambungan pemulihan tersebut. Arah kebijakan ditempuh dengan strategi yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Dari kebijakan moneter, beberapa negara maju secara gradual mulai memasuki fase normalisasi untuk merespons pemulihan ekonomi yang cukup kuat dan diikuti dengan prospek

inflasi yang diperkirakan mulai naik. Sementara itu, sebagian besar negara berkembang masih melakukan kebijakan moneter longgar guna mendukung pemulihan ekonomi.

Dari kebijakan fiskal, banyak negara masih memberikan peran besar kepada fiskal dalam menopang perbaikan ekonomi, meskipun beberapa negara menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Pemulihan kondisi ekonomi global juga direspons melalui kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi permasalahan di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial. Kerja sama internasional juga terus dilakukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif dengan resiliensi yang terjaga.

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2017, Bank Indonesia, 28 Maret 2018

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan ekspor komoditas yang selanjutnya mendorong peningkatan investasi non bangunan, khususnya pada korporasi yang berbasis komoditas. Stimulus fiskal oleh pemerintah terkait pembangunan proyek infrastruktur juga mendorong investasi bangunan. Di sisi lain, investasi pada sektor-sektor non komoditas belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh terbatas khususnya pada belanja makanan dan pakaian disertai pergeseran pola konsumsi ke *leisure*, serta terjadi preferensi untuk menunda konsumsi pada masyarakat golongan menengah atas. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik bersumber dari lebih meratanya investasi, berlanjutnya stimulus fiskal Pemerintah, dan meningkatnya ekspor sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1-5,5%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2017 mencatat surplus yang relatif besar dengan defisit transaksi berjalan yang terkendali di bawah 2,0% dari PDB. Besarnya surplus NPI terutama ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang meningkat dibandingkan 2016, khususnya dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan membaiknya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan terkendali, terutama didukung oleh kenaikan surplus nonmigas, di tengah defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer yang masih cukup besar, antara lain terkait defisit

jasa transportasi dan pembayaran repatriasi hasil investasi asing. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2017 tercatat sebesar 125,97 miliar dolar AS, meningkat dari 116,36 miliar dolar AS pada akhir 2016. Cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan pada 2018 diperkirakan masih tetap terkendali dalam batas yang aman meskipun meningkat menjadi 2,0-2,5% dari PDB, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik.

Rupiah cenderung stabil pada 2017 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada awal triwulan IV 2017. Nilai tukar rupiah bergerak stabil hingga September dan melemah pada bulan Oktober dipengaruhi faktor eksternal. Pelemahan Rupiah tersebut sejalan dengan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia terhadap dolar AS seiring normalisasi kebijakan moneter, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, dan rencana reformasi pajak di AS. Pada November, Rupiah kembali menguat seiring dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga dan prospek perekonomian yang tetap baik sehingga secara *point-to-point* (ptp) Rupiah menguat sebesar 0,27% (mtm) ke level Rp13.526 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Inflasi 2017 terjaga tetap rendah sekitar 3,5% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi $4 \pm 1\%$. Terkendalnya inflasi terutama disumbang oleh rendahnya inflasi *volatile food* ditopang oleh pasokan yang memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan oleh Pemerintah, dan harga pangan global yang rendah. Inflasi *volatile food* tersebut merupakan yang terendah dalam 14 tahun terakhir. Inflasi inti juga menurun sejalan dengan ekspektasi yang terjangkau, nilai tukar yang stabil, dan terbatasnya permintaan domestik. Sementara itu, inflasi *administered prices* meningkat terutama karena kenaikan tarif listrik 900 VA pada paruh pertama tahun 2017, sebagai bagian dari reformasi subsidi energi. Pada November 2017, inflasi IHK tercatat sebesar 0,20% (mtm) sehingga secara kumulatif (Januari - November) dan tahunan masing-masing mencapai 2,87% (ytd) dan 3,30% (yoy). Ke depan, inflasi 2018 diperkirakan akan tetap terkendali pada level yang rendah dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengendalian inflasi.

(Disarikan dari "Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2017" Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 15 Desember 2017)

ANALISIS INDUSTRI FARMASI

Industri farmasi nasional terus menunjukkan kinerja yang semakin positif dengan mampu menyediakan kebutuhan obat untuk pasar dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami pertumbuhan cukup tinggi mencapai 10,97% (yoy) pada Triwulan IV tahun 2017 lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2016 sebesar 3,13 (yoy).

Nilai pasar produk farmasi di Indonesia sekitar USD4,7 miliar atau setara dengan 27 persen dari total pasar farmasi di ASEAN. Industri farmasi diharapkan dapat lebih mendominasi pasar domestik dan ekspor. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia tengah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengcover 160 juta penduduk. Program tersebut membutuhkan penyediaan obat dalam jumlah besar terutama obat generik. Oleh karena itu, industri farmasi dalam negeri juga dituntut agar menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif. Dalam hal ini, pemerintah tentunya akan memprioritaskan produsen lokal dalam penyediaan obat pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor andalan yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, industri farmasi berkontribusi sebesar Rp54,4 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 40 ribu orang.

Kemenperin berkomitmen untuk melakukan pendalaman struktur di industri farmasi ini sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Untuk mendorong pengembangan bahan baku farmasi di dalam negeri, pemerintah telah menyediakan beberapa insentif, salah satunya melalui fasilitas pajak penghasilan. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Di samping itu, pemerintah juga gencar menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menginstruksikan kepada 12 (dua belas) kementerian dan lembaga dapat saling bersinergi dan mendukung dalam pengembangan industri farmasi dan bahan farmasi untuk mendorong kemandirian obat nasional.

(Disarikan dari "Analisis Perkembangan Industri" Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agustus 2017; Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS), Edisi 93, Februari 2018)

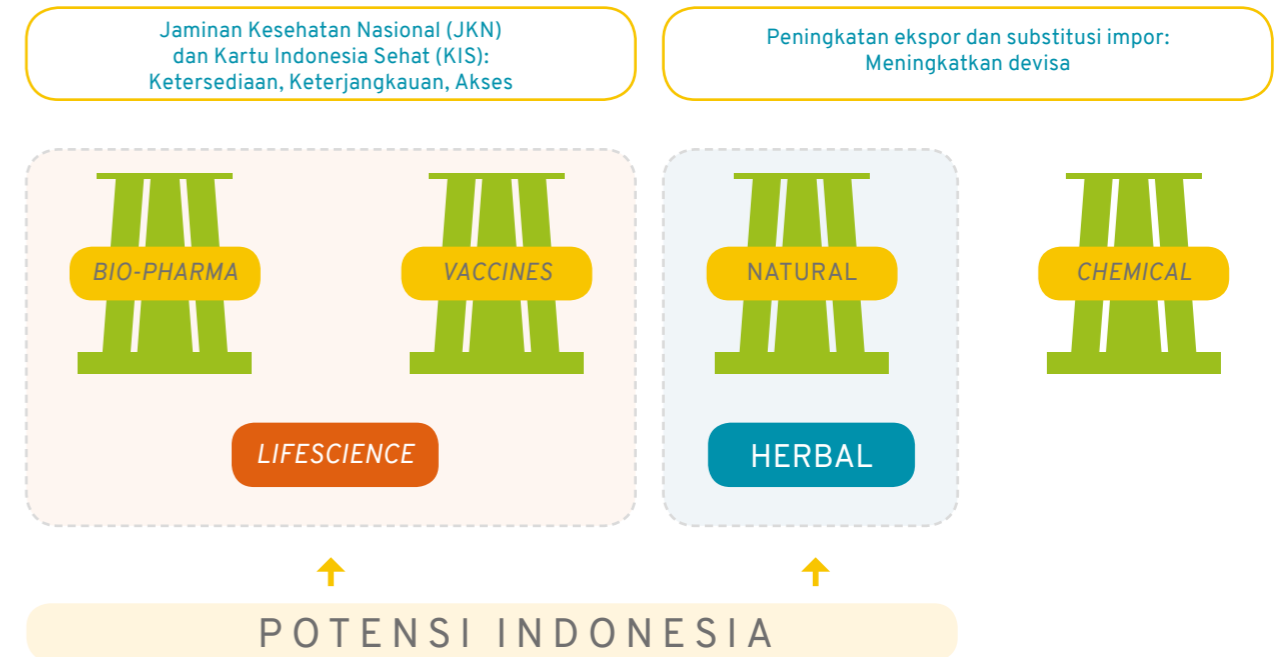


ANALISIS POSISI PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI FARMASI GLOBAL DAN NASIONAL

INDUSTRI FARMASI INDONESIA



JUMLAH INDUSTRI



Sumber: Incident Information Management System (IIMS) Health dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pada industri farmasi Indonesia, saat ini terdapat 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Kimia Farma, Indo Farma, Phapros dan Bio Farma serta 178 Perusahaan lokal dan 24 *Multi Nasional Company* (MNC). Perusahaan-perusahaan farmasi BUMN tersebut telah diberikan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Khusus Bio farma adalah fokus untuk produk-produk Biologi dan saat ini bertransformasi menuju Bio Farma *Lifescience*, dengan produk utama vaksin. BUMN yang lainnya akan fokus kepada produk herbal, *natural* serta *chemical*.

Dalam Rencana Jangka Panjang Bio Farma (RJPP) tahun 2017-2021, menggunakan analisis SWOT, Bio Farma berada pada posisi tumbuh dimana secara internal Bio Farma mempunyai kekuatan lebih besar dibanding kelemahannya dan secara eksternal mempunyai peluang lebih besar dibanding dengan ancamannya. Demikian pula dengan analisis daya tarik industri dan kekuatan bisnis, Bio Farma berada pada posisi tumbuh dimana industri vaksin tergolong sedang dengan kekuatan bisnis tergolong rata-rata. Pada posisi tumbuh, Bio Farma menerapkan strategi melalui integrasi horisontal.

Pada tahun 2017, Bio Farma meningkatkan kapasitas produksi produk akhir dan bulk serta melanjutkan pengembangan vaksin baru. Selain itu Bio Farma tetap mempertahankan sistem manajemen mutu, lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja (K3) serta mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Bio Farma saat ini telah memiliki 11 (sebelas) produk yang terqualifikasi oleh World Health Organization (WHO), yaitu Vaksin TT (10 ds/vial), Vaksin Td (10 ds/vial), Vaksin DTP (10 ds/vial), Vaksin TOPV 10 dan 20 dosis, Vaksin BOPV (20 ds/vial), Vaksin Campak (10 ds/vial), Vaksin HJ VHB Bayi (1 ds/pouch), Vaksin DTP HB HIB 5 ds, Vaksin mOPV 1, Vaksin DT dan Vaksin DTP-HB. Selain memperoleh prequalifikasi (PQ) WHO untuk kualitas produk, Bio Farma pun memperoleh prequalifikasi WHO untuk kualitas laboratorium, sedangkan untuk sistem manajemen mutu, Bio Farma telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) yang terintegrasi dengan lingkungan (ISO 14001:2004) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) – OHSAS 18001:2007 dari PT Lloy'd Register Quality Assurance.

Dengan dimilikinya sertifikasi WHO, ISO dan OHSAS serta komitmen tinggi menjadi *green company* dapat menjadikan salah satu kekuatan Bio Farma untuk bersaing dengan Perusahaan lain di pasar global.

PERAN STRATEGIS BIO FARMA

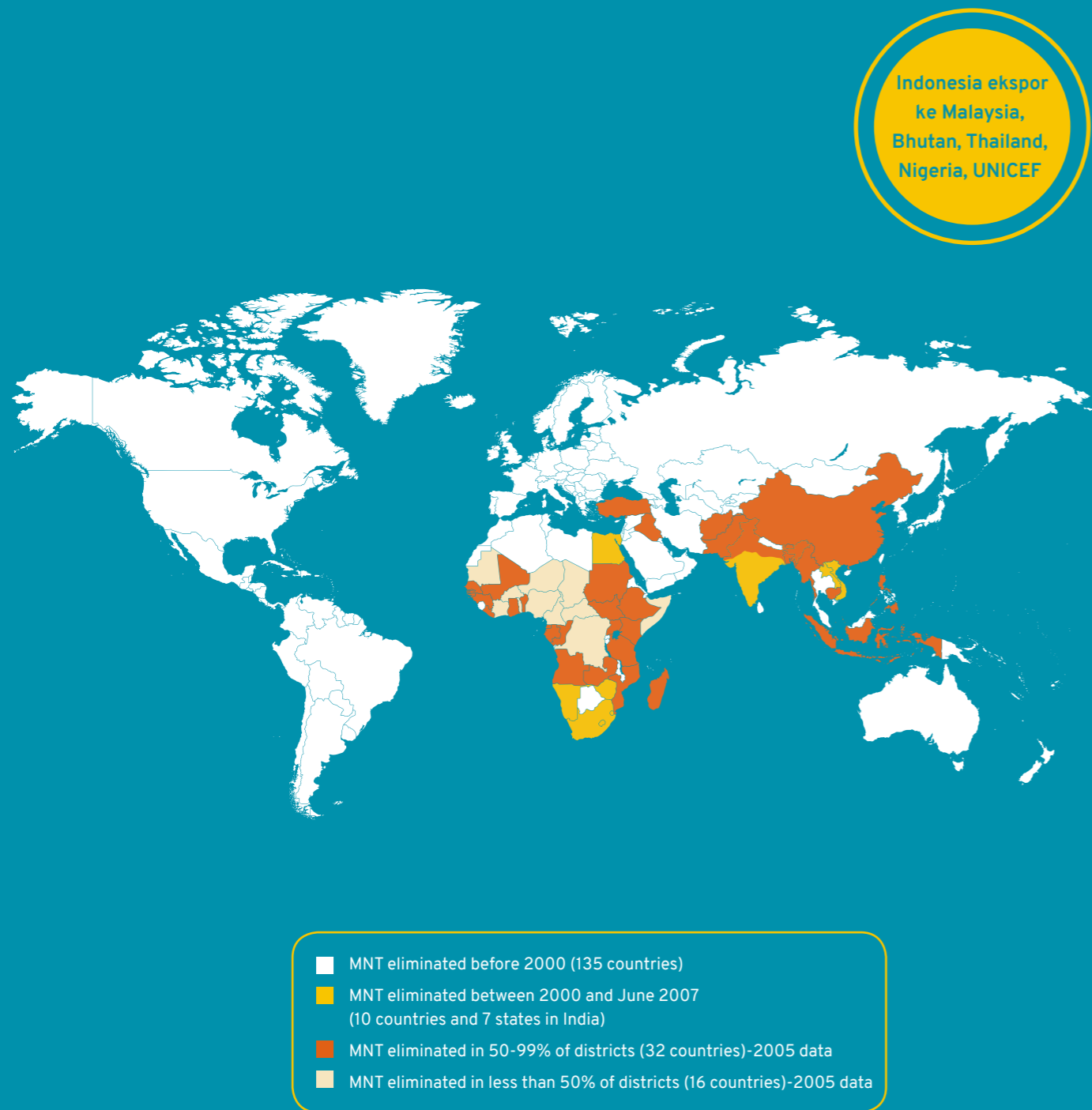
Bio Farma memiliki peran yang sangat strategis di bidang pengembangan dan produksi vaksin baik di tingkat lokal maupun internasional. Di tingkat lokal merupakan satu-satunya produsen yang memasok kebutuhan vaksin *Expanded Programme on Immunization* (EPI) untuk kebutuhan masyarakat Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI, sehingga suplai vaksin secara nasional dapat diamankan. Bio Farma merupakan salah satu anggota Dewan Riset Nasional yang salah satu tugasnya mempercepat pengembangan vaksin di Indonesia sehingga kemandirian bangsa di bidang vaksin dapat segera terwujud, hal ini sesuai dengan program Pemerintah yang berupaya untuk menciptakan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang termasuk kesehatan.

Di tingkat internasional, Bio Farma memiliki peran yang strategis sebagai *global player* dalam memasok kebutuhan vaksin dunia melalui *World Health Organization* (WHO)/*United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), karena merupakan salah satu produsen vaksin yang telah lulus prakualifikasi WHO. Peran strategis lainnya saat ini adalah terpilih sebagai ketua organisasi *Developing Countries Vaccine Manufacturers Network* (DCVMN) dan salah satu anggota *Global Alliance for Vaccines Immunization* (GAVI), sehingga semakin meningkatkan posisi tawar Bio Farma di organisasi tersebut. Di *Organization of Islamic Countries* (OIC) peran strategis Bio Farma semakin diakui, yang ditandai dengan banyaknya tawaran dari Negara-negara islam untuk melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi vaksin diantaranya dari Negara Iran dan Arab Saudi.

Bio Farma merupakan pemimpin dalam industri vaksin di Indonesia, dengan filosofi mengabdikan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sampai saat ini Bio Farma telah memainkan peranan penting dalam pemberantasan penyakit menular di Indonesia dan dunia.

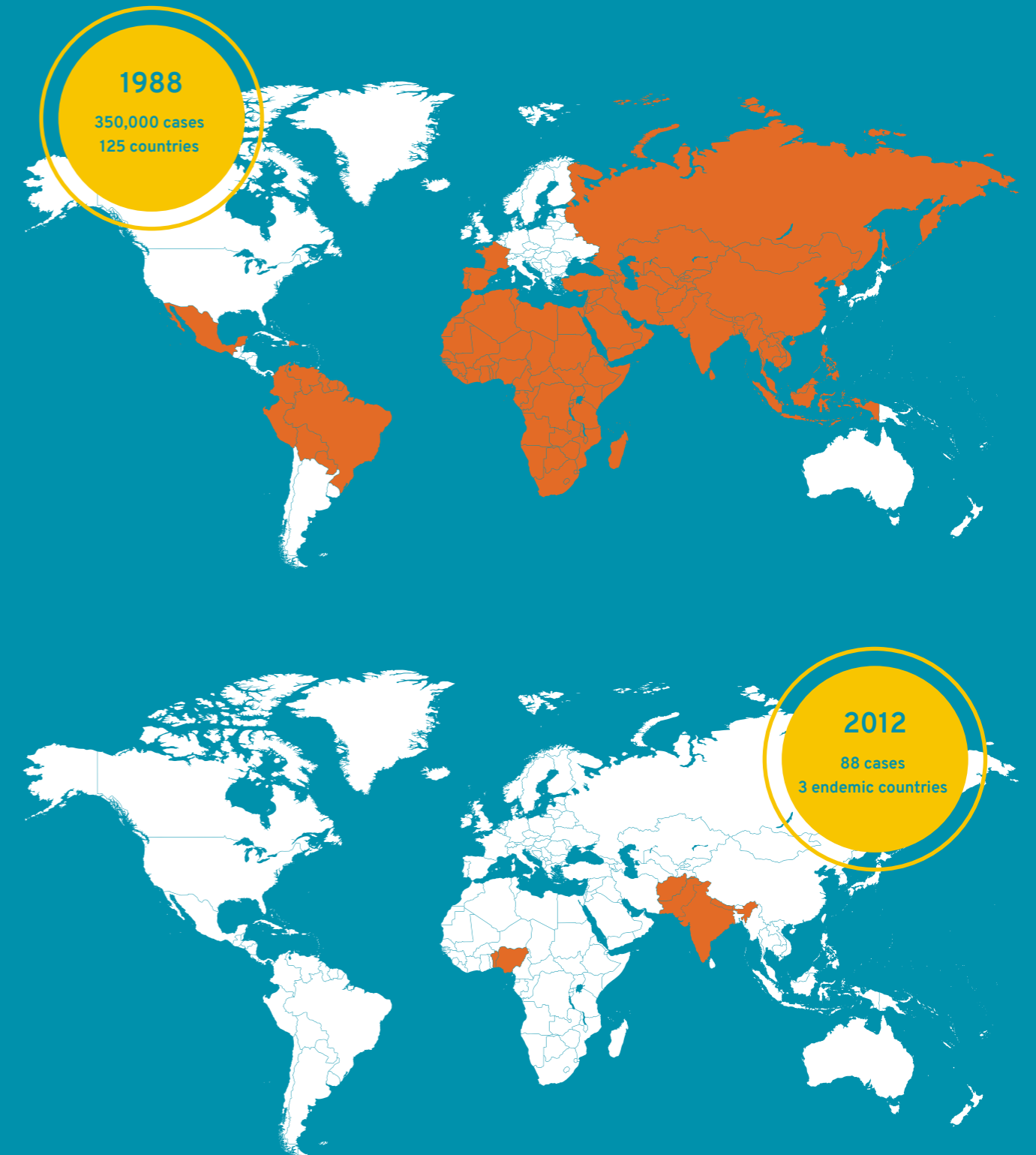


Peran Bio Farma dalam Pemberantasan Tetanus



Sumber: World Health Organization (WHO)

Peran Bio Farma dalam Pemberantasan Polio



Sumber: Center for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization (WHO)

| Kontribusi Bio Farma di Dunia

Selama lebih dari 127 tahun, Bio Farma telah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan dunia. Kami telah memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan kebutuhan vaksin dunia. Dengan filosofi *Dedicated to Improve Quality of Life*, kami berperan aktif meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan kesehatan global (*Global Health Security*).

Kapasitas produksi lebih dari
2 miliar
dosis
per tahun

130
Negara telah
menggunakan
produk Bio Farma

50
Negara Islam

TINJAUAN OPERASIONAL

STRATEGI PERUSAHAAN

Pada tahun 2017 Perusahaan menetapkan strategi dan kebijakan Perusahaan yang dijabarkan ke dalam program kerja masing-masing bidang. Di bawah ini diuraikan mengenai strategi dan kebijakan Perusahaan sebagai berikut.

STRATEGI PERUSAHAAN

- Portofolio produk adalah vaksin sebagai bisnis inti dan akan mengembangkan biosimilar dan *blood product* sebagai bisnis terkait.
- Melakukan kemitraan (*partnership*) untuk dalam bidang penelitian dan pengembangan serta pemasaran (*marketing authorization* dan *joint marketing*).
- Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas internal untuk mendukung aspirasi dan pertumbuhan pendapatan.
- Mengembangkan *cost center* menjadi *profit center* dengan membentuk Unit Bisnis atau Anak Perusahaan serta *joint venture* dengan pemilik teknologi/modal untuk produk baru.
- Menggunakan dana mandiri untuk biaya operasional dan kredit perbankan untuk pengembangan usaha.
- Menyempurnakan *supply chain management* dan *costing* dengan berbasis teknologi informasi.
- Melakukan efisiensi biaya dalam pengadaan barang/jasa, pemakaian bahan baku/penolong serta perbaikan proses kerja tanpa mengurangi efektivitas program kerja.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

- Prioritas penyediaan vaksin untuk mendukung program imunisasi Pemerintah.
- Prioritas penelitian dan pengembangan (litbang) yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di samping mengikuti *global trend* (WHO dan UNICEF). Melakukan kerjasama litbang dengan pola *Academic Business Government and Community* (ABCG). Utilisasi seluruh kapasitas produksi secara optimal. Investasi selektif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta produk baru. Penyesuaian organisasi pada direktorat, divisi dan bagian yang memiliki rentang kendali terlalu lebar dan memiliki fungsi yang saling berkaitan.
- Manajemen formasi berdasarkan kompetensi dan pengetahuan (*knowledge based*).
- Pengembangan aplikasi teknologi informasi secara swadaya dan terintegrasi.
- Menerapkan sistem mutu secara konsisten dan terpadu.
- Mengikuti regulasi WHO dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait kualitas produk.
- Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkelanjutan sesuai dengan keragaman sosial (*sociodiversity*), keragaman wilayah (*geodiversity*) dan keragaman budaya (*culture diversity*).

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk Bio Farma. Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk Perusahaan.

STRATEGI PEMASARAN

Untuk mendukung pencapaian target penjualan, Bio Farma menjalankan strategi pemasaran antara lain adalah sebagai berikut:

- Penjualan Dalam Negeri**
 - Penambahan lini produk dari *partnership* yang dipasarkan di pasar domestik yaitu vaksin IPV, MR dan Varicella.
 - Pertemuan langsung (*face to face meeting*) dengan *customer*, agar terjaga hubungan baik dengan *customer* dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan global.
 - Pemutakhiran fasilitas penunjang proses distribusi.
 - Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
 - Melakukan survei dan analisa potensi dan peluang pasar.
- Penjualan Ekspor dan Pengembangan Bisnis**
 - Menjajaki penambahan lini produk dari *partnership* yang dipasarkan di pasar domestik yaitu vaksin JE dan Rotavirus.
 - Penambahan lini produk yang dipasarkan di pasar ekspor yaitu bulk Campak.
 - Ekspor perdana Vaksin Pentabio 10 ds melalui Institusi Internasional (UNICEF).
 - Pertemuan langsung (*face to face meeting*) dengan *customer*, agar terjaga hubungan baik dengan *customer* dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan global.
 - Perluasan pasar baru tujuan ekspor.
 - Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
 - Peningkatan aktivitas promosi menggunakan media yang efektif dan efisien.
 - Melakukan survei dan analisa potensi dan peluang pasar.
 - Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan *Market Access and Delivery*.
 - Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan produksi vial dan ampul.
 - Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan *Blood Product*.
 - Inisiasi proses pembentukan *Joint Venture MR Vaccine*.
 - Inisiasi proses pembentukan *Joint Venture Conjugated Meningitis Vaccine*.
- Regulatory Affair dan Pemasaran**
 - Registrasi produk impor di dalam negeri dan produk sendiri di luar negeri baik produk lama maupun produk baru.



- Mengikuti pengembangan produk Bio Farma mulai dari tahap skala eksperimen sampai skala komersial.
 - Menginformasikan regulasi yang berlaku untuk produk baru yang akan dibuat ataupun yang sudah berjalan.
 - Mengikuti informasi mengenai *Pharmacovigilance*.
 - Mengikuti pertemuan ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality - Pharmaceutical Product Working Group* (ACCSQ-PPWG).
 - Meningkatkan kualitas isi *dossier*.
 - Pengadaan *software Electronic Common Technical Document* (e-CTD), database administrasi *online* dan *software document management system*.
 - Pendirian kantor perwakilan pemasaran di kota-kota besar seluruh Indonesia.
 - Peningkatan kinerja *marketer* untuk penjualan di sektor swasta dan didukung oleh aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM).
 - Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
 - Peningkatan aktivitas promosi menggunakan media yang efektif dan efisien.
- Klinik dan Imunisasi**

Pada tahun 2017, Klinik Imunisasi sudah menjadi Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif, klinik dan pemasaran sinergi dengan salah satu BUMN Farmasi. Program kerja dari klinik imunisasi adalah sebagai berikut:

 - Pembukaan outlet layanan vaksinasi 12 (dua belas) buah.
 - Proficiency Test* untuk kegiatan uji di laboratorium mikrobiologi.
 - Implementasi *Laboratory Information System* (LIS).
 - Training* Karyawan UBKI untuk peningkatan kompetensi, pelayanan, *customer satisfaction*.
 - Implementasi dan perbaikan berkesinambungan sistem pelayanan berbasis IT.
 - Implementasi *Customer Relationship Management* (CRM).
 - Meningkatkan kunjungan dan promosi, edukasi, sosialisasi layanan bersama *corporate marketer*.
 - Penambahan *sales* khusus layanan laboratorium.
 - Penambahan ruang lingkup layanan laboratorium Mikrobiologi yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
 - Customer gathering* bagi pelanggan laboratorium mikro dan vaksinasi.

PANGSA PASAR

Menurut laporan *Access to Vaccine Index* 2017, secara keseluruhan, pasar vaksin global mengalami perkembangan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2014, tumbuh dari USD6 miliar menjadi USD33 miliar. Penjualan vaksin ke negara-negara maju dan berpenghasilan tinggi sekitar 65% dari total nilai pasar vaksin, negara-negara berpenghasilan menengah atas 23%, negara berpendapatan menengah bawah 8%, dan negara-negara berpenghasilan rendah sebesar 4%.

Nilai pengadaan vaksin UNICEF meningkat dua kali lipat antara 2010 dan 2014 menjadi USD1,5 miliar. Mengingat program imunisasi nasional terus berkembang baik meningkatkan cakupan untuk vaksin yang sudah ada maupun memperkenalkan vaksin baru.

Tabel realisasi penjualan produk Bio Farma bersih per segmen usaha/per sektor

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	2016	2015	2014
	1	3	4	5
Sektor Pemerintah	1.359.280	681.376	570.619	539.959
Sektor Swasta	409.382	386.015	139.485	137.889
Sektor Ekspor	1.242.909	1.248.368	1.635.814	1.366.232
Total Penjualan Bersih	3.011.571	2.315.759	2.345.918	2.044.080

Sifat usaha Bio Farma adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut:

- Pasar Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B (HB), Td dan DTP-HB-Hib (pentaBio);
- Pasar swasta nasional, yaitu melayani para Distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, Menginitis; dan antisera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)), dan PPD 2 TU;
- Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan negara lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prekualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu Vaksin TT (10 ds/vial), Vaksin Td (10 ds/vial), Vaksin DTP (10 ds/vial), Vaksin TOPV 10 dan 20 dosis, Vaksin BOPV (20 ds/vial), Vaksin Campak (10 ds/vial), Vaksin HJ VHB Bayi (1 ds/pouch), Vaksin DTP HB HIB 5 ds, Vaksin mOPV 1, Vaksin DT dan Vaksin DTP-HB.

Pada tahun 2017, *market share* produk Bio Farma untuk Sektor Pemerintah masih 100%, sedangkan untuk kebutuhan UNICEF bervariasi, yaitu untuk vaksin Campak 10 ds sebesar 24%, DTP 10 ds sebesar 96%, Td 10 ds sebesar 33%, TT 10 ds sebesar 19% dan OPV sebesar 48%. Untuk vaksin Polio, Bio Farma lebih memprioritaskan mensuplai vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu program imunisasi polio reguler. Disamping itu, OPV juga diekspor ke berbagai negara baik dalam bentuk vaksin (melalui UNICEF dan kerjasama bilateral), maupun bulk ke beberapa produsen vaksin di India melalui kerjasama bilateral.

Sesuai dengan kebijakan Bio Farma untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan, Bio Farma telah mengimplementasikan *Customer Relationship Management* (CRM) yang terintegrasi baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri sehingga pangsa pasar yang telah ada dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.

KINERJA SEGMENT USAHA

PENJELASAN SEGMENT USAHA

Produk Bio Farma dikelompokkan berdasarkan segmen terdiri atas Segmen/Kelompok Produk dan Penjualan Produk Per Segmen/ Sektor Usaha.

SEGMENT/KELOMPOK PRODUK

VAKSIN BAKTERI

Produk-produk Bio Farma yang termasuk kedalam segmen (kelompok produk) vaksin bakteri adalah sebagai berikut:

1. Vaksin TT

Vaksin TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, teradsorbsi kedalam aluminium fosfat. Untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap Tetanus Neonatorum pada wanita usia subur.

2. Vaksin DT

Vaksin DT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang teradsorbsi kedalam aluminium fosfat. Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria (difteri) dan Tetanus secara simultan pada anak-anak.



3. Vaksin DTP

Vaksin DTP merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi. Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria, Tetanus dan Pertusis (batuk rejan) secara simultan pada bayi dan anak-anak.

4. Vaksin Bacillus Calmette Guerin (BCG) Beku Kering

Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung *Mycobacterium bovis* hidup yang dilemahkan (*Bacillus Calmette Guerin*), strain Paris. Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis. Vaksin BCG diberikan pada bayi sejak lahir, untuk mencegah penyakit TBC. Jika bayi sudah berumur lebih dari tiga bulan, harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dulu. BCG dapat diberikan apabila hasil uji tuberkulin negatif.

5. Vaksin TD

Vaksin Td merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni, dengan komponen difteri berdosisi rendah dan teradsorbsi pada aluminium fosfat. Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri untuk anak usia 7 tahun ke atas.

6. Vaksin Bio-TT

Vaksin Bio-TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam ampul, mengandung toksoid tetanus murni. Untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur.

VAKSIN VIRUS

Produk-produk Bio Farma yang termasuk kedalam segmen (kelompok produk) vaksin virus adalah sebagai berikut:

1. Vaksin Oral Polio

Vaksin Polio Oral (OPV) adalah vaksin tri- valen merupakan cairan berwarna kuning kemerahan dikemas dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1,2 dan 3 virus Polio hidup (*strain Sabin*) yang telah dilemahkan. Vaksin Polio Oral ini merupakan suspensi "drops" untuk diteteskan melalui *dropper* (secara oral). Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Imunisasi yang satu ini belakangan sering didung-dungkan pemerintah karena telah memakan korban cukup banyak. Target pemerintah membebaskan anak-anak Indonesia dari penyakit polio. Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir. Selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali, saat bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian vaksin ini dulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun.

2. Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis

Vaksin bOPV adalah cairan berwarna kuning muda sampai merah muda dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1 virus Polio hidup yang dilemahkan (*strain Sabin*). Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1 dan 3.

3. Vaksin Campak (Beku Kering)

Vaksin campak adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan, merupakan vaksin beku kering berwarna kekuningan pada vial gelas, yang harus dilarutkan hanya dengan pelarut vaksin campak kering produksi Bio Farma yang telah disediakan secara terpisah. Vaksin campak ini berupa

serbuk injeksi. Untuk pencegahan terhadap penyakit Campak. Campak pertama kali diberikan saat anak umur 9 bulan. Campak-2 diberikan pada program BIAS SD kelas 1, umur 6 tahun.

4. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

Vaksin Hepatitis B Rekombinan mengandung antigen virus Hepatitis B, HBsAg, yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel ragi dengan teknologi rekayasa DNA. Vaksin Hepatitis B rekombinan berbentuk suspensi steril berwarna keputihan dalam prefill *injection device*, yang dikemas dalam aluminium foil pouch, and vial. Untuk pencegahan terhadap penyakit Hepatitis B. Hepatitis B diberikan tiga kali. Yang pertama dalam waktu 12 jam setelah lahir. Imunisasi ini dilanjutkan saat bayi berumur 1 bulan, kemudian diberikan lagi saat 3-6 bulan.

5. Vaksin Flubio

Vaksin influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan (*slightly turbid*), mengandung haemagglutinin dari antigen virus influenza. Vaksin influenza HA berupa suspensi yang diberikan untuk injeksi. Untuk pencegahan influenza musiman. Vaksin influenza kepada orang sehat usia 12 tahun ke atas. Karena secara alami influenza bersifat musiman, pemberian vaksin direkomendasikan sekali dalam setahun.

VAKSIN KOMBINASI

1. Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

Vaksin Pentabio adalah Vaksin DTP-HB Hib (Vaksin Jerap Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B Rekombinan, Haemophilus influenzae tipe b) berupa suspensi homogeny yang mengandung toksoid tetanus dan difter-i murni, bakter-i pertusis (batuk rejan) inaktif, antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) murni yang tidak infeksius, dan komponen Hib sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida Haemophilus influenzae tipe b tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid tetanus. Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B dan Haemophilus Influenza tipe B. Imunisasi kombinasi Pentavalen terdiri dari 5 jenis vaksin sekaligus diantaranya DPT-HB,Hib pada anak bayi dan imunisasi lanjutan pada anak batita sesuai standar. Imunisasi DPT-HB Hib merupakan imunisasi rutin yang diberikan kepada sasaran pada usia 0-11 bulan. Imunisasi lanjutan DPT-HB, Hib dan Campak, diberikan kepada batita (Bawah Tiga Tahun).

SERUM DAN DIAGNOSTIKA

Produk-produk Bio Farma yang termasuk kedalam segmen (kelompok produk) Serum dan Diagnostika adalah sebagai berikut:

1. Serum

a. Serum Anti tetanus (BioSAT)

Serum Anti Tetanus (BioSAT) adalah antiSerum yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, serta mengandung fenol sebagai pengawet, berupa cairan bening kekuningan. Untuk pengobatan terhadap penyakit tetanus, Indikasi suntikan ATS

(Anti Tetanus Serum), Luka cukup besar (dalam lebih dari 1 cm), Luka berbentuk bintang, Luka berasal dari benda yang kotor dan berkarat, Luka gigitan hewan dan manusia, Luka tembak dan luka bakar, Luka terkontaminasi yaitu luka yang lebih dari 6 jam tidak ditangani, atau luka kurang dari 6 jam namun terpapar banyak kontaminasi, atau luka kurang dari 6 jam namun timbul karena kekuatan yang cukup besar (misalnya luka tembak atau terjepit mesin), Penderita tidak memiliki riwayat imunisasi tetanus yang jelas atau tidak mendapat *booster* selama 5 tahun atau lebih.

b. Serum Anti Difteri (BioADS)

Merupakan serum untuk pengobatan terhadap penyakit diphtheria.

c. Serum Anti Bisa Ular (BioSave)

Serum Anti Bisa Ular Polivalen (*BioSave*) adalah anti Serum murni yang dibuat dari plasma kuda yang memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik (seperti ular dari jenis Naja sputatrix – Ular Kobra, Bungarus fasciatus – Ular Belang) dan yang bersifat hemotoksik (ular Agkistrodon rh – dostoma – Ular Tanah) yang banyak ditemukan di Indonesia, serta mengandung fenol sebagai pengawet. Serum Anti Bisa Ular Polivalen berupa cairan bening kekuningan. Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa yang mengandung efek neurotoksik (Naja sputatrix/ular kobra dan Bungarus fasciatus/ular belang) dan efek hemotoksis (Ankystrodon rhodostoma/ular tanah).

1. Diagnostika

PPD Rt 23 (*Purified Protein Derivative*) Untuk pengujian kepekaan seseorang terhadap infeksi tuberkulosis.

PRODUK PARTNERSHIP

Produk-produk Bio Farma yang termasuk kedalam segmen (kelompok produk) *partnership* adalah sebagai berikut:

1. Vaksin Menivax ACYW (meningitis)

Pencegahan terhadap penyakit radang selaput otak.

PENJUALAN PRODUK PER SEGMENT/SEKTOR USAHA

- 1. Sektor Pemerintah
- 2. Sektor Swasta
- 3. Sektor Ekspor

FASILITAS DAN KUALITAS PRODUKSI BIO FARMA

Bio Farma berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif di berbagai bidang dengan mengacu pada Standar Internasional dan Sistem Manajemen Mutu terkini. Sejak tahun 1997, produk Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakuilifikasi WHO. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia

(WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan *world class standard* antara lain ISO 26000 *guidance for CSR*, *Enterprise Risk Management* ISO 31000, *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Saat ini, Bio Farma beroperasi di dua lokasi yang berbeda, yaitu Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan luas lahan 91.058 m2 yang digunakan untuk fasilitas Produksi, Penelitian dan Pengembangan, Pemasaran, serta Administrasi. Sedangkan lokasi kedua berada di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan 282.441 m2 yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Untuk mendukung kelancaran operasional, perusahaan memiliki juga Kantor Perwakilan di Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta.

PROSES PRODUKSI DAN PENGUJIAN VAKSIN BIO FARMA

Proses produksi vaksin Bio Farma dilakukan melalui proses yang ketat, dan berstandar tinggi. Di awali dengan penyediaan bahan baku, yang berasal dari rekanan yang memiliki kualifikasi tertentu, fasilitas produksi yang harus tervalidasi baik dari alat dan penunjang lainnya, hingga fasilitas penyimpanan barang jadi dan proses distribusi yang di monitor tertata agar tetap memenuhi faktor kualitas, keamanan, dan efektivitas yang konsisten. Keseluruhan proses pembuatan vaksin tersebut, tidak terlepas dari adanya fase uji kualitas, baik untuk barang setengah jadi (bulk), maupun produk jadi, yang sudah ditetapkan oleh BPOM, dan WHO.

Vaksin memiliki perbedaan yang mendasar dengan produk farmasi lainnya seperti obat – obatan. Vaksin yang dibuat dari makhluk hidup, memilki potensi kontaminasi yang cukup besar, baik yang kontaminasi berasal dari lingkungan maupun dari operator dalam setiap tahapan pembuatan vaksin. Oleh karenanya diperlukan suatu jaminan baik dari jaminan kualitas maupun jaminan keamanan dari setiap produk yang ada. Bio Farma memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang terjamin baik dari sisi keamanan, kualitas dan kemanjuran. Untuk menghasilkan produk yang baik tersebut, Bio Farma melakukan pemeriksaan setiap produk baik yang dilakukan oleh sendiri maupun dari pihak eksternal. Pemeriksaan Uji Kualitas internal seperti; Uji potensi, Uji keamanan (toksisitas), Uji mikrobiologi (sterilitas) dan Uji kimia (pH, kandungan pengawet, dsb), dilakukan oleh Divisi Pengawasan Mutu dan Divisi *Quality Assurance*. Pemeriksaan dari pihak eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM - RI), memiliki peranan yang penting dalam hal menilai kesiapan fasilitas pabrik yang dimiliki oleh Bio Farma, termasuk perizinan yang diperlukan untuk pembuatan vaksin, pemeriksaan *bacth* produk vaksin, termasuk pemantauan kinerja dari setiap vaksin yang berasal dari Bio Farma.

Jadi, vaksin produksi Bio Farma yang digunakan Pemerintah untuk program imunisasi nasional (Pentabio (dtp-hb-hib), DT, TD, TT, Hepatitis b, Campak, Polio, dan BCG) adalah vaksin dengan proses pembuatan sangat ketat sesuai standar WHO serta sudah mendapatkan *release* dari Badan POM.

PRODUKSI/KINERJA OPERASIONAL SEGMENT

Realisasi beban produksi tahun 2017 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,73 triliun, naik sebesar Rp553,07 miliar atau meningkat sebesar 47,19% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1,17 triliun dan sebesar Rp342,23 miliar atau 24,75 % di atas RKAP sebesar Rp1,38 triliun.

Tabel Kinerja Segment Vaksin Bakteri

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produksi Vaksin Bakteri (Juta Dosis)	392,70	880,98	536,98	531,50	435,38	361,76	73,13	44,58	(144,28)	(26,87)
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	215,05	309,27	236,93	263,67	229,64	187,21	90,76	69,53	(21,89)	(9,24)

Pada tahun 2017 produksi vaksin bakteri tercatat sebesar 392,70 juta dosis, turun sebesar 144,28 juta dosis atau 26,87% dibandingkan dengan produksi vaksin bakteri tahun 2016 yaitu sebesar 536,98 juta dosis. Penurunan ini seiring dengan penurunan penjualannya.

Realisasi beban produksi vaksin bakteri pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp215,05 miliar, turun sebesar Rp21,89 miliar atau 9,24% dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp236,93 miliar.

Tabel Kinerja Segmen Vaksin Virus

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produksi Vaksin Virus (Juta Dosis)	2.898,95	3.740,04	3.937,41	3.406,32	3.094,21	2.630,18	73,63	77,51	(1.038,47)	(26,37)
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	532,84	663,03	529,54	506,16	457,44	430,33	100,62	80,36	3,30	0,62

Pada tahun 2017 produksi vaksin virus tercatat sebesar 2.898,95 juta dosis, turun sebesar 1.038,47 juta dosis atau 26,37% dibandingkan dengan produksi vaksin bakteri tahun 2016 yaitu sebesar 3.937,41 juta dosis. Penurunan ini karena penjualan vaksin Polio berkurang karena permintaan vaksin Polio dunia berkurang sehubungan adanya eradikasi Polio.

Realisasi beban produksi vaksin virus pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp532,84 miliar, naik sebesar Rp3,30 miliar atau 0,62% dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp529,54 miliar.

Tabel Kinerja Segmen Vaksin Kombinasi

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produksi Vaksin Kombinasi (Juta Dosis)	25,85	25,87	20,72	15,79	312,98	15,29	124,78	99,96	5,14	24,80
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	205,28	105,76	148,74	159,72	163,49	95,46	138,01	194,09	56,54	38,01

Pada tahun 2017 produksi vaksin kombinasi tercatat sebesar 25,85 juta dosis, naik sebesar 5,14 juta dosis atau 24,80% dibandingkan dengan produksi vaksin kombinasi tahun 2016 yaitu sebesar 20,72 juta dosis. Peningkatan jumlah produksi vaksin kombinasi terutama akibat adanya peningkatan produksi vaksin Pentabio 5 ds.

Realisasi beban produksi vaksin kombinasi pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp205,28 miliar, naik sebesar Rp56,64 miliar atau 38,01% dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp148,74 miliar.

Tabel Kinerja Segmen Serum dan Diagnostika

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produksi Vaksin Serum dan Diagnostika (vial/ampul)	460.403	615.057	697.818	507.420	456.733	658.975	65,98	74,86	(237.405)	(34,02)
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	58,57	39,04	38,26	33,06	32,20	30,59	153,08	150,03	20,31	53,08

Pada tahun 2017 produksi vaksin serum dan diagnostika tercatat sebesar 460,40 ribu vial/ampul, turun sebesar 237,4 ribu vial/ampul atau 65,98% dibandingkan dengan produksi vaksin serum dan diagnostika tahun 2016 yaitu sebesar 697,82 ribu vial/ampul. Penurunan jumlah produksi vaksin serum dan diagnostika terutama karena tidak diproduksinya ADS 20.000/BIOADS di tahun 2017.

Produk Serum dan Diagnostika beban produksinya mencapai 150,03% dari anggarannya atau lebih tinggi dari pencapaian penjualannya, terutama karena adanya peningkatan beban *overhead* tetap produksi vaksin sera.

Tabel Kinerja Segmen Produk Partnership

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produksi Produk Partnership (Juta Dosis)	87,05	36,98	27,36	-	-	-	318,17	235,39	59,69	218,17
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	713,27	265,69	218,47	-	-	-	326,48	268,46	494,80	226,48

Pada tahun 2017 produksi produk *partnership* tercatat sebesar 87,05 juta dosis, naik sebesar 59,69 juta dosis atau 218,17% dibandingkan dengan produksi produk *partnership* tahun 2016 yaitu sebesar 27,36 juta dosis. Kenaikan jumlah produksi produk *partnership* disebabkan kenaikan produksi vaksin V.BCG Bayi+Anak 20 ds Impor, Meningitis dan MR 10 ds serta adanya produksi vaksin IPV 5 ds yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Realisasi beban produksi produk *partnership* pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp713,27 miliar, naik sebesar Rp494,80 miliar atau 226,48% dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp218,47 miliar.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT

PENDAPATAN

Penjualan Produk Perusahaan

Penjualan Produk Bersih Perusahaan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp1.872,11 miliar, turun sebesar Rp55,61 miliar atau 2,88% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp1.927,72 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan penjualan vaksin bakteri sebesar Rp56,73 miliar atau 23,29%. Meskipun penjualan vaksin bakteri mengalami penurunan, namun penjualan vaksin kombinasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 61,34% atau meningkat sebesar Rp123,12 miliar.

Tabel Penjualan Produk Perusahaan

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Vaksin Bakteri	186.865	269.303	243.598	305.289	217.605	233.754	76,71	69,39	(56.733)	(23,29)
Vaksin Virus	1.301.225	1.798.624	1.436.397	1.705.305	1.457.280	1.302.853	90,59	72,35	(135.173)	(9,41)
Vaksin Kombinasi	323.810	298.351	200.695	253.404	276.548	248.565	161,34	108,53	123.116	61,34
Sera dan Diagnostika	76.074	86.450	63.412	80.689	90.240	63.635	119,97	88,00	12.662	19,97
Jumlah	1.887.974	2.452.728	1.944.102	2.344.687	2.041.673	1.848.806	97,11	76,97	(56.128)	(2,89)
Dikurangi: Potongan Penjualan	(15.861)		(16.378)	(15.063)	(12.685)	(354)	96,85		516	(3,15)
Penjualan Produk Bersih	1.872.113	2.452.728	1.927.724	2.329.624	2.028.988	1.848.452	97,12	76,33	(55.611)	(2,88)

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan Produk Partnership

Penjualan Produk Partnership Perusahaan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp1.111,03 miliar, naik sebesar Rp752,07 miliar atau 209,52% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp358,97 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan penjualan pemerintah sebesar Rp738,36 miliar atau 568,80%.

Tabel Penjualan Produk Partnership

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Penjualan Pemerintah	868.174	-	129.812	-	7.769	-	668,80	-	738.363	568,80
Penjualan Swasta	248.404	-	235.105	-	-	-	105,66	-	13.300	5,66
Jumlah	1.116.579	-	364.916	-	-	-	305,98	-	751.662	205,98
Dikurangi: Potongan Penjualan	(5.551)	-	(5.961)	-	-	-	93,12	-	410	(6,88)
Penjualan Produk Partnership	1.111.028	385.789	358.956	-	-	-	309,52	287,99	752.072	209,52

Penjualan Trading Partnership

Penjualan Bersih Trading Partnership Perusahaan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp20,12 miliar, turun sebesar Rp3,64 miliar atau 15,34% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp23,76 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan penjualan Vaksin HPV sebesar Rp7,45 miliar atau 32,66%. Meskipun secara total penjualan bersih trading partnership mengalami penurunan, namun penjualan Polyvalent Snake Anti Venom mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 76,25%.

Tabel Penjualan Trading Partnership

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Polyvalent Snake Anti Venom	1.983	-	1.125	3.393,27	2.641	1.848	176,25	-	858	76,25
Imovac Rabies Vero	-	-	-	8.528	-	-	-	-	-	-
HJ HPV-Gardasil	15.355	-	22.804	-	-	-	67,34	-	(7.449)	(32,66)
HJ Difteria Antitoxin	2.898	-	-	-	-	-	-	-	2.898	-
Lain-lain (di bawah Rp500 Juta)	111	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Sub Jumlah	20.347	-	23.929	11.922	2.641	1.848	85,03	-	(3.582)	(14,97)
Dikurangi: Potongan Penjualan	(228)	-	(165)	(486)	(122)	-	137,80	-	(62)	37,80
Jumlah Penjualan Bersih Trading Partnership	20.120	93.099,31	23.764	11.436	10.287	1.848	84,66	21,61	(3.644)	(15,34)

Penjualan Jasa

Jumlah Penjualan Produk, Produk Partnership, Trading Partnership dan Jasa pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp3.011,57 miliar, naik sebesar Rp695,81 miliar atau 30,05% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.315,76 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan penjualan jasa imunisasi sebesar 77,29%.

Tabel Penjualan Jasa

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Imunisasi	7.047	5.504	3.975	3.529	3.978	2.501	177,29	128,03	3.072	77,29
Laboratorium	1.696	2.063	1.660	1.329	827	881	102,13	82,18	35	2,13
Poliklinik	-	1.032	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Jumlah	8.743	8.599	5.635	4.859	4.805	3.382	155,15	101,67	3.108	55,15
Dikurangi: Potongan Penjualan	(433)	-	(320)	(0)	-	(0)	135,27	-	(113)	35,27
Penjualan Jasa Bersih	8.310	8.599	5.315	4.858	4.805	3.382	156,34	96,64	2.995	56,34
Jumlah Penjualan Produk, Produk Partnership, Trading Partnership dan Jasa	3.011.571	2.940.215	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.812	30,05

PENJUALAN PRODUK BERSIH PER SEGMENT USAHA (PER SEKTOR)

Pada tahun 2017 total penjualan bersih Perusahaan tercatat sebesar Rp3.011,57 miliar, naik sebesar Rp695,81 miliar atau 30,05% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.315,76 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan sektor pemerintah sebesar Rp 677,90 miliar atau 99,49%.

Tabel Realisasi penjualan produk bersih per segmen usaha/per sektor

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016
	1	2					7=1/3	8=1/2	
Sektor Pemerintah	1.359.280	795.573	681.376	570.619	539.959	548.724	199,49	170,86	677.904,16
Sektor Swasta	409.382	395.148	386.015	139.485	137.889	82.106	106,05	103,60	23.366,21
Sektor Ekspor	1.242.909	1.749.494	1.248.368	1.635.814	1.366.232	1.222.852	99,56	71,04	(5.458,65)
Total Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.215	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.811,72

PROFITABILITAS

Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari meningkatnya laba bersih sebesar Rp24,31 miliar dari Rp501,04 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp525,36 miliar di tahun 2017. Peningkatan perolehan laba bersih tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 karena pertumbuhan Produk *Partnership* sebesar 209,52% atau senilai Rp752,07 miliar.

Tabel Profitabilitas Perusahaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.872.113	2.452.728	1.927.724	2.329.624	2.028.988	1.848.452	97,12	76,33	(55.611)	(2,88)
Produk <i>Partnership</i>	1.111.028	385.789	358.956	-	-	-	309,52	287,99	752.072	209,52
Trading <i>Partnership</i>	20.120	93.099	23.764	11.436	10.287	1.848	84,67	21,61	(3.644)	(15,33)
Jasa	8.310	8.599	5.315	4.858	4.805	3.382	156,35	96,64	2.995	56,35
Jumlah Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.216	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.812	30,05
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA										
Produk Perusahaan	(923.185)	(899.855)	(763.398)	(852.361)	(767.609)	(718.463)	120,93	102,59	(159.787)	20,93
Produk <i>Partnership</i>	(710.318)	(266.662)	(215.497)	-	-	-	329,62	266,37	(494.821)	229,62
Trading <i>Partnership</i>	(16.766)	(89.452)	(21.437)	-	-	-	78,21	18,74	4.671	(21,79)
Jasa	(6.861)	(6.285)	(4.962)	(3.962)	(3.654)	(3.986)	138,27	109,16	(1.899)	38,27
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.657.130)	(1.262.254)	(1.005.294)	(867.488)	(780.090)	(723.596)	164,84	131,28	(651.836)	64,84
LABA (RUGI) KOTOR	1.354.440	1.677.962	1.310.465	1.478.430	1.263.991	1.130.085	103,36	80,72	43.975	3,36
Penghasilan lain-lain	115.158	1.520	164.728	129.064	118.630	152.838	69,91	7.576,18	(49.570)	(30,09)
Beban Administrasi dan Umum	(409.734)	(128.830)	(402.002)	(421.759)	(349.010)	(304.313)	101,92	318,04	(7.732)	1,92
Beban Penjualan	(137.478)	(402.122)	(133.996)	(126.818)	(99.182)	(72.830)	102,60	34,19	(3.482)	2,60
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(124.570)	-	(114.481)	(93.443)	(88.779)	(68.318)	108,81	96,69	(10.089)	8,81
Beban Bunga Pinjaman	(124.570)	(3.674)	(9.343)	-	-	-	1.333,30	3.390,58	(115.227)	1.233,30



Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Beban Lain-lain	(84.182)	(130)	(139.745)	(66.201)	(69.748)	(58.873)	60,24	64.755,38	55.563	(39,76)
Jumlah	(640.807)	(671.999)	(625.497)	(579.157)	(488.089)	(351.496)	102,45	95,36	(15.310)	2,45
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	1.005.963	684.968	899.274	775.902	778.589	104,19	70,94	28.666	4,19
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak Kini	(194.907)	(263.158)	(185.425)	(232.893)	(197.136)	(207.288)	105,11	74,06	(9.482)	5,11
Pajak Tangguhan	6.629	4.508	1.498	4.213	3.427	1.166	442,52	147,05	5.131	342,52
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(188.278)	(258.650)	(183.927)	(228.681)	(193.709)	(206.121)	102,37	72,79	(4.351)	2,37
LABA (RUGI) BERSIH	525.356	747.313	501.041	670.593	582.193	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN										
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	1.980.782	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(27.238)	-	(8.313)	828.226	(21.701)	-	327,65	-	(18.925)	227,66

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	(27.238)	-	(8.313)	1.979.954	(21.323)	1.979.954	327,65	-	(18.925)	227,66
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	498.117	747.313	492.728	2.650.547	560.870	572.468	101,09	66,65	5.389	1,09

PROSPEK USAHA

Bio Farma memiliki situasi kompetitif yang spesifik dengan karakteristik industrinya yang *highly regulated, preventive product, dependency to government and global program, low profitability, and high content technology*.

Global Vaccine Action Plan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menetapkan target yang jelas untuk meningkatkan akses terhadap vaksin di seluruh dunia. Pencapaian target ini membutuhkan kerangka kerja yang terkoordinasi dari berbagai lembaga donor atau pemberi dana, lembaga riset dan pengembangan vaksin, serta produsen vaksin. Hal ini sangat penting mengingat diperlukan sinergi dan kolaborasi baik pada aspek produksi maupun aspek pembelian vaksin untuk menjaga ketersediaan vaksin di dunia.

Peta produsen vaksin global saat ini terdapat sekitar 100 industri vaksin di dunia, Bio Farma menjadi satu-satunya produsen vaksin atau Biotek di Indonesia. Saat ini Bio Farma, termasuk ke dalam sekitar 30 produsen vaksin *global player* yang mendapatkan pra-kualifikasi sehingga mendapatkan peran penting dalam menyediakan suplai vaksin pada badan kesehatan dunia (WHO) dan UNICEF. *Market* industri vaksin sangat berkembang, *emerging market* selalu naik sekitar 30%, dengan pertumbuhan di negara berkembang termasuk Indonesia sekitar 14-17 %, di negara Amerika, Jepang masih jauh dibawah Indonesia. Pasar utama yang dilayani Bio Farma saat ini adalah pasar vaksin generik yang dibutuhkan negara berkembang (*emerging market*) untuk program imunisasi pemerintah atau oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang kesehatan atau sosial.

Perubahan Situasi Persaingan

Perubahan penting yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi posisi persaingan, termasuk peluang inovasi dan kolaborasi adalah:

- Adanya penggantian/perubahan prioritas kebutuhan produk vaksin secara global sesuai dengan himbauan dari WHO.
- Perubahan regulasi dan persyaratan WHO untuk prakualifikasi produk yang semakin ketat.
- Persyaratan registrasi produk di tiap negara yang semakin meningkat.
- Perubahan teknologi proses produksi yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan modernisasi proses (Pembangunan fasilitas baru).
- Kebutuhan vaksin baru untuk program imunisasi masal.

Peluang inovasi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan global tersebut adalah melakukan:

- Riset produk yang sesuai *trend* dan regulasi,
- Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam negeri maupun luar negeri
- Peran aktif dalam organisasi internasional seperti WHO, DCVMN, OIC, dan GAVI.

Industri dan bahan farmasi menjadi salah satu sektor andalan yang diprioritaskan karena berperan sebagai penggerak utama perekonomian nasional di masa datang. Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pengembangan sektor industri farmasi melalui Permenkes RI No. 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2018, yaitu: 1) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 3) surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan (Sumber: Perpres No.79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018)

Pasar Pemerintah yang selama ini merupakan *captive market* telah berubah mengingat telah diberlakukannya proses pengadaan vaksin dengan menggunakan *e-catalog*, konsumen (dalam hal ini pemerintah) membeli produk vaksin pada *e-catalog* secara

online. Hal tersebut akan meningkatkan persaingan sesama produsen vaksin karena hanya produk yang berkualitas dan harga bersaing yang masuk ke *e-catalog*. Di samping itu, masuknya kompetitor lain ke pasar domestik seperti China (memiliki 41 Perusahaan vaksin) dan India serta berlakunya pasar tunggal ASEAN (*Asean free Trade Area/AFTA*) tahun 2016 dan *World Trade Organization* (WTO) tahun 2020 akan meningkatkan persaingan baik untuk sektor pemerintah maupun swasta.

Hal yang dapat dilakukan untuk pasar domestik adalah melakukan penguatan pasar dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam hal ketepatan pengiriman dan kelengkapan/keragaman jenis vaksin yang dibutuhkan. Untuk produk yang belum bisa diproduksi sendiri akan tetapi dibutuhkan oleh konsumen, Bio Farma akan memanfaatkan peluang tersebut melalui kemitraan dengan produsen lain dimulai dari *trading* kemudian jika pasar menjanjikan akan dilanjutkan ke tahap *fill and finish* (impor bulk kemudian Bio Farma akan melakukan formulasi dan *filling*) dan jika pasar sudah memasuki skala ekonomis akan berlanjut ke produksi sendiri.

Selain dari itu, peluang dapat diciptakan dari produk yang telah ada, seperti vaksin DTP, DT, TT, Td, DTP-Hep B-Hib dan bulk Difteri, Pertusis, Tetanus, bulk dan vaksin Campak, bulk Hib, serta bulk dan vaksin Polio yang kebutuhannya meningkat menjelang eradikasi penyakit Polio yang diperkirakan tahun 2020. Untuk vaksin Bakteri (Difteri, Pertusis, Tetanus dan BCG), Bio Farma secara bertahap melakukan penyempurnaan fasilitas produksi sesuai tuntutan regulasi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi untuk menekan biaya produksi, agar dapat bersaing di pasar global.

Bio Farma telah memulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM) dan insulin; dan berencana untuk mengembangkan produk kelompok *blood product*. Prospek pasar untuk *blood product* sangat besar terutama untuk albumin dan imunoglobulin yang selama ini dipenuhi oleh produk impor. Dalam rangka kemandirian *blood product* ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.72/2015 dan Surat Menteri Kesehatan No. TU.02.01/V/0448/2016 Pemerintah telah memberikan mandat kepada Bio Farma untuk melakukan produksi *blood product* secara lokal pada tahun 2018.

Peluang lainnya adalah dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah cukup besar. Pada tahun 2015, JKN telah meliputi 60% dari total populasi di Indonesia dan tahun 2019 ditargetkan akan meliputi seluruh populasi di Indonesia. Bio Farma dapat memasukkan produknya (saat ini vaksin dan antisera) ke dalam program BPJS.

Saat ini, pasar sektor swasta untuk penjualan vaksin imunisasi dasar relatif sulit ditingkatkan mengingat vaksin tersebut sudah dipenuhi oleh Pemerintah, kecuali untuk daerah tertentu dengan adanya Otonomi Daerah (OTDA)

dapat menganggarkan kebutuhan vaksin yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peluang di sektor ini adalah penjualan ke non OTDA melalui *product branded* (produk dengan kemasan khusus/berbeda) hasil produksi sendiri seperti vaksin Flu Bio dan serum serta produk *partnership*, seperti Meningitis, Verorab, Vaxigrip, Varicella, HPV (gardasil) dan Measles Rubella (MR). Bio Farma pun telah membentuk *geographical marketer matrix* pada bagan organisasi Bio Farma dan membuka beberapa kantor perwakilan pemasaran di Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan dan lebih mengenalkan produk Bio Farma kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sektor ekspor, meskipun saat ini Bio Farma telah berhasil menjual produknya ke lebih dari 132 negara, masih perlu dilakukan pengembangan pasar global diantaranya dengan meningkatkan penjualan melalui agen internasional/agen lokal, pasar pemerintah Negara setempat dan penjualan melalui *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *Pan American Health Organization* (PAHO) serta harga jual yang kompetitif.

Melihat peluang yang ada di industri farmasi tersebut, dengan kekuatan yang dimiliki, Bio Farma optimis bahwa prospek usaha Bio Farma di masa yang akan datang akan sangat baik. Bio Farma memandang bahwa prospek usaha farmasi pada tahun 2018 akan tetap tumbuh. Bio Farma terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bisnis yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung rencana Perusahaan untuk tumbuh lebih baik di tahun 2018.

STRATEGI KE DEPAN

Untuk mewujudkan transformasi bisnis dari produsen vaksin dan antisera menjadi produsen produk *lifescience* dan strategi diversifikasi produk sebagaimana direncanakan dalam RJPP tahun 2017-2012, maka di dalam tahun 2017, Bio Farma merencanakan strategi ke depan untuk pengembangan bisnis Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan Unit Bisnis Imunisasi dan Klinik menjadi Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif, klinik dan pemasaran, sinergi dengan salah satu BUMN Farmasi;
2. Membentuk Unit Bisnis *Market Access and Delivery* untuk Divisi Pemasaran, Divisi *Regulatory Affairs*, Divisi Penjualan Dalam Negeri dan Divisi Penjualan Ekspor agar dapat memaksimalkan sinergi pemasaran, penjualan dan jaringan distribusi produk sendiri maupun produk *partnership*.
3. Menjajagi pembentukan Anak Perusahaan produksi vial dan ampul.
4. Menjajagi pembentukan Unit Bisnis Sera dan Diagnostik dan *Animal Breeding*.
5. Menjajagi pembentukan Anak Perusahaan *Blood Product*, yang diawali dengan *toll manufacturing* dengan pemilik teknologi dan melakukan perjanjian komersial dengan institusi terkait.
6. Menjajagi pembentukan *Joint Venture MR Vaccine*.
7. Menjajagi pembentukan *Joint Venture Conjugated Meningitis Vaccine*.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoemarma Wahyudin dan Rekan dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bio Farma pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel Laporan Posisi Keuangan

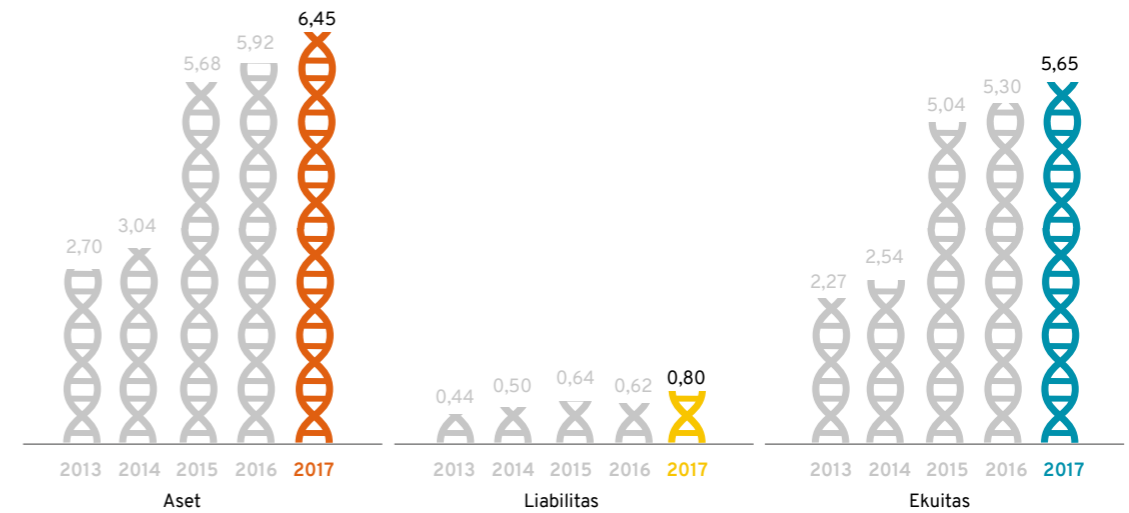
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	369.546	325.830	447.950	555.939	971.717	891.251	82,50	113,42	(78.404)	(17,50)
Efek Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	25.600	-	-	-	-	-
Piutang Usaha	313.138	224.511	288.626	507.746	257.260	288.246	108,49	139,48	24.512	8,49
Piutang Lain-Lain	122	1.012	446	822	850	346	27,29	12,03	(324)	(72,71)
Persediaan	712.912	947.409	708.564	462.557	326.600	204.899	100,61	75,25	4.347	0,61
Uang Muka	27.734	504.119	54.052	102.353	50.412	38.624	51,31	5,50	(26.318)	(48,69)
Pajak Dibayar Dimuka	359.948	288.404	298.817	242.720	154.008	96.972	120,46	124,81	61.131	20,46
Biaya Dibayar Dimuka	12.474	24.632	12.137	10.163	4.767	1.591	102,78	50,64	337	2,78
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	14	42.236	800	1.592	2.726	3.104	1,75	0,03	(786)	(98,25)
Aset Lancar Lainnya	168.198	-	38.162	111.888	30.698	17.870	440,75	-	130.036	340,75
Jumlah Aset Lancar	1.964.087	2.358.153	1.849.555	1.995.781	1.824.639	1.542.901	106,19	83,29	114.531	6,19

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
ASET TIDAK LANCAR										
Aset Pajak Tangguhan	30.214	30.416	23.585	22.087	17.874	14.447	128,11	99,34	6.629	28,11
Aset Tetap	4.394.231	5.851.363	3.998.187	3.605.537	1.163.473	1.126.085	109,91	75,10	396.044	9,91
Aset Tak Berwujud	32.522	22.843	38.634	36.005	37.855	20.214	84,18	142,37	(6.112)	(15,82)
Aset Tidak Lancar Lainnya	28.395	10.191	12.493	21.253	766	956	227,29	278,63	15.902	127,29
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.485.362	5.934.762	4.072.899	3.684.882	1.219.969	1.161.703	110,13	75,83	412.463	10,13
JUMLAH ASET	6.449.449	8.292.915	5.922.454	5.680.663	3.044.608	2.704.604	108,90	77,77	526.995	8,90
LIABILITAS										
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Usaha	371.253	492.512	259.234	233.417	145.095	158.098	143,21	75,38	112.018	43,21
Utang Pajak	57.801	84.083	47.624	46.518	38.919	86.916	121,37	68,74	10.177	21,37
Biaya yang Masih Harus Dibayar	107.859	153.040	113.405	145.489	128.280	112.781	95,11	70,48	(5.546)	(4,89)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.008	-	44	899	1.366	5.405	2.283,65	-	964	2.183,65
Liabilitas Lancar Lainnya	41.635	7.942	32.861	30.341	26.009	26.437	126,70	524,22	8.774	26,70
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	579.556	737.577	453.169	456.663	339.668	389.637	127,89	78,58	126.387	27,89
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	219.937	185.337	167.133	152.022	136.368	48.371	131,59	118,67	52.804	31,59
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	27.846	-	27.846	24.882	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	219.937	1.485.333	167.133	179.868	161.250	48.371	131,59	14,81	52.804	31,59
JUMLAH LIABILITAS	799.493	2.222.910	620.302	636.532	500.919	438.008	128,89	35,97	179.191	28,89
EKUITAS										
Modal Saham	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.250.000	750.000	100,00	100,00	-	-
Modal Donasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba (Rugi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicadangkan	1.250.552	1.413.092	899.824	816.422	786.075	941.920	138,98	88,50	350.728	38,98
Belum Dicadangkan	-	-	-	(2.484)	-	675	-	-	-	-
Laba Periode Berjalan	525.356	747.313	501.041	670.593	577.590	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85
Komponen Ekuitas Lainnya	1.874.049	1.909.600	1.901.287	1.909.600	(69.976)	-	98,57	98,14	(27.239)	(1,43)
JUMLAH EKUITAS	5.649.956	6.070.005	5.302.152	5.044.132	2.543.689	2.265.062	106,56	93,08	347.804	6,56
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.449.449	8.292.915	5.922.454	5.680.663	3.044.608	2.703.070	108,90	77,77	526.995	8,90

Grafik Posisi Keuangan
[dalam triliun rupiah]



ASET

Pada 2017, jumlah aset Perusahaan mencapai Rp6,45 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp526,99 miliar atau sebesar 8,90% dibandingkan 2016 yang mencapai Rp5,92 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan aset lancar dan aset tidak lancar.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Aset Lancar	1.964.087	2.358.153	1.849.555	1.995.781	1.824.639	1.542.901	106,19	83,29	114.531	6,19
Aset Tidak Lancar	4.485.362	5.934.762	4.072.899	3.684.882	1.219.969	1.161.703	110,13	75,83	412.463	10,13
Jumlah Aset	6.449.449	8.292.915	5.922.454	5.680.663	3.044.608	2.704.604	108,90	77,77	526.995	8,90

ASET LANCAR

Aset lancar Perusahaan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp1,96 triliun naik sebesar Rp114,53 miliar atau 6,19% dibandingkan dengan aset lancar tahun 2016 yaitu sebesar Rp1,85 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan aset lancar lainnya sebesar 340,75%.

Tabel Aset Lancar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Kas dan Setara Kas	369.546	325.830	447.950	555.939	971.717	891.251	82,50	113,42	(78.404)	(17,50)
Efek Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	25.600	-	-	-	-	-
Piutang Usaha	313.138	224.511	288.626	507.746	257.260	288.246	108,49	139,48	24.512	8,49
Piutang Lain-Lain	122	1.012	446	822	850	346	27,29	12,03	(324)	(72,71)
Persediaan	712.912	947.409	708.564	462.557	326.600	204.899	100,61	75,25	4.347	0,61
Uang Muka	27.734	504.119	54.052	102.353	50.412	38.624	51,31	5,50	(26.318)	(48,69)
Pajak Dibayar Dimuka	359.948	288.404	298.817	242.720	154.008	96.972	120,46	124,81	61.131	20,46
Biaya Dibayar Dimuka	12.474	24.632	12.137	10.163	4.767	1.591	102,78	50,64	337	2,78
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	14	42.236	800	1.592	2.726	3.104	1,75	0,03	(786)	(98,25)
Aset Lancar Lainnya	168.198	-	38.162	111.888	30.698	17.870	440,75	-	130.036	340,75
Jumlah Aset Lancar	1.964.087	2.358.153	1.849.555	1.995.781	1.824.639	1.542.901	106,19	83,29	114.531	6,19

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp78,404 miliar atau sebesar 17,50% dari senilai Rp447,95 miliar di tahun 2016 menjadi 369,55 miliar di tahun 2017.

Piutang Usaha

Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp24,51 miliar atau 8,49% dari senilai Rp288,63 miliar di tahun 2016 menjadi Rp313,14 miliar di tahun 2017.

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp324 juta atau 72,71% dari senilai Rp446 juta di tahun 2016 menjadi Rp122 juta di tahun 2017.

Persediaan

Persediaan mengalami peningkatan sebesar Rp4,35 miliar atau 0,61% dari senilai Rp708,56 miliar di tahun 2016 menjadi Rp712,91 miliar di tahun 2017.

Uang Muka

Uang Muka mengalami penurunan sebesar Rp26,32 miliar atau 48,69% dari senilai Rp54,05 miliar di tahun 2016 menjadi Rp27,73 miliar di tahun 2017.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp61,13 miliar atau 20,46% dari senilai Rp298,82 miliar di tahun 2016 menjadi Rp359,95 miliar di tahun 2017.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp337 juta atau 2,78% dari senilai Rp12,14 miliar di tahun 2016 menjadi Rp12,47 miliar di tahun 2017.

Pendapatan Yang Masih Akan Diterima

Pendapatan yang masih akan diterima mengalami penurunan sebesar Rp786 juta atau 98,25% dari senilai Rp800 juta di tahun 2016 menjadi Rp14 juta di tahun 2017.

**Aset Lancar Lainnya**

Aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp130,04 miliar atau 340,75% dari senilai Rp38,16 miliar di tahun 2016 menjadi Rp168,20 miliar di tahun 2017.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah aset tidak lancar yang dibukukan pada 2017 adalah senilai Rp4,49 triliun, meningkat sebesar Rp412,46 miliar atau 10,13% dari jumlah yang tercatat di tahun 2016 yaitu sebesar Rp4,07 triliun. Pertumbuhan aset tidak lancar di dominasi oleh adanya pertumbuhan aset tetap yang tumbuh sebesar Rp396,04 miliar menjadi Rp4,39 triliun di tahun 2017.

Tabel Aset Tidak Lancar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Aset Pajak Tangguhan	30.214	30.416	23.585	22.087	17.874	14.447	128,11	99,34	6.629	28,11
Aset Tetap	4.394.231	5.851.363	3.998.187	3.605.537	1.163.473	1.126.085	109,91	75,10	396.044	9,91
Aset Tak Berwujud	32.522	22.843	38.634	36.005	37.855	20.214	84,18	142,37	(6.112)	(15,82)
Aset Tidak Lancar Lainnya	28.395	10.191	12.493	21.253	766	956	227,29	278,63	15.902	127,29
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.485.362	5.934.762	4.072.899	3.684.882	1.219.969	1.161.703	110,13	75,83	412.463	10,13

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp6,63 miliar atau 28,11% dari senilai Rp23,59 miliar di tahun 2016 menjadi Rp30,21 miliar di tahun 2017.

Aset Tetap

Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp396,04 miliar atau 9,91% dari nilai Rp3,99 triliun di tahun 2016 menjadi Rp4,39 triliun di tahun 2017.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud mengalami penurunan sebesar Rp6,1 miliar atau 15,82% dari nilai Rp38,63 miliar di tahun 2016 menjadi Rp32,52 miliar di tahun 2017.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp15,90 miliar atau 127,29% dari nilai Rp12,49 miliar di tahun 2016 menjadi Rp28,40 miliar di tahun 2017.

LIABILITAS

Pada 2017, total liabilitas Perusahaan mencapai Rp799,49 miliar. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp179,19 miliar atau sebesar 28,89% dibandingkan 2016 yang mencapai Rp620,30 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Liabilitas Jangka Pendek	579.556	737.577	453.169	456.663	339.668	389.637	127,89	78,58	126.387	27,89
Liabilitas Jangka Panjang	219.937	1.485.333	167.133	179.868	161.250	48.371	131,59	14,81	52.804	31,59
Jumlah Liabilitas	799.493	2.222.910	620.302	636.532	500.919	438.008	128,89	35,97	179.191	28,89

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek Perusahaan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp579,56 miliar naik sebesar Rp126,39 miliar atau 27,89% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek tahun 2016 yaitu sebesar Rp453,17 miliar.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Utang Usaha	371.253	492.512	259.234	233.417	145.095	158.098	143,21	75,38	112.018	43,21
Utang Pajak	57.801	84.083	47.624	46.518	38.919	86.916	121,37	68,74	10.177	21,37
Biaya yang Masih Harus Dibayar	107.859	153.040	113.405	145.489	128.280	112.781	95,11	70,48	(5.546)	(4,89)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.008	0	44	899	1.366	5.405	2.283,65	-	964	2.183,65
Liabilitas Lancar Lainnya	41.635	7.942	32.861	30.341	26.009	26.437	126,70	524,22	8.774	26,70
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	579.556	737.577	453.169	456.663	339.668	389.637	127,89	78,58	126.387	27,89

Utang Usaha

Utang Usaha mengalami kenaikan sebesar Rp112,02 miliar atau 43,21% dari nilai Rp259,23 miliar di tahun 2016 menjadi Rp371,25 miliar di tahun 2017.

Utang Pajak

Utang Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp10,18 miliar atau 21,37% dari nilai Rp47,62 miliar di tahun 2016 menjadi Rp57,80 miliar di tahun 2017.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan sebesar Rp5,55 miliar atau 4,89% dari nilai Rp113,40 miliar di tahun 2016 menjadi Rp107,86 miliar di tahun 2017.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp964 juta atau 2.183,65% dari nilai Rp44 juta di tahun 2016 menjadi Rp1,00 miliar di tahun 2017.

Liabilitas Lancar Lainnya

Liabilitas lancar lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp8,77 miliar atau 26,70% dari nilai Rp32,86 miliar di tahun 2016 menjadi Rp41,64 miliar di tahun 2017.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang Perusahaan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp219,94 miliar naik sebesar Rp52,80 miliar atau 31,59% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang tahun 2016 yaitu sebesar Rp167,13 miliar.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Pasca Kerja	219.937	185.337	167.133	152.022	136.368	48.371	131,59	118,67	52.804	31,59
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	27.846	-	27.846	24.882	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	219.937	1.485.333	167.133	179.868	161.250	48.371	131,59	14,81	52.804	31,59

Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja mengalami kenaikan sebesar Rp52,80 miliar atau 31,59% dari nilai Rp167,13 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 219,94 miliar di tahun 2017.

EKUITAS

Pada tahun 2017, ekuitas Perusahaan mencapai Rp5,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar 6,56% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp5,30 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yaitu saldo laba yang dicadangkan sebesar Rp350,73 miliar atau meningkat sebesar 38,98% menjadi Rp1,25 triliun dari Rp899,82 miliar tahun 2016, dan laba tahun berjalan tahun 2017 sebesar Rp525,36 miliar yang meningkat sebesar Rp24,32 miliar atau 4,85% dari tahun 2016 senilai Rp501,04 miliar.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Modal Saham	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.250.000	750.000	100,00	100,00	-	-
Modal Donasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba (Rugi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicadangkan	1.250.552	1.413.092	899.824	816.422	786.075	941.920	138,98	88,50	350.728	38,98
Belum Dicadangkan	-	-	-	(2.484)	-	675	-	-	-	-
Laba Periode Berjalan	525.356	747.313	501.041	670.593	577.590	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85
Komponen Ekuitas Lainnya	1.874.049	1.909.600	1.901.287	1.909.600	(69.976)	-	98,57	98,14	(27.239)	(1,43)
Jumlah Ekuitas	5.649.956	6.070.005	5.302.152	5.044.132	2.543.689	2.265.062	106,56	93,08	347.804	6,56

Modal Saham

Modal saham di Bio Farma mencapai Rp2 triliun di 2017. Modal saham tersebut tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari 2016 yang mencapai Rp2 triliun.

Saldo Laba (Rugi)- Dicadangkan

Saldo Laba yang dicadangkan mengalami kenaikan sebesar Rp350,73 miliar atau 38,98%. Jumlah saldo laba yang dicadangkan tahun 2017 adalah Rp1,25 triliun.

Laba Periode Berjalan

Laba bersih tahun berjalan tahun 2017 tercatat sebesar Rp525,36 miliar naik 4,85% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp501,04 miliar.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya mengalami penurunan sebesar Rp27,24 miliar atau 1,43% dari senilai Rp1,90 triliun di tahun 2016 menjadi Rp1,87 triliun di tahun 2017.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif lain

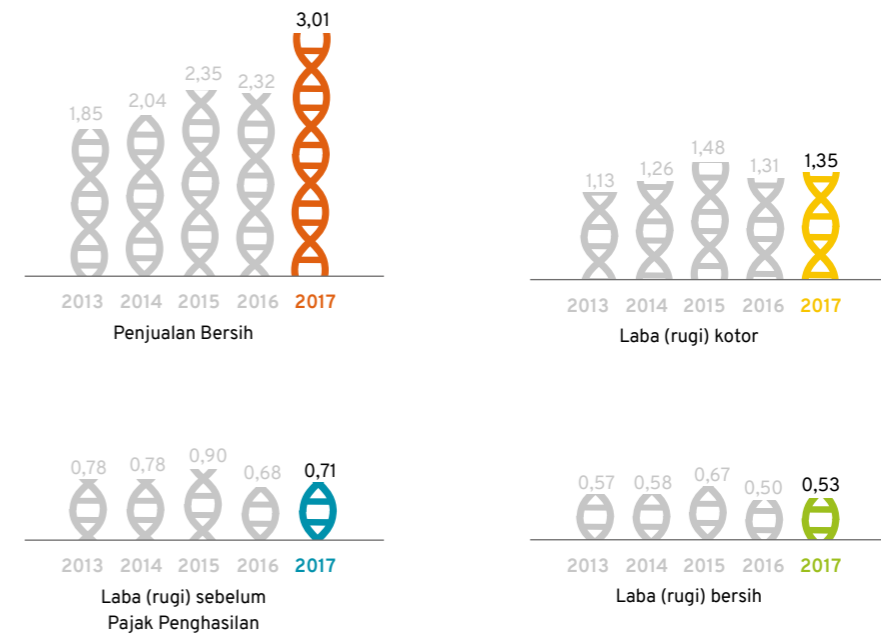
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.872.113	2.452.728	1.927.724	2.329.624	2.028.988	1.848.452	97,12	76,33	(55.611)	(2,88)
Produk Partnership	1.111.028	385.789	358.956	-	-	-	309,52	287,99	752.072	209,52
Trading Partnership	20.120	93.099	23.764	11.436	10.287	1.848	84,67	21,61	(3.644)	(15,33)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Jasa	8.310	8.599	5.315	4.858	4.805	3.382	156,35	96,64	2.995	56,35
Jumlah Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.216	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.812	30,05
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA										
Produk Perusahaan	(923.185)	(899.855)	(763.398)	(852.361)	(767.609)	(718.463)	120,93	102,59	(159.787)	20,93
Produk Partnership	(710.318)	(266.662)	(215.497)	-	-	-	329,62	266,37	(494.821)	229,62
Trading Partnership	(16.766)	(89.452)	(21.437)	-	-	-	78,21	18,74	4.671	(21,79)
Jasa	(6.861)	(6.285)	(4.962)	(3.962)	(3.654)	(3.986)	138,27	109,16	(1.899)	38,27
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.657.130)	(1.262.254)	(1.005.294)	(867.488)	(780.090)	(723.596)	164,84	131,28	(651.836)	64,84
LABA (RUGI) KOTOR	1.354.440	1.677.962	1.310.465	1.478.430	1.263.991	1.130.085	103,36	80,72	43.975	3,36
Penghasilan lain-lain	115.158	1.520	164.728	129.064	118.630	152.838	69,91	7576,18	(49.570)	(30,09)
Beban Administrasi dan Umum	(409.734)	(128.830)	(402.002)	(421.759)	(349.010)	(304.313)	101,92	318,04	(7.732)	1,92
Beban Penjualan	(137.478)	(402.122)	(133.996)	(126.818)	(99.182)	(72.830)	102,60	34,19	(3.482)	2,60
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(124.570)		(114.481)	(93.443)	(88.779)	(68.318)	108,81	96,69	(10.089)	8,81
Beban Bunga Pinjaman	(124.570)	(3.674)	(9.343)	-	-	-	1333,30	3390,58	(115.227)	1.233,30
Beban Lain-lain	(84.182)	(130)	(139.745)	(66.201)	(69.748)	(58.873)	60,24	-64.755,38	55.563	(39,76)
Jumlah	(640.807)	(671.999)	(625.497)	(579.157)	(488.089)	(351.496)	102,45	95,36	(15.310)	2,45
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	1.005.963	684.968	899.274	775.902	778.589	104,19	70,94	28.666	4,19
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak Kini	(194.907)	(263.158)	(185.425)	(232.893)	(197.136)	(207.288)	105,11	74,06	(9.482)	5,11
Pajak Tangguhan	6.629	4.508	1.498	4.213	3.427	1.166	442,52	147,05	5.131	342,52
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(188.278)	(258.650)	(183.927)	(228.681)	(193.709)	(206.121)	102,37	72,79	(4.351)	2,37
LABA (RUGI) BERSIH	525.356	747.313	501.041	670.593	582.193	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN										

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi										
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	1.980.782	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(27.238)	-	(8.313)	828.226	(21.701)	-	327,65	-	(18.925)	227,66
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	(27.238)	-	(8.313)	1.979.954	(21.323)	1.979.954	327,65	-	(18.925)	227,66
TOTAL PENGHASILAN KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN	498.117	747.313	492.728	2.650.547	560.870	572.468	101,09	66,65	5.389	1,09

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain [dalam triliun rupiah]



PENJUALAN BERSIH

Penjualan bersih Perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp695,81 miliar atau 30,05%, dari Rp2,32 triliun di 2016 menjadi Rp3,01 triliun di 2017. Kenaikan ini berasal dari penjualan produk *partnership* dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 209,52% dan 56,34%.

Tabel Penjualan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.872.113	2.452.728	1.927.724	2.329.624	2.028.988	1.848.452	97,12	76,33	(55.611)	(2,88)
Produk Partnership	1.111.028	385.789	358.956	-	-	-	309,52	287,99	752.072	209,52
Trading Partnership	20.120	93.099	23.764	11.436	10.287	1.848	84,67	21,61	(3.644)	(15,33)
Jasa	8.310	8.599	5.315	4.858	4.805	3.382	156,35	96,64	2.995	56,35
Jumlah Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.216	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.812	30,05



BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban pokok penjualan mengalami penurunan sebesar Rp651,84 miliar atau 64,84% dari Rp1,00 triliun di 2016 menjadi Rp1,66 triliun di 2017.

Tabel Beban Pokok Penjualan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Produk Perusahaan	(923.185)	(899.855)	(763.398)	(852.361)	(767.609)	(718.463)	120,93	102,59	(159.787)	20,93
Produk Partnership	(710.318)	(266.662)	(215.497)	-	-	-	329,62	266,37	(494.821)	229,62
Trading Partnership	(16.766)	(89.452)	(21.437)	-	-	-	78,21	18,74	4.671	(21,79)
Jasa	(6.861)	(6.285)	(4.962)	(3.962)	(3.654)	(3.986)	138,27	109,16	(1.899)	38,27
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.657.130)	(1.262.254)	(1.005.294)	(867.488)	(780.090)	(723.596)	164,84	131,28	(651.836)	64,84

LABA (RUGI) KOTOR

Laba bruto di 2017 mencapai Rp1,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp43,98 miliar atau 3,36% dari 2016 yang mencapai Rp1,31 triliun. Hal ini disebabkan peningkatan Penjualan bersih yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban pokok penjualan dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan.

Tabel Laba (Rugi) Kotor

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Jumlah Penjualan Bersih	3.011.571	2.940.216	2.315.759	2.345.918	2.044.080	1.853.682	130,05	102,43	695.812	30,05
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.657.130)	(1.262.254)	(1.005.294)	(867.488)	(780.090)	(723.596)	164,84	131,28	(651.836)	64,84
LABA (RUGI) KOTOR	1.354.440	1.677.962	1.310.465	1.478.430	1.263.991	1.130.085	103,36	80,72	43.975	3,36

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Laba sebelum pajak penghasilan di 2017 mencapai Rp713,63 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp28,67 miliar atau 4,19% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp684,97 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan pendapatan operasional lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban operasional.



Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
LABA (RUGI) KOTOR	1.354.440	1.677.962	1.310.465	1.478.430	1.263.991	1.130.085	103,36	80,72	43.975	3,36
Penghasilan lain-lain	115.158	1.520	164.728	129.064	118.630	152.838	69,91	7576,18	(49.570)	(30,09)
Beban Administrasi dan Umum	(409.734)	(128.830)	(402.002)	(421.759)	(349.010)	(304.313)	101,92	318,04	(7.732)	1,92
Beban Penjualan	(137.478)	(402.122)	(133.996)	(126.818)	(99.182)	(72.830)	102,60	34,19	(3.482)	2,60
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(124.570)	-	(114.481)	(93.443)	(88.779)	(68.318)	108,81	96,69	(10.089)	8,81
Beban Bunga Pinjaman	(124.570)	(3.674)	(9.343)	-	-	-	1333,30	3390,58	(115.227)	1.233,30
Beban Lain-lain	(84.182)	(130)	(139.745)	(66.201)	(69.748)	(58.873)	60,24	-64.755,38	55.563	(39,76)
Jumlah	(640.807)	(671.999)	(625.497)	(579.157)	(488.089)	(351.496)	102,45	95,36	(15.310)	2,45
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	1.005.963	684.968	899.274	775.902	778.589	104,19	70,94	28.666	4,19

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan mengalami peningkatan Rp4,35 miliar atau sebesar 2,37% dari Rp183,93 miliar di 2016 menjadi Rp188,28 miliar di 2017. Beban pajak penghasilan meningkat seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Tabel Beban Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pajak Kini	(194.907)	(263.158)	(185.425)	(232.893)	(197.136)	(207.288)	105,11	74,06	(9.482)	5,11
Pajak Tangguhan	6.629	4.508	1.498	4.213	3.427	1.166	442,52	147,05	5.131	342,52
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(188.278)	(258.650)	(183.927)	(228.681)	(193.709)	(206.121)	102,37	72,79	(4.351)	2,37

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN

Laba bersih periode berjalan di 2017 mencapai Rp525,36 miliar, meningkat sebesar Rp24,32 miliar atau sebesar 4,85% dari 2016 yang mencapai Rp501,04 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba bruto dan laba sebelum pajak.

Tabel Laba Bersih Periode Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	1.005.963	684.968	899.274	775.902	778.589	104,19	70,94	28.666	4,19
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(188.278)	(258.650)	(183.927)	(228.681)	(193.709)	(206.121)	102,37	72,79	(4.351)	2,37
LABA (RUGI) BERSIH	525.356	747.313	501.041	670.593	582.193	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak mengalami peningkatan Rp18,92 miliar atau sebesar 227,65% dari Rp8,31 miliar di 2016 menjadi Rp27,24 miliar di 2017.

Tabel Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	-	-	-	1.980.782	-	-	-	-	-	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	1.980.782	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(27.238)	-	(8.313)	828.226	(21.701)	-	327,66	-	(18.925)	227,66
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	(27.238)	-	(8.313)	1.979.954	(21.323)	1.979.954	327,66	-	(18.925)	227,66

PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan Rp5,39 miliar atau sebesar 1,09% dari Rp492,73 miliar di 2016 menjadi Rp498,12 miliar di 2017.

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
LABA (RUGI) BERSIH	525.356	747.313	501.041	670.593	582.193	572.468	104,85	70,30	24.315	4,85
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	(27.238)	-	(8.313)	1.979.954	(21.323)	1.979.954	327,65	-	(18.925)	227,66
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	498.117	747.313	492.728	2.650.547	560.870	572.468	101,09	66,65	5.389	1,09

LAPORAN ARUS KAS

Dengan arus kas operasi yang kuat Perusahaan memiliki posisi solid untuk tumbuh di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam pengungkapan dalam arus kas sebagai berikut.

Tabel Arus Kas

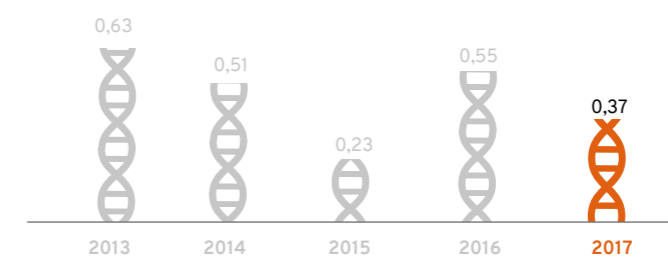
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI										
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.111.408	3.004.396	2.334.948	2.106.478	2.108.672	1.800.735	133,25	103,56	776.460	33,25
Penerimaan (Pembayaran) Pajak	(369.722)	(349.775)	(267.037)	(297.534)	(314.959)	(151.969)	138,45	105,70	(102.685)	38,45
Penerimaan Bunga	3.558	-	7.960	37.422	35.395	12.823	44,69	-	(4.403)	(55,31)
Penerimaan Hibah/Donasi WHO	1.917	-	13.588	800	4.989	1.278	14,11	-	(11.671)	(85,89)
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	613	1.520	1.238	(23.774)	11.673	(19.156)	49,55	40,37	(625)	(50,45)
Penerimaan Klaim Asuransi	575	-	-	-	107	-	-	-	575	-
Pembayaran Bunga	(8.071)	(3.674)	(9.343)	-	-	-	86,39	219,70	1.271	(13,61)
Pembayaran Tantiem	(11.021)	(14.750)	(14.750)	(13.737)	(9.727)	(6.980)	74,72	74,72	3.729	(25,28)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(2.362.898)	(2.065.122)	(1.519.679)	(1.584.191)	(1.330.310)	(1.003.850)	155,49	114,42	(843.219)	55,49
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	366.360	572.595	546.926	225.465	505.839	632.880	66,99	63,98	(180.566)	(33,01)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI										
Pembelian Aset Tetap	(293.309)	(1.782.105)	(393.170)	(535.175)	(163.149)	(192.644)	74,60	16,46	99.861	(25,40)
Penyertaan pada Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	-	-	-	-	(25.000)	-	-	-	-	-
Penyertaan pada Perusahaan Vial	-	(19.950)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aset Tak berwujud	(3.245)	(6.681)	(11.173)	(3.962)	(20.578)	(6.671)	29,04	48,57	7.928	(70,96)
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	-	(38.850)	-	25.000	-	138	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(296.554)	(1.847.586)	(404.343)	(514.137)	(208.727)	(199.176)	73,34	16,05	107.788	(26,66)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN										
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	-	-	235.000	-	-	-	-	-	(235.000)	(100,00)
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	-	(235.000)	-	-	-	-	-	235.000	(100,00)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7=1/3	8=1/2	9=1-3	10=9/3
Pembayaran Dividen dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	(150.313)	(128.317)	(234.707)	(149.727)	(228.987)	(113.938)	64,04	117,14	84.394	(35,96)
Modal Donasi dari WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(150.313)	1.071.683	(234.707)	(149.727)	(228.987)	(113.938)	64,04	(14,03)	84.394	(35,96)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(80.507)	(203.308)	(92.123)	(438.398)	68.125	319.765	87,39	39,60	11.616	(12,61)
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	2.103	-	(15.865)	22.621	12.341	72.988	(13,26)	-	17.969	(113,26)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	447.950	529.138	555.939	971.717	891.251	498.498	80,58	84,66	(107.989)	(19,42)
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	369.546	325.830	447.950	555.939	971.717	891.251	82,50	113,42	(78.404)	(17,50)

Grafik Laporan Arus Kas [dalam triliun rupiah]



Arus kas dari aktivitas operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 33,01% atau sebesar Rp180,57 miliar, dari Rp546,93 miliar di tahun 2016 menjadi Rp366,36 miliar di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan pada tahun 2016 sebesar Rp1,52 triliun menjadi Rp2,36 triliun di tahun 2017. Selain itu, terjadi pula peningkatan pembayaran kas yang digunakan untuk pembayaran pajak pada tahun 2016 sebesar Rp267,04 miliar dan di tahun 2017 menjadi Rp369,72 miliar.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 26,66% atau sebesar Rp107,79 miliar, dari senilai Rp404,34 miliar di tahun 2016 menjadi Rp296,55 miliar di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pengeluaran kas yang digunakan untuk penambahan aset tetap di tahun 2016 nilainya mencapai Rp393,17 miliar turun menjadi Rp293,31 miliar di tahun 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp234,71 miliar. Sementara di tahun 2017 terealisasi sebesar Rp150,31 miliar, peningkatan tersebut karena pembayaran dividen dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar 35,96% atau Rp84,39 miliar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas 2017 baik diukur dengan menggunakan Rasio Kas dan Rasio Lancar dengan pencapaian secara berurutan antara lain 63,76%, dan 338,90%. Berdasarkan besarnya rasio lancar, bahwa kemampuan Perusahaan dalam membayar utang di 2017 masih relatif baik.

Tabel Likuiditas

(dalam %)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Rasio Kas	63,76	44,18	98,85	121,74	286,08	228,74	64,51	144,34	(35,08)	(35,49)
Rasio Lancar	338,90	319,72	408,14	437,04	537,18	395,98	83,03	106,00	(69,24)	(16,97)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Rasio solvabilitas tahun 2017 sebesar 14,15% dalam kondisi baik meskipun tidak ada realisasi kredit investasi. Rasio utang terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Tabel Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Debt to Equity	14,15	36,62	11,70	12,62	19,69	19,34	120,95	38,64	2,45	20,95



RENTABILITAS

Secara umum realisasi rentabilitas tahun 2017 di bawah anggaran tahun 2017, hal ini terutama dipengaruhi oleh tingginya beban pokok penjualan dan jasa karena adanya perubahan komposisi produk yang dijual dari yang dianggarkan sebelumnya berupa Bulk Polio sedangkan realisasinya berupa produk *partnership* sehingga berdampak pada upaya Perusahaan dalam memperoleh laba.

Tabel Rentabilitas

(dalam %)

Uraian	2017	RKAP 2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2					7=1/3	8=1/2		
Gross Profit Margin	44,97	57,07	56,59	63,02	61,84	60,96	79,48	78,81	(11,61)	(20,52)
Operating Margin	22,67	34,29	28,50	35,65	35,57	36,93	79,54	66,10	(5,83)	(20,46)
Net Profit Margin	17,44	25,42	21,64	28,59	28,48	30,88	80,61	68,62	(4,20)	(19,39)
Return on Equity (ROE)	12,97	20,46	12,47	17,14	31,93	37,81	104,04	63,41	0,50	4,04
Return on Investment (ROI)	16,93	17,62	16,53	20,27	31,15	34,81	102,38	96,04	0,39	2,38
Return On Assets (ROA)	8,62	10,23	8,80	15,37	20,26	24,11	98,02	84,27	(0,17)	(1,98)

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan Bio Farma dalam menagih piutangnya. Untuk mengurangi risiko pembeli gagal bayar (*default*). Bio Farma menerapkan kebijakan distributor tidak melakukan pembayaran atau telat melakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Dikenakan denda 1% dari nilai faktur untuk tiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung berdasarkan hari kalender (tercantum dalam perjanjian distributorship pasal 12).
2. Barang yang dikirim ditahan terlebih dahulu sampai mereka melakukan pembayaran (SOP dan perjanjian *distributorship*).
3. Dilakukan klaim atas bank garansi distributor tersebut. klaim diajukan oleh Bagian Penjualan Sektor Swasta ke Bagian Administrasi Keuangan yang akan dilanjutkan ke Bank atau Asuransi yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. (Bank Garansi tercantum dalam Perjanjian Distributorship pasal 12 dan SOP).
4. Besaran bank garansi ditentukan oleh Pemasaran.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang

(dalam hari)

Uraian	2017		2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2017- 2016	Pertumbuhan (%)
	1	RKAP 2017 2					7=1/3	8=1/2		
Collection period	37,95	27,87	45,49	79,00	45,94	56,76	83,42	136,17	(7,54)	(16,58)
Average A/R	9,62	13,10	8,02	4,62	7,95	6,43	119,95	73,44	1,60	19,95

Pada akhir tahun 2017, *collection period* memperlihatkan perbaikan sebesar 7,54% menjadi 37,95 hari dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 45,49 hari. Hal ini menandakan bahwa piutang menjadi lebih cepat mencair menjadi kas.

STRUKTUR MODAL

Bio Farma menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perusahaan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Begitu juga dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Perusahaan. Kebutuhan permodalan direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Tujuan Perusahaan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada Pemegang Saham. Perusahaan harus memonitor modal berdasarkan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah hutang dengan total modal. Hutang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan. Struktur modal merupakan perimbangan antara pengguna modal sendiri dengan pinjaman/hutang yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL DAN DASAR PEMILIHAN

Perusahaan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan Ekuitas sebagai sumber modalnya. Sampai dengan 2017, struktur Modal Bio Farma masih didominasi oleh Ekuitas.

Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan dimasa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perusahaan telah efektif dan efisien.

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Oleh karena itu Bio Farma menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perusahaan.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2017 yang dimiliki oleh Bio Farma adalah 12,40% berasal dari liabilitas 87,60% dari ekuitas. Komposisi Liabilitas untuk tahun 2016 sebesar 10,47% dan ekuitas sebesar 89,53%.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017		2016		2015		2014		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek	579.556	8,99	453.169	7,65	456.663	8,04	339.668	11,16	389.637	14,41
Liabilitas Jangka Panjang	219.937	3,41	167.133	2,82	179.868	3,17	161.250	5,30	48.371	1,79
Jumlah Liabilitas	799.493	12,40	620.302	10,47	636.532	11,21	500.919	16,45	438.008	16,20
Ekuitas	5.649.956	87,60	5.302.152	89,53	5.044.132	88,79	2.543.689	83,55	2.265.062	83,80
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.449.449	100,00	5.922.454	100,00	5.680.663	100,00	3.044.608	100,00	2.703.070	100,00

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

NAMA PIHAK DAN TUJUAN IKATAN

Selama tahun 2017 Bio Farma melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan beberapa rekanan dengan tujuan pengadaan terkait dengan Penilaian *Assesment World Health Organization (WHO)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, Penggantian, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)/ Lingkungan, Peningkatan Kapasitas, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Produk Baru.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana intern Perusahaan yaitu dari RKAP 2017.

MATA UANG

Mata uang yang menjadi denominasi adalah Rupiah dan mata uang asing. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, keuangan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut, sebagai berikut.

Tabel Kurs Mata Uang Asing

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Euro (EUR)	16.173,62	14.161,55	15.069,67	15.133,26	16.821,44
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	13.548,00	13.436,00	13.759,00	12.440,00	12.189,00
1 Dollar Australia (AUD)	10.557,29	9.724,31	10.064,16	10.218,22	10.875,66
1 Dollar Singapura (SGD)	10.133,53	9.298,92	9.751,19	9.422,10	9.627,99
1 Poundsterling Inggris (GBP)	18.218,01	16.507,51	20.451,11	19.370,33	20.096,63
1 Frank Swiss (CHF)	13.842,15	13.177,76	13.951,29	12.582,82	13.731,78
1 Danish Krone Denmark (DKK)	2.172,34	1.905,09	2.019,32	2.031,90	2.254,99
1 Yen Jepang (JPY)	120,22	115,40	114,52	104,24	116,17

LANGKAH-LANGKAH YANG DIRENCANAKAN PERUSAHAAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING YANG TERKAIT

Dalam melakukan transaksi investasi, Perusahaan dapat menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang telah disepakati didalam perjanjian. Apabila Perusahaan menggunakan mata uang selain Rupiah, maka terdapat risiko nilai tukar (*currency exposure*), dalam hal ini Bio Farma selaku Perusahaan memiliki beberapa sumber penerimaan dalam bentuk mata uang asing, apabila memiliki exposure maka secara natural dapat terpenuhi dari penerimaan mata uang asing (*natural hedge*).

RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko risiko di atas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko penjualan kredit, Perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan.

Tabel Eksposur Maksimum Risiko Kredit dan Konsentrasi Risiko

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	2017			2016		
	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum
	Institusi	Lain-Lain		Institusi	Lain-Lain	
Piutang Usaha	313.138.277.507		313.138.277.507	288.626.423.903	-	288.626.423.903
Piutang Lain-Lain	1.302.637.458	121.769.028	1.424.406.486	1.302.637.458	446.140.212	1.748.777.670
Total	314.440.914.965	121.769.028	314.562.683.993	289.929.061.361	446.140.212	290.375.201.573

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Di samping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa yang datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga Perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif dibanding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (*natural hedging*) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan (*long position*) serta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka Perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar di atas, Perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan *Vendor* Luar Negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Tabel Detail Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan Yang Dipengaruhi Oleh Tingkat Suku Bunga

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
	Suku Bunga Mengembang Kurang Dari 1 Tahun	Suku Bunga Tetap Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah	Suku Bunga Mengembang Kurang Dari 1 Tahun	Suku Bunga Tetap Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
Kas dan Setara Kas	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Aset Keuangan	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Gap Suku Bunga	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.



NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms length*. Perusahaan memperhitungkan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya, sebagai dampak pendiskontoannya yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasi pada nilai kini arus kas masa depan pada tingkat bunga yang Pada 31 Desember 2017, tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka panjang.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Tujuan investasi barang modal untuk keperluan pengembangan Perusahaan adalah dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan melalui ekspansi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi lini usaha.

JENIS DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Adapun rincian terkait jenis dan nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Realisasi Investasi Berdasarkan Penggunaannya

(dalam jutaan Rupiah)

Kelompok Investasi	2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]	Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5			
Penilaian WHO DAN GMP								
Peralatan Kantor	1.611	1.250	1.867	1.327	1.013	128,88	361	28,88
Peralatan Pabrik	20.788	15.665	28.779	17.425	21.863	132,71	5.124	32,71
Peralatan Lainnya	-	-	595	3.133	7.142	-	-	-
Peralatan Bangunan	-	1.800	43.073	1.354	20.580	-	(1.800)	(100,00)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	4.826	-	7.632	56	-	(4.826)	(100,00)
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	22.399	23.540	74.314	30.873	50.655	95,15	(1.141)	(4,85)
PENGGANTIAN								
Peralatan Kantor	6.370	8.689	7.860	17.876	5.620	73,31	(2.319)	(26,69)
Peralatan Pabrik	17.958	20.582	13.700	7.320	23.284	87,25	(2.624)	(12,75)
Peralatan Lainnya	4.866	1.817	983	3.034	13.787	267,88	3.050	167,88
Peralatan Bangunan	1.157	2.438	807	909	2.122	47,47	(1.281)	(52,53)
Kendaraan Bermotor	-	30	384	750	-	-	(30)	(100,00)
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30.351	33.555	23.735	29.889	44.814	90,45	(3.204)	(9,55)
IPAL/K3/ LINGKUNGAN/ QUALITY CONTROL								
Peralatan Kantor	243	803	738	832	728	30,23	(560)	(69,77)
Peralatan Pabrik	11.367	13.021	13.706	9.277	479	87,30	(1.653)	(12,70)
Peralatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan Bangunan	1.360	9.884	378	25	424	13,76	(8.524)	(86,24)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-

Kelompok Investasi	2017	2016	2015	2014	2013	Kenaikan/ Penurunan [%]	Selisih 2017-2016	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6=1/2	7=1-2	8=7/2
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	12.970	23.708	14.822	10.133	1.632	54,71	(10.738)	(45,29)
PENINGKATAN KAPASITAS								
Peralatan Kantor	3.707	6.464	2.879	12.115	3.589	57,35	(2.757)	(42,65)
Peralatan Pabrik	312.148	284.970	160.586	482	8.067	109,54	27.178	9,54
Peralatan Lainnya	11.814	12.423	51.322	16.071	5.008	95,10	(609)	(4,90)
Peralatan Bangunan	38.689	70.321	180.371	37.561	90.904	55,02	(31.632)	(44,98)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	2.789	4.402	3.880	2.880	6.656	63,37	(1.612)	(36,63)
Tanah	40.268	-	-	-	-	-	40.268	-
Jumlah	409.415	378.580	399.039	69.109	114.224	108,14	30.835	8,14
LITBANG/RISET DASAR/DEVELOPMENT								
Peralatan Kantor	679	1.006	328	243	324	67,48	(327)	(32,52)
Peralatan Pabrik	47.075	42.293	5.946	7.886	19.579	111,31	4.782	11,31
Peralatan Lainnya	-	112	-	4.855	4.787	0,00	(112)	(100,00)
Peralatan Bangunan	4.187	28.079	3.698	-	-	14,91	(23.892)	(85,09)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	51.941	71.491	9.971	12.984	24.690	72,65	(19.550)	(27,35)
PRODUK BARU								
Peralatan Kantor	133	113	170	161	230	-	20	17,56
Peralatan Pabrik	14.159	8.947	20.645	7.058	9.449	158,24	5.211	58,24
Peralatan Lainnya	-	-	907	4.925	1.233	-	-	-
Peralatan Bangunan	5.943	1.776	31	-	819	334,70	4.167	234,70
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	393	961	1.339	9.492	530	40,96	(567)	(59,04)
Jumlah	20.628	11.797	23.093	21.636	12.262	174,86	8.831	74,86
Total	547.704	542.671	544.974	174.623	248.276	100,93	5.034	0,93



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

INVESTASI

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma tidak melakukan kegiatan investasi.

EKSPANSI

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma tidak melakukan kegiatan ekspansi.

DIVESTASI

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET 2017

Realisasi penjualan tahun 2017 meningkat 2,43% dari target yang telah ditetapkan, namun dari sisi pencapaian laba bersih turun sebesar 29,70% dari target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi terutama akibat turunnya penjualan vaksin Polio, dimana vaksin Polio tersebut memiliki margin laba cukup tinggi. Laporan pencapaian Laba tahun 2017 tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel Pencapaian Target

(dalam jutaan Rupiah)

Pos Pos Keuangan Utama	Target RKAP 2017	Realisasi 2017	Pencapaian Target		Deviasi	
	Rp	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4 = 3/2*100%	5 = 3 - 2	6 = 5/2*100%	
PENJUALAN BERSIH						
Produk Perusahaan	2.452.728	1.872.113	76,33	(580.615)	(23,67)	
Produk <i>Partnership</i>	385.789	1.111.028	287,99	725.239	187,99	
<i>Trading Partnership</i>	93.099	20.120	21,61	(72.979)	(78,39)	
Jasa	8.599	8.310	96,64	(289)	(3,36)	
Jumlah Penjualan Bersih	2.940.216	3.011.571	102,43	71.355	2,43	
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA						
Produk Perusahaan	(899.855)	(923.185)	102,59	(23.330)	2,59	
Produk <i>Partnership</i>	(266.662)	(710.318)	266,37	(443.656)	166,37	
<i>Trading Partnership</i>	(89.452)	(16.766)	18,74	72.686	(81,26)	
Jasa	(6.285)	(6.861)	109,16	(576)	9,16%	
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.262.254)	(1.657.130)	131,28	(394.876)	31,28%	
LABA (RUGI) KOTOR	1.677.962	1.354.440	80,72	(323.522)	(19,28%)	
Penghasilan lain-lain	1.520	115.158	7576,18	113.638	7476,18	
Beban Administrasi dan Umum	(128.830)	(409.734)	318,04	(280.904)	218,04	
Beban Penjualan	(402.122)	(137.478)	34,19	264.644	(65,81%)	
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans		(124.570)		(124.570)		
Beban Bunga Pinjaman	(3.674)	(124.570)	3390,58	(120.896)	3290,58	
Beban Lain-lain	(130)	(84.182)	64.755,38	(84.052)	64.655,38	
Jumlah	(671.999)	(640.807)	95,36	31.192	(4,64)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.005.963	713.634	70,94	(292.329)	(29,06)	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Pajak Kini	(263.158)	(194.907)	74,06	68.251	(25,94)	
Pajak Tangguhan	4.508	6.629	147,05	2.121	47,05	
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(258.650)	(188.278)	72,79	70.372	(27,21)	
LABA (RUGI) BERSIH	747.313	525.356	70,30	(221.957)	(29,70)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi						
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	

Pos Pos Keuangan Utama	Target RKAP 2017	Realisasi 2017	Pencapaian Target		Deviasi	
	Rp	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4 = 3/2*100%	5 = 3 - 2	6 = 5/2*100%	
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	-	(27.238)	-	-	-	
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	-	(27.238)	-	-	-	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	747.313	498.117	66,65	(249.196)	(33,35)	

PROYEKSI 2018

Manajemen Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Perusahaan untuk tahun 2018 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2018, baik dari segi makro maupun mikro. Rencana Bisnis Perusahaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel Proyeksi

(dalam jutaan Rupiah)

Pos Pos Keuangan Utama	Proyeksi 2018
PENJUALAN BERSIH	
Produk Perusahaan	2,102,189
Produk <i>Partnership</i>	1,130,590
<i>Trading Partnership</i>	41,894
Jasa	9,006
Jumlah Penjualan Bersih	3,283,680
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA	
Produk Perusahaan	(998,443)
Produk <i>Partnership</i>	(740,047)
<i>Trading Partnership</i>	(34,149)
Jasa	(7,908)
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1,780,548)
LABA (RUGI) KOTOR	1,503,132
Penghasilan lain-lain	3,672
Beban Administrasi dan Umum	(403,595)
Beban Penjualan	(154,578)
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(150,703)
Beban Bunga Pinjaman	(11,877)
Beban Lain-lain	(1,103)
Jumlah	(718,185)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	784,947
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	

Pos Pos Keuangan Utama	Proyeksi 2018
Pajak Kini	(208,933)
Pajak Tangguhan	5,163
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(203,770)
LABA (RUGI) BERSIH	581,177
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	
Surplus Revaluasi Aset Tetap	
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	581,177

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI 2018

Untuk memenuhi sasaran Perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, secara umum dapat dikemukakan beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi perhitungan sebagai berikut.

- Nilai tukar rupiah terhadap 1 US \$ sebesar Rp13.500
- Tingkat suku bunga sebesar 5,3%.
- Tingkat inflasi 3,5%.
- Pertumbuhan Ekonomi 5,4%.
- Harga jual vaksin ke Pemerintah tidak mengalami kenaikan.
- Dividen dari laba bersih tahun 2017 sebesar 20%.

Parameter tersebut diatas diperkirakan akan berdampak terhadap:

- Jumlah sasaran cakupan imunisasi.
- Kemampuan masyarakat dan anggaran Pemerintah dalam pembiayaan kesehatan termasuk untuk imunisasi.
- Kenaikan harga barang dan jasa yang diperlukan dalam operasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri (impor).
- Rencana penjualan, beban Perusahaan, investasi dan target laba Perusahaan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Terdapat pergantian Direksi dengan tanggal dan SK Pengangkatan sebagai berikut.

Direksi	No SK Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Direktur Lama	Direktur Baru
Direktur Utama	SK-27/MBU/01/2018	23 Januari 2018	Juliman*	M. Rahman Roestan
Direktur Pemasaran	SK-27/MBU/01/2018	23 Januari 2018	M. Rahman Roestan	Sri Harsi Teteki
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	SK-101/MBU/04/2018	20 April 2018	Sugeng Raharso	Adriansjah Azhari
Direktur Keuangan	SK-101/MBU/04/2018	20 April 2018	Pramusti Indrascaryo	Pardiman

*Pelaksana Tugas

Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kinerja Perusahaan atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode Laporan Akuntan.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Bio Farma memiliki kebijakan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham setidaknya satu kali setahun. Berdasarkan hasil perolehan laba bersih tahun 2017 yaitu sebesar Rp525,36 miliar manajemen mengusulkan pembagian laba sebagai berikut.

Dividen	20%	=	Rp105.071.122.000
Cadangan	80%	=	Rp420.284.488.161
Jumlah	100%	=	Rp525.355.610.161

Cadangan diusulkan sebesar Rp420,28 miliar atau 80% dari laba bersih untuk mendanai rencana investasi tahun 2018 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1,18 triliun dan memperkuat modal kerja sehubungan dengan peningkatan beban penelitian, pengembangan dan *surveilans* untuk menghasilkan produk baru dan *sustainable growth*.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Pembagian atas laba bersih tahun 2016 dan 2015 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan laporan keuangan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, dan pembagian laba bersih tahun buku 2016 dan 2015 pada tanggal 10 Mei 2017 dan 10 Juni 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Dividen Tahun Buku 2015-2016

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2015
Laba Bersih	501.040.990.083	670.592.891.245
Dividen	150.313.000.000	234.707.000.000
Dividen Kas Per Saham*	-	-
Dividend Pay Out Ratio (%)	30%	35%
Tanggal Pengumuman	10 Mei 2017	10 Juni 2016
Tanggal Pembayaran	30 Mei 2017	29 Juni 2016

*) Bio Farma per 31 Desember 2017 merupakan salah satu BUMN *non listed* yang komposisi kepemilikan saham 100% Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah Dividen Kas Per Saham.



Kewajiban dividen dari laba bersih tahun buku 2016 yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan tahunan tahun buku 2016 pada tanggal 10 Mei 2017 adalah sebesar Rp150.313.000.000,00. Untuk kewajiban dividen atas laba bersih tahun buku 2017 akan ditetapkan pada RUPS tentang Laporan Tahunan tahun buku 2017.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2017, sesuai dengan karakteristik Bio Farma yang 100% dimiliki oleh Pemerintah maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan (ESOP/MSOP) di Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi dengan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai 31 Desember 2017, Bio Farma adalah perusahaan negara yang tidak melakukan penawaran saham dan obligasi di bursa, sehingga tidak adanya realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum di dalam Ekuitas. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum seperti total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi. Secara umum persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sebagai mana dilakukan dengan pihak ketiga. Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2017 dilakukan secara wajar (*Arm's Length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak terkait atau mengandung benturan kepentingan telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bio Farma beserta sifat dari transaksi tersebut.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi	Hubungan dengan Perusahaan	Sifat Saldo Akun /Transaksi
Bank Milik Negara/ Daerah	Entitas Sepengendali	Kas dan setara kas
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Indofarma Global Medika (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Lain-lain
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
Koperasi Karyawan Bio Farma	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
CV Karya Cahya Abadi	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
Pihak Berelasi Lainnya	Entitas Sepengendali	Lain-lain dengan transaksimasing-masing dibawah Rp1

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap Jumlah Aset	Jumlah	% terhadap Jumlah Aset
Kas dan Setara Kas	369.362.205.418,52	5,73%	440.760.856.520,38	7,52%
Piutang Usaha	9.214.473.247,32	0,14%	12.281.476.667,02	0,21%
Piutang Lain-lain	1.302.637.458,00	0,02%	1.302.637.458,00	0,02%
Uang Muka Pembelian	-	-	-	-
Lokal	-	0,00%	834.000.000,00	0,01%
Pendapatan yang Masihakan diterima	13.994.095,00	0,00%	221.375.000,00	0,004%
Utang Usaha				
Koperasi Karyawan Bio Farma	10.179.747.608,00	0,16%	14.869.209.175,93	0,25%
CV Karya Cahya Abadi	2.420.885.452,00	0,04%	1.652.232.908,17	0,03%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	0,00%	8.351.209.044,81	0,14%
PT Pertamina (Persero)	3.405.240.000,00	0,05%	-	0,00%
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	194.204.873,00	0,00%	160.990.986,00	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.350.000.000,00	0,02%	-	0,00%
PT INTI	-	0,00%	71.221.650,00	0,00%
Jumlah	397.443.388.151,84	6,16%	480.505.209.410,31	8,19%

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Selama tahun 2017, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya (kualitatif dan/atau kuantitatif) terhadap Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan Bio Farma untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (*accrual basis*), kecuali untuk laporan arus kas.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

ALASAN PENERAPAN

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku. Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017

PERUBAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Pada tahun 2016 dan 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen beberapa PSAK, serta mengesahkan SAK dan ISAK yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017.
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Selain itu, perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Amandemen, Interpretasi, dan Penyesuaian standar, serta SAK yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi, mengamandemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah *property* memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif, mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (*bearer plants*) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing. Berlaku efektif 1 Januari 2019, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 69: Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 73: Sewa, menetapkan prinsip pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

DAMPAK PERUBAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Penerapan standar-standar yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan. Untuk dampak dari standar/penyesuaian dan interpretasi tahun 2018-2020 Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap Perusahaan di tahun 2017.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Menjelang eradikasi polio pada tahun 2020 dimana penggunaan Vaksin Polio Oral (*Oral Polio Vaccine/OPV*) akan diberhentikan dan diganti dengan vaksin IPV (*Inactivated Polio Vaccine*), laju pertumbuhan pendapatan Bio Farma berpotensi untuk mengalami penurunan yang drastis karena sekitar 60% pendapatan diperoleh dari vaksin polio. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Bio Farma melakukan beberapa strategi melalui peningkatan kapasitas produksi atas produk-produk yang telah mendapatkan *Pre Qualification* World Health Organization (PQ WHO) dan melakukan kemitraan (*partnership*) untuk produk baru baik berupa kerjasama riset dan pengembangan serta pemasaran.

Penelitian dan pengembangan produk dilakukan sesuai dengan tren dan berupaya melakukan percepatan sehingga *time to market* produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Bio Farma bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam dan luar negeri agar dapat mempercepat ketersediaan produk di pasar. Saat ini sedang mengintensifkan pengembangan produk baru antara lain yaitu vaksin S-IPV, Rotavirus, vaksin Pneumococ, vaksin Typhoid konjugat dan vaksin Hep B. Selain itu, Bio Farma telah memulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM) dan insulin; dan berencana untuk mengembangkan produk kelompok *blood product*.

Bio Farma menyiapkan lahan baru di Jasinga Bogor sebagai *Lifescience Park* yang akan digunakan sebagai fasilitas *research and development* dan produksi produk baru, pusat riset bioteknologi dan serta pusat hewan laboratorium. *Lifescience Park* ini disiapkan untuk kemandirian penyediaan vaksin, produk biosimilar, *stemcell*, *blood product*, mAB (monoclonal Anti Body) dan diagnostik standar internasional serta sebagai pengembangan area pusat riset bioteknologi dan hewan laboratorium. Dengan adanya fasilitas *Lifescience park* tersebut diharapkan menghasilkan produk baru yang *time efficient to market* sampai 50% serta diharapkan memiliki aspek sosial berupa turunya biaya pengobatan sampai 70% dan berkurangnya jumlah kematian dan penularan penyakit sebesar 80-100%.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Dalam evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi kelangsungan usaha, Bio Farma memiliki Divisi *Compliance and Risk Management*, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan *Quality Assurance* (QA).

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas



4. Masalah Internal
5. Tingkat inflasi
6. Nilai tukar
7. Indikator pelaksanaan tata kelola Perusahaan

ASPEK PERPAJAKAN

PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

Bio Farma dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya. Bio Farma telah menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAYARAN PAJAK

Total Pembayaran Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh)

Uraian Pajak	Tahun 2017
PPh Pasal 21	68.559.185.413
PPh Final Pasal 4 (2)	1.807.726.514
PPh Pasal 22	7.671.294.580
PPh Pasal 23	3.517.071.011
PPh Pasal 25 Angsuran Bulanan	244.656.476.112
PPh Pasal 22 Impor (Kredit)	22.111.262.000
PPh Pasal 22 (Kredit)	9.574.119.920

Uraian Pajak	Tahun 2017
PPh Pasal 23 (Kredit)	29.006.674
PPN	175.370.448.462
Pajak Daerah	1.711.849.846
Pajak Lainnya	3.051.726.988
Total	538.060.167.834

KESEHATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara, maka realisasi kinerja Perusahaan selama tahun 2017 pada kriteria "Sehat AA" dengan skor 86,00 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017

No	Uraian	Bobot	2017	
			Nilai	Skor
I ASPEK KEUANGAN				
1	Imbalan Kepada Pemegang Saham/ <i>Return on Equity</i> (ROE)	20,00	12,97%	16,00
2	Imbalan Investasi/ <i>Return on Investment</i> (ROI)	15,00	16,93%	13,50
3	Rasio Kas/ <i>Cash Ratio</i>	5,00	63,76%	5,00
4	Rasio Lancar/ <i>Current Ratio</i>	5,00	338,90%	5,00
5	Perputaran Piutang/ <i>Collection Period</i> (CP)	5,00	37,95 hari	5,00
6	Perputaran Persediaan/ <i>Inventory Turnover</i> (IT)	5,00	86,40 hari	4,50
7	Perputaran Total Aset/ <i>Total Asset Turnover</i> (TATO)	5,00	60,05%	3,00
8	Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA)	10,00	83,51%	7,00
TOTAL NILAI (I)		70,00		59,00
B ASPEK OPERASIONAL				
1	Effisiensi Produksi dan Produktivitas	5,00	Rp1.529,32	3,00
2	Pemeliharaan kontinuitas Produksi	5,00	17,57%	4,00
3	Penugasan Pemerintah		100%	3,00
4	Penelitian dan Pengembangan	5,00	94,36%	2,00
TOTAL NILAI (II)		15,00		12,00
C ASPEK ADMINISTRASI				
1	Laporan Perhitungan Tahunan	3,00	100,00%	3,00
2	Rancangan RKAP	3,00	100,00%	3,00
3	Laporan Periodik	3,00	100,00%	3,00
4	Kinerja PKBL:			
	a. Efektifitas Penyaluran Dana	3,00	97,08%	3,00
	b. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	3,00	75,77%	3,00
TOTAL NILAI (III)		15,00		15,00
TOTAL SKOR		100,00		86,00
SEHAT AA				

INDIKATOR UTAMA PERUSAHAAN

Perhitungan sepuluh indikator utama Perusahaan tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Indikator Utama Perusahaan

URAIAN	REALISASI 2017	RKAP 2017	REALISASI 2016	REALISASI 2015
Pertumbuhan [%]				
a. Pendapatan/Penjualan Netto	130,05	113,64	98,71	114,77
b. Laba Usaha	103,44	112,37	78,91	115,05
c. Laba Sebelum Pajak	104,18	116,37	76,17	115,90
<i>Return On Investment (ROI) * [%]</i>	11,07	12,13	11,57	15,83
<i>Profit Margin (PROMA) [%]</i>	23,70	34,21	29,58	38,33
<i>Company Productivity (COPRO) [Rp/orang]</i>	1.138.592.914,10	1.413.980.732,55	1.119.272.626,90	1.312.570.440,89
<i>Employee Productivity (EMPRO) [Rp/orang]</i>	2.557.877.861,54	2.411.989.709,26	1.997.081.801,28	2.095.356.606,81
<i>Asset Productivity (ASPRO) [%]</i>	46,70	35,45	39,10	41,30
<i>Inventory Turn Over (ITO) [kali]</i>	2,33	1,53	1,72	2,20
<i>Receivable Turn Over (RTO) [kali]</i>	10,08	11,46	5,87	6,17
<i>Base Cost Productivity (BASE PRO) [%]</i>	77,33	65,71	71,50	64,35
Quality Performance Rate [%]				
a. Product Defect	0,42	-	0,61	1,75
b. Material Defect	-	-	0,48	0,15

*) KEP.210/M-PBUMN/1999





Tata Kelola Perusahaan

“

Bio Farma berkomitmen dan telah menerapkan Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global. Penerapan GCG pada Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul dan bermartabat.

Good Corporate Governance



Bio Farma telah merasakan manfaat dari diterapkannya *good corporate governance*. Selain adanya peningkatan kinerja baik dari sisi operasional maupun keuangan secara berkelanjutan, Bio Farma mendapat pengakuan dari masyarakat dengan diperolehnya beberapa penghargaan. Di tahun 2017, Bio Farma meraih penghargaan antara lain Indonesia *Most Admirer Companies* dari Warta Ekonomi dan Indonesia *Global Brand 2017* dari SWA.



KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN GOVERNANCE OUTCOME

Perusahaan dalam persaingan global dituntut untuk *sustain* oleh *stakeholders* dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Faktor Utama penentu daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan publik dalam sistem tata kelola berbagai sektor. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara fundamental menjadi landasan yang kuat bagi Bio Farma dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global.

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh Karyawan Bio Farma atau yang biasa disebut dengan Insan Bio Farma menjunjung tinggi komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap Insan Bio Farma. Dengan GCG, Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul dan bermartabat dengan budaya Perusahaan yaitu *Professional, Integrity, Team Work, Innovation, dan Customer Oriented*.

Dengan terwujudnya GCG, Bio Farma mampu mengoptimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.



ARTI PENTING GCG BAGI BIO FARMA

Bagi Perusahaan, GCG merupakan sebuah kebutuhan. GCG memiliki arti penting bagi Bio Farma yaitu:

1. Untuk menambah dan memaksimalkan nilai Perusahaan guna memenangkan kompetisi Global.
2. Untuk menghindari *fraud* dan KKN.
3. Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Sedangkan tujuan penerapan GCG di Bio Farma adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memaksimalkan nilai Perusahaan guna memenangkan kompetisi global.
2. Untuk menghindari *fraud* dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan di lingkungan sekitar Perusahaan dan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

MANFAAT PENERAPAN GCG

Penerapan GCG diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Perusahaan, antara lain:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung Pemegang Saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan Perusahaan yang baik, menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh Perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko Perusahaan.
3. Meningkatnya citra Perusahaan kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan Perusahaan terhadap keberadaan, strategi dan kebijakan yang ditempuh Perusahaan, karena mendapat jaminan dari segala tindakan dan operasi Perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
5. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
6. Perusahaan dapat mengoptimalkan perolehan laba dan nilai pertumbuhan yang tinggi.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Good Corporate Governance (GCG) hadir sebagai sebuah kerangka dan acuan bagi Bio Farma dalam melakukan pengelolaan Perusahaan yang baik dan benar. Penerapan GCG yang efektif dan seimbang membutuhkan peran dan kontribusi positif dari seluruh Insan Bio Farma yang melaksanakannya.

Penerapan GCG di Bio Farma bertujuan untuk mencapai keberhasilan atas filosofi, visi, misi, dan tujuan Perusahaan, yang berlandaskan atas 5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* disingkat TARIF.

1. **Transparency** (Transparansi)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.
2. **Accountability** (Akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban)
Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Independency** (Kemandirian)
Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Fairness** (Kewajaran)
Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

DASAR PENERAPAN GCG

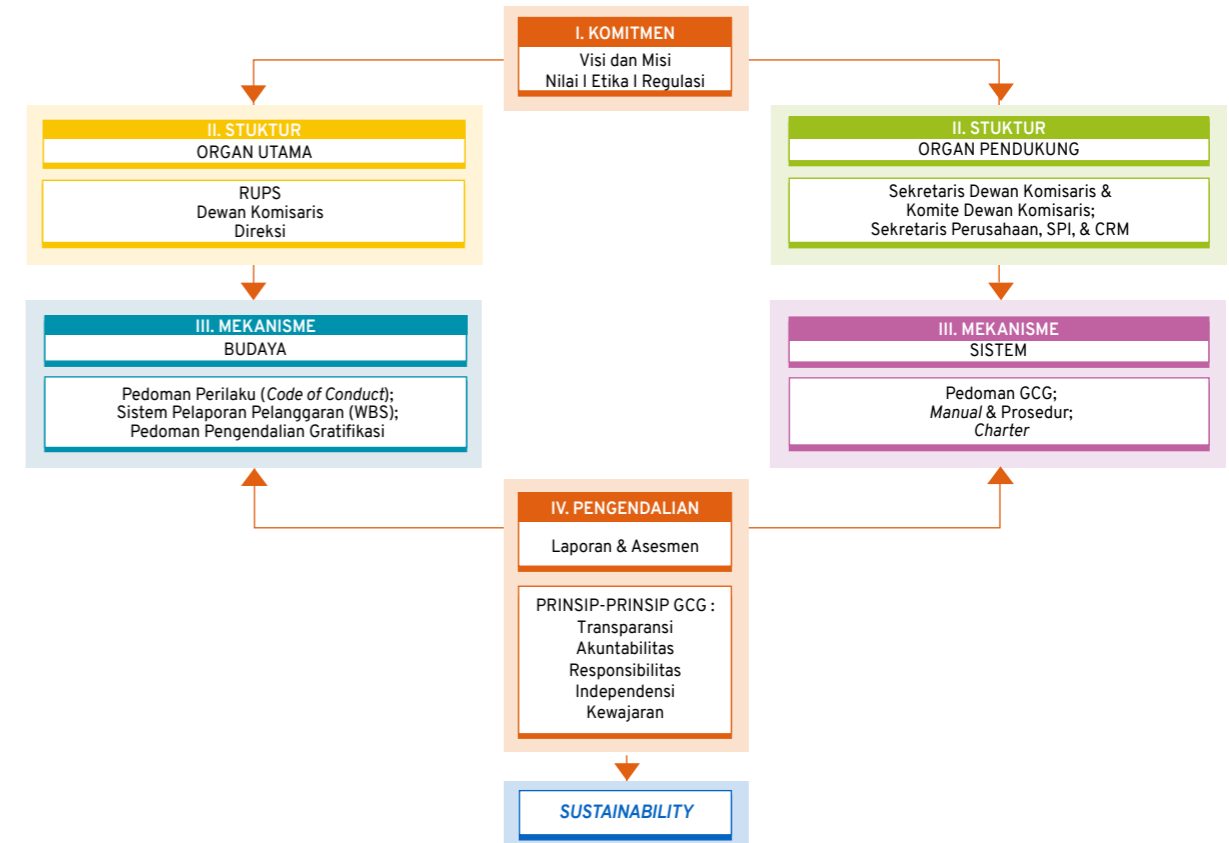
Penerapan *good corporate governance* pada Bio Farma senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penerapan *corporate governance* di Bio Farma adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan *Good Corporate Governance* yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perusahaan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

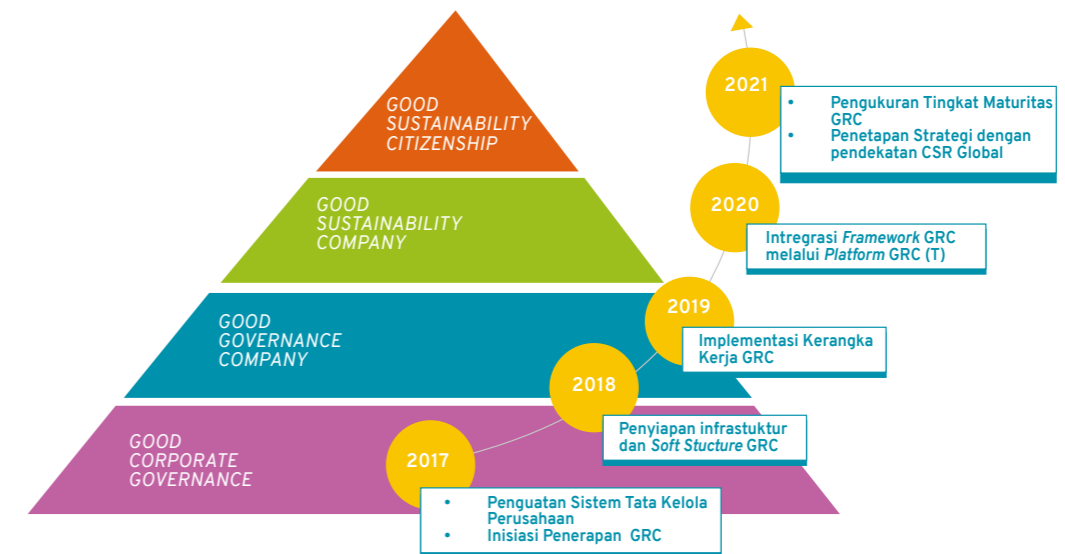
Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan. Komitmen Perusahaan terhadap penerapan GCG ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



GCG menjadi Filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, dan cara kerja setiap insan Bio Farma. Melalui GCG Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai perusahaan yang unggul

ROADMAP GCG

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga menjadi semakin baik lagi, manajemen telah menetapkan *Roadmap GCG* tahun 2017-2021 yang terbagi atas 4 (empat) fase yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 5 (lima) tahun. Sasaran akhir yang hendak dicapai adalah posisi sebagai perusahaan global yang penetapan strateginya melalui pendekatan CSR Global dan mampu mengukur tingkat maturitas *Governance, Risk and Compliance* (GRC) menuju *Good Sustainability Citizenship*. Untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja Bio Farma, maka Bio Farma memperbaiki *Roadmap GCG* sebagai berikut:





STRATEGI DAN RENCANA PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA
1. Membangun komitmen dari Direksi dan seluruh pimpinan Divisi/Bagian untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko korporat.	1. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, regulasi dan standar Internasional yang berkaitan dengan aktivitas dan produk yang dihasilkan Perusahaan.	1. Melakukan penyusunan, reviu serta <i>monitoring</i> atas dokumen hukum (Keputusan Direksi, Nota Dinas) dan Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan
2. Bekerjasama antar unit di perusahaan dan instansi lain terkait kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan manajemen risiko serta memanfaatkan fasilitas jaringan yang tersedia (intranet, internet, <i>email</i> , dan lainnya) untuk memperoleh dan menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan, regulasi dan tata kelola perusahaan	2. Pelaksanaan tata kelola perusahaan senantiasa berlandaskan pada lima prinsip yakni <i>transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness</i> , serta nilai Perusahaan yakni <i>professional, integrity, teamwork, innovation, dan customer oriented</i> .	2. Melakukan identifikasi, sosialisasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kepatuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, K3 dan yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan
3. Mengelola Risiko Korporat yang disusun atas hasil identifikasi semua potensi kejadian/risiko yang ada di semua Unit Risiko (Bagian).	3. Mengimplementasikan kebijakan tentang Penerapan GCG di perusahaan, Kode Etik Perilaku Perusahaan, Panduan Tata Kelola Perusahaan Bagi Direksi, dan Pedoman Penilaian Internal GCG.	3. Melakukan identifikasi dan <i>monitoring</i> atas perizinan yang diperlukan Perusahaan.
4. Menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko.	4. Menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan dengan rujukan ISO 31000.	4. Melakukan kajian hukum dan memberikan legal opinion yang diperlukan
5. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajemen risiko, hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.	5. Tuntutan multi - regulasi dan cakupan ruang lingkup yang luas.	5. Melakukan konsultasi permasalahan hukum.
6. Mensosialisasikan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan menjadikannya sebagai budaya kerja di lingkungan Perusahaan.	6. Menerapkan ISO 22301 <i>Business Continuity Management System</i> .	6. Melakukan <i>review</i> , pemutakhiran dan sosialisasi atas kebijakan/Pedoman dan SOP tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko sesuai aturan yang berlaku.
		7. Mendampingi pelaksanaan <i>assessment</i> penerapan GCG, KPKU dan melakukan perbaikan atas rekomendasinya.
		8. Membuat Laporan Manajemen Risiko Korporat (ERM), dan <i>Monitoring</i> Implementasi Manajemen Risiko Korporat (ERM).

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA
7. Memonitor pelaksanaan penanganan tindak lanjut atas identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh semua Unit Risiko (Bagian) baik rutin maupun proyek.		9. Implementasi aplikasi IT GRC.
8. Menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko dengan membangun IT GRC.		10. Melakukan konsultasi implementasi GCG, ERM, aplikasi IT GRC, dan KPKU.
9. Menyediakan SDM yang kompeten untuk membangun konsep GRC dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) - <i>Single GRC Platform</i> .		11. Menyusun kebutuhan pelatihan di bidang hukum, tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko di Divisi CRM.
10. Berkoordinasi dengan unit/Divisi lain untuk membangun infrastruktur dan <i>soft structure Business Continuity Management System (BCMS)</i> serta menetapkan prosedur dan melakukan pengujian atas BCMS yang dibangun.		12. Menyusun infrastruktur dan <i>soft structure</i> GRC.
		13. Pengukuran Tingkat Kematangan GRC (<i>Maturity Level</i>).
		14. Menyusun prosedur, menerapkan dan melakukan pengujian terhadap BCMS.
		15. Perolehan penghargaan di bidang GCG.

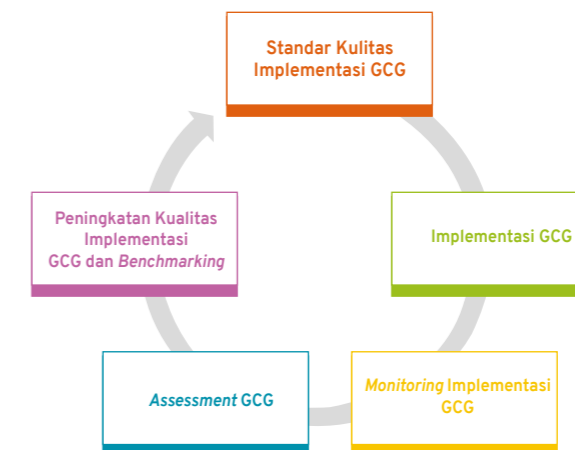
GOVERNANCE OUTCOME

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. Dengan terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bio Farma mampu mengoptimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan. Ini dapat dilihat dari perolehan skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Bio Farma tahun 2017 mencapai 537 atau naik 5,24% atau 26,75 poin dibanding skor tahun 2016 sebesar 510,25. Pencapaian skor ini menjadikan Bio Farma masuk dalam klasifikasi *Good Performance*. Meningkatnya skor hasil evaluasi yang dilakukan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) ini, membuktikan bahwa komitmen penerapan Tata Kelola di Bio Farma semakin baik, efektif sehingga kinerja Perusahaan semakin meningkat.

PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

Pada prinsipnya penerapan GCG di Bio Farma berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh tenaga kerja dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan.

Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.



Penerapan GCG pada Bio Farma meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. *Awareness Building*
Membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG. Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka, pemasangan banner, poster, wallpaper dekstop, video animasi, *email*, majalah/buletin, aplikasi GCG, dan *website*.
 - b. *GCG Assessment*
Mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk menindaklanjutinya.
 - c. *GCG Manual Building*
Penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk Organ Perusahaan dan manual untuk seluruh unit kerja, mencakup berbagai aspek seperti:
 - Kebijakan GCG
 - Pedoman GCG
 - Piagam/*Charter* Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, serta Satuan Pengawasan Intern.
 - Kebijakan *Disclosure* dan Transparansi
 - Kebijakan Manajemen Risiko
 - Kebijakan Teknologi Informasi
 - Kebijakan Sumber Daya Manusia
 - Pedoman dan Prosedur Baku Setiap Unit Kerja
2. Tahap Implementasi
 - a. Sosialisasi
Memperkenalkan kepada Insan Bio Farma berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG.
 - b. Implementasi
Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada dan berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi mencakup pada upaya manajemen perubahan guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
 - c. Internalisasi
Upaya untuk memperkenalkan GCG ke dalam seluruh proses bisnis Perusahaan dan berbagai peraturan di Perusahaan.
3. Tahap Evaluasi
Dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan bantuan dari pihak independen untuk melakukan penilaian atas implementasi/praktik GCG yang ada.

PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Perseroan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking*.

Standar implementasi GCG di Perseroan khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Praktik penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bio Farma adalah sebagai berikut:

Transparency (T)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan Perusahaan. • Informasi penting lainnya kepada <i>stakeholders</i> melalui <i>website</i>, media massa, dan lain-lain.
Accountability (A)	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS mengesahkan RKAP dan Laporan Tahunan. • Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang kepengurusan Perusahaan. • Direksi memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. • Kejelasan tugas dan fungsi tercermin dalam Struktur Organisasi.
Responsibility (R)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kewajiban perpajakan. • Melaksanakan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. • Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan sekitar.
Independency (I)	<ul style="list-style-type: none"> • Organ Perusahaan saling menghormati dan tidak mencampuri hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing organ. • Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Bio Farma dalam pengambilan keputusan selalu menghindari benturan kepentingan.
Fairness (F)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai peraturan yang berlaku. • Perusahaan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dan meningkatkan kompetensi karyawan.

Beberapa aktivitas kunci yang mencerminkan penerapan *corporate governance* di Bio Farma antara lain:

1. Perusahaan melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).
2. Perusahaan menetapkan KPI untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial menjalankan fungsi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
4. Perusahaan dikelola dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan.
5. Direksi dan pejabat di Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan.
6. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan) serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
7. Satuan Pengawasan Intern (SPI) merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit, memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko dan pengendalian intern, memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan, dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.
8. Sekretaris Perusahaan memastikan Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai penghubung (*liaison officer*), menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS, dan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat.
9. Perusahaan menetapkan prosedur pengendalian informasi Perusahaan.

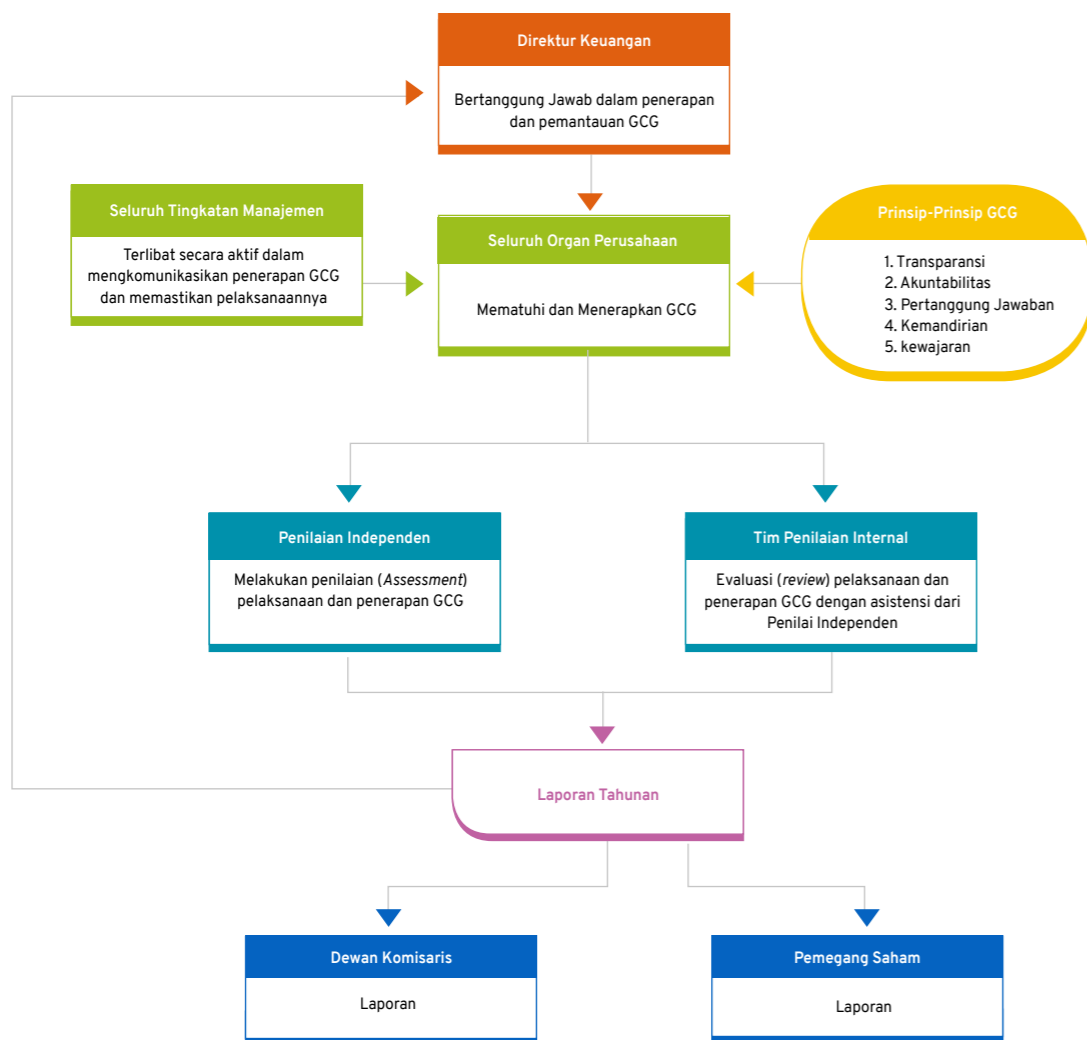
MONITORING PENERAPAN GCG

Bio Farma melakukan *monitoring* penerapan GCG secara berkala setiap tahun dengan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oleh pihak internal.

PENILAIAN GCG (GCG ASSESSMENT)

Sebagai salah satu upaya dalam mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG adalah melalui GCG *Assessment*. Langkah ini dilakukan untuk memastikan level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Mekanisme penerapan dan asesmen GCG di Bio Farma bisa digambarkan dalam bagan berikut.



Asesmen penerapan GCG di Bio Farma mengacu pada pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN Bab XII tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang mewajibkan BUMN untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan melakukan evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam GCG *assessment* tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; serta
6. Aspek lainnya.



PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

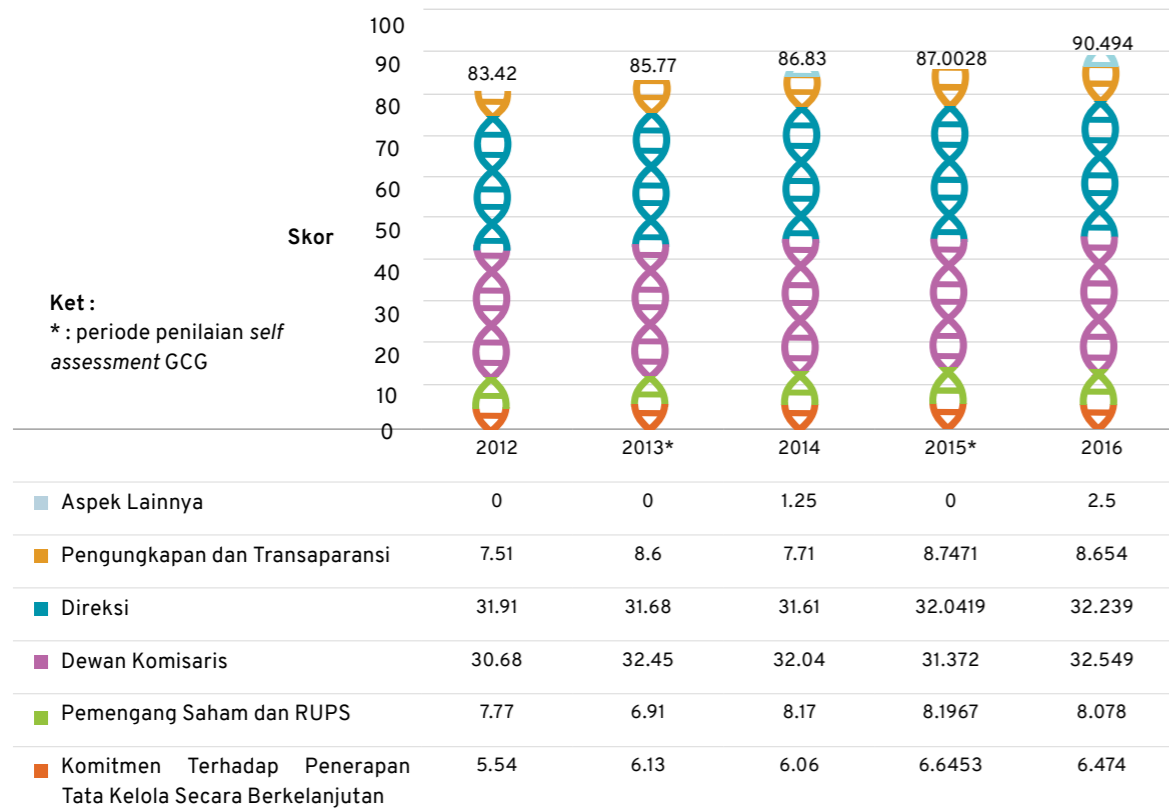
Penilaian menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 (enam) periode. Pada tahun 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2016 telah dilakukan *self assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi.

SKOR PENILAIAN

Adapun hasil *assessment* GCG periode tahun 2016 mencapai skor 90,494 yang termasuk ke dalam predikat kategori “Sangat Baik”.

Hasil *Assessment* Implementasi GCG pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2016

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER	BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2016		PENJELASAN
		SKOR	% CAPAIAN	
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,474	92,49	Sangat Baik
II Pemegang Saham dan RUPS	9	8,078	89,76	Sangat Baik
III Dewan Komisaris	35	32,549	93,00	Sangat Baik
IV Direksi	35	32,239	92,11	Sangat Baik
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,654	96,16	Sangat Baik
Sub Total	95	87,994		
VI Aspek Lainnya	5	2,500		
TOTAL	100	90,494		SANGAT BAIK



REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Beberapa kelemahan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berhasil diidentifikasi dari proses asesmen GCG selanjutnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas implementasi GCG kedepannya.

Beberapa kelemahan yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan perbaikan adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
1	Pemegang Saham menetapkan secara definitif jabatan Direktur Utama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.	✓			<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tanggal 10 Juli 2017 Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma dimana mengukuhkan pemberhentian Bpk. Iskandar sebagai Direktur Utama dan menugaskan Bpk. Juliman untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Produksi. Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma tanggal 22 Januari 2018 Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi. Penetapan secara definitive jabatan Direktur Utama oleh Pemegang Saham melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.



No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut		Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris Direksi	
2	Memberikan Penilaian Kinerja Direksi secara individual dan dituangkan dalam RUPS.	✓		-
3	Menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Komisaris dan Penilaiannya.	✓		-
4	Memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris	✓		-
5	Melaksanakan tindak lanjut atas <i>areas of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Bio Farma (Persero).	✓		-
6	Memberikan pengesahan RJPP Tahun 2017-2021.	✓		-
7	Melaksanakan pengesahan RUPS RKAP tepat waktu.	✓		<ul style="list-style-type: none"> RUPS RKAP Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018. RUPS RKAP Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017. Pelaksanaan RUPS RKAP tidak dilakukan secara tepat waktu karena tidak dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut		Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris Direksi	
8	Memberikan persetujuan/keputusan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Pemegang Saham secara tepat waktu (maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap).	√		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2017-2018 Nomor: 01351/DIR/IV/2017 tanggal 13 April 2017 - Persetujuan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan Terkait Perpanjangan dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit Bank Mandiri Tahun 2017-2018 Nomor: S-15/DK/BF/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 - 14 (empat belas) hari kerja untuk persetujuan Fasilitas Kredit Bank Mandiri Permohonan Mengagunkan Aktiva Tetap Terkait Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank Tahun 2017-2018 Nomor: 01352/DIR/IV/2017 tanggal 13 April 2017 - Persetujuan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan Terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank Tahun 2017-2018 tanggal 03 Mei 2017 - 14 (empat belas) hari kerja untuk persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank - Permohonan Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero) Nomor: 04404/DIR/XI/2016 tanggal 18 November 2016 dan Nomor: 04973/DIR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal kelengkapan atas surat permohonan penghapusbukuan dan/ atau pemindahtanganan aset tetap PT Bio Farma yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tanggal 12 Januari 2017 - Persetujuan Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-11/DK/BF/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 - 50 (lima puluh) hari kerja untuk persetujuan penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap. Persetujuan Dekom untuk pelepasan aset > 7 (tujuh) hari sehingga diasumsikan tidak tepat waktu.
9	Melaksanakan program pelatihan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam KPI Dewan Komisaris.		√	-
10	Menuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris terkait proses pemberian persetujuan atas Rancangan RJPP.		√	-
11	Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan berdasarkan telaahan atas hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan <i>internal control report</i> .		√	Notulen Rapat Komite Audit dengan SPI tanggal 23 Februari 2018 Pembahasan <i>Progress Tindak Lanjut Audit Internal dan Eksternal dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern secara Entitas</i> .



No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut		Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris Direksi	
12	Meningkatkan pemberian arahan dan nasehat tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya, kebijakan teknologi informasi dan pelaksanaannya.		√	<p>Sampai saat ini belum ada pembahasan khusus dengan Komite Audit terkait kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, serta kebijakan TI dan pelaksanaannya.</p> <p>Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta teknologi informasi dibahas bersamaan dengan pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan.</p> <p>Notulen Rapat Direksi- Dewan Komisaris tanggal 24 Februari 2017 Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun Buku 2016 (<i>Audited</i>) PT Bio Farma (Persero)</p>
13	<p>Menuangkan secara eksplisit dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pembahasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. - Rencana pembahasan transaksi atau tindakan dalam lingkungan kewenangan oleh Dewan Komisaris yang terjadi pada tahun berjalan. - Rencana pengawasan efektivitas pelaksanaan audit internal dan rencana pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. 		√	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris untuk rapat pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2017 serta jadwal dan program pelaksanaan audit oleh KAP dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris - Rencana kegiatan Komite Audit untuk menilai efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan oleh SPI sesuai dengan PKPT yang disepakati

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Rencana kegiatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk menelaah dan mereviu Kebijakan GCG (Manual Board, manual of GCG, code of conduct, kebijakan gratifikasi dan whistle blowing system dan infrastruktur GCG lainnya) dan memonitor atas pelaksanaan kebijakan tersebut
14	Memberikan persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris secara tepat waktu.		√		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2017-2018 Nomor: 01351/DIR/IV/2017 tanggal 13 April 2017 - Persetujuan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan Terkait Perpanjangan dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit Bank Mandiri Tahun 2017-2018 Nomor: S-15/DK/BF/05/2017 tanggal 3 Mei 2017. - 14 (empat belas) hari kerja untuk persetujuan Fasilitas Kredit Bank Mandiri. - Permohonan Mengagunkan Aktiva Tetap Terkait Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank Tahun 2017-2018 Nomor: 01352/DIR/IV/2017 tanggal 13 April 2017. - Persetujuan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan Terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank Tahun 2017-2018 tanggal 03 Mei 2017. - 14 (empat belas) hari kerja untuk persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Indonesia Eximbank. - Permohonan Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero) Nomor: 04404/DIR/XI/2016 tanggal 18 November 2016 dan Nomor: 04973/DIR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal kelengkapan atas surat permohonan penghapusbukuan dan/ atau pemindahtanganan aset tetap PT Bio Farma yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tanggal 12 Januari 2017. - Persetujuan Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-11/DK/BF/03/2017 tanggal 24 Maret 2017. - 50 (lima puluh) hari kerja untuk persetujuan penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap. Persetujuan Dekom untuk pelepasan aset > 7 (tujuh) hari sehingga diasumsikan tidak tepat waktu.
15	Memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.		√		Surat usulan Direksi beserta lampiran analisa risiko dan lampiran lainnya atas tindakan strategis Direksi



No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
16	Mencantumkan besarnya honorarium auditor eksternal dalam pengusulan penunjukan auditor eksternal kepada RUPS/Pemegang Saham.		√		<p>Evaluasi Kinerja dan Usulan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Bio Farma Tahun Buku 2017 Nomor: 08/DK-KA/BF/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.</p> <p>Untuk surat pengusulan Dewan Komisaris kepada RUPS belum ada.</p>
17	Menuangkan dalam Risalah Rapat terkait telaahan terhadap Laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal, telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal, dan juga kelengkapan atribut temuan PPI.		√		<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat Komite Audit dengan SPI tanggal 23 Februari 2018 pembahasan progress tindak lanjut audit internal dan eksternal dan evaluasi sistem pengendalian intern secara entitas. - Notulen Rapat Komite Audit tanggal 5 April 2017 pembahasan tindak lanjut temuan BPK. - Notulen Rapat Komite Audit tanggal 24 Mei 2017 Pembahasan Evaluasi hasil Audit PPI Tahap 1 Tahun 2017. - Notulen Rapat Komite Audit tanggal 13 Oktober 2017 Pembahasan Evaluasi hasil audit PPI Tahap 2 Tahun 2017. - Notulen Rapat Komite Audit tanggal 06 Desember 2017 pembahasan progress audit memorandum KAP tahun 2017 dan tindak lanjut hasil audit KAP 2016.

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut		Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris Direksi	
18	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan mempertimbangkan realisasi pencapaian masing-masing Direksi.		✓	Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris masih secara kolegal berdasarkan kontrak manajemen tahun 2017.
19	Mendokumentasikan pembahasan mengenai muatan GCG pada Laporan Tahunan Perusahaan dan lebih aktif dalam menindaklanjuti area of <i>improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris.		✓	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengawasan Dekom memuat pembahasan GCG - Laporan Kegiatan Komite RPG memuat pembahasan GCG - Risalah Rapat Komite RPG
20	Memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Memuat penjelasan ketidakhadiran dalam rapat dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dalam Risalah Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi; - Membuat surat kuasa untuk anggota Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat untuk mewakili suaranya dalam rapat; - Untuk melakukan validasi risalah rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dituangkan dalam Risalah Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi. 		✓	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat Internal Dewan Komisaris tahun 2017 (Peserta Rapat) - Surat kuasa Dewan Komisaris selama tahun 2017
21	Memerintahkan Komite Dewan Komisaris untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan dalam Program Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengenai rencana <i>self assessment</i> komite tersebut; - Mengefektifkan pertemuan rutin Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sesuai dengan program kerja. 		✓	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memuat <i>self assessment</i> Komite Dewan Komisaris di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Dewan Komisaris tahun 2017 dan 2018. - Di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite RPG tahun 2017 terdapat 22 (dua puluh dua) rencana kegiatan Komite RPG selama tahun 2017 dengan pelaksanaan/realisasi kegiatan sebanyak 11 (sebelas). - Di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit tahun 2017 terdapat 46 (empat puluh enam) rencana kegiatan Komite Audit selama tahun 2017 dengan pelaksanaan/realisasi kegiatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).
22	Menyelesaikan proses pemutakhiran Pedoman Penerapan Tata Kelola (GCG) di PT Bio Farma (Persero) dengan memuat organ-organ utama perusahaan dalam penerapan GCG.		✓	Masih dalam tahap proses <i>review</i> SK untuk menyempurnakan Pedoman GCG.
23	Menyelesaikan proses pemutakhiran Pedoman Perilaku dengan memuat Penghormatan kepada Hak Intelektual dan integritas Laporan Keuangan.		✓	Masih dalam tahap proses <i>review</i> SK untuk menyempurnakan Pedoman Perilaku.

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
24	Menyempurnakan Kebijakan Perusahaan mengenai LHKPN disesuaikan dengan peraturan terbaru dari KPK, yaitu Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal 7 Juli 2016 dan Surat Edaran KPK Nomor SE 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.			✓	Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 03991/DIR/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bio Farma (Persero).
25	Mendorong seluruh pegawai wajib lapor LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			✓	Tahun 2017, adanya pemutihan oleh KPK
26	Memberikan teguran atas Pegawai Wajib Lapor yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK.			✓	Tahun 2017, adanya pemutihan oleh KPK
27	Mengimplementasikan <i>Pedoman Performance Management System</i> (PMS) sebagai sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja unit dan jabatan dalam organisasi termasuk aplikasinya.			✓	<ul style="list-style-type: none"> - KPI individu - KPI Bagian - KPI Divisi Selama tahun 2017 <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi PMS (petunjuk teknis)
28	Menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.			✓	KPI individu
29	Mendokumentasikan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi secara berjenjang.			✓	Notulen QSHE Meeting selama tahun 2017
30	Mendokumentasikan dan melaporkan pencapaian target kinerja Direksi secara individu kepada Dewan Komisaris.			✓	KPI Direktorat
31	Mempercepat proses penerapan aplikasi <i>e-procurement</i> dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.			✓	Sudah finalisasi URS aplikasi <i>E-Procurement</i> modul Pelelangan.
32	Menetapkan KPI individu yang mencakup indikator kinerja individu dan target kinerja bagi setiap karyawan.			✓	KPI Individu
33	Menetapkan kebijakan <i>job tender</i> untuk pengisian jabatan satu level di bawah Direksi sebagai salah satu sarana pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk menduduki jabatan sesuai persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan.			✓	Masih dalam tahap <i>review</i> Divisi SDM.
34	Memperbaharui Prosedur Klasifikasi dan evaluasi rekanan dengan menambahkan kriteria evaluasi dari aspek <i>service</i> dan <i>cost</i> yang diberikan serta menambahkan pengaturan penilaian kinerja rekanan yang memasok barang investasi.			✓	Masih dalam tahap <i>review</i> prosedur baku klasifikasi dan evaluasi rekanan, dan akan memuat pengaturan penilaian kinerja rekanan/pemasok barang investasi.
35	Meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya			✓	Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017
36	Memastikan bahwa dinamika rapat, <i>dissenting comments</i> , dan penjelasan ketidakhadiran Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat.			✓	Risalah Rapat Direksi tahun 2017
37	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf auditor internal/kualitas tenaga auditor/personil yang ditugaskan di PPI.			✓	Pada tahun 2017 personal SPI telah menyelesaikan pendidikan sertifikasi QIA 1 (satu) orang, dari 3 (tiga) orang yang direncanakan.

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut		Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris Direksi	
38	Meningkatkan kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan proses Tata Kelola (<i>governance</i>), manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil audit PPI.		✓	<p>Risiko Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Operasional atas Divisi <i>Human Capital</i> (Bagian Manajemen Kinerja) Pemeriksaan Operasional atas Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Produksi. Pemeriksaan Operasional atas Unit Kerja yang mempunyai peran penting dalam pengendalian percepatan pembangunan proyek. <p>GCG:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Operasional atas Divisi Pengadaan (Bagian Penunjang Pembelian). <p>PPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Operasional atas Divisi Keuangan (Bagian Pajak). Pemeriksaan Operasional atas Divisi Produksi Vaksin Bakteri (Bagian Produksi Vaksin Tetanus). Pemeriksaan Operasional atas Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan (Bagian Perencanaan Produksi). Pemeriksaan Operasional atas Matrix Riset & Pengembangan. Pemeriksaan Operasional atas Divisi Umum & Manajemen Aset.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Hasil dari *assessment* serta ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholders* digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG. Peningkatan kualitas dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil asesmen sehingga *gap* pemenuhan standar bisa terpenuhi. Di samping itu Perusahaan juga melakukan *benchmarking* dalam rangka mengikuti perkembangan *best practices* yang ada, yang selanjutnya bertujuan untuk melakukan peningkatan standar kualitas penerapan GCG di Bio Farma.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Struktur GCG meliputi infrastruktur dan *soft structure* yang berupa kebijakan dan pedoman perusahaan yang menjadi landasan penerapan GCG.

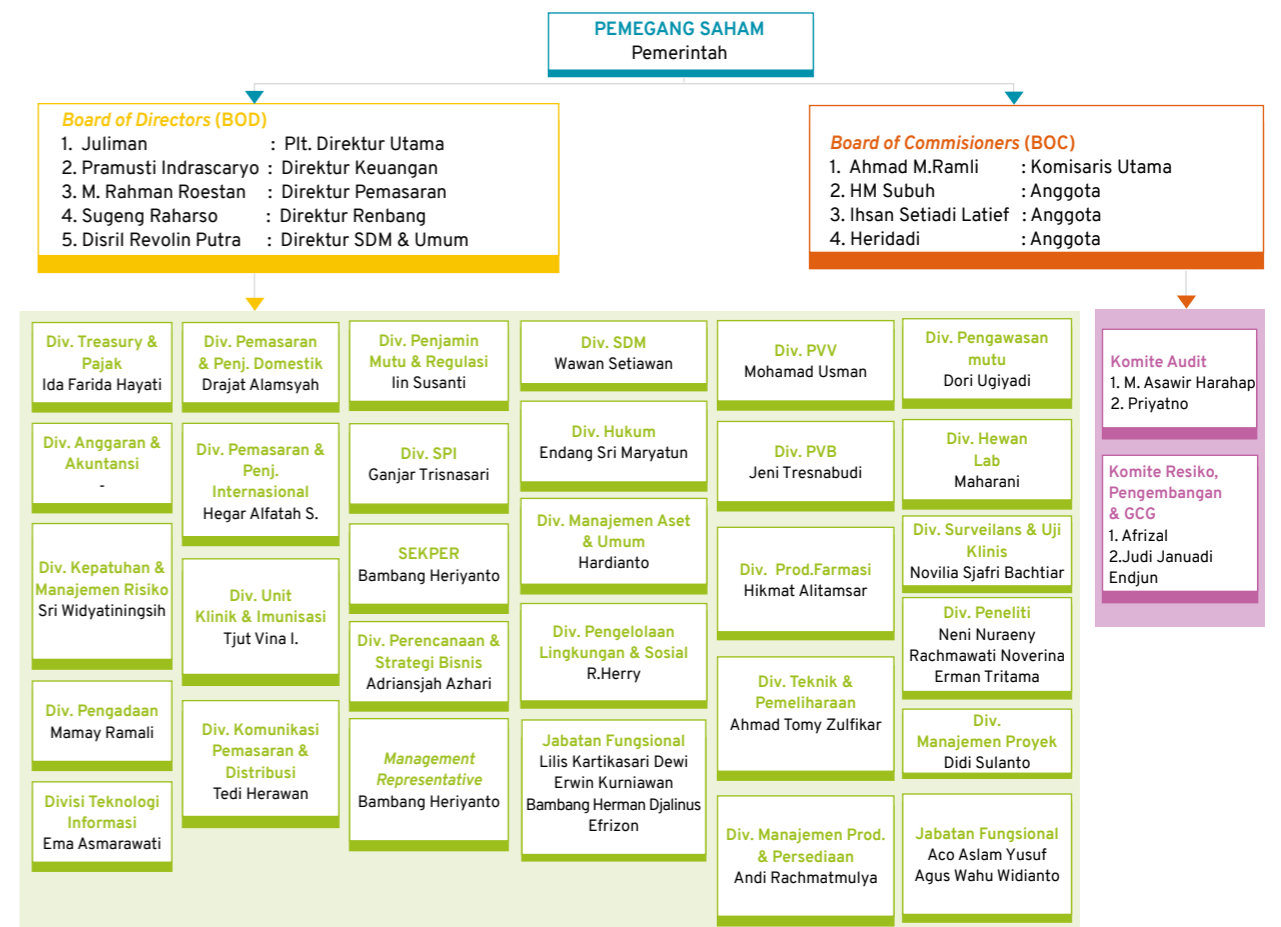
STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

Struktur tata kelola Bio Farma mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas memiliki Organ Perseroan yang terdiri dari tiga unsur yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan Perusahaan dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan.

Berkaitan dengan Organ Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas kelanjutan usaha Bio Farma dalam jangka panjang sehingga harus memiliki persamaan persepsi terhadap filosofi, visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.



Struktur Organ Perseroan disajikan dalam bagan di bawah ini.



GCG SOFT STRUCTURE

Selain struktur Organ Perusahaan, Bio Farma memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Maksud dan tujuan kebijakan/pedoman GCG adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikembangkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-04/DK/BF/II/2013, No. 01023/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di PT Bio Farma (Persero).
2. SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-06/DK/BF/II/2013 No.01025/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero). *Board Manual* merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-05/DK/BF/II/2013, No. 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) yang telah diperbaharui dengan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-07/DK/BF/III/2014, No. 01123/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Bio Farma dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pedoman Perilaku merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran/perilaku tidak etis.
4. SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 01236/DIR/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT Bio Farma (Persero). Pengendalian gratifikasi merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran lainnya.
5. SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bio Farma (Persero). *Whistleblowing system* merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*), korupsi, pencurian, suap menyuap, gratifikais, benturan kepentingan, dan pelanggaran terhadap hukum serta kebijakan/prosedur Perusahaan.
6. SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 00693/DIR/I/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan Karyawan di Lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara (LHKPN) dan User Aplikasi Wajib LHKPN.
7. SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 07882/DIR/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bio Farma (Persero).

Di samping itu, Bio Farma juga telah memiliki Kebijakan/Pedoman sebagai berikut:

1. Piagam/*Charter* Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, serta Satuan Pengawasan Intern.
2. Kebijakan Pengelolaan Penyampaian Informasi Melalui Media Massa, Kebijakan Pemutakhiran Konten *Website*, Kebijakan Distribusi Informasi Internal, Kebijakan Penetapan Klasifikasi Informasi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kebijakan Manajemen Risiko.
4. Kebijakan Teknologi Informasi.
5. Kebijakan Sumber Daya Manusia.
6. Pedoman dan Prosedur Baku Setiap Unit Kerja.

Pedoman dan kebijakan terkait implementasi tata kelola perusahaan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini, perubahan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan usaha Bio Farma. Implementasi GCG diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan.

Sebagai langkah nyata dari komitmen pelaksanaan GCG, pada tanggal 6 Maret 2017, Insan Bio Farma (Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh Tenaga Kerja) telah menandatangani Pakta Integritas setelah dilakukan

internalisasi dan sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Pengendalian Gratifikasi, Perpajakan, dan LHKPN. Selain Pakta Integritas, pada tanggal 6 Maret 2017 dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi dengan dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MEKANISME GCG

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS sebagai organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam RUPS dilakukan secara wajar dengan mengedepankan aspek transparansi. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, RUPS memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal penting terkait dengan kepentingan perusahaan jangka panjang dan kepentingan-kepentingan lainnya dalam perusahaan. RUPS ataupun pemegang saham tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan RUPS dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 jenis RUPS.

1. RUPS Tahunan
RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:
 - RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan, diadakan paling lama dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
 - RUPS mengenai persetujuan RKAP Perusahaan, diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
2. RUPS luar biasa
RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan

REFERENSI PERATURAN

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, dan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK PEMEGANG SAHAM

Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Hanya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dapat meminta diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
3. Mengusulkan, menyetujui, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih dalam RUPS.
4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan.
5. Menyetujui perubahan jumlah modal.
6. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero.
7. Memperoleh laporan keuangan Perusahaan.
8. Mendapatkan pembagian laba dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh Perusahaan.
9. Mendapatkan pembagian aktiva bersih Perusahaan.
10. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Pemegang saham harus dapat:
 - Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
 - Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
4. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS



PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS TAHUNAN 2017 DAN REALISASINYA

Sepanjang Tahun 2017, Perusahaan telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 dan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017.

RUPS PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2017

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham melalui surat No. 04811/DIR/XII/2016 pada tanggal 19 Desember 2016	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 di Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat.	Hasil keputusan RUPS disampaikan melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 Nomor: 01/RUPS/01/2017 tanggal 4 Januari 2017

AGENDA RUPS PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2017

RUPS ini membahas tentang:

1. Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017.
2. Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2017.
3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2017.
4. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI's) Direksi Tahun 2017.
5. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI's) Dewan Komisaris Tahun 2017.
6. Persetujuan mengagunkan aset tetap perusahaan berupa tanah seluas 63.214 m² di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 00004 dan tanah seluas 91.058 m² di Jalan Pasteur No.28, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 288 untuk penarikan kredit investasi sebesar Rp 1,20 triliun.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2017

Nama	Jabatan	Kehadiran
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Hadir
Paruli Lubis	Anggota Komisaris	Tidak Hadir dan memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa nomor: SKU-01/BF/01/2017 tanggal 3 Januari 2017
Heridadi	Anggota Komisaris	Hadir
Ihsan Setiadi Latief	Anggota Komisaris	Hadir
Nizar Yamani	Anggota Komisaris	Hadir
Mohamad Subuh	Anggota Komisaris	Hadir
Iskandar	Direktur Utama	Hadir
Andjang Kusumah	Direktur	Hadir
Pramusti Indrascaryo	Direktur	Tidak Hadir dan memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa nomor: 04889/DIR/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016
Mahendra Suhardono	Direktur	Hadir
Juliman	Direktur	Hadir
Sugeng Raharso	Direktur	Hadir

KEPUTUSAN RUPS PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2017

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma tentang Persetujuan RKAP dan RKA-PKBL tahun 2017 Nomor:01/RUPS/01/2017, hasil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017.
2. Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017.
3. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2017.

4. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi tahun 2017.
5. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2017.
6. Menyetujui pengagunan aset tetap perusahaan berupa tanah seluas 63.214 m² di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 00004 dan tanah seluas 91.058 m² di Jalan Pasteur No.28, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 288 dengan total nilai pasar sebesar Rp 1,88 triliun untuk penarikan kredit investasi maksimal sebesar Rp1,20 triliun.

Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah menindaklanjuti Arahan RUPS sebagai berikut:

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
1.	RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2017 dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan RKAP dengan selalu berpegang pada prinsip disiplin anggaran dan melaporkannya secara berkala kepada Pemegang Saham.	Selesai	Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG secara berkala melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. Kegiatan usaha dilakukan berdasarkan RKAP serta dinamika eksternal lingkungan bisnis.
2.	Buku RKAP, RKA PKBL, tanggapan tertulis Dewan Komisaris, <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.	Selesai	Laporan berkala BUMN yang memuat Laporan Manajemen dan laporan PKBL sudah disampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Laporan Berkala BUMN yang memuat Laporan Manajemen dan laporan PKBL agar disampaikan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU/06/2015	Selesai	<p>a. Auditor Eksternal-BPK RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017, dari 11 (sebelas) rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas PKBL tahun 2010 dan 2011 dan biaya-biaya terkait vaksin flu burung sampai dengan tahun 2011, sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi telah dinyatakan selesai dan 1 (satu) rekomendasi telah disampaikan <i>progress</i> tindak lanjutnya ke BPK RI pada 27 Desember 2017. <p>Saat ini masih menunggu proses penelaahan/<i>review</i> BPK atas <i>progress</i> tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sampai dengan tanggal 28 Juli 2017, dari 52 (lima puluh dua) rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2014 dan 2015, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi telah dinyatakan selesai dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi perlu ditindaklanjuti. <p>Pada tanggal 3 Oktober 2017, PT Bio Farma (Persero) telah mengirimkan lagi 19 tindak lanjut rekomendasi kepada BPK RI dan tanggal 27 Desember 2017 mengirimkan 4 <i>progress</i> tindak lanjut, sehingga sampai dengan akhir 2017 tersisa 2 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Saat ini masih dalam penelaahan/<i>reviu</i> oleh BPK RI.</p> <p>b. Auditor Eksternal-KAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan tanggal 24 Februari 2017, semua rekomendasi Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. 2) Sampai dengan akhir tahun 2017, 21 rekomendasi Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 sudah ditindaklanjuti dan 5 rekomendasi masih dinyatakan dalam proses, sebagaimana dibahas dalam rapat pembahasan KAP dan Komite Audit tanggal 04 Desember 2017.

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
			Saat ini masih menunggu proses penelaahan/ <i>review</i> final dari KAP.
			<p>c. Auditor Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan akhir tahun 2017, semua rekomendasi LHP atas Divisi PVV telah ditindaklanjuti. b) Sampai dengan akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi Manajemen Aset & Umum. c) Sampai dengan akhir tahun 2017, 10 (sepuluh) rekomendasi LHP atas Divisi Pengadaan telah ditindaklanjuti dan 1 (satu) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. d) Sampai dengan akhir tahun 2017, 12 (dua belas) rekomendasi LHP atas UBKI telah ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut. e) Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 6 (enam) rekomendasi LHP atas Divisi Human Capital yang telah ditindaklanjuti dan 1 (satu) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut. f) Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 3 (tiga) rekomendasi LHP atas Divisi PKBL, CSR & EHS yang telah ditindaklanjuti dan 1 (satu) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut. g) Sampai dengan akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan. h) Sampai dengan akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi Teknik & Pemeliharaan telah ditindaklanjuti. 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai akhir tahun 2017, 11 (sebelas) rekomendasi LHP atas Divisi Keuangan yang telah ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut. b) Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi PVB telah ditindaklanjuti. c) Sampai akhir tahun 2017, 15 (lima belas) rekomendasi LHP atas Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Perencanaan Produksi dan Manajemen Persediaan telah ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. d) Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi Manajemen Aset dan Umum telah ditindaklanjuti. e) Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi <i>Human Capital</i> telah ditindaklanjuti. f) Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Divisi Pengadaan masih dalam proses tindak lanjut. g) Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi LHP atas Matriks Riset & Pengembangan masih dalam proses tindak lanjut. h) Sampai akhir tahun 2017, 19 (sembilan belas) rekomendasi LHP atas Divisi PPMP telah ditindaklanjuti dan 3 (tiga) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. <p>Sampai akhir tahun 2017, seluruh rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.</p>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
4.	Direksi diminta menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal tahun-tahun sebelumnya.	Selesai	RKAP 2017 sudah disosialisasikan kepada pejabat setingkat Kepala Divisi dan Kepala Bagian dalam Rapat Kerja (<i>Plan of Action</i>) tahun 2017 pada tanggal 16-17 Januari 2017. Program efisiensi untuk menekan biaya sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui pertemuan ceramah bulanan, dan dekstop komputer seluruh unit kerja secara berkesinambungan.
5.	Target produksi dan pendapatan dalam RKAP 2017 merupakan target minimal sedangkan target biaya merupakan target maksimal yang harus dicapai pada tahun 2017, hal ini agar disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan dan pencapaiannya.	Selesai	Prosedur, Peraturan dan Kebijakan <i>Performance Management System (PMS)</i> yang didalamnya terdapat sistem KPI berjenjang pendukung telah selesai disusun pada Triwulan I 2017. Penyelerasan/ <i>alignment</i> sistem KPI dengan RKAP dan RJPP dengan menggunakan pendekatan <i>balance scorecard</i> telah selesai dikerjakan. Saat ini sedang tahap sosialisasi dan validasi untuk penetapan KPI masing-masing Divisi sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. KPI Korporasi dan Divisi telah selesai dikerjakan pada pertengahan triwulan IV-2017, dan proses uji coba penggunaan KPI Korporasi dan Divisi ini sedang dilakukan di Direktorat SDM dan Umum untuk tahun 2018.
6.	Sebagai tindak lanjut Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> dan telah disepakati, agar disusun KPI secara berjenjang untuk setiap level manajemen dan anak perusahaan.	Selesai	Pengembangan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan roadmap BUMN Farmasi kearah pengembangan Bioteknologi dan <i>Life Sciences Industry</i> .
7.	Direksi diminta memperhatikan <i>Roadmap</i> BUMN di Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai acuan kebijakan pengembangan perusahaan dalam meningkatkan kontribusi perusahaan di sektor pelayanan kesehatan.	Selesai	Saat ini Perusahaan sudah melakukan sinergi antara BUMN dengan: <ul style="list-style-type: none"> • PT Kimia Farma (Persero) untuk pengadaan bahan baku penunjang produksi (Kanamicine dan obat anastesi); • PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero) untuk pekerjaan konstruksi; • PT Pertamina (Persero) untuk pengadaan solar; • PT PLN (Persero) untuk energi listrik; • PT Telkom untuk teknologi informasi; • LKBN Antara untuk pemberitaan; • PT Citi link Indonesia (Anak Perusahaan/AP PT. Garuda (Persero) Tbk.) untuk akomodasi; • PT Sigma Cipta Caraka (AP PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk) untuk teknologi informasi; • PT Bahana Sekuritas (Persero) untuk jasa konsultansi; • PT Sucofindo (Persero) untuk jasa konsultansi.
8.	BUMN agar mengupayakan sinergi antara BUMN dengan mengacu pada Instruksi Menteri BUMN nomor KEP-109/MBU/2002 tentang Sinergi Antar BUMN dan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	Selesai	Proses transformasi bisnis Bio Farma menjadi <i>Global Life Science Company</i> yang unggul dan menerapkan <i>new strategic initiative</i> dituangkan dalam RJPP tahun 2017-2021 seiring inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mencapai <i>national health security</i> dan <i>self-sufficiency</i> , maka strategi korporasi tahun 2017-2021 yaitu "Mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan melalui percepatan <i>time to market</i> produk diversifikasi (Vaksin dan Antisera, <i>Blood Products, Biosimilar</i> ." Dari strategi korporasi tersebut dijabarkan ke dalam strategi produk dan kemitraan sebagai berikut: a. Strategi Produk dengan 3 prioritas produk utama yaitu vaksin dan antisera, <i>blood product</i> dan <i>biosimilar</i> . b. Strategi Pengembangan Bisnis melalui: 1. Mengembangkan infrastruktur dan perangkat pendukung pengembangan karyawan melalui penataan organisasi berbasis produk. 2. Menerapkan kepatuhan terhadap regulasi internasional dan dalam negeri serta sistem mutu sesuai standar internasional. 3. Percepatan pengembangan kapasitas produksi/manufaktur dengan menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas produk serta mengefektifkan pemanfaatan aset. c. Strategi Keuangan 1. Penyediaan pendanaan. <i>Self-funded</i> , yaitu menggunakan dana mandiri perusahaan. Eksternal, yaitu menggunakan dana pinjaman bank atau non bank. Pengendalian <i>Capital Expenditure (CAPEX)</i> dan <i>Operating Expenditure (OPEX)</i>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
9.	Direksi agar mempercepat proses transformasi bisnis PT Bio Farma (Persero) untuk mengantisipasi perkembangan industri bio farmasi dengan menyusun program-program yang konkrit di segala bidang.	Selesai	1. Membentuk Tim <i>Counterpart</i> Pembuatan dan Penyusunan Laporan Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study/FS</i>) Pembangunan Fasilitas Industri Fraksionasi Plasma pada tanggal 1 Desember 2016. 2. FS Pendirian Industri fraksionasi plasma telah selesai disusun dan dibahas dengan Dewan Komisaris serta dikirimkan dan disosialisasikan kepada Menteri Kesehatan RI dengan tembusan kepada Sekjen Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Dirjen Yankes Kemenkes RI, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi KBUMN dan Ketua PMI Pusat. 3. FS Pendirian Industri fraksionasi plasma telah disosialisasikan kepada jajaran dan pengurus PMI Pusat dan PMI Jawa Barat. 4. Sosialisasi hasil FS fraksionasi plasma dan permohonan dukungan dan percepatan kemandirian industri fraksionasi plasma kepada Kepala BPOM. 5. Mendorong perubahan-perubahan regulasi melalui satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi kelompok kerja III agar dapat mempercepat kemandirian produk fraksionasi darah. 6. Saat ini menunggu penugasan pelaksanaan fraksionasi darah yang sesuai PMK 72 tahun 2015 harus dikeluarkan oleh Menkes. 7. Saat ini menunggu perubahan PMK 72 tahun 2015, untuk dapat melaksanakan <i>toll manufacturing</i> produk darah. 8. Terdapat arahan kementerian BUMN bulan oktober 2017 untuk melakukan sinergi dengan Kimia Farma. Bio Farma berperan dalam fraksionasi produk plasma dan Kimia Farma dalam hal distribusi dan pemasaran. Telah dibuat telaahan bersama antara Bio Farma dan Kimia Farma, dan telah diinformasikan kepada Kementerian BUMN bulan desember 2017.
10.	Dalam rangka menindaklanjuti amanat instruksi presiden nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, Direksi agar mengakselerasi pengembangan produk biosimilar yang telah dirintis, khususnya produk fraksionasi darah.	Selesai	a. Rencana pembentukan anak perusahaan telah dibuat kajian dalam bentuk Studi Kelayakan Pembentukan Anak Perusahaan <i>Pharmaceutical Engineering & Supporting</i> yang bergerak dalam pabrikasi pembuatan vial dan ampul, dengan hasil secara finansial layak dan direkomendasikan partner kerjasama berasal dari Korea karena tidak ada BUMN yang memproduksi vial/ampul dengan kualitas nomor 1. b. Hasil kajian butir a telah dibahas dengan Dewan Komisaris pada bulan Juni 2017. Lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini bersinergi dengan PT Pupuk Kujang dalam bentuk sewa lahan selama 30 tahun.
11.	Program investasi penyertaan anak perusahaan sedapat mungkin dilakukan melalui sinergi dengan BUMN lain yang mempunyai unit usaha maupun sumber daya sejenis.	Selesai	Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG secara berkala melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. Kegiatan usaha dilakukan berdasarkan RKAP serta dinamika eksternal lingkungan bisnis.

RUPS PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2016

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham melalui surat No. 01483/Dir/IV/2017 pada tanggal 25 April 2017.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2017 di Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat.	Hasil keputusan RUPS disampaikan melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Nomor: RIS-02/RUPS/BF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

AGENDA RUPS PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2016

RUPS ini membahas tentang:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan Tahun Buku 2016.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan tahun buku 2016.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
5. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2016

Nama	Jabatan	Kehadiran
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Hadir
Paruli Lubis	Anggota Komisaris	Hadir
Heridadi	Anggota Komisaris	Hadir
Ihsan Setiadi Latief	Anggota Komisaris	Hadir
Nizar Yamani	Anggota Komisaris	Hadir
Mohamad Subuh	Anggota Komisaris	Tidak Hadir dan memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa nomor: SKU-03/DK/BF/05/2017 tanggal 9 Mei 2017
Iskandar	Direktur Utama	Hadir
Pramusti Indrascaryo	Direktur	Hadir
Mahendra Suhardono	Direktur	Hadir
Juliman	Direktur	Hadir
Sugeng Raharso	Direktur	Hadir

KEPUTUSAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2016

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bio Farma (Persero) tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 Nomor RIS-02/RUPS/BF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, hasil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sesuai laporannya Nomor 408/LAI.16.BF.5/DWR/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.
3. Menyetujui Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 dan mengesahkan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sesuai laporannya nomor 407/LAI.16.BF-PKBL-5/DWR/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama tahun buku 2016.
4. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Menyetujui tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan

fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 untuk ditetapkan secara tersendiri.

6. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2016.

Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut.

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
1.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan, dan saran Auditor pada tahun 2016 termasuk tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri BUMN secara berkala.	Selesai	a. Direksi telah menindaklanjuti temuan, catatan, dan saran Auditor pada tahun 2016 termasuk tahun-tahun sebelumnya dengan progres sebagaimana dijelaskan dalam bab 5.2 Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tanggal 4 Januari 2017 tentang Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 butir 3. a dan b. Progres tindak lanjut atas temuan auditor eksternal tersebut telah dibahas secara periodik dan ditindaklanjuti. Laporan tindak lanjut diserahkan ke auditor eksternal, tembusan ke Dewan Komisaris.
2.	Direksi agar fokus pada strategi pengembangan pemasaran dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan terutama dari pasar dalam negeri (pemerintah dan swasta).	Selesai	Direksi menetapkan strategi Partnership untuk mengembangkan pemasaran dalam negeri dengan memenuhi kebutuhan vaksin produk baru (vaksin dan serum) baik untuk program imunisasi nasional dari Pemerintah maupun sektor swasta, dan produk- produk bioteknologi lainnya yang dibutuhkan sektor swasta dan pemasarannya didukung oleh tim Pemasaran di seluruh Indonesia.
3.	Direksi agar membuat perencanaan bisnis selama lima atau sepuluh tahun ke depan dalam rangka mengantisipasi adanya gejolak-gejolak perubahan kebijakan pemerintah maupun organisasi internasional yang dapat berpengaruh terhadap bisnis PT Bio Farma (Persero).	Selesai	Direksi sudah menyusun perencanaan bisnis selama lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2017-2021 yang didalamnya sudah mengukur risiko korporat dan menyusun perencanaan strategi korporat setelah tahun 2020.
4.	Direksi agar melakukan percepatan riset, mendorong penemuan/paten baru, serta melakukan kerjasama dengan produsen vaksin lainnya, perguruan tinggi, lembaga riset baik nasional maupun internasional untuk mempercepat ketersediaan produk di pasar dan memenuhi kebutuhan vaksin dalam dan luar negeri.	Selesai	a. Dalam rangka percepatan riset, Direksi menerapkan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> • Prioritas litbang sejalan dengan kebijakan Pemerintah disamping mengikuti <i>global trend</i> (WHO dan Unicef). • Prioritas kerjasama litbang dengan publik sektor. • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui training dan alih teknologi dengan partner Bio Farma. • Melakukan litbang dengan sistem kerja matrix. • Melakukan kerjasama litbang dengan pola <i>Academic Business Government and Community</i> (ABGC). • Perlu menambah fasilitas litbang, terutama fasilitas pembuatan <i>clinical material</i> untuk fase III. b. Berikut beberapa program kerja riset dan pengembangan produk yang sedang berjalan di tahun 2017, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tifoid konjugat vaksin, tahap uji klinis fase I. • <i>Whole cell pneumo</i> vaksin, tahap uji klinis fase I. • Rotavirus vaksin, akan dimulai tahap uji klinis fase I. • Hepatitis b vaksin, tahap uji preklinis. • Lipovaxin dengan model <i>New TB Vaccine</i>, bekerjasama dengan Lipotek, Australia. • Adjuvant R4/E8 Pam2Cys dengan model vaksin <i>therapeutic</i> Hepatitis B, bekerjasama dengan Innovac, Australia. • Darbopoetin (EPO generasi ke-2) LIPI, UGM dan Batavia, Belanda. • Trastuzumab (monoclonal antibodi untuk kanker payudara), bekerjasama dengan ProBioGen USA. • Vaksin Dengue berbasis rekombinan protein DEN 1 - 4 bekerjasama dengan Konsorsium Riset Vaksin Dengue Nasional. Vaksin Influenza berbasis <i>cell culture</i> SI-6 bekerjasama dengan SI-Biotech, Jepang.

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
5.	Dalam melaksanakan program investasi, baik yang berupa investasi rutin maupun pengembangan, Direksi diminta untuk terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam proses pelaksanaannya serta dilengkapi dengan pengkajian manajemen risiko yang komprehensif disertai rancangan langkah-langkah mitigasi atas risiko investasi dimaksud.	Selesai	<p>a. Dalam pelaksanaan program investasi, Bio Farma melakukan penerapan prinsip-prinsip GCG yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan sampai barang diterima sesuai dengan kontrak.</p> <p>b. Untuk memastikan bahwa kebutuhan investasi diperlukan oleh perusahaan dan layak, maka setiap pengajuan investasi harus disertai kajian. Khusus untuk investasi yang bersifat strategis/proyek dibuat <i>feasibility study</i> atau paling tidak studi pendahuluan yang didalamnya memasukkan aspek risiko proyek.</p> <p>Semua rencana Investasi dibuat TOR untuk memastikan kebutuhan dan spesifikasinya sesuai yang diperlukan.</p>
6.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan <i>compliance</i> /pemenuhan portal <i>Financial Information System</i> , Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris dan Direksi.	Selesai	Direksi telah menetapkan personnel dari masing masing unit terkait yang ditugaskan sebagai admin untuk pemenuhan pengisian data pada portal <i>Financial Information System</i> , Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik secara periodik.
7.	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) sesuai suratnya nomor S-12/DK/BF/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 (audited) PT Bio Farma (Persero).	Selesai	<p>a. Target pendapatan dalam RKAP 2017 telah dijabarkan dalam program kerja unit terkait sedangkan program efisiensi beban perusahaan telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja untuk menekan biaya secara signifikan.</p> <p>b. Program efisiensi untuk menekan biaya disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui pertemuan ceramah bulanan, dan desktop komputer seluruh unit kerja secara berkesinambungan.</p> <p>c. Direksi melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan untuk penetapan <i>stockpile</i> bulk OPV type 2 untuk mengantisipasi kebutuhan nasional jika terjadi wabah polio, dan koordinasi dengan WHO untuk kebijakan <i>stockpile</i> bulk OPV type 2 untuk kebutuhan global dan untuk mendukung program eradikasi polio dunia.</p> <p>d. 1) Untuk percepatan pengadaan tanah telah terbit Keputusan Direksi No. 02149/DIR/VI/2017 tentang Prosedur Pengadaan Tanah di PT Bio Farma (Persero) dan No. 01583/Dir/V/2017 tentang Panitia Pengadaan Lahan. Sampai dengan semester I tahun 2017, pengadaan tanah belum dapat direalisasikan. Untuk lahan di kawasan industri, appraisal harga dan peninjauan harga ke pemilik sudah dilakukan. Diharapkan pada semester II 2017 sudah dapat direalisasikan.</p> <p>2) Untuk penyelesaian bangunan, dari sejak perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan dilakukan koordinasi dengan <i>user/counterpart</i>, konsultan perencana, konsultan pengawas/manajemen konstruksi dan kontraktor termasuk melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat atas jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>3) Untuk mengawal percepatan penyelesaian bangunan, Direksi telah membentuk Tim PMO (<i>Program Management Office</i>) untuk monitoring pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat strategis termasuk penyelesaian bangunan.</p> <p>4) Proses pengadaan tanah dikawasan industri disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek dan menengah dimana dikawaran tersebut.</p> <p>Utilitasnya sudah tersedia secara memadai sehingga dapat segera digunakan.</p>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
			<p>e. Direksi telah melaksanakan program peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan menyediakan vaksin produk baru (vaksin dan serum) yang dibutuhkan untuk program imunisasi nasional dari Pemerintah dan sektor swasta yang pemasarannya didukung oleh tim Pemasaran di seluruh Indonesia, serta melakukan upaya penyempurnaan proses bisnis dan penghematan untuk efisiensi biaya.</p> <p>f. Guna memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan peran SPI, telah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Audit operasional untuk menilai pengendalian intern berjalan sesuai PKPT. 2) Audit Keuangan sebelum laporan keuangan diterbitkan guna menilai kewajaran laporan serta compliance. 3) <i>Cash Opname</i> dan <i>Stock Opname</i>, secara rutin, triwulanan dan tahunan. 4) Audit-audit khusus, sesuai kebijakan atau penugasan khusus Direksi. 5) Memberikan saran dan masukan dalam rangka konsultasi kegiatan kerja. 6) Meningkatkan kompetensi staff SPI dengan pelatihan dan sertifikasi terkait. 7) <i>Me-review</i> perhitungan royalti, insentif, bonus, dsb. 8) <i>Me-review</i> SOP-SOP Non Produksi yang diperlukan. <p>g. 1) Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi auditor eksternal (BPK – RI dan Kantor Akuntan Publik) serta auditor internal (Pengawasan dan Pengendalian Inten) dengan progres sebagaimana dijelaskan dalam bab 5.2 tentang Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tanggal 4 Januari 2017 tentang Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 butir 3. a, b dan c.</p> <p>2) Perbaikan terhadap sistem yang ada secara terus menerus dilakukan baik berasal dari inisiatif unit kerja maupun rekomendasi dari Dewan Komisaris, Pemegang Saham, auditor internal dan eksternal.</p> <p>h. 1) Perusahaan membuat perencanaan investasi berdasarkan RJPP yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk rencana investasi yang bersifat strategis didukung oleh kajian studi kelayakan yang menganalisa proyek dari berbagai aspek diantaranya teknis, finansial, dan risiko.</p> <p>2) Pada saat rencana investasi akan dieksekusi dan dimasukkan ke dalam RKAP, Direksi akan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan kemampuan pendanaan.</p> <p>i. 1) Untuk <i>monitoring</i> rencana investasi, khusus untuk investasi yang bersifat strategis/proyek, dilakukan koordinasi secara rutin dalam rapat Sub Tim atau Tim PMO (<i>Program Management Office</i>) jika terjadi masalah yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.</p> <p>2) Pada saat terjadi realisasi investasi, akan dibuat analisa deviasinya terhadap yang sudah direncanakan.</p> <p>j. Analisis penyebab belum tercapainya target kegiatan R & D sesuai RKAP tahun 2016 dan dampaknya terhadap operasional, yaitu:</p>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kendala</th> <th>Dampak</th> <th>Rekomendasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Infrastruktur research masih belum memadai</td> <td>Timeline project tidak terpenuhi, delay time to market</td> <td>Membangun fasilitas riset baru (sudah dalam tahap DED untuk gedung 34 dan tahap validasi gedung 16)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bahan baku dan alat</td> <td>Keterlambatan riset</td> <td>Mengusulkan kebijakan pengadaan barang riset internal maupun nasional (sistem SAS dan rekomendasi Ristek)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SDM-Iklm inovasi belum mendukung</td> <td>Percepatan hasil litbang dan inovasi baru tidak muncul</td> <td>Sistem manajemen SDM yang mendorong inovasi (sistem inovasi sudah ada, ISO 2015 terkait inovasi akan diterapkan untuk audit mendatang, dan sistem merit akan dilaksanakan).</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Management project</td> <td>Prioritas project dan fokus tidak terjadi</td> <td>Membuat skala prioritas dan membangun sistem port folio product berbasis bisnis (melibatkan Business Development/ BusDev, Divisi Pemasaran dan team)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Research Partnership sesuai dengan misi perusahaan dan kondisi BF</td> <td>Partner perlu dikaji dengan pertimbangan win-win solution</td> <td>Perlu team untuk menilai proposal dan membuat FS (sudah ada team FS untuk beberapa project dan dibantu Busdev)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kendala	Dampak	Rekomendasi	1.	Infrastruktur research masih belum memadai	Timeline project tidak terpenuhi, delay time to market	Membangun fasilitas riset baru (sudah dalam tahap DED untuk gedung 34 dan tahap validasi gedung 16)	2.	Bahan baku dan alat	Keterlambatan riset	Mengusulkan kebijakan pengadaan barang riset internal maupun nasional (sistem SAS dan rekomendasi Ristek)	3.	SDM-Iklm inovasi belum mendukung	Percepatan hasil litbang dan inovasi baru tidak muncul	Sistem manajemen SDM yang mendorong inovasi (sistem inovasi sudah ada, ISO 2015 terkait inovasi akan diterapkan untuk audit mendatang, dan sistem merit akan dilaksanakan).	4.	Management project	Prioritas project dan fokus tidak terjadi	Membuat skala prioritas dan membangun sistem port folio product berbasis bisnis (melibatkan Business Development/ BusDev, Divisi Pemasaran dan team)	5.	Research Partnership sesuai dengan misi perusahaan dan kondisi BF	Partner perlu dikaji dengan pertimbangan win-win solution	Perlu team untuk menilai proposal dan membuat FS (sudah ada team FS untuk beberapa project dan dibantu Busdev)
No.	Kendala	Dampak	Rekomendasi																								
1.	Infrastruktur research masih belum memadai	Timeline project tidak terpenuhi, delay time to market	Membangun fasilitas riset baru (sudah dalam tahap DED untuk gedung 34 dan tahap validasi gedung 16)																								
2.	Bahan baku dan alat	Keterlambatan riset	Mengusulkan kebijakan pengadaan barang riset internal maupun nasional (sistem SAS dan rekomendasi Ristek)																								
3.	SDM-Iklm inovasi belum mendukung	Percepatan hasil litbang dan inovasi baru tidak muncul	Sistem manajemen SDM yang mendorong inovasi (sistem inovasi sudah ada, ISO 2015 terkait inovasi akan diterapkan untuk audit mendatang, dan sistem merit akan dilaksanakan).																								
4.	Management project	Prioritas project dan fokus tidak terjadi	Membuat skala prioritas dan membangun sistem port folio product berbasis bisnis (melibatkan Business Development/ BusDev, Divisi Pemasaran dan team)																								
5.	Research Partnership sesuai dengan misi perusahaan dan kondisi BF	Partner perlu dikaji dengan pertimbangan win-win solution	Perlu team untuk menilai proposal dan membuat FS (sudah ada team FS untuk beberapa project dan dibantu Busdev)																								

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
			<p>k. Permasalahan implementasi ERP diselesaikan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi ERP <ol style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan penyempurnaan aplikasi ERP meliputi penerapan beberapa kontrol yang semula tidak dikonfigurasi di ERP, perubahan proses bisnis akibat kebijakan atau proses bisnis baru, perbaikan aplikasi menyesuaikan dengan proses bisnis di Bio Farma. Penerapan beberapa kontrol menyesuaikan dengan kesiapan Bio Farma. b. Pembuatan aplikasi di luar ERP yaitu aplikasi <i>Raw Material Management</i> untuk mengelola proses uji dan aplikasi <i>Inventory Management</i> untuk monitoring mutasi barang di bagian sebelum MRP berjalan. Aplikasi RMM sudah selesai dibangun (<i>develop</i>) dan sudah divalidasi sampai dengan tahapan <i>soft live</i>, sedangkan untuk aplikasi <i>Inventory Management</i> sedang masa <i>soft live</i> (perlu penyempurnaan kembali untuk penyesuaian kode barang termasuk dimensi). Diharapkan <i>go live</i> triwulan I 2018. 2) Infrastruktur <p>Infrastruktur sedang dalam tahap perbaikan. <i>Mini DRC</i> sedang dalam tahap test kehandalan, pembuatan <i>backup disk to disk system</i>, perencanaan penambahan bandwidth antara <i>Server</i> utama dan <i>Mini DRC</i>, dan perubahan topologi jaringan dari bus/star yang merupakan <i>Single Point Of Failure</i> menjadi <i>Ring</i>. Saat ini sedang dilakukan konfigurasi.</p> 3) Proses Bisnis dan Kebijakan <p>Terdapat beberapa penyempurnaan proses bisnis dan sistem dan prosedur yang telah, sedang dan akan dilakukan terkait implementasi ERP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan barang/jasa sesuai standar modul <i>Procurement & Sourcing</i> yang merubah prosedur kerja di Divisi Pengadaan. • Proses pencatatan persediaan sesuai modul Inventory dan bisnis perusahaan yang merubah prosedur kerja di Divisi PPMP, Divisi Pengadaan, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Divisi Anggaran & Akuntansi. • Penerapan <i>budget control</i> yang merubah prosedur baku yang merubah prosedur baku di Divisi PPMP, Divisi Pengadaan, Divisi Anggaran & Akuntansi. • Seluruh unit kerja yang dalam aktivitasnya kerjanya menggunakan aplikasi ERP, harus memasukkan risiko penerapan ERP di unit kerjanya ke dalam Laporan Manajemen Risiko yang dilaporkan ke Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. • Penyempurnaan pengelolaan teknologi informasi di Divisi Teknologi Informasi yang terkait dengan aplikasi, <i>hardware</i>, data/informasi, serta infrastruktur dan SDM.

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
			<p>4) Sumber Daya Manusia Untuk kesiapan Sumber Daya Manusia telah, sedang dan akan dilakukan beberapa kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan pekerjaan operator ERP ke dalam <i>Job Description</i>. • Pelatihan ulang kepada end user aplikasi ERP sehingga diharapkan tingkat kesalahan menjadi lebih kecil atau bahkan hilang. • Pelatihan beberapa aplikasi penunjang ERP seperti <i>Raw Material Management</i> dan <i>Inventory Management</i> sehingga pengendalian menjadi lebih baik. • Persiapan pembuatan <i>Unit Change Management</i> sehingga sumber daya manusia lebih siap dalam penggunaan ERP. <p>l. Perusahaan telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara bertahap untuk mempercepat realisasi investasi dari sejak perencanaan kebutuhan sampai dengan pengadaannya baik dari aspek sistem dan prosedur termasuk sumber daya manusianya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan struktur organisasi dimana penanganan investasi ini sudah tersebar di berbagai divisi disertai penyempurnaan sistem dan prosedur termasuk Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Baku pengadaan barang dan jasa. 2) Telah dibentuk Tim PMO (<i>Program Management Office</i>) yang berfungsi untuk mengintegrasikan semua kegiatan strategis perusahaan. <p>m. Direksi telah menetapkan arah transformasi menuju <i>Life Science Industry</i> yang telah disusun dalam RJPP 2017 - 2021 dengan melakukan diversifikasi produk baru diantaranya <i>Blood Product</i> dan Biosimilar dan penguatan program <i>Partnership</i> untuk menghadapi persaingan global. Adapun program yang telah dilakukan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan struktur organisasi yang diduduki fungsi dan tanggungjawabnya pada triwulan III tahun 2017, saat ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi tertanggal 17 November 2017 serta telah disosialisasikan ke Serikat Pekerja pada tanggal 15 Desember 2017 dan Karyawan dalam hal ini Kepala Divisi dan Kepala Bagian pada tanggal 28 Desember 2017; dan 2) Penyusunan kembali sistem karir yang berbasis kompetensi dan kinerja yang telah selesai triwulan pada triwulan III tahun 2017 dan telah disosialisasikan ke Serikat Pekerja pada tanggal 15 Desember 2017 dan Karyawan dalam hal ini Kepala Divisi dan Kepala Bagian pada tanggal 28 Desember 2017 serta telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 29 Desember 2017. Saat ini Surat Keputusan mengenai sistem karir sedang dalam tahap finalisasi yang direncanakan akan selesai minggu pertama bulan Januari 2018. <p>n. Direksi berkomitmen dalam peningkatan peran dan fungsi pengendalian SPI melalui penguatan Sumber Daya Manusia di Pengawasan & Pengendalian Intern (PPI), dalam aspek kuantitas maupun kualitasnya.</p> <p>PPI ikut mengawal pengendalian intern didalam fungsi <i>human capital</i>, dengan ikut mereview kebijakan-kebijakan yang diambil oleh <i>human capital</i> terkait SDM dengan membandingkan dengan ketentuan yang berlaku (<i>compliance</i>).</p>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
			<p>Saat ini aktivitas kolaborasi PPI dan HC atas kualitas kebijakan berjalan dengan baik.</p> <p>o. 1) Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan kolektabilitas pada program kemitraan, sesuai PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan, Tahun 2017 PKBL PT Bio Farma telah menyalurkan Dana Program Kemitraan sebesar Rp 16.337.500.000,00 atau sebesar 105% dari anggarannya sebesar Rp 15.500.000.000,00 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran Program Kemitraan sinergi BUMN dengan PTPN X sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) serta dengan PTPN XI sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Perjanjian Kerja Sama tersebut di tandatangani pada tanggal 13 Juli 2017. b. Penyaluran secara langsung oleh PKBL PT Bio Farma (Persero) sebanyak 137 Mitra Binaan dengan total peyaluran sebesar Rp 5.337.500.000,00 di wilayah Bandung dan sekitarnya di Wilayah Propinsi Jawa Barat Dengan adanya penyaluran program kemitraan tersebut meningkatkan nilai efektifitas penyaluran dana kemitraan dan sekaligus meningkatkan efektifitas kolektabilitas. <p>2) Untuk menghindari risiko meningkatnya piutang macet/bermasalah dilakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama sinergi program kemitraan dengan BUMN dilakukan dengan pola <i>executing/avalis</i>. Sudah dilakukan pola avalis penyaluran program kemitraan dengan PTPN X sebesar Rp 7 Miliar dan PTPN XI sebesar Rp 4 Miliar. b. Seleksi secara selektif terhadap calon mitra binaan dan dilakukan verifikasi hasil <i>survey</i> oleh penyelia, serta diutamakan kepada mitra yang mengajukan pinjaman kedua/ketiga dengan kategori lancar pada pinjaman pertama. Penyaluran dana kemitraan untuk UKM Tahun 2017 sebanyak 137 Mitra Binaan sudah dilakukan secara selektif dan diprioritaskan untuk mitra yang mengajukan pinjaman ke dua/ketiga dengan kategori lancar pada pinjaman pertama/kedua. <p>3) Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kesadaran Bio Farma sebagai upaya meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sehingga penyaluran program PKBL diprioritaskan kepada daerah sekitar perusahaan yang membutuhkan bantuan (salah satunya dengan mengajukan proposal) dan bantuan tersebut dapat memberikan nilai positif kepada perusahaan.</p> <p>Penyaluran kegiatan PKBL sudah diprioritaskan pada UKM yang ada di daerah Bandung sekitarnya termasuk penyaluran Bina Lingkungan seperti bantuan program Bedah Rumah Veteran, elektrifikasi, pembuatan/renovasi MCK, pembuatan/renovasi sarana ibadah dll.</p>

No	Arahan Pemegang Saham	Status	Keterangan
		p.	Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan dalam pedoman GCG. Kebijakan perusahaan yang taat terhadap perundang-undangan menjadi kebijakan perusahaan dan telah ditetapkan dalam dokumen Manual Bio Farma.
		q.	Perusahaan telah menetapkan sistem pelaporan periodik terhadap pencapaian kinerja yang diberlakukan kepada tiap unit kerja. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, Perusahaan telah menetapkan mekanisme peningkatan kinerja dengan pemanfaatan peluang melalui pengelolaan inovasi terhadap proses kerja.
8.	Buku laporan tahunan, laporan audit, dan risalah rapat pembahasan PKBL tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.	Selesai	<p>b. Direksi telah menindaklanjuti temuan, catatan, dan saran Auditor pada tahun 2016 termasuk tahun-tahun sebelumnya dengan progres sebagaimana dijelaskan dalam bab 5.2 Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tanggal 4 Januari 2017 tentang Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017 butir 3. a dan b.</p> <p>Progres tindak lanjut atas temuan auditor eksternal tersebut telah dibahas secara periodik dan ditindaklanjuti. Laporan tindak lanjut diserahkan ke auditor eksternal, tembusan ke Dewan Komisaris.</p>



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi.

REFERENSI PERATURAN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 06 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 Tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

BOARD MANUAL

Pedoman Dewan Komisaris (*Board Manual*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut senantiasa ditinjau ulang secara berkala. Selain *Board Manual*, Dewan Komisaris juga telah mempunyai *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan tanggal 17 Desember 2015. Pedoman Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dan *Charter* Dewan Komisaris antara lain mengatur aspek:

1. Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris Baru.
2. Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.
4. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris.
5. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Tugas, wewenang dan Kewajiban serta Pembagian tugas Dewan Komisaris.
7. Ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Dewan Komisaris yang lowong.
8. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang.
9. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan RKAP.
10. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
11. Pengelolaan Manajemen Risiko.
12. Sistem Pengendalian Internal.
13. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
14. Etika berusaha dan anti korupsi.
15. Larangan mengambil keuntungan pribadi.
16. Organ pendukung Dewan Komisaris.
17. Rapat Dewan Komisaris.
18. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
19. Rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris.
20. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
21. Kebijakan informasi yang harus Disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
22. Kebijakan Informasi Perubahan Lingkungan Bisnis.
23. Kebijakan dalam Merespon Saran, Harapan, Permasalahan, dan Keluhan dari *Stakeholder* dan Menyampaikan Saran Penyelesaian kepada Direksi.
24. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya.
25. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
26. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan.
27. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya.
28. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya.
29. Kebijakan Komisaris dan Pemberian Nasihat atas Kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
30. Kebijakan atas Pemantauan Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.
31. Kebijakan Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Terhadap Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris.
32. Kebijakan atas Proses Penunjukan Calon Auditor Eksternal dan/atau Penunjukan Kembali Auditor Eksternal dan Penyampaian Usulan Calon Auditor Eksternal kepada RUPS.
33. Kebijakan Komisarian Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal, serta Pelaksanaan Telaah atas

- Pengaduan yang Berkaitan dengan BUMN yang Diterima oleh Dewan Komisaris.
34. Kebijakan Pelaporan Kepada Pemegang Saham jika Terjadi Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
 35. Kebijakan Komisaris dan pemberian nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Pelaksanaannya.
 36. Kebijakan atas Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 37. Kebijakan atas Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi Kepada Pemegang Saham.
 38. Kebijakan atas Penilaian Kinerja dan Pelaporan kepada Pemegang Saham.
 39. Kebijakan dan Pengurusan Remunerasi Direksi.
 40. Kebijakan Pemantauan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*).
 41. Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
 42. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
 43. Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberi nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
15. Dewan Komisaris harus memantau bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
16. Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) Dewan Komisaris kepada RUPS.
17. Menyajikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) kepada Pemegang Saham.

Kewajiban Dewan Komisaris yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Kewajiban Dewan Komisaris yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

- a. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- b. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas



implimentasi rencana dan kebijakan Perusahaan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJP.

Kewajiban Dewan Komisaris yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan

- a. Dewan komisaris melakukan telaahan atas Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham.

Pengelolaan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

- b. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- c. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
- d. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
- e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
 - d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
 - i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
 - j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menyewakan aset
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (*revenue*), atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*)
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*),

Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.

- Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - Pelaksanaan tindakan tersebut pada angkat 1), 2), 3) dan 4), harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa Benturan Kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dari Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dari Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 - h. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud angka 2 di atas.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Kriteria Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal



- a. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - Orang perseorangan;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- b. Persyaratan formal anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - Orang perseorangan;
 - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit; dan
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu:

- a. integritas;
- b. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan

- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar,

peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	Kementerian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014	23 Januari 2014
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	Kementerian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: 392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015	5 November 2012
Nizar Yamani*	Komisaris	Kementerian BUMN	Kep di Luar RUPS Nomor: 204/MBU/2012 tanggal 28 Mei 2012 Jo Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-81/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013	28 Mei 2012
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Kementerian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013	1 Mei 2013
Heridadi	Komisaris Independen	Kementerian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015	23 Januari 2014
Mohamad Subuh	Komisaris	Kementerian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015	22 Juni 2015

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

- Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan.
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Program pengenalan minimal meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
 - Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- Pelaksanaan program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan program pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam rangka pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program orientasi bagi Dewan Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktivitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Selama tahun 2017, tidak ada pengangkatan Dewan Komisaris baru berdasarkan RUPS sehingga Bio Farma tidak melaksanakan program orientasi untuk Dewan Komisaris baru.

Program orientasi bagi Dewan Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy*, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Dalam acara program orientasi, Dewan Komisaris yang baru sepakat akan menghindari potensi untuk terlibat dalam kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Direksi, dan menghindari potensi terjadinya gratifikasi serta berkomitmen akan melaksanakan GCG sebaik-baiknya. Dewan Komisaris juga telah menyepakati pembagian tugas di antara Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tgl 9 Juli 2015 sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris. Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	<p>Membidangi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana jangka panjang, pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan. Pelaporan yang meliputi laporan manajemen triwulanan dan laporan keuangan tahunan dengan memperhatikan standar pelaporan yang berlaku. Sebagai Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter Komite Audit</i>
Nizar Yamani*	Komisaris	<p>Membidangi Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan produksi meliputi proses produksi termasuk rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ketersediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku serta pengendalian terhadap barang persediaan kadaluarsa. Sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter Komite Risiko, Pengembangan dan GCG</i>.
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	<p>Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implementasi <i>IT Master Plan</i>. Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter Komite Audit</i>.
Heridadi	Komisaris Independen	<p>Membidangi Penelitian dan Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera. Sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter Komite Risiko, Pengembangan dan GCG</i>.
Mohamad Subuh	Komisaris	<p>Membidangi SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan. Sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter Komite Risiko, Pengembangan dan GCG</i>.

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PENERAPANNYA

Bio Farma memiliki kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang mengacu kepada:

- Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN
- Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
- Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero)

Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif terutama di era global seperti saat ini, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal, profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam mengelola BUMN, terutama Sumber Daya Manusia yang menempati posisi pada Organ BUMN, diantaranya adalah Anggota Dewan Komisaris BUMN.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 tanggal 7 November 2014.

Bahwa untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses, serta menyesuaikan dengan peraturan/perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 perlu ditinjau kembali, sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat dilakukan secara lebih baik, lebih terencana dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2017, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	56 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum; S2 Hukum Internasional; Program Doktor Studi Ilmu Hukum Internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kemkominfo. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemkumham. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kemkumham. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Pit. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 	Hukum
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	54 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ilmu Keuangan S2 <i>Business Administration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Transformasi Perbendaharaan. Direktur Sistem Perbendaharaan. Direktur Pelaksanaan Anggaran. Sekretaris Badan Akuntansi Negara Departemen Keuangan. Kepala Kantor Wilayah XXVII Ditjen Anggaran Manado. 	Keuangan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Nizar Yamani*	Komisaris	65 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran Spesialis Neurologi Konsultan Neurofisiologi Klinis 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris RS Kanker Dharmais. Anggota Dewan Komisaris RS Sanglah Bali. Anggota Dewan Komisaris PT Surveyot Carbon Consulting. Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma, Tbk. Kepala Unit Medis di RS Nasional Functional Brain Centers. 	Kesehatan
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	45 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Aqidah & Filsafat S2 BKU Ilmu Komunikasi S3 BKU Ilmu Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Islam. Peneliti dalam bidang sosial, agama dan kemasyarakatan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat STAIPI. 	Sosial
Heridadi	Komisaris Independen	65 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran S2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan S3 Kedokteran 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD. Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD. Dosen S2 Universitas Pertahanan. Kepala Pusat Kesehatan TNI. Direktur Kesehatan TNI AD. Wakil Direktur Kesehatan TNI AD. 	Kesehatan
Mohamad Subuh	Komisaris	55 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran S2 <i>Public Policy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Umum Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Direktur Umum Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Sekretaris Direktorat Umum Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Direktur Pengendalian Penyakit Menular. Kepala Kantor Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Direktur RS Umum Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kalimantan Barat. 	Kesehatan

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada Tahun 2017, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

PERIODE I : 1 JANUARI – 27 MEI 2017

Periode 1 Januari 2017 – 27 Mei 2017, Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama
Ihsan S. Latief	Anggota Dewan Komisaris
Nizar Yamani	Anggota Dewan Komisaris
Mohamad Subuh	Anggota Dewan Komisaris
Paruli Lubis	Komisaris Independen
Heridadi	Komisaris Independen

PERIODE II : 28 MEI – 4 NOVEMBER 2017

Periode 28 Mei 2017 – 4 November 2017, Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama
Ihsan S. Latief	Anggota Dewan Komisaris
Mohamad Subuh	Anggota Dewan Komisaris
Paruli Lubis	Komisaris Independen
Heridadi	Komisaris Independen

PERIODE III : 5 NOVEMBER - 31 DESEMBER 2017

Periode 5 November 2017 - 31 Desember 2017 Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama
Ihsan S. Latief	Anggota Dewan Komisaris
Mohamad Subuh	Anggota Dewan Komisaris
Heridadi	Komisaris Independen

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Tiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perusahaan maupun hubungan dengan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma bertindak independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Untuk menjamin tercapainya independensi dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran di antara beragam kepentingan serta senantiasa terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris											
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nizar Yamani*	Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris											
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Heridadi	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mohamad Subuh	Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
 * masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.
 ** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN/Perusahaan lain.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	-	-
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	-	-
Nizar Yamani*	Komisaris	-	-
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	-	-
Heridadi	Komisaris Independen	-	-
Mohamad Subuh	Komisaris	-	-

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai Benturan Kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017, tidak ada kepemilikan saham Dewan Komisaris Bio Farma, untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris telah membuat daftar khusus yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		Pribadi pada Bio Farma	Keluarga Pada Bio Farma	Pribadi/Keluarga Pada Perusahaan Lain
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Paruli Lubis**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
Nizar Yamani*	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
Heridadi	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Subuh	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang mengatur bahwa paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017 berjumlah 4 (empat) orang anggota dengan 1 (satu) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Komisaris yang ada.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Adapun kriteria Komisaris Independen, yaitu:

No.	Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen	
		Paruli Lubis*	Heridadi
1.	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓
2.	Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.	✓	✓
3.	Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.	✓	✓
4.	Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.	✓	✓

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) dan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: 07/DK/BF/03/2016 Tentang Tata Tertib Rapat Internal Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Di samping waktu tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:

1. Atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris;
2. Atas permintaan Direksi;
3. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	27 Januari 2017	Membahas Laporan Manajemen Perusahaan (LMP) Un Audited Tahun Buku 2016, dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Nizar Yamanie	Hadir	
2.	15 Februari 2017	Membahas Persiapan Wawancara Calon Direksi PT Bio Farma (Persero) dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Nizar Yamanie	Hadir	
3.	24 Februari 2017	Membahas Laporan Manajemen Perusahaan (LMP) Audit TB 2016, Kuesioner GCG, dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Nizar Yamanie	Hadir	
4.	24 Maret 2017	Membahas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2016, Membahas Tanggapan Dewan Komisaris atas LMP (Audited) TB 2016, dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Nizar Yamanie	Hadir	
5.	03 Mei 2017	Membahas kuesioner GCG, membahas usulan KAP dan remunerasi, membahas surat permohonan Direksi tentang Perpanjangan dan peningkatan plafond fasilitas kredit modal kerja Bank Mandiri, membahas surat permohonan Direksi tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit modal kerja ekspor Indonesia eximbank, membahas calon anggota Komite Audit, dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Nizar Yamanie	Hadir	
			Mohamad Subuh	Tidak Hadir	Sedang melaksanakan tugas instansi asal

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6.	19 Juni 2017	Tindak lanjut sewa lahan jasinga dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Mohamad Subuh	Tidak Hadir	Sedang melaksanakan tugas instansi asal
7.	28 Juli 2017	Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2017 PT Bio Farma (Persero) dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Tidak Hadir	Sedang ke luar kota
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Mohamad Subuh	Tidak Hadir	Sedang melaksanakan tugas instansi asal
8.	18 September 2017	Tindak lanjut lahan Jasinga, Surat Direksi nomor: 028886/DIR/VIII/2017 tentang Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT Bio Farma Tahun 2017 dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Mohamad Subuh	Tidak Hadir	Sedang melaksanakan tugas instansi asal
9.	9 Oktober 2017	Membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Komite tahun 2018, Usulan Direksi tentang pembentukan perusahaan patungan, Membahas revisi RJPP tahun 2017-2021, Membahas surat usulan Direksi tentang persetujuan Kredit Jangka Panjang, dan lain-lain.	Ahmad M. Ramli	Hadir	
			Paruli Lubis	Hadir	
			Heridadi	Hadir	
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	
			Mohamad Subuh	Hadir	

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Peserta Rapat - Direksi	Hadir/Tidak Hadir
1.	30 Januari 2017	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan & Laporan Kegiatan PKBL Tahun Buku 2016 (Un-Audited) PT Bio Farma (Persero)	Ahmad M. Ramli	Hadir	Iskandar	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Sugeng Raharso	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	Juliman	Hadir
			Heridadi	Hadir	Mahendra S.	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Nizar Yamanie	Hadir	Andjang Kusumah	Tidak Hadir
2.	24 Februari 2017	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan & Laporan Kegiatan PKBL Tahun Buku 2016 (audited) PT Bio Farma (Persero)	Ahmad M. Ramli	Hadir	Iskandar	Tidak Hadir
			M. Subuh	Tidak Hadir	Sugeng Raharso	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	Juliman	Hadir
			Heridadi	Hadir	Mahendra S.	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Nizar Yamanie	Hadir	Andjang Kusumah	Tidak Hadir
3.	28 Juli 2017	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2017	Ahmad M. Ramli	Hadir	Juliman	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	M. Rahman Roestan	Hadir
			Heridadi	Hadir	Disriil Revolin Putra	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Sugeng Raharso	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Peserta Rapat - Direksi	Hadir/Tidak Hadir
4.	18 September 2017	1. Lahan Jasinga 2. Struktur Organisasi 3. Lain-lain	Ahmad M. Ramli	Hadir	Juliman	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	M. Rahman Roestan	Hadir
			Heridadi	Hadir	Disril Revolin Putra	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Sugeng Raharso	Hadir
5.	9 Oktober 2017	1. Penyempurnaan RJPP Tahun 2017-2021 2. Rencana Kerjasama JVC Pabrik Vial dan Ampul 3. SOP/SK Kerjasama Bio Farma dengan Mitra 4. Finalisasi Struktur Organisasi	Ahmad M. Ramli	Hadir	Juliman	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	M. Rahman Roestan	Hadir
			Heridadi	Hadir	Disril Revolin Putra	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Sugeng Raharso	Hadir
6.	30 Oktober 2017	1. Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan III Tahun 2017 2. Rancangan RKAP 2018 3. Penyempurnaan RJPP Tahun 2017-2021	Ahmad M. Ramli	Hadir	Juliman	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	M. Rahman Roestan	Hadir
			Heridadi	Hadir	Disril Revolin Putra	Hadir
			Paruli Lubis	Hadir	Sugeng Raharso	Hadir
7.	18 Desember 2017	1. Laporan Direksi 2. Update RKAP 2018 3. Kesiapan KLB Differi 4. Lain-lain	Ahmad M. Ramli	Hadir	Juliman	Hadir
			M. Subuh	Hadir	Pramusti Indrascaryo	Hadir
			Ihsan Setiadi Latief	Hadir	M. Rahman Roestan	Hadir
			Heridadi	Hadir	Disril Revolin Putra	Hadir
					Sugeng Raharso	Hadir

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	9	9	100	7	7	100
Paruli Lubis **	Komisaris Independen	9	9	100	6	6	100
Nizar Yamanie *	Anggota Komisaris	5	5	100	2	2	100
Ihsan Setiadi Latief	Anggota Komisaris	9	9	100	7	7	100
Heridadi	Anggota Komisaris	9	8	88,89	7	7	100
Mohamad Subuh	Anggota Komisaris	9	3	33,33	7	6	50

Keterangan:

* Masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017

** Masa jabatan sampai dengan 4 November 2017

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti program pelatihan berupa *training*/pelatihan atau seminar agar dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
- Program pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dan Direksi dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti program pelatihan diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya serta Karyawan terkait jika diperlukan.

Sepanjang tahun 2017, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar. Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris disajikan dalam Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris Bio Farma yang meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif merupakan kewenangan Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017. Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 dan Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: S-24/D1.MBU/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
- Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
- Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Dewan Komisaris dan kemudian
- disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Dewan Komisaris berdasarkan PER-04/MBU/2014.
- Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Adapun struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut.

- Honorarium.
 - Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari gaji Direktur Utama.
 - Honorarium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Honorarium Komisaris utama.
- Tunjangan.
 - Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan.
 - Tunjangan transportasi sebesar 20% x honorarium.
 - Asuransi Purna Jabatan: premi sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun.

3. Fasilitas.

- Kesehatan : Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
- Bantuan Hukum : fasilitas bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

4. Tantiem/Insentif Kinerja. Tantiem/Insentif Kinerja didasarkan atas kinerja tahun buku 2016.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

- Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.
- Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris pada pengawasan tahun 2017.

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Nama	Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2017				
	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem & THR	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Ahmad M. Ramli	540.000.000,00	108.000.000,00	648.000.000,00	666.874.608,00	1.314.874.608,00
Nizar Yamani *	202.500.000,00	40.500.000,00	243.000.000,00	600.187.147,00	843.187.147,00
Paruli Lubis **	405.000.000,00	81.000.000,00	486.000.000,00	600.187.147,00	1.086.187.147,00
Heridadi	486.000.000,00	97.200.000,00	583.200.000,00	600.187.147,00	1.183.387.147,00
Ihsan Setiadi Latief	486.000.000,00	97.200.000,00	583.200.000,00	600.187.147,00	1.183.387.147,00
Mohamad Subuh	486.000.000,00	97.200.000,00	583.200.000,00	600.187.147,00	1.183.387.147,00
Total	2.605.500.000,00	521.100.000,00	3.126.600.000,00	3.667.810.343,00	6.794.410.343,00

Keterangan :

* masa jabatan sampai dengan 27 Mei 2017.

** masa jabatan sampai dengan 4 November 2017.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 Milyar	-
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar	5
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar	1
Rp500 juta ke bawah	-



KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar Bio Farma, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi diantaranya:

- Persetujuan mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit Bank Mandiri Tahun 2017-2018.
- Rekomendasi Dewan Komisaris atas penggunaan sebagian cadangan perusahaan untuk peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Ditempatkan PT Bio Farma.
- Persetujuan perubahan struktur organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017.
- Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero).
- Persetujuan sistem remunerasi Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris Bio Farma telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- Melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat terhadap:
 - Pelaksanaan RKAP Tahun 2017 dan RJPP.
 - Masalah-masalah strategis bagi perusahaan seperti WHO PQ, Proyek Pengembangan Vaksin dan lain sebagainya.
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penerapan prinsip-prinsip GCG, ISO, cGMP dan lain-lain.
 - Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
- Membuat keputusan/memberikan persetujuan/tanggapan:
 - Menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada Pemegang Saham atas Laporan Manajemen berkala, Laporan Tahunan dan Usulan RKAP dan RJPP;
 - Laporan RKAP dan RKA PKBL.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva
 - Remunerasi Direksi.
- Review* analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat rutin internal Dewan Komisaris.

4. *Review* analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat gabungan bersama Direksi termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi.
5. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan beserta Rencana Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan.
7. Pemantauan atas tindak lanjut keputusan/arahan pemegang saham dan hasil/temuan audit internal dan eksternal.
8. Melakukan kunjungan kerja dan *monitoring* ke lapangan.
9. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan.
10. Melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendadak dan mendesak.

Dewan Komisaris telah menyampaikan berbagai arahan, nasihat dan memberikan persetujuan khususnya menyangkut kelangsungan/perkembangan bisnis Perusahaan. Secara khusus arahan yang disampaikan Dewan Komisaris pada tahun 2017 antara lain:

1. Direksi diminta agar menggunakan RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham sebagai alat kendali atas beban perusahaan, karena biaya dalam RKAP merupakan batasan maksimal yang diperbolehkan, sedangkan pendapatan adalah batasan minimal yang harus dicapai.
2. Direksi agar memperhatikan efektivitas upaya-upaya peningkatan efisiesi, selain itu agar meningkatkan *monitoring* dan pengendalian biaya-biaya usaha utamanya pada biaya atau kegiatan yang kurang terkait dengan upaya merealisasikan penjualan, sehingga target penjualan tahun 2017 dapat tercapai.
3. Mengingat kegiatan investasi merupakan tulang punggung keberlangsungan dan pengembangan perusahaan, dan terutama berdampak jangka panjang, disarankan agar Direksi dapat memberikan perhatian yang lebih lagi untuk mengupayakan percepatan realisasi investasi, sehingga pengembangan bisnis perusahaan ke depan tidak menghadapi kendala, dan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai rencana jangka pendek maupun rencana strategis (jangka panjang).
4. Mengingat penelitian dan pengembangan, serta inovasi produk merupakan tujuan (misi) perusahaan didirikan, disarankan Direksi memerintahkan manajemen terkait agar membuat analisa sebab-sebab belum tercapainya target kegiatan tersebut sesuai RKAP tahun 2016, dan bagaimana dampaknya terhadap operasional dan keberlangsungan (*going concern*) perusahaan di masa yang akan datang.
5. Dalam proses pelaksanaan program investasi, agar Direksi terus meningkatkan unsur GCG serta dilengkapi dengan pengkajian manajemen risiko yang komprehensif disertai rancangan langkah-langkah mitigasi atas risiko dimaksud.
6. Terkait dengan alokasi dana Bina Lingkungan, Dewan Komisaris menyarankan agar manajemen memprioritaskan alokasi dana BL pada program-program/kegiatan yang *inline* dengan bisnis perusahaan, dan melakukan upaya penagihan terhadap piutang macet kepada para mitra binaan.
7. Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2017 agar dijadikan basis dan pembelajaran yang bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya, dengan diikuti kerja keras, pengoptimalan seluruh sumber daya, serta terus mengupayakan peluang peningkatan melalui pengawasan yang konstruktif, dan senantiasa memotivasi semangat kerja karyawan guna memperoleh produktivitas dan efisiensi yang optimal bagi perusahaan, mengingat berbagai tantangan yang akan dihadapi perusahaan dimasa mendatang semakin berat.
8. Direksi diminta untuk memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap aspek kegiatan pengurusan perseroan dengan memperhatikan pedoman GCG sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 jo PER-16/MBU/2012.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2017 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku yang lalu.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, bahwa RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris Bio Farma telah menerbitkan *Charter* Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) 2016.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Target	Realisasi	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Aspek Perencanaan							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2016	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10
Sub Total				10			
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:						
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	4	1	1	4
b.	Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	4	1	1	4
c.	Analisis kinerja triwulanan	Triwulanan	Surat	4	3	3	4
d.	Evaluasi RJPP	Setahun	Surat	4	1	1	4
2.	Memberi nasehat dan arahan kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris.						
a.	Jumlah rapat	Bulanan	Kali	4	12	12	4
b.	Kehadiran Rapat	Bulanan	%	4	100	100	4
c.	Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	4	12	12	4
3.	Rapat Dewan Komisaris						
a.	Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	9	12	12	9
b.	Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	100	5
c.	Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	5	12	12	5
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan unit terkait	Setahun	Risalah	6	12	12	6
5.	Kunjungan kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	2	2	4
6.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	100	3
Sub Total				60			
III. Aspek Pelaporan							
1.	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3	3	5
2.	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	5
Sub Total				15			
IV. Aspek Dinamis							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	3	1	1	3

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Target	Realisasi	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> dll.	Setahun	Kali	3	4	4	3
3.	Hasil <i>assessment</i> GCG Dewan Komisaris (<i>self assessment</i> /Konsultan Independen)	Tahunan	Skor	3	25	25	3
4.	Pembagian tugas Dewan Komisaris	Setahun	Kali	3	1	1	3
5.	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Assessor GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3
Sub Total				15			
TOTAL				100			

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2017 dilakukan secara kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Asesmen atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan *Charter* Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) 2017.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun tabel di bawah ini merupakan KPI Dewan Komisaris Tahun 2016 dan Tahun 2017:

Indikator	Bobot	Tahun 2016	Tahun 2017
Aspek Perencanaan	10	10	10
Aspek Pengawasan dan Nasehat	60	64,4	60
Aspek Pelaporan	15	15	15
Aspek Dinamis	15	22,3	15
Total	100	111,7	100

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Selain penilaian Dewan Komisaris berdasarkan KPI, Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *GCG assessment*. Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 (enam) periode. Pada tahun 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2016 telah dilakukan *self assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris;
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi;
8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris;
9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut;
11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris;
12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017, Bio Farma telah melakukan *GCG assessment* yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada 2017, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris mencapai skor 32,549 dengan capaian 93,00% dan predikat Sangat Baik.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. Memasuki masa usia pensiun dan Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan diberhentikan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Deputi Teknis bersama dengan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2, disertai dengan:
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian;

- b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.
6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
7. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dengan Peraturan ini, Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
8. Menteri dapat pula menugaskan Sekretaris dan/atau Deputi berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a, b, c, d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
11. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 10 dianggap telah terpenuhi.
13. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
14. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 13, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
15. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
17. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
18. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
20. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
21. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 20.
22. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
24. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan, mengelola bisnis dan urusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perusahaan semata-mata.

REFERENSI PERATURAN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 06 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

BOARD MANUAL

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- | | |
|------|--|
| I | : Ketentuan Umum |
| II | : Program Pengenalan dan Pelatihan |
| III | : Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi |
| IV | : Dewan Komisaris |
| V | : Direksi |
| VI | : Rapat Dewan Komisaris |
| VII | : Rapat Direksi |
| VIII | : Rapat Antara Direksi dan Dewan Komisaris |
| IX | : Rapat Antara Komite Dewan Komisaris dengan Counterpart Dewan Komisaris |

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013; Nomor: 01025/DIR/II/2013 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.



8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.

18. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Direksi guna dimintakan persetujuan RUPS.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)

1. Direksi wajib menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. RJP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
 - b. Posisi Perusahaan saat ini.
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
2. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran, strategi, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan.
 - b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.

- c. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaannya.
- d. Program kerja Dewan Komisaris.
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
7. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*)

1. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada.
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau.
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan tidak memberi alasannya secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Kewajiban Direksi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Laporan Berkala

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.

6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pengelolaan Manajemen Risiko

1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
 - a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

1. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - i. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
 - ii. Filosofi dan gaya manajemen.
 - iii. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - iv. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - v. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan ada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
 - e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Untuk pengangkatan dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern. Untuk pengangkatan dan

memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dengan batasan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyewakan aset
Direksi dapat menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa/transaksi sampai dengan 1% dari pendapatan (*revenue*) atau 2% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - b. Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha
Direksi dapat melakukan Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*) atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*)
Direksi dapat melakukan Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan sampai dengan 6% dari pendapatan (*revenue*) atau 6,5% sampai dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - d. Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya
Direksi dapat melakukan kerjasama Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - e. Pelaksanaan tindakan tersebut pada huruf a, b, c, dan d, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa Benturan Kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

KRITERIA DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, kriteria/persyaratan menjadi anggota Direksi sebagai berikut:

1. Persyaratan Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan Materiil Direksi BUMN, yaitu:
 - a. Keahlian;
 - b. Integritas;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pengalaman;
 - e. Jujur;
 - f. Perilaku yang baik; dan
 - g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Persyaratan Lain
Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
 - c. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - d. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.



PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Iskandar **	Direktur Utama	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	12 April 2013
Juliman	Direktur Produksi sebagai Plt. Direktur Utama	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	12 April 2013
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	12 April 2013
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017	10 Juli 2017
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	Kementrian BUMN	Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma di Luar RUPS Nomor: SK-116/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013	4 Februari 2013
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	14 Juli 2017
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	12 April 2013
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Kementrian BUMN	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	12 April 2013

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
- ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
- *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
- **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

- Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan.
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Program pengenalan minimal meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
 - Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- Pelaksanaan program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan program pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan khusus Direksi, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, buku sejarah perusahaan, Dokumen terkait GCG, *product knowledge*, serta diakhiri dengan kunjungan ke area produksi vaksin.

Selama tahun 2017, terdapat perubahan susunan Direksi Bio Farma sehingga terdapat program orientasi untuk Direksi baru sebagai berikut:

Nama	Materi Program Orientasi	Tempat Pelaksanaan
Disril Revolin Putra	<ol style="list-style-type: none"> Pengenalan Level-Level Jabatan Prosedur Pengangkatan Karyawan Kontrak Proses <i>Competency Assessment/Mapping</i> Prosedur Penyesuaian Ijazah, Promosi dan Transfer Karir Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan <i>Grade</i> <i>Performance Management</i> dan KPI <i>Competency Management</i> <i>Distinc Job Profile</i> (DJP) Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Struktur Organisasi <i>On Job Training</i> (OJT) <i>Training</i> Pendidikan Formal <i>Knowledge Management</i> Internship <i>Innovation Management</i> BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Kegiatan <i>Work Life Balance</i> (WLB) Hubungan industrial Kartu Identitas Karaywan Kehadiran, Izin dan Ketentuan Cuti Karyawan Izin Keluar dari Lingkungan Perusahaan DPLK, Uang Jasa dan Pengabdian Ketentuan Pensiun Normal dan GSH Karyawan Fasilitas Kesehatan Karyawan BIOSIS (Bio Farma Sistem Informasi SDM) SPPD/Prosedur Perjalanan Dinas Kebijakan PT Bio Farma (Persero) Manajemen Mutu Bio Farma Mikrobiologi Dasar Pengendalian Kontaminasi Prosedur <i>Gowning</i> Proses Aseptis/Berperilaku di Ruang Berkelas Kualifikasi Operator Aseptis Dokumentasi 	PT Bio Farma (Persero)

Nama	Materi Program Orientasi	Tempat Pelaksanaan
	37. <i>Change Control</i> 38. Deviasi dan Investigasi 39. Audit 40. Validasi dan Kalibrasi 41. <i>Water System</i> 42. <i>Post Market</i> , Penanganan Keluhan Pelanggan dan <i>Recall</i> 43. GMP Produk Steril 44. <i>Safety First</i> di Lingkungan Pekerjaan 45. Mengetahui Perlengkapan dan Rambu-Rambu K3 46. Pemantauan Kesehatan Karyawan 47. <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) 48. Kesiapan Tanggap Darurat 49. Pemeliharaan Lingkungan 50. Pengelolaan Limbah 51. Cara Membuang Sampah 52. <i>Good Corporate Governance</i> 53. Pengendalian Gratifikasi 54. <i>Risk Management</i> 55. Pengenalan Lingkungan Perusahaan 56. Pengenalan Proses Produksi 57. Pengenalan <i>Marketing</i> 58. Pengenalan Produk dan Pengembangan	

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dijabarkan dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang penetapannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga harus melaksanakan kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi dan misi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Iskandar **	Direktur Utama	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Utama dan seluruh jajaran Direksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan Direksi lainnya dalam pencapaian kinerja bisnis Perusahaan.
Juliman	Direktur Produksi sebagai Plt. Direktur Utama	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Produksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Pemasaran termasuk pengelolaan unit bisnis strategis dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat SDM & Umum dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Perencanaan & Pengembangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Keuangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
- ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
- *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
- **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN PENERAPANNYA

Bio Farma memiliki kebijakan mengenai keberagaman komposisi Direksi yang mengacu kepada:

- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
- Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero)

Dalam rangka memperoleh Sumber Daya Manusia BUMN khususnya Anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian Anggota Direksi secara baik, diperlukan penyempurnaan pedoman yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keberagaman Komposisi Direksi Bio Farma antara lain:

1. Orang perorangan:
 - Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
 - Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Integritas;

Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

 - Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.
 - Pengalaman dan keahlian dibidang pengurusan Perusahaan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.
 - Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - Psikologis bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan

tugasnya sebagai anggota Direksi Perusahaan.

3. Persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, keberagaman komposisi Direksi tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Iskandar **	Direktur Utama	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Farmasi; Profesi Apoteker; S2 Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Perencanaan dan Pengembangan; Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan 	Science
Juliman	Direktur Produksi sebagai Plt. Direktur Utama	55 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Farmasi; Profesi Apoteker; S2 Manajemen Operasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Logistik; Kepala Divisi Pemasaran Ekspor 	Science
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	55 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Farmasi; Profesi Apoteker; S2 Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Produksi; Kepala Divisi <i>Quality Assurance</i> 	Science
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	47 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Farmasi; Profesi Apoteker; S2 Business Administration; S3 <i>Management Strategic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Secretary; Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi 	Manajemen
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	64 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi; S2 Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris beberapa BUMN; Asisten Deputi Urusan Usaha Telekomunikasi; Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur 	Manajemen
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	52 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum; S2 Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur SDM dan Hukum PT Pelindo II 	Hukum
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran Hewan; Profesi Dokter Hewan; S2 Manajemen Operasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Hewan Laboratorium Kepala Satuan Pengawasan Intern 	Science
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	52 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi; S2 Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Vice President</i> Bank Mandiri Asisten <i>Vice President</i> Bank Mandiri 	Keuangan

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
- ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
- *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
- **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
		Hubungan Keuangan Dengan				Hubungan Keluarga Dengan				Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya		Tidak	
Iskandar **	Direktur Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Juliman	Direktur Produksi sebagai Plt. Direktur Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
- ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
- *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
- **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Aturan rangkap jabatan Direksi sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai berikut:
 - a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri Selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan;

- b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Iskandar **	Direktur Utama		
Juliman	Direktur Produksi sebagai PIt. Direktur Utama	-	-
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	-	-
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	-	-
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	-	-
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	-	-
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	-	-
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	-	-

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
 ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
 *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
 **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan.
- Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Pada tahun 2017, tidak ada kepemilikan saham oleh Direksi baik pada Bio Farma maupun perusahaan lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Direksi telah membuat daftar khusus yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Direksi dan/atau keluarganya.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		Pribadi pada Bio Farma	Keluarga Pada Bio Farma	Pribadi/Keluarga Perusahaan Lain
Iskandar **	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Juliman	Direktur Produksi sebagai PIt. Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil	Nihil
Mas Rahman Roestan***	Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil	Nihil
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	Nihil	Nihil	Nihil
Disril Revolin Putra****	Direktur SDM & Umum	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		Pribadi pada Bio Farma	Keluarga Pada Bio Farma	Pribadi/Keluarga Perusahaan Lain
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Nihil	Nihil	Nihil
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
 ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
 *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
 **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi Bio Farma sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT

- Rapat Dewan Direksi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
- Disamping waktu tersebut, Rapat Direksi dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:
 - Atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi.
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain wilayah RI yang ditetapkan oleh Direksi.

PESERTA RAPAT DIREKSI

- Peserta Rapat Direksi terdiri dari semua anggota Direksi.
- Apabila Direksi menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam Rapat Direksi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

AGENDA RAPAT DIREKSI

- Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Direksi, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat Direksi.
- Agenda untuk Rapat Direksi dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam Rapat Direksi.
- Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Direksi, menentukan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam Rapat Direksi, yang untuk itu – apabila dianggap perlu oleh anggota Direksi yang bersangkutan – dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) agar melaksanakan penyusunan acara dan menyiapkan bahan/berkas untuk Rapat Direksi.
- Acara yang belum selesai dibahas/diputuskan pada Rapat Direksi sebelumnya, dapat diajukan ke dalam Rapat Direksi berikutnya oleh anggota Direksi yang terkait/berkepentingan.
- Setiap anggota Direksi dapat menambah acara Rapat Direksi di luar acara yang telah disusun sebelumnya, untuk dibahas/diputuskan dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahan/berkasnya telah disiapkan oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hasil dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat Direksi disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada para anggota Direksi sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.

UNDANGAN RAPAT DIREKSI

- Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau oleh anggota Direksi lain yang mewakili Direktur Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- Dalam undangan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat Direksi.
- Undangan Rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DIREKSI

- Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
- Dalam Rapat Direksi, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi, hanya oleh anggota Direksi lain dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Direksi yang bersangkutan.
- Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

PIMPINAN RAPAT DIREKSI

- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- Dalam hal Direkstur Utama tidak hadir, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.
- Dalam hal direktur Utama tidak hadir dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
- Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

RISALAH RAPAT DIREKSI

- Untuk setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat.
- Risalah Rapat Direksi harus mencantumkan:
 - Alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada Direksi yang tidak hadir.
 - Hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat Direksi sebelumnya.
 - Dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan Rapat Direksi termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada.
 - Pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan Rapat Direksi.
 - Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Direksi.
- Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan Notulis.
- Risalah Rapat Direksi diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

PENCATAT/NOTULIS RAPAT DIREKSI

- Pencatat/Notulis Rapat Direksi adalah Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Dalam hal Sekretaris Perusahaan tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai Notulis Rapat Direksi adalah salah seorang anggota Direksi yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	23 Januari 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Laporan Keuangan 2016 3. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman Andjang Kusumah	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	Cuti Ibadah

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
2.	27 Februari 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Laporan FS <i>Blood Product</i> 3. Laporan Progres Antisipasi Vaksin Palsu 4. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman Andjang Kusumah	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
3.	10 April 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. <i>Forecast</i> dan rencana investasi 3. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
4.	25 April 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Proyek Tahap 2 3. Progress <i>Blood Product</i> 4. Progress JV Vial dan Ampul 5. Progress <i>IT Master Plan</i> 6. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir	Tanpa Keterangan
5.	18 Mei 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Risiko Regulasi Global dan Nasional 3. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman	Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir	Dinas Luar Negeri
6.	9 Juni 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Progress Rencana PEF dan <i>Stockpile OPV</i> 3. Progress Rencana <i>Blood Product</i> 4. Lain-lain	Iskandar Pramusti Indrascaryo Mahendra Suhardono Sugeng Raharso Juliman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
7.	11 Juli 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Penunjukkan Pymt. <i>Corporate Secretary</i> 3. Lain-lain	Juliman Sugeng Raharso Pramusti Indrascaryo Mas Rahman Roestan	Hadir Hadir Hadir Hadir	
8.	14 Juli 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Rencana <i>Joint Venture (JV) Produksi Vial</i> 3. Rencana Perubahan Struktur Organisasi 4. Lain-lain	Juliman Sugeng Raharso Pramusti Indrascaryo Mas Rahman Roestan Disril Revolin Putra	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	
9.	21 Juli 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Progress Implementasi ERP dan MRP 3. Lain-lain	Juliman Sugeng Raharso Pramusti Indrascaryo Mas Rahman Roestan Disril Revolin Putra	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
10.	28 Juli 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Perkembangan Lahan Jasinga 3. Perkembangan Lahan Indotaisei	Juliman Sugeng Raharso Pramusti Indrascaryo Mas Rahman Roestan Disril Revolin Putra	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
11.	4 Agustus 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Rencana Perubahan Struktur Organisasi	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
12.	11 Agustus 2017	Pembahasan Rapat Sebelumnya Respon Surat Menkes 19 Juli 2017 Rencana Kit Diagnostik DM Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
13.	21 Agustus 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Penyempurnaan RJPP 2017-2021 3. RKAP 2018 dan Prognosa 2017 4. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
14.	29 Agustus 2017	1. Harga Vaksin Pneumokokus 2. Perpanjangan Kontrak dengan Sigma	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
15.	6 September 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Kredit Sindikasi 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Gedung No.3 dan Gedung No.43 Tahap 2 4. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
16.	13 September 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. SOP/SK Kerjasama Bio Farma dengan Mitra 3. Rancangan RKAP 2018 4. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
17.	2 Oktober 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Laporan Survei Lahan Kawasan Indotaisei 3. Laporan Hasil Pertemuan DCVMN	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
18.	4 Oktober 2017	Pembahasan Lanjutan Rencana Pengiriman Bulk Polio ke Bibcol	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
19.	9 Oktober 2017	1. Pengajuan Kredit Investasi 2. Kegiatan dan Biaya Monitoring	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
20.	24 Oktober 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Proyek Pembangunan Gedung <i>Learning Development Centre</i> (LDC) 3. Laporan Manajemen Perusahaan TW II/2017 4. Pengembangan Vaksin <i>Measles Rubella</i> (MR) 5. Lain-lain	Juliman	Tidak Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
21.	26 Oktober 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Perhitungan Tunjangan Kesejahteraan Tahap I 2017 3. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Gedung No.3 4. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
22.	1 November 2017	1. Struktur Organisasi 2. <i>Annual Fee</i> Tahun 2017 untuk Produk yang Masuk dalam PQ WHO 3. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
23.	3 November 2017	Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Gedung No.3	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
24.	16 November 2017	1. Struktur Organisasi 2. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Tidak Hadir	Dinas
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
25.	28 November 2017	1. Update RKAP 2018 2. Struktur Organisasi 3. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	
26.	7 Desember 2017	1. Pembahasan Peralatan Gedung AI (Avian Influenza) 2. Struktur Organisasi 3. Program Kemitraan Tahun 2018	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Tidak Hadir	Dinas
			Disril Revolin Putra	Hadir	
27.	27 Desember 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Update RKAP 2018 terkait perubahan investasi 3. Persiapan Centre of Excellent (CoE) OIC 4. Lain-lain	Juliman	Hadir	
			Sugeng Raharso	Hadir	
			Pramusti Indrascaryo	Hadir	
			Mas Rahman Roestan	Hadir	
			Disril Revolin Putra	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
28.	29 Desember 2017	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya 2. Penggajian 3. Lain-lain	Juliman Sugeng Raharso Pramusti Indrascaryo Mas Rahman Roestan Disril Revolin Putra	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Iskandar **	Direktur Utama	6	6	100	2	1	50
Juliman	Direktur Produksi sebagai Pit.Direktur Utama	28	27	96,43	7	7	100
Mahendra Suhardono **	Direktur Pemasaran	6	5	83,33	2	2	100
Mas Rahman Roestan ***	Direktur Pemasaran	22	21	95,45	5	5	100
Andjang Kusumah *	Direktur SDM	2	1	50	2	0	0
Disril Revolin Putra ****	Direktur SDM & Umum	21	20	95,24	5	5	100
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	28	26	92,86	7	7	100
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	28	28	100	7	7	100

Keterangan:

- * : Masa jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
 ** : Masa jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
 *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
 **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

- Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti program pelatihan berupa *training*/pelatihan atau seminar agar dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
- Program pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja Dewan Komisaris dan Direksi dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti program pelatihan diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya serta Karyawan terkait jika diperlukan.

Sepanjang tahun 2017, anggota Direksi Perusahaan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar. Pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/06/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 dan Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: S-24/D1.MBU/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

- Dewan Komisaris penugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi.
- Komite Audit melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Direksi.
- Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Direksi.
- Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Direksi dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Direksi Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Direksi berdasarkan PER-04/MBU/2014.
- Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Direksi.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi		
Gaji per Tahun	Tunjangan	Fasilitas
Direktur Utama Rp 1.200.000.000,-	• Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Gaji • Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun	• Fasilitas kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan. • Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (<i>at cost</i>) • Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)
Direksi Rp 1.080.000.000,-	• Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000,- per bulan	

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

- Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.
- Pemberian remunerasi kepada Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan tahun 2017.

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016, rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi Bio Farma pada tahun 2017 terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi dan santunan purna jabatan sebagai berikut:

Remunerasi Direksi Tahun 2017						
Nama	Dalam Rupiah					
	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Potongan Dinas	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6 = 4 + 5
Iskandar **	600.000.000,00	150.000.000,00	13.960.000,00	736.040.000,00	1.481.943.574,00	2.217.983.574,00
Juliman	1.080.000.000,00	300.000.000,00	28.014.174,00	1.351.985.826,00	1.333.749.216,00	2.685.735.042,00
Mahendra Suhardono **	540.000.000,00	150.000.000,00	13.375.164,00	676.624.836,00	1.333.749.216,00	2.010.374.052,00
Mas Rahman Roestan***	600.000.000,00	150.000.000,00	12.985.175,00	737.014.825,00	-	737.014.825,00

Remunerasi Direksi Tahun 2017

Nama	Dalam Rupiah					
	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Potongan Dinas	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6 = 4 + 5
Andjang Kusumah *	180.000.000,00	50.000.000,00	4.216.800,00	225.783.200,00	1.243.749.216,00	1.469.532.416,00
Disril Revolun Putra***	540.000.000,00	150.000.000,00	12.985.175,00	677.014.825,00	-	677.014.825,00
Sugeng Raharso	1.080.000.000,00	300.000.000,00	28.014.174,00	1.351.985.826,00	1.333.749.216,00	2.685.735.042,00
Pramusti Indrascaryo	1.080.000.000,00	300.000.000,00	28.014.174,00	1.351.985.826,00	1.333.749.216,00	2.685.735.042,00
Total	5.700.000.000,00	1.550.000.000,00	141.564.836,00	7.108.435.164,00	8.060.689.654,00	15.169.124.818,00

Keterangan:

- * : Masa Jabatan sampai dengan 6 Maret 2017
 ** : Masa Jabatan sampai dengan 9 Juli 2017
 *** : Mulai menjabat sejak 10 Juli 2017
 **** : Mulai menjabat sejak 14 Juli 2017

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Orang
Di atas Rp2 Miliar	5
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	2
Rp500 juta ke bawah	-

PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKSI

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi tahun 2017 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui kontrak manajemen. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *assessment* GCG.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2017 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegal berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS. Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Penyusunan KPI mengacu pada Surat Menteri BUMN Nomor: S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Penerapan KPI yang bertujuan sebagai alat penilaian bagi pemegang saham atas kinerja Direksi sampai dengan akhir tahun. Hasil kinerja Direksi secara kolegal dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Tingkat kesehatan Perusahaan diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Kinerja Perusahaan tahun 2013 dengan skor 96,00 dengan kriteria "Sehat AAA" tahun 2014 mencapai skor 95,50 dengan kriteria "Sehat AAA", tahun 2015 mencapai skor 88,50 dengan kriteria "Sehat AA", tahun 2016 mencapai skor 81,60 dengan kriteria "Sehat AA", dan tahun 2017 mencapai skor 86,00 dengan kriteria "Sehat AA".

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 2013- 2017 (Audited)

No.	Indikator	Bobot	2013		2014		2015		2016		2017	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
I. ASPEK KEUANGAN												
1	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	20	37,81	20	30,76	20	17,14	20	12,47	16	12,97	16,00
2	Imbalan Investasi (ROI)	15	34,81	15	31,20	15	20,27	15	16,53	13,50	16,93	13,50
3	Rasio Kas	5	228,74	5	286,08	5	121,74	5	98,85	5,00	63,76	5
4	Rasio Lancar	5	395,98	5	537,18	5	437,04	5	408,14	5,00	338,90	5
5	Collection Periods	5	56,76	5	45,94	5	79	4,5	45,49	5,00	37,95	5
6	Perputaran Persediaan	5	40,35	5	58,32	5	71,97	4,5	111,68	4,00	86,40	4,5
7	Perputaran Total Asset	5	79,48	3,5	75,56	5	48,46	2,5	48,62	2,50	60,05	3
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	10	77,56	7,5	81,53	7	86,01	7	86,63	7,00	83,51	7
		70	66		65,50		63,50		58,00		59,00	
II. ASPEK OPERASIONAL												
1	Efisiensi Produksi & Produktivitas	5	766,16	5	800,39	5	1.291,92	2	1.134,68	4	1.529,32	3
2	Pemeliharaan Kontinuitas Produksi	5	12,89	5	16,39	5	14,04	4	17,92	4	17,57	4
3	Penelitian & Pengembangan	2	89,24	2	87,20	2	89,90	2	83,35	1,60	94,36	2
4	Penugasan Pemerintah	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3
		15	15		15		11		12,60		12	

No.	Indikator	Bobot	2013		2014		2015		2016		2017	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
III. ASPEK ADMINISTRASI												
1	Laporan Perhitungan Tahunan	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3
2	Rancangan RKAP	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3
3	Laporan Periodik	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3
4	Kinerja PKBL:											
	• Efektivitas Penyaluran Dana	3	15,87	3	90,07	3	86,44	2	32,86	-	97,08	3
	• Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	3	71,32	3	75,72	3	76,30	3	59,95	2	75,77	3
		15	15	15	14	11	15					
	TOTAL SKOR	100	96	95,50	88,50	81,60	86					
	KRITERIA		SEHAT (AAA)	SEHAT (AA)	SEHAT (AA)	SEHAT (AA)	SEHAT (AA)					

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi tahun 2017 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Direksi menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Secara keseluruhan KPI tahun 2017 melebihi target yang ditentukan terutama untuk aspek keuangan dan pasar serta kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab sosial masyarakat, meskipun pada sisi lain untuk aspek efektivitas produk dan proses, fokus pelanggan dan fokus tenaga kerja tidak seluruhnya sesuai target yang ditentukan.

Penilaian KPI Direksi Tahun 2017						
	Perspektif	Bobot (%)	Satuan	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	
					Nilai	Skor
Keuangan dan Pasar	Pendapatan Usaha	10	Rp. 000	2,940,215,456	3,011,570,730	10.24
	EBITDA : Interest	10	Rp. 000	317.75	109.19	3.44
	Working Capital Days	5	hari	201.18	167.80	5.99
		25				19.67
Efektivitas Produk dan Proses	PQ WHO	7	Jumlah Produk	11	11	7.00
	Proper KLH	8	Kategori	Hijau	Emas	10.00
		18				17.00
Fokus Pelanggan dan Pasar	Increasing of exported product	5	Rp. 000	1,749,494,136	1,242,909,017	3.55
	Kepuasan Pelanggan	7	Skor	80	82.74	7.24
		7				10.79

Penilaian KPI Direksi Tahun 2017						
	Perspektif	Bobot (%)	Satuan	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	
					Nilai	Skor
Fokus Tenaga Kerja	Pengembangan Kompetensi	5	Persentase	100	100	5.00
	Produktifitas Tenaga Kerja/Empro	5	Rp/Karyawan	2,411,989,709	2,539,267,058	5.26
		10				10.26
Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat	Tingkat Kesehatan	7	Skor	91.50	86.00	6.58
	Skor GCG & KPKU :					
	* Skor GCG	8	Skor	86.50	90.49	8.37
	*Skor KPKU	8	Skor	500	537	8.59
	c. Capex Fisik	10	Persentase	75	37.49	5.00
	d. Entry Data Portal BUMN	5	Item	5	5	5.00
Sub Jumlah		38				33.54
Jumlah		100				91.27

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Maks. Skor	Realisasi	Skor
Kategori 1 : Kepemimpinan			
1.1 Kepemimpinan Senior	70	65%	45,50
1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	50	60%	30,00
Kategori 2 : Perencanaan Strategis			
2.1 Pengembangan Strategi	40	65%	26,00
2.2 Implementasi Strategi	45	60%	27,00
Kategori 3 : Fokus Pelanggan			
3.1 Suara Pelanggan	45	55%	24,75
3.2 Keterikatan Pelanggan	40	55%	22,00
Kategori 4 : Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan			
4.1 Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja	45	50%	22,50
4.2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi Informasi	45	55%	24,75
Kategori 5 : Fokus Tenaga Kerja			
5.1 Lingkungan Tenaga Kerja	40	60%	24,00
5.2 Keterikatan Tenaga Kerja	45	55%	24,75
Kategori 6 : Fokus Operasi			
6.1 Proses Kerja	45	60%	27,00
6.2 Efektivitas Proses	40	55%	22,00
Kategori 7 : Hasil-Hasil			
7.1 Hasil-Hasil Produk dan Proses	110	50%	55,00
7.2 Hasil-Hasil Fokus Pelanggan	85	50%	42,50
7.3 Hasil-Hasil Fokus Tenaga Kerja	85	45%	38,25
7.4 Hasil-Hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola	80	45%	36,00

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Maks. Skor	Realisasi	Skor
7.5 Hasil-Hasil Keuangan	90	50%	45,00
Total	1.000		537,00

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kategori 1 : Kepemimpinan	60	63,50	69,50	75,50
Kategori 2 : Perencanaan Strategis	42,50	42,50	48,75	53,00
Kategori 3 : Fokus Pelanggan	29,75	40,50	48,75	46,75
Kategori 4 : Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan	40,50	45	42,75	47,25
Kategori 5 : Fokus Tenaga Kerja	40,25	40,25	44,5	48,75
Kategori 6 : Fokus Operasi	44,25	42,50	49	49,00
Kategori 7 : Hasil-Hasil	165,5	192,75	207	216,75
TOTAL	422,75	467	510,25	537,00

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui GCG *assessment*. Penilaian kinerja Direksi melalui GCG *Assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Penilaian menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 periode. Pada tahun 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2016 telah dilakukan *self assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada tahun 2017, Bio Farma telah melakukan GCG *assessment* yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada 2017, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor 32,239 dengan capaian 92,11% dan predikat Sangat Baik.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan Pemberhentian antara lain:
 - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - d. Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara.
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN.
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Mengundurkan diri.
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
3. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
4. Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Masa jabatannya berakhir.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
5. Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada angka 4 huruf c antara lain sebagai berikut:
 - a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
 - e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau.
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
6. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 5, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
7. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Tata Cara Pemberhentian Direksi

1. Deputi Teknis melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi dan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan:
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Rencana pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
5. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Menteri dapat menugaskan Deputi dan/atau Sekretaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
7. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
8. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu.

9. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
10. Apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu dianggap telah terpenuhi.
11. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
12. Apabila Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
13. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
14. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
15. Menteri dapat memberhentikan Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis.
16. Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis dan/atau Sekretaris.
17. Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan melalui cara:
 - a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
18. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
20. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
22. Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG secara konsisten. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut campur dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan.

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan akan mempertanggungjawabkannya di RUPS.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan keputusan strategis Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai 2 (dua) organ Perusahaan senantiasa mengagendakan pertemuan berkala. Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris secara berkala, antara lain untuk membahas kinerja Perusahaan bulan sebelumnya, rencana Direksi bulan mendatang untuk meraih peluang yang ada, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
 - a. RJPP.
 - b. Rencana Pengembangan Perusahaan.
 - c. RKAP.
 - d. Rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan.
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
 - g. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian Visi dan Misi Perusahaan
3. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam:
 - a. Proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
 - b. Penunjukan penilai (assessor) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan.
4. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi.
 - c. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - e. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
5. Hal-hal lainnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi serta peraturan perundang-undang yang berlaku.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit serta Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2017 Tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/BF/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu menciptakan tertib kerja, transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Kriteria dan prosedur pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang antara lain mensyaratkan Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar perusahaan, diangkat oleh Dewan Komisaris, memahami tata kelola perusahaan dan mampu berkomunikasi dengan baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Dewan Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;
2. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Pemegang Saham dan/atau pihak terkait lainnya;
3. Memberikan informasi/data yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Komite secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
5. Membuat risalah rapat baik rapat intern Dewan Komisaris, maupun rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
6. Dalam hal membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris harus bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan;
7. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
8. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
9. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
10. Menyampaikan kepada Komisaris Utama setiap surat yang masuk untuk mendapatkan disposisi;
11. Untuk ketertiban administrasi setiap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, harus terlebih dahulu dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris Dewan Komisaris;
12. Untuk setiap kegiatan Komite-komite, Sekretaris Dewan Komisaris dapat membantu demi kelancaran tugas-tugas dimaksud;
13. Dengan berkoordinasi pihak manajemen, Sekretaris Dewan Komisaris setiap bulan Oktober mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris (RKAK) untuk tahun berikutnya;
14. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris yang keberadaannya diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris;



- 15. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- 16. Berkoordinasi dengan anggota Komite jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
- 17. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Roslyn Sitohang

Warga Negara Indonesia. Lahir di Rapusan tanggal 16 Desember 1963. Pendidikan terakhir S1 Administrasi Negara di STIAM Jakarta. Pernah bekerja sebagai Staf pada Ditjen Pembinaan BUMN di Departemen Keuangan, Staf pada Deputi Bid. Usaha Agro Industri dan pada Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya di Kementerian Negara BUMN, Kasubbid Usaha Industri Streategis Ia1 Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kasubbid Usaha Pariwisata dan Perhotelan, Kasubbid Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata lib-2, dan Staf Dewan Komisaris di PT Indofarma (Persero) Tbk serta di PT Kimia Farma (Persero) Tbk

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-09/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Sekretaris Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016. Remunerasi yang diterima oleh Sekretaris Dewan Komisaris terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kerja.

Penetapan Penghasilan bagi Sekretaris Dewan Komisaris

No.	Jenis Penghasilan	Besaran
1.	Honorarium	15% x gaji Direktur Utama
2.	Tunjangan:	
1.	Tunjangan Hari Raya	1. 1 (satu) kali <i>Take Home Pay</i> per bulan
2.	Tunjangan Komunikasi	2. 5% dari Honorarium per bulan
3.	Tunjangan Transportasi	3. 20% x honorarium per bulan
4.	Asuransi Purna Jabatan	4. Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). b. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun. c. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Penetapan Penghasilan bagi Sekretaris Dewan Komisaris

No.	Jenis Penghasilan	Besaran
3.	Fasilitas	1. Sekretaris Dewan Komisaris beserta seorang suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>). Fasilitas kesehatan diberikan berupa: a. Rawat jalan dan obat; b. Rawat inap dan obat; dan c. <i>Medical check up</i> dalam negeri 1 (satu) kali setiap tahun untuk yang bersangkutan.
	1. Fasilitas Kesehatan	
	2. Bantuan Hukum	2. Sesuai dengan ketentuan perusahaan
4.	Tantiem/Insentif Kinerja	Sesuai PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012
5.	Kewajiban Perpajakan	Pajak Penghasilan ditanggung Perusahaan

Kewajiban perpajakan seperti pajak penghasilan ditanggung Perusahaan, kecuali pajak atas tantiem/insentif ditanggung yang bersangkutan.

Remunerasi yang diterima oleh Sekretaris Dewan Komisaris terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi. Besaran remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris tersebut ditentukan melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut:

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2017

Nama	Dalam Rupiah				
	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem & THR	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Roslyn Sitohang *	165.000.000,00	41.250.000,00	206.250.000,00	18.750.000,00	225.000.000,00
Aan Rosyianto	15.000.000,00	3.750.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
Total	180.000.000,00	45.000.000,00	225.000.000,00	18.750.000,00	243.750.000,00

Keterangan:

*: Masa Jabatan sampai dengan 3 Desember 2017

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Selama tahun 2017, Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat masuk sebanyak 76 (tujuh puluh enam), surat keluar sebanyak 36 (tiga puluh enam), Surat Keputusan mengenai berbagai hal sesuai ketentuan sebanyak 12 (dua belas), Risalah Rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan), dan Risalah Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 8 (delapan).

Sekretaris Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bio Farma telah dibentuk sejak tahun 2004 dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Komite Audit dibentuk untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2014. Piagam Komite Audit berisi latar belakang, visi, misi, maksud dan tujuan, kedudukan, keanggotaan, hak dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak yang terkait, rapat, laporan, serta konflik dan kode etik sebagai pedoman bagi Komite Audit.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2014. Piagam Komite Audit berisi latar belakang, visi, misi, maksud dan tujuan, kedudukan, keanggotaan, hak dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak yang terkait, rapat, laporan, serta konflik dan kode etik sebagai pedoman bagi Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit (*Charter Komite Audit*), Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Komite Audit

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
 - a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham;
 - c. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI (auditor internal) maupun auditor ekstern untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya;
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
2. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.
4. Menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS.
5. Melakukan evaluasi dan analisis atas sistem penggajian, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris namun tidak sebatas pada:

1. Menyusun dan mereview secara berkala *Charter* Komite Audit.
2. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Angaran Perusahaan, Laporan Manajemen dan informasi lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan BUMN.
4. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN.
5. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
6. Mengkaji kecukupan fungsi audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

HAK DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Kepada Anggota Komite Audit baru diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Komite Audit, berdasarkan Surat Tugas dari Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perusahaan dari

- Direksi, SPI dan semua satuan organisasi perusahaan. Jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan komite audit perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut.
5. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Ketua Komite Audit adalah Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris independen atau yang dapat bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perusahaan.

Berdasarkan Pedoman Kerja (*Charter*) Komite Audit yaitu anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- g. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- h. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
- i. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada BUMN/Perusahaan lain.
- j. Tidak mempunyai:
 - 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan atau
 - 2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Anggota Komite Audit Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan vendor Bio Farma. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua atau Anggota Komite Audit melalui Surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

PERIODE I : JANUARI –MEI 2017

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
1	Paruli Lubis	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
2	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap anggota	Komisaris	Sosial	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
3	Abu Bakar	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
4	M. Aswir Harahap	Anggota	Pihak Independen	Hukum	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015

PERIODE II : MEI – NOVEMBER 2017

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
1	Paruli Lubis	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
2	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap anggota	Komisaris	Sosial	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
3	M. Asawir Harahap	Anggota	Pihak Independen	Hukum	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015 dan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 03 Juli 2017
4	Priyatno	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/BF/05/2017 tanggal Mei 2017

PERIODE III : NOVEMBER – DESEMBER 2017

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
1	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Keuangan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015
2	M. Asawir Harahap	Anggota	Pihak Independen	Hukum	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015 dan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 03 Juli 2017
3	Priyatno	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi	SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/BF/05/2017 tanggal Mei 2017

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Ihsan Setiadi Latief
Wakil Ketua Komite Audit Merangkap Anggota

Profil Beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

M. Asawir Harahap
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2017 adalah 71 tahun. Lahir tanggal 1 September 2006, Menyelesaikan pendidikan S1 dari Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi (1975).

Memiliki pengalaman sebagai Auditor di Bidang Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah pada Direktorat Akuntan Negara (1969), Kasiwas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kanwil VII DJPKN Palembang (1981), Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Jasa Perdagangan dan Pertambangan di Kanwil VII DJPKN Palembang (1982), Kasiwas Pertambangan & Energi, Bidwas BUMN/BUMD II di Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel (1984), Kasiwas Industri 3, Bidwas BUMN/BUMD I di Unit Perwakilan BPKP DKI Jakarta (1985), Ka Bidwas Pengeluaran II di Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel (1993), Ka Bidwas BUMN/BUMD I di Perwakilan BPKP Prov. Jatim (1996), Kepala Perwakilan (Eselon II) di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (1998), Direktur Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (2001), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan & Kemanan di Unit Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (2001). Kepala Perwakilan (Eselon II) Unit Perwakilan BPKP Prov. Jatim (2002), Deputi (Eselon I) di Unit Deputi Bidang Akuntan Negara. Selain itu juga memiliki pengalaman di bidang Audit/Pengawasan yaitu pengalaman Audit selama 35 tahun dibidang Perusahaan Negara, BUMN & BUMD, Komisaris Independen PT Indofarma Global Medika, Ketua Badan Pengawas Yayasan Keluarga BPKP Dharma Satya Parahita, Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Bio Farma sejak tanggal 23 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-01/DK/ BF/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan diangkat kembali dengan SK No.: KEP-05/DK/BF/06/2017, tanggal 03 Juli 2017. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

Priyatno
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Depok, Usia per 31 Desember 2017 adalah 63 tahun. Lahir tanggal 20 Juni 1954, menyelesaikan pendidikan S1 Bidang Hukum dan Program Pasca Sarjana Peraturan Perundang-undangan (1991).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum (1989), Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan (1992), Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kepegawaian (1995), Kepala Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi (1997), Kepala Bagian Penelaahan Hukum (1999), Kepala Bagian Mutasi (2001), Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi (2003), dan Kepala Biro Umum (2011).

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-04/DK/BF/05/2017 tanggal Mei 2017. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

- Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - Memiliki integritas yang baik pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 - Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
 - Mampu berkomunikasi secara aktif.
 - Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan.
- Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Per 31 Desember 2017, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Aqidah & Filsafat S2 BKU Ilmu Komunikasi S3 BKU Ilmu Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Islam Peneliti dalam bidang sosial, agama dan kemasyarakatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat STAIPI
Priyatno	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum S2 Peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Biro Umum Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
M. Asawir Harahap	Anggota	S1 Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> Deputi (Eselon I) BPKP Kepala Perwakilan (Eselon II) BPKP Provinsi Jawa Timur

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Semua anggota Komite Audit tidak mempunyai afiliasi dengan anggota Komite Audit Lainnya, dengan Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi Komite Audit ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara Independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Komite Audit yang dijalankan untuk kepentingan perusahaan.

Antar Anggota Komite Audit, serta Komite Audit dengan Anggota Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.



Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Paruli Lubis	Ihsan Setiadi Latief	Abu Bakar	Ihsan Setiadi Latief	Abu Bakar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2017, Anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar. Pengembangan Kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Komite Audit pada Laporan Tahunan ini.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat minimal satu kali dalam sebulan, baik berupa rapat internal, atau rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Kepala SPI, Kepala Divisi atau Auditor Eksternal. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2017, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	17 Januari 2017	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Kegiatan PKBL PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 (Un-Audited)	<ul style="list-style-type: none"> Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief M. Asawir Harahap
2	18 Januari 2017	Pembahasan evaluasi hasil audit pengawasan & pengendalian intern Tahap III (Juli s/d Okt 2016)	<ul style="list-style-type: none"> Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief M. Asawir Harahap Abu Bakar
3	27 Februari 2017	Rapat pembahasan KAP untuk melaksanakan kegiatan audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief M. Asawir Harahap
4	23 Maret 2017	Rapat Pembahasan usulan KAP untuk melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) tahun 2017	
5	19 Mei 2017	Pembahasan evaluasi hasil audit PPI	
6	09 Juni 2017	Pembahasan ERP-IT	
7	10 Juli 2017	Rapat pembahasan IT, Rencana Pemasaran, dan Kredit Investasi	
8	27 Juli 2016	Rapat pembahasan Teknis LMP Semester I Tahun 2017 PT Bio Farma (Persero)	
9	07 Agustus 2017	Progres report IT dan progres report pemasaran	
10	18 Agustus 2017	Rapat pembahasan progres report IT	
11	14 September 2017	Rapat pembahasan PKBL, Laporan Keuangan s.d Agustus 2017 dan RJPP	
12	11 Oktober 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan PPI No.03, 04 dan 06	
13	23 November 2017	Rencana PKPT 2018	<ul style="list-style-type: none"> Ihsan Setiadi Latief M. Asawir Harahap Priyatno
14	04 Desember 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Temuan KAP Tahun 2016 dan progres audit memorandum KAP 2017	
15	14 Desember 2017	Pembahasan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018	

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2017, Komite Audit mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 15 (lima belas) kali berupa rapat dengan SPI, rapat dengan eksternal auditor, rapat dengan Anggaran dan Akuntansi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Data kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase
Paruli Lubis *	Ketua	12		
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua	15		

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase
M. Asawir Harahap	Anggota	15		
Abu Bakar **	Anggota	5		
Priyatno ***	Anggota	10		

Keterangan :

* : Masa Jabatan sampai dengan November 2017

** : Masa Jabatan sampai dengan Mei 2017

***: Masa Jabatan dimulai Mei 2017

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi bagi Anggota Komite Audit ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dewan Komisaris No: KEP-08/DK/BF/07/2017 tentang Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Komisaris. Anggota Komite Audit yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit untuk melaksanakan tugas menjadi beban perusahaan. Besaran remunerasi Komite Audit tersebut ditentukan melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut:

Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit

No	Jenis Penghasilan	Besaran
1	Honorarium bulanan anggota Komite Audit	20% x gaji Direktur Utama
	Tunjangan :	
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1. Tidak ada
2.	Tunjangan Komunikasi	2. Tidak ada
2	3. Santunan Purna Jabatan	3. Tidak ada
4.	Tunjangan Pakaian	4. Tidak ada
5.	Tunjangan Transportasi	5. Tidak ada
3	Fasilitas	Tidak ada
-	Fasilitas Kesehatan	
4	Tantiem/Insentif Kinerja	Tidak ada

Remunerasi Komite Audit Tahun 2017

Dalam Rupiah

Nama	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
M. Asawir Harahap	240.000.000,00	-	240.000.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00
Priyatno	240.000.000,00	-	240.000.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00
Total	480.000.000,00	-	480.000.000,00	40.000.000,00	520.000.000,00

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE AUDIT

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Rapat Internal		
	Evaluasi kebijakan, laporan manajemen, laporan keuangan, RJPP, RKAP dan masalah-masalah khusus	12	19

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
2	Rapat dengan Auditor Eksternal		
	Pembahasan Laporan audit dengan KAP (eksternal auditor)	4	4
3	Rapat dengan Direktorat Keuangan		
	Pembahasan RKAP dan RJPP	2	2
	Pembahasan Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan (triwulanan, semester, tahunan)	4	5
	Pembahasan laporan keuangan (<i>audited</i>)	1	
	Pembahasan kebijakan dan masalah khusus	2	4
4	Rapat dengan SPI		
	Pembahasan LHP (triwulanan)	5	1
	Pembahasan Penilaian <i>Internal Control</i>	1	1
	Pembahasan Evaluasi Investasi	1	0
5	Rapat dengan Dewan Komisaris		
	Pembahasan dalam rangka pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan (<i>audited</i>)	2	0
	Pembahasan RKAP dan RJPP	2	0
	Pembahasan laporan manajemen (triwulanan, semester, tahunan)	4	0
	Pembahasan kebijakan dan masalah khusus	2	0
6	Kunjungan Kerja dan <i>Capacity Building</i>		
	Untuk memahami bisnis perusahaan dilakukan perjalanan dinas dalam atau luar negeri apabila dianggap perlu	2	0
	Untuk meningkatkan kompetensi dilakukan perjalanan dinas dalam atau luar negeri untuk menghadiri seminar/ <i>workshop</i> atau studi banding pada industri vaksin/farmasi	2	0

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja Komite Audit (RKKA) yang disetujui Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda
1.	16 – 17 Januari 2017	Rapat Kerja PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017
2.	17 Januari 2017	<i>Progress Audit</i> KAP tahap 1 atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) tahun 2016
3.	18 Januari 2017	Pembahasan Evaluasi Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian Intern Tahap III (Juli sampai dengan Oktober 2016)
4.	27 Januari 2017	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma tahun 2016 (unaudited). (Laporan Nomor: 01/DK/-KA/BF/I/2017 tanggal 27/01/2017 Perihal: Evaluasi atas LMP PT Bio Farma Tahun 2016 unaudited)
5.	3 Februari 2017	Telaah Komite Audit atas Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Laporan KA Nomor: 03/DK-KA/BF-II/2017)
6.	27 Februari 2017	Rapat Pembahasan KAP untuk melaksanakan Kegiatan Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma tahun 2017
7.	27 Februari 2017	Pembahasan <i>progress audit</i> atas laporan keuangan Bio Farma tahun 2016 (Laporan Evaluasi No.04/DK-KA/BF-II/2017)
8.	27 Februari 2017	Pembahasan Teknis LMP PT Bio Farma tahun 2016 (audited) Laporan Evaluasi No.05/DK-KA/BF/II/2017)
9.	06 Maret 2017	Laporan Evaluasi Komite Audit atas LMP Bio Farma tahun 2016 audited (No.05/DK-KA/BF/II/2017)
10.	14 Maret 2017	Kajian Hukum atas Hapus buku dan aset tetap kendaraan dinas (laporan telaah Komite Audit No.07/DK-KA/III/2017)
11.	23 Maret 2017	Rapat pembahasan usulan KAP untuk melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017
12.	23 Maret 2017	Evaluasi kinerja dan usulan penunjukan KAP untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan Bio Farma tahun buku 2017. (No.08/DK-KA/BF/III/2017)
13.	06 April 2017	09/DK-KA/BF/IV/2017, Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I Tahun 2017
14.	07 April 2017	10/DK-KA/BF/IV/2017 Perihal usulan calon anggota Komite Audit pengganti sdr. Abu Bakar Ak.CA
15.	27 April 2017	11/DK-KA/BF/IV/2017 Perihal: Permohonan menggunakan aktiva tetap perusahaan terkait perpanjangan dan peningkatan plafond fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016-2017
16.	27 April 2017	12/DK-KA/BF/IV/2017 Perihal: Permohonan menggunakan aktiva tetap perusahaan terkait perpanjangan dan peningkatan plafond fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016-2017



No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda
17.	02 Mei 2017	13/DK-KA/BF/V/2017 Perihal: Evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Triwulan I Tahun 2017
18.	19 Mei 2017	034/PPI/V/2017 Perihal: Pembahasan evaluasi hasil audit PPI dan lain-lain
19.	30 Mei 2017	14/DK-KA/BF/V/2017 Perihal: Evaluasi atas laporan keuangan PT Bio Farma per 30 April tahun 2017
20.	09 Juni 2017	038/PPI/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Undangan
21.	10 Juli 2017	043/PPI/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 Rapat dengan agenda pembahasan: IT Rencana Pemasaran Kredit investasi
22.	27 Juli 2017	02758/Dir/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 Perihal: Undangan rapat pembahasan Teknis LMP Semester I Tahun 2017 PT Bio Farma (Persero) dan No.15/DK-KA/BF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017
23.	28 Juli 2017	16/DK-KA/BF/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Perihal: Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan II Tahun 2017
24.	07 Agustus 2017	17/DK-KA/BF/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Perihal: Evaluasi atas Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Semester 1 tahun 2017
25.	07 Agustus 2017	047/PPI/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Perihal: Undangan rapat agenda progres <i>report</i> IT dan progres <i>report</i> pemasaran
26.	18 Agustus 2017	048/PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal: Undangan Rapat agenda progres <i>report</i> IT
27.	30 Agustus 2017	18/DK-KA/BF/VIII/2017 tanggal 30/08/2017 Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018
28.	11 September 2017	051/PPI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal undangan rapat
	14 September 2017	053/PPI/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal undangan rapat agenda: PKBL, Laporan keuangan sampai dengan Agustus 2017 dan RJPP
29.	28 September 2017	19/DK-KA/BF/IX/2017 tanggal 28 September 2017 Rancangan RKAP PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018 belum disampaikan Direksi kepada Dekom
30.	28 September 2017	20/DK-KA/BF/IX/2017 tanggal 28/09/2017 Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang dan Tanggapan atas Pengagunaan Asset
31.	03 Oktober 2017	21/DK-KA/BF/X/2017 tanggal 03/10/2017 Tanggapan atas rencana Pendirian Perusahaan Patungan (<i>Joint Venture Company</i>)
32.	04 Oktober 2017	22/DK-KA/BF/X/2017 tanggal 04/10/2017 Telaahan atas Rancangan RJPP PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017-2021
33.	11 Oktober 2017	059/PPI/X/2017 tanggal 11/10/2017 Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan PPI No.03, 04 dan 06

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda
34.	30 November 2017	26/DK-KA/BF/XI/2017 tanggal 30/11/2017 Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan III Tahun 2017
35.	04 Desember 2017	072/SPI/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 Pembahasan Tindak Lanjut Temuan KAP Tahun 2016, pembahasan progres audit memorandum KAP 2017
36.	14 Desember 2017	Pembahasan teknis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018

KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam rangka mengelola kegiatan usaha PT Bio Farma (Persero) selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Risiko PT Bio Farma.

Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2009, sesuai dengan Surat Keputusan No. : KEP-033/DK/BF/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Komite Risiko.

Pada tahun 2012, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-02/DK/BF/V/2012 tanggal 20-Januari-2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi PT Bio Farma (Persero). Keberadaan Komite Risiko dan Nominasi merujuk kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 70 ayat (3), mewajibkan Dewan Komisaris membentuk Komite lainnya selain Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Bio Farma (Persero) dan merujuk pada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN pasal 17 ayat (1) bahwa organ Dewan Komisaris terdiri dari:

- Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan
- Komite Audit,
- Komite Lainnya, jika diperlukan.

Komite lainnya yang diperlukan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Risiko dan Nominasi dengan pertimbangan bahwa implementasi manajemen risiko perusahaan menjadi satu bagian sendiri dalam PER-01/MBU/2011 pasal 25.

Pada tahun 2013, penamaan Komite Risiko dan Nominasi berubah menjadi Komite Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

Pada tahun 2014, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diatur secara dalam Pedoman Kerja Komite Risiko Pengembangan dan GCG. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dibentuk Dewan Komisaris dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma terakhir diperbarui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Susunan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero).

Masa jabatan anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 70 ayat 3, mewajibkan Dewan Komisaris membentuk komite lainnya selain Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Bio Farma (Persero).
- PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN pasal 17 ayat 1 bahwa organ Dewan

Komisaris terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Lainnya, jika diperlukan
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berpedoman pada Piagam (*Charter*) Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang disahkan pada 19 Februari 2014.

Isi piagam Komite Risiko, Pengembangan dan GCG meliputi:

1. Deskripsi dan Landasan Hukum
2. Tujuan
3. Struktur
4. Komposisi
5. Masa Tugas
6. Persyaratan Anggota Komite
7. Kode Etik Anggota Komite
8. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
9. Wewenang Anggota Komite
10. Pelaksanaan Tugas Komite (Rapat, Perjalanan Dinas dan Diklat)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berpedoman pada Piagam (*Charter*) Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang disahkan pada 19 Februari 2014.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Divisi *Compliance* dan *Risk Management* Perusahaan;
2. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh Divisi *Compliance* dan *Risk Management* terhadap rencana investasi perusahaan yang material;
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG oleh Divisi *Compliance* dan *Risk Management*;
5. Melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan atau ekspansi bisnis;
6. Melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG serta dan mendampingi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* (CRM) dalam *assessment* GCG oleh pihak eksternal secara berkala;
7. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan *review* tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi.
8. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan;
9. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan sesuai kebutuhan;
10. Menyusun sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Memberikan evaluasi dan analisa atas sistem seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan perusahaan;
12. Menyusun jenis dan jumlah gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS;
13. Melakukan evaluasi dan analisa atas sistem penggajian, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

WEWENANG KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan kewajibannya, komite berwenang untuk:

1. Memperoleh semua dokumen dan akses penuh, independen, dan tidak terbatas tentang kebijakan perusahaan yang terkait dengan strategi pengembangan usaha, penerapan GCG, pengelolaan risiko, dan sistem nominasi dan remunerasi perusahaan;
2. Bekerjasama dengan *counterpart* manajemen perusahaan, termasuk anggota Direksi yang berkaitan, dan terutama dengan Divisi *Compliance* dan *Risk Management*, Divisi SDM, *Corporate Strategy*, SPI, dan Divisi-divisi lain terkait sebagai *Risk/Business Process Owner*;

3. Melakukan *review* atas fungsi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dan keberadaan dan efektivitas implementasi ERM di PT Bio Farma (Persero);
4. Mendapatkan masukan dari profesional eksternal/pihak yang independen bila diperlukan atas biaya perusahaan.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam pada Piagam (*Charter*) Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yaitu bahwa anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan manajemen risiko dan bidang usaha perusahaan, serta mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip nominasi dan remunerasi sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota dari pihak eksternal. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan *vendor* Bio Farma.

PERIODE I : JANUARI – MEI 2017

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
1	Heridadi	Ketua	Komisaris Independen	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015
2	Nizar Yamanie	Wakil Ketua I	Komisaris	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015
3	H.M. Subuh	Wakil Ketua II	Komisaris	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015
4	Afrizal	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014
5	Judi Januadi Endjun	Anggota	Pihak Independen	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016

PERIODE II : MEI – DESEMBER 2017

No.	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
1	Heridadi	Ketua	Komisaris Independen	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015
2	H.M. Subuh	Wakil Ketua II	Komisaris	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015
3	Afrizal	Anggota	Pihak Independen	Kesehatan	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014
4	Judi Januadi Endjun	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi	SK Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016

PROFIL KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Profil Komite Risiko, Pengembangan dan GCG per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Heridadi Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Profil Beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 dan diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

H.M Subuh Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Profil Beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-02/DK/BF/VII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 dan diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

Afrizal Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2017 adalah 57 tahun. Lahir di Jakarta 17 April 1960, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1985) dan lulus Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI (2002).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi UI (1988-1989), Konsultan Akuntansi, Keuangan dan Auditor (1987-1990), Financial Controller (1990-1995), Asisten Direksi PT Tarnsweep International (1996-2000), General Manager Adm. & Keuangan PT SNC Lavalin TPS (2002-2004), Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI (2003-2004), Manajer Audit Badan Audit Internal UI (2005-2008), Direktur Akuntansi UI (2008), Kepala Badan Audit Internal UI (2008-2014), Direktur Logistik UI (2015-2016). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma sejak tanggal 15 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP- 06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 dan diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

Judi Januadi Endjun Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (1985), Diploma of Ultrasound dari University of Zagreb (1991), Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1993), dan Magister Hukum UPN Neteran (2017).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Dosen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (1979), Kepala Puskesmas Kecamatan Hato Bulico (1985-1987), dan Pegawai Negeri Sipil (1985-2017). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sejak tanggal 02 Februari 2016.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Per 31 Desember 2017, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heridadi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran S2 Perencanaan Dan Manajemen Kesehatan S3 Kedokteran 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD Dosen S2 Universitas Pertahanan Kepala Pusat Kesehatan TNI Direktur Kesehatan TNI AD Wakil Direktur Kesehatan TNI AD
H.M. Subuh	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran S2 Public Policy 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Umum Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktur Umum Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Sekretaris Direktorat Umum Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kepala Kantor Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Direktur RS Umum Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kalimantan Barat
Afrizal	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi; S2 Administrasi dan Kebijakan Perpajakan; S2 Ilmu Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Fasilitas UI Direktur Logistik UI Direktur Akuntansi UI
Judi Januadi Endjun	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Kedokteran; Spesialis Obstetri dan Ginekologi; S2 Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri Sipil Kepala Puskesmas

INDEPENDENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Tabel Independensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Aspek Independensi	Heridadi	Nizar Yamanie	H.M. Subuh	Afrizal	Judi Januadi Endjun
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Pengembangan Kompetensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG pada Laporan Tahunan ini.



RAPAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

AGENDA RAPAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Tabel Agenda Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	2 Maret 2017	Pembahasan peran, fungsi dan organisasi PMO dan <i>monitoring</i> dan evaluasi risiko korporat: <i>progress</i> pelaksanaan proyek pembangunan gedung tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Nizar Yamanie Judi Januadi Endjun Afrizal
2.	30 Maret 2017	Pembahasan <i>progress</i> pengembangan produk plasma dan biosimilar dan <i>progress</i> pengembangan vaksin	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Afrizal
3.	27 April 2017	Membahas <i>progress</i> penanganan risiko kegagalan dalam pembinaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Afrizal
4.	30 April 2017	Progress penanganan risiko kegagalan dalam pembinaan SDM (03-ERM-2016 dan 05-ERM-2016)	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Afrizal
5.	19 Mei 2017	Pembahasan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Risiko Korporat: "Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional dan Internasional"	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Nizar Yamanie Afrizal
6.	9 Juni 2017	Membahas Penanganan Risiko Korporat 2017: Risiko Likuiditas dan Kredit Investasi dan Masuknya Pesaing Baru Terhadap Produk Baru Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi H.M.Subuh Afrizal Judi Januadi Endjun
7.	25 Juli 2017	Membahas penanganan risiko korporat 2017: Risiko pemalsuan produk Bio Farma dan risiko munculnya berita negatif di media massa <i>mainstream</i>	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Afrizal Judi Januadi Endjun
8.	28 Agustus 2017	Membahas Penanganan Risiko Korporat Tidak Terserapnya Persediaan Produk dan Analisis Risiko Sewa Lahan Jasinga	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi H.M.Subuh Afrizal Judi Januadi Endjun

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
9.	21 November 2017	Pembahasan Kajian Kredit Investasi (KI) dan <i>Medium Term Notes</i> (MTN) sebagai Fasilitas Pembiayaan PT Bio Farma (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi H.M.Subuh Afrizal Judi Januadi Endjun
10.	27 November 2017	Membahas penyusunan risiko korporat 2018 dan <i>monitoring</i> dan evaluasi penanganan risiko korporat "implementasi MRP tidak sesuai target"	<ul style="list-style-type: none"> Heridadi Afrizal Judi Januadi Endjun

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran dalam Rapat	Persentase (%)
Heridadi	Ketua	10	6	60
Nizar Yamanie *	Wakil Ketua I	5	1	20
H.M. Subuh	Wakil Ketua II	10	2	20
Afrizal	Anggota	10	6	60
Judi Januadi Endjun	Anggota	10	3	30

Keterangan:

*: Masa jabatan sampai dengan bulan Mei 2017

REMUNERASI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Remunerasi bagi Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dewan Komisaris No: KEP-08/DK/BF/07/2017 tentang Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Komisaris. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk melaksanakan tugas menjadi beban Perusahaan.

Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero)

No	Jenis Penghasilan	Besaran
1	Honorarium bulanan anggota Komite Audit	20% x gaji Direktur Utama
2	Tunjangan : 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Komunikasi 3. Santunan Purna Jabatan 4. Tunjangan Pakaian 5. Tunjangan Transportasi	1. Tidak ada 2. Tidak ada 3. Tidak ada 4. Tidak ada 5. Tidak ada
3	Fasilitas - Fasilitas Kesehatan	Tidak ada
4	Tantiem/Insentif Kinerja	Tidak ada

Remunerasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Tahun 2017

Dalam Rupiah

Nama	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Afrizal	240.000.000,00	-	240.000.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00
Judi Januadi Endjun	240.000.000,00	-	240.000.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00
Total	480.000.000,00	-	480.000.000,00	40.000.000,00	520.000.000,00

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Rapat Internal	5	0
2	Rapat dengan Divisi CPS dan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	2	1
3	Rapat dengan Divisi CRM dan Divisi Terkait lainnya	11	10
4	Rapat dengan Divisi SDM	2	0
5	Rapat dengan Konsultan GCG dan Manajemen Risiko Independen (jika diperlukan)	2	0

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG TAHUN 2017

No.	Pelaksanaan	Agenda
1.	16-17 Januari 2017	Rapat Kerja (<i>Plan of Action</i>) PT Bio Farma (Persero) tahun 2017 dengan tema <i>Biotech Innovation for a Good Performance</i>
2.	2 Maret 2017	a. Peran, fungsi dan organisasi PMO b. Pembahasan <i>monitoring</i> dan evaluasi risiko korporat <i>progress</i> pelaksanaan proyek pembangunan gedung tahun 2017
3.	30 Maret 2017	a. Pembahasan kemajuan pengembangan <i>blood product</i> (produk plasma) dan biosimilar b. Pembahasan kemajuan pengembangan produk vaksin
4.	27 April 2017	Pembahasan <i>monitoring</i> progress penanganan risiko kegagalan dalam pembinaan SDM (03-ERM-2016 dan 05-ERM-2016)
5.	19 Mei 2017	Pembahasan <i>monitoring</i> dan evaluasi penanganan risiko perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional
6.	9 Juni 2017	Pembahasan penanganan risiko pesaing baru untuk produk baru dan risiko likuiditas dan kredit investasi
7.	25 Juli 2017	Persiapan wawancara <i>assessment</i> GCG Dewan Komisaris
8.	25 Juli 2017	Rapat Komite RPG dan Tim <i>Counterpart</i> PT Bio Farma (Persero): • Pembahasan risiko pemalsuan produk Bio Farma • Pembahasan risiko munculnya berita negatif di media mainstream
9.	28 Agustus 2017	Rapat Komite RPG dan Tim <i>Counterpart</i> PT Bio Farma: • Analisis risiko sewa lahan jasinga • Membahas penanganan risiko korporat tidak terserapnya persediaan produk
10.	21 November 2017	Pembahasan kajian kredit investasi (KI) dan medium term notes (MTN) sebagai fasilitas pembiayaan PT Bio Farma
11.	27 November 2017	1. Pembahasan Penyusunan risiko korporat 2018 2. Pembahasan <i>monitoring</i> dan evaluasi penanganan risiko korporat implementasi MRP tidak sesuai target

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2011, sesuai dengan Surat Keputusan No.KEP-02/DK/BF/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero).

Pada tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero) berubah menjadi Komite Audit dan Remunerasi serta Komite Risiko & Nominasi yaitu berdasarkan KEP-02/DK/BF/V/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi PT Bio Farma (Persero) serta No. KEP-10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Remunerasi.

PT Bio Farma (Persero) per 31 Desember 2017 tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian, Bio Farma tidak menyajikan informasi nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi dan kebijakan mengenai suksesi Direksi

Komite Audit dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dalam rangka mengelola kegiatan usaha PT Bio Farma (Persero) selain efisien, berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT Bio Farma.

Untuk membatasi jumlah Komite perlu pembatalan Surat Keputusan No.KEP-01/DK/BF/XI/2012 tentang Pengangkatan Komite Audit dan Remunerasi serta pembatalan Surat Keputusan No. KEP-10/DK/BF/XI/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Remunerasi.

Berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, Komite Audit dan Remunerasi diubah menjadi Komite Audit.

Komite Risiko dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dalam rangka mengelola kegiatan usaha PT Bio Farma (Persero) selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Risiko PT Bio Farma.

Untuk membatasi jumlah Komite perlu pembatalan Surat Keputusan No.KEP-01/DK/BF/XI/2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi serta pembatalan Surat Keputusan No.KEP-11/DK/BF/XI/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Risiko dan Nominasi.

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, Komite Risiko dan Nominasi diubah menjadi Komite Risiko.

Pada tahun 2014, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, sumber bakal calon Direksi berasal dari:

- Direksi BUMN;
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN.
- Talenta Kementerian BUMN;
- Sumber lain yang terdiri dari:
 - Pejabat BUMN lain; dan
 - Sumber lainnya.

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggotaDireksi harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 tersebut di atas dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS tersebut dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Nominasi Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 ayat 2, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham setelah melalui proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu jika anggota Direksi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar, telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara, melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi Perusahaan, alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan.

Dewan Komisaris menetapkan kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada Pemegang Saham dalam *Charter* Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016. Di dalam *charter* tersebut diatur antara lain:

- Secara berkala, Dewan Komisaris menerima hasil *talent pool* dari Direksi untuk pegawai 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, anatara lain berupa:
 - Curriculum Vitae*;
 - Hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
- Dewan Komisaris melakukan revidu atas kebijakan dan proses penilaian serta uji kepatutan dan kelayakan bakal calon anggota Direksi, serta revidu atas hasil penilaian yang disampaikan.
- Dewan Komisaris memberikan pendapat tertulis mengenai calon anggota Direksi sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemegang Saham, termasuk penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional.
- Penunjukan lembaga profesional yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau oleh Direksi melalui koordinasi dengan Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai suksesi Direksi tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 00488/DIR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 03940/DIR/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Sistem Perencanaan Karir Karyawan PT Bio Farma (Persero). Suksesi manajemen dimaksudkan untuk mempersiapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal perusahaan. Suksesi manajemen didahului dengan program kaderisasi dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi dan kompetensi individu. Terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN Deputi Teknis/Sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal BUMN.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

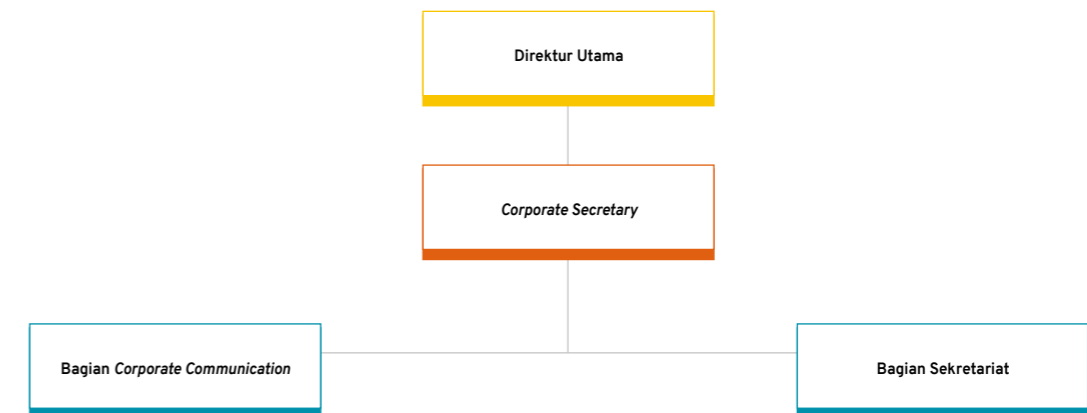
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai penghubung (*liaison officer*), menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar pengangkatan dan pemberhentian serta fungsi Sekretaris Perusahaan Bio Farma mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-1/MBU/2011, Pasal 29 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN



FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan, serta aspek keterbukaan dari perusahaan.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

- Bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target audiens baik dalam dan luar negeri agar reputasi Bio Farma terjaga dengan baik.
- Mengendalikan penyampaian informasi kinerja Perusahaan dan corporate action kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Menganalisis dan mengawasi pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat
- berdasarkan key performance indicator.
- Menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, mengkoordinasikan pencatatan notulen rapat serta mengendalikan administrasi kesekretariatan Direksi.
- Sebagai *Management Representative* untuk sistem manajemen terintegrasi ISO, OHSAS, ERM, dan IFRS.
- Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi aspek GCG, regulasi dengan risiko aktivitas perusahaan.

Terkait tugas mengevaluasi aspek-aspek GCG, Sekretaris Perusahaan memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen dalam upaya penyempurnaan dan melengkapi perangkat kebijakan GCG seperti Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*), Kebijakan GCG, Pedoman Penerapan dan Penilaian Internal Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Piagam Internal Audit dan Piagam Komite Audit.

Untuk mendukung visi Perusahaan menjadi produsen vaksin kelas dunia yang berdaya saing global, Sekretaris Perusahaan mengemban tugas strategis mewakili Perusahaan untuk aktif di berbagai forum internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Organization of Islamic Conference (OIC), DCVMN, GAVI, dan sebagainya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Bambang Heriyanto, usia 46 tahun. Lahir di Cirebon tahun 1970. Meraih gelar Sarjana Farmasi (1994) dan Apoteker (1995) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Magister Manajemen (2005). Merintis karir di Bio Farma sebagai Staf di Bagian Pemurnian & Diagnostika/Reagensia (1997), Kepala Bagian Produksi Sera & Diagnostika (2002), Kepala Bagian Formulasi & Pengisian (2003), Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus (2009), Kepala Divisi Produksi Vaksin Virus (2012), Kepala Divisi *Compliance & Risk Management* sejak tahun 2015 – 2017, Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2017 – Sekarang.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK Direksi Nomor 0501/HC/TKK/VII/2017.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2017, Sekretaris Perusahaan Bio Farma telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Bambang Heriyanto	Transformasi Bisnis <i>Lifescience</i>	16 Januari 2017, Bandung	Pricewater House Coopers
	<i>Sosialisasi Assessment Good Corporate Governance</i>	02 Februari 2017, Bandung	Inhouse, BPKP Jawa Barat
	Forum Riset <i>Lifescience</i> Nasional 2017	30 – 31 Agustus 2017, Jakarta	Inhouse
	Sosialisasi LHKPN	05 Desember 2017, Bandung	Inhouse, KPK-RI

INTERNAL AUDIT

Internal Audit di Bio Farma mengalami pengembangan Fungsi menjadi Pengendalian dan Pengawasan Internal. Pengembangan ini bertujuan untuk Memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Internal Audit memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KETUA INTERNAL AUDIT



KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai SK Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), Pengawasan & Pengendalian Intern diubah menjadi Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Secara struktural Satuan Pengawasan Intern berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka.SPI) yang membawahi Bagian Auditor Internal. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

PROFIL KEPALA INTERNAL AUDIT



Warga negara Indonesia, Berdomisili di Bandung. Lahir di Tanjung Karang, 10 September 1964. Gandjar Trisnasari memperoleh gelar Sarjana Farmasi & Apoteker dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989 dan Magister Manajemen Operasi dari Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Selama berkarir di Bio Farma, pernah menempati berbagai posisi strategis, diantaranya sebagai Kepala Bagian Pengujian Mutu Vaksin Bakteri (Mei 1995 – September 2001), Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus (September 2001 – Desember 2004), Kepala Bagian Quality Assurance Operation (Desember 2004 – September 2007), Kepala Divisi Produksi Vaksin Bakteri (September 2007 – Januari 2015), Kepala Divisi Produksi Farmasi (Januari 2015 – Juli 2017), 2017 sampai saat ini sebagai Kepala Pengawasan dan Pengendalian Internal Bio Farma.

Penunjukan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Bio Farma sejak Juli 2017, berdasarkan surat keputusan Direksi No : 0502/HC/TKK/VII/2017 dan persetujuan Dewan Komisaris No S-22/DK/BF/07/2017.

Gandjar juga aktif diberbagai kegiatan antara lain pernah menjadi penguji pada kegiatan ujian Apoteker yang diselenggarakan oleh Sekolah Farmasi (2013, 2014, 2016 & 2018), serta sebagai narasumber diantaranya pada Seminar Nasional Kesehatan yang diselenggarakan oleh STIKES Paguwarmas, Cilacap (2016), 7th Annual World Vaccine Congress Singapore (2013), Sosialisasi Penerapan PQ WHO di Indonesia (2012), dan Evaluasi Perkembangan penerapan program Pre Qualification di Indonesia (2012).

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA INTERNAL AUDIT

Bio Farma membentuk Audit Internal yang disebut dengan Pengawasan Internal (PI) dipimpin oleh seorang Kepala Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan Internal merupakan pengawas yang objektif dan independen, dibentuk untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Piagam Pengawasan Internal atau Internal Audit *Charter* adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen Pimpinan atas fungsi suatu Unit Pengawasan Intern (PI) di PT Bio Farma (Persero). Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit *Charter*) PT Bio Farma (Persero) merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas para auditor Pengawasan Internal untuk diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan PT Bio Farma (Persero)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*).
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama, dikomunikasikan dengan Dewan Komisaris cq Komite Audit.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas terhadap operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya di perusahaan.

6. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Manajemen.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.
8. Secara Periodik triwulanan atau empat kali setahun bersama dengan komite audit membahas laporan hasil audit dan meminta masukan yang diperlukan.
9. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan yang direkomendasikan baik yang berasal dari pengawasan internal maupun eksternal.
10. Secara periodik triwulanan membuat laporan hasil tindak lanjut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama cq Komite Audit.
11. Melakukan tugas konsultasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal.
12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

Direktur Utama memberi wewenang kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern untuk:

1. Mengakses ke seluruh informasi, dokumen, dan catatan, ke Direksi dan ke karyawan, ke lokasi asset perusahaan, ke sistem informasi, dan ke sistem dan prosedur yang relevan tentang perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsi audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan komisaris, Komite Audit, Komite Risiko.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan asidentil dengan Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko
4. Melakukan koordinasi bila perusahaan sedang diaudit oleh auditor eksternal seperti KAP atau BPK.
5. Menghasilkan sumber daya audit, menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang audit.
7. Mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional/ahli.

KOMPOSISI PERSONIL INTERNAL AUDIT

No.	Nama	Jabatan
1.	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
2.	Amar Yuliar S.	Ahli Madya
3.	Satia Permadi	Ahli Madya
4.	Edi Iskandar	Ahli Madya
5.	Sigit Prakosa	Ahli Madya
6.	Johnny H. Gultom	Ahli Madya
7.	Leni Lestari	Ahli Muda
8.	Ai Sukarni	Ahli Muda
9.	Emilina	Ahli Muda
10.	Ahmad Agus R.	Ahli Muda
11.	Dedi Mulyadi	Ahli Muda
12.	Nurdin Wijaya	Ahli Muda
13.	Dani Matias	Ahli Muda
14.	Benny Emirald H.	Ahli Muda
15.	Yanuar Rasyid	Staf

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) yang Telah Disetujui Divisi Human Capital Tahun 2017

No.	Nama	Jenis Tahapan Pelatihan					Jadwal Pelatihan 2017				Jumlah Tahapan	Keterangan
		I	II	III	IV	V	Agt	Sep	Okt	Nop		
1.	Amar Yuliar S.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Pelatihan Tingkat Manajerial
2.	Johnny H. Gultom	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	

No.	Nama	Jenis Tahapan Pelatihan					Jadwal Pelatihan 2017				Jumlah Tahapan	Keterangan
		I	II	III	IV	V	Agt	Sep	Okt	Nop		
3.	Nurdin Wijaya	1	0	-	-	-	-	-	1	-	1	Rencana mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar I & II
4.	Dani Matias	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	
5.	Emilina	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	

KODE ETIK AUDITOR

1. Auditor internal harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Auditor internal dilarang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
3. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar Profesi Audit Internal.
5. Auditor internal dilarang secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal dan mendiskreditkan organisasinya.
6. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan profesional berjenjang dan berkelanjutan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTERNAL AUDIT

Tabel Pengembangan Kompetensi Internal Audit

No	Nama	Jenis Diklat	Waktu	Tempat
1.	Gandjar Trisnasari	<ul style="list-style-type: none"> Auditor Talks "Re-Branding Internal Audit untuk Peningkatan Efektivitas Peran di Perusahaan" National Anti Fraud Conference 2017 "Strategy Anti Fraud berbasis Nilai (Value Based)" 	25 Oktober 2017 05-08 November 2017	Jakarta Yogyakarta
2.	Amar Yuliar S.	<ul style="list-style-type: none"> Audit Intern Tingkat Manajerial Pelatihan Persiapan Pensiun (Financial Planning Training) 	28 Agustus - 07 September 2017 07-08 September 2017	Jakarta Bandung
3.	Satia Permadi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasi National Anti Fraud Conference 2017 "Strategy Anti Fraud berbasis Nilai (Value Based)" 	31 Juli - 01 Agustus 2017 05-08 November 2017	Bandung Yogyakarta
4.	Edi Iskandar	<ul style="list-style-type: none"> Sharing Session Review Certification (AAPM Indonesian Chapter-Jakarta) Information Technology Infrastructure Library V.3 Foundation 	07 Februari 2017 25-28 Juli 2017	Jakarta Jakarta
5.	Sigit Prakosa	<ul style="list-style-type: none"> Professional Auditor Forum (PAF) Pendidikan profesional berkelanjutan IAI International Seminar 	06 Maret 2017 16-17 Maret 2017 29 Maret 2017	Jakarta Jakarta Jakarta
6.	Johnny H. Gultom	<ul style="list-style-type: none"> Activity Based Costing (ABC) Method Pemantapan ERP 	28-29 Agustus 2017 25-26 September 2017	Bandung Bandung
7.	Leni Lestari	<ul style="list-style-type: none"> Auditor Talk "Fraud Procurement: Prevent, Detect & Correct" 	05-06 Desember 2017	Jakarta
8.	Ai Sukarni	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Persiapan Pensiun (Financial Planning Training) Balance Score Card Auditor Talk "Fraud Procurement: Prevent, Detect & Correct" 	07-08 September 2017 15-16 November 2017 05-06 Desember 2017	Bandung Jakarta Bandung
9.	Emilina	<ul style="list-style-type: none"> Balance Score Card 	15-16 November 2017	Bandung
10.	Ahmad Agus R.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasi Activity Based Costing (ABC) Method PSAK 71 dan Implementasi PerMen BUMN No. PER-09/2013 & SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang transaksi lindung nilai Training Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE) Balance Score Card 	31 Juli-01 Agustus 2017 28-29 Agustus 2017 28-29 November 2017 06-07 Desember 2017 13-14 Desember 2017	Bandung Bandung Bandung Makasar Bandung

No	Nama	Jenis Diklat	Waktu	Tempat
11.	Dedi Mulyadi	<ul style="list-style-type: none"> Balance Score Card Training Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE) 	29-30 November 2017 06-07 Desember 2017	Bandung Makasar
12.	Nurdin Wijaya	<ul style="list-style-type: none"> Legal Drafting Training Public Training Interpretasi Penilaian KPKU BUMN Penerapan Whistleblower System dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD Pelatihan Audit Internal Tingkat Dasar I Balance Score Card 	10-12 Juli 2017 26-28 Juli 2017 28 September 2017 23 Oktober-03 November 2017 29 November 2017	Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Bandung
13.	Dani Matias	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan ERP Penerapan Whistleblower System dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD Balance Score Card 	25-26 September 2017 28 September 2017 18-19 Desember 2017	Bandung Surabaya Bandung
14.	Benny Emerald H.	<ul style="list-style-type: none"> PSAK 71 dan Implementasi PerMen BUMN No. PER-09/2013 & SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang transaksi lindung nilai 	28-29 November 2017	Bandung
15.	Yanuar Rasyid	<ul style="list-style-type: none"> Legal Drafting Training 	10-12 Juli 2017	Jakarta

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2017

PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT

No.	Kegiatan PKPT
1.	Pemeriksaan Operasional atas Bagian Pajak
2.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Produksi Vaksin Bakteri (Bagian Produksi Vaksin Tetanus)
3.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Manajemen Aset & Umum
4.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Human Capital (Bagian Manajemen Kinerja)
5.	Pemeriksaan Operasional atas Unit Kerja yang mempunyai Peran Penting dalam Pengendalian Percepatan Pembangunan Proyek
6.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan
7.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Pengadaan (Bagian Penunjang Pembelian)
8.	Pemeriksaan Operasional atas Matriks Riset & Pengembangan
9.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi PPMP

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2017

No.	Kegiatan Audit
1.	Pemeriksaan Operasional atas Bagian Pajak
2.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Produksi Vaksin Bakteri (Bagian Produksi Vaksin Tetanus)
3.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Manajemen Aset & Umum
4.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Human Capital (Bagian Manajemen Kinerja)
5.	Pemeriksaan Operasional atas Unit Kerja yang mempunyai Peran Penting dalam Pengendalian Percepatan Pembangunan Proyek
6.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan
7.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Pengadaan (Bagian Penunjang Pembelian)
8.	Pemeriksaan Operasional atas Matriks Riset & Pengembangan
9.	Pemeriksaan Operasional atas Divisi PPMP
10.	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Kas Opname Kas Besar, Kas Kecil dan Kas PKBL per 30 Des 2016 Laporan Hasil Kas Opname per 30 Des 2016 Laporan Hasil Kas Opname PKBL per 30 Des 2016 Berita Acara Kas Opname Kas Besar, Kas Kecil per 31 Mar 2017 Berita Acara Kas Opname PKBL per 31 Mar 2017 Laporan Hasil Kas Opname per 31 Mar 2017 Laporan Hasil Kas Opname PKBL per 31 Mar 2017 Berita Acara Kas Opname Besar, Kas Kecil dan PKBL per 31 Sep 2017 Laporan Hasil Kas Opname per 31 Sep 2017 Laporan Hasil Kas Opname PKBL per 31 Sep 2017

No.	Kegiatan Audit
11.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Review Perhitungan Royalti Vaksin Pentabio & Flubio Tahap 2 Tahun 2016 Hasil Review atas Perhitungan Insentif Penjualan Tahun 2016 Hasil Review atas Perhitungan Royalti Pentabio Penjualan Sektor Pemerintah periode tahun 2016 Hasil Review Perhitungan Royalti Vaksin Flubio periode Apr 2016-Mar 2017 Hasil Review Perhitungan Royalti Flubio & Pentabio Jan-Jun 2017 Hasil Review atas Perhitungan Sharing Profit Galenia
12.	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Stok Opname Persediaan Barang ½ jadi & Bahan Baku di Gudang Persediaan per 30 Des 2016 Laporan Hasil Stok Opname tahun 2016 Berita Acara Hasil Stok Opname Barang di Bagian
13.	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Non PKPT atas Operasional Lahan Jasinga (ST-010/PPI/VII/2017) Pemeriksaan Non PKPT atas Operasional Bagian Hubungan Industrial & WLB
14.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Review atas Permohonan Rencana Pembayaran Jasa Produksi Karyawan Tahun 2016 Tahap I Hasil Review Perhitungan Uang Pakaian Dinas Direksi dan Komisaris Tahun 2017 Hasil Review Perhitungan Uang Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2017 Hasil Review Perhitungan Rencana Pembayaran Jasa Produksi Karyawan dan Tenaga Kontrak Tahun 2016 Tahap II Hasil Review atas Rencana Pembayaran THR Hasil Review Perhitungan Jasa Produksi Karyawan dan Tenaga Kontrak Tahap Akhir Hasil Review Perhitungan Rapel Gaji Direksi Januari - Juni 2017 Hasil Review Perhitungan Uang Cuti Karyawan Tahun 2017 Hasil Review Perhitungan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah untuk Karyawan mengundurkan diri Hasil Review Perhitungan Rapel Gaji Staf Sekretariat Dewan Komisaris Hasil Review atas Perhitungan TTK Tahap-1 Hasil Review atas Perhitungan TTK Tahap-2 Hasil Review atas Perhitungan Selisih Gaji Pokok & UMK Karyawan Tetap Januari - November 2017
15.	<ul style="list-style-type: none"> Review Draft SK Penetapan Kewenangan Persetujuan dan/atau Penandatanganan Bukti Pembayaran dan Penerimaan Kas Bank Review Draft SK Kebijakan Akuntansi di BF Review Draft SK Kebijakan PKBL Review Draft SK Program CSR Review Draft SK Pengadaan Barang dan Jasa Review Draft SK Bantuan Sosial Review Draft SK Program Transisi Karir Karyawan Review Draft SK Manajemen Karir
16.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Review atas SM/Proku: Divisi Pemasaran, Divisi Akuntansi, Divisi Human Capital, Divisi Manajemen Aset Hasil Review atas SM/Proku: Bagian Penjualan Sektor Swasta, Divisi Logistik, Divisi Teknologi Informasi, Divisi CSR dan PKBL, Divisi CPS, Divisi Penjualan Ekspor Institusi, Bagian Manajemen Karir, Bagian Corcom, dan Bagian Anggaran
17.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Review Usulan Tim
18.	<ul style="list-style-type: none"> Pengurusan fasilitas pembebasan bea masuk ke Dikti dan bea Cukai terkait mesin litbang

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

No.	Temuan	Tindak Lanjut
1.	Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 terdiri dari 19 (sembilan belas) temuan dengan 26 (dua puluh enam) rekomendasi.	Dari 26 (dua puluh enam) rekomendasi, sampai dengan tahun 2017, 5 (lima) rekomendasi masih dinyatakan dalam proses dan 21 (dua puluh satu) rekomendasi dinyatakan sudah ditindaklanjuti.
2.	Terdapat 8 (delapan) temuan termasuk PKBL dengan 13 (tiga belas) rekomendasi atas temuan KAP terhadap progress report audit interim tahap I Tahun 2017 (Hasil Pengujian Transaksi dan Pengendalian Intern).	Sampai dengan akhir tahun 2017, sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 6 (enam) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut.
3.	Terdapat 13 (tiga belas) temuan dengan 17 (tujuh belas rekomendasi) atas temuan KAP terhadap progress report audit interim tahap I Tahun 2017 (Audit IT atas Aplikasi ERP MS Dynamics).	Sampai dengan akhir tahun 2017, sebanyak 12 (dua belas) rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 5 (lima) rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut.
4.	Berdasarkan Berita Acara penyerahan tanggal 20 Oktober 2016, BPK RI telah menyampaikan LHP dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan dan Biaya pada PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2014 dan 2015 kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama, yang berisi 52 (lima puluh dua) rekomendasi.	Dari 52 (lima puluh dua) rekomendasi, tersisa 2 (dua) yang belum ditindaklanjuti. Sebanyak 50 (lima puluh) rekomendasi sudah ditindaklanjuti.
5.	Terdapat 11 (sebelas) rekomendasi yang disampaikan BPK RI atas LHP dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011 serta Biaya-biaya terkait Pengadaan Vaksin Flu Burung sampai dengan Tahun 2011.	Dari 11 (sebelas) rekomendasi yang disampaikan, seluruhnya sudah ditindaklanjuti.
6.	Sampai dengan 31 Desember 2017, SPI telah menghasilkan 9 (sembilan) LHP, 41 (empat puluh satu) temuan dan 86 (delapan puluh enam) rekomendasi.	Dari 86 (delapan puluh enam) rekomendasi, sebanyak 61 (enam puluh satu) telah selesai ditindaklanjuti dan 25 (dua puluh lima) masih dalam proses tindak lanjut.

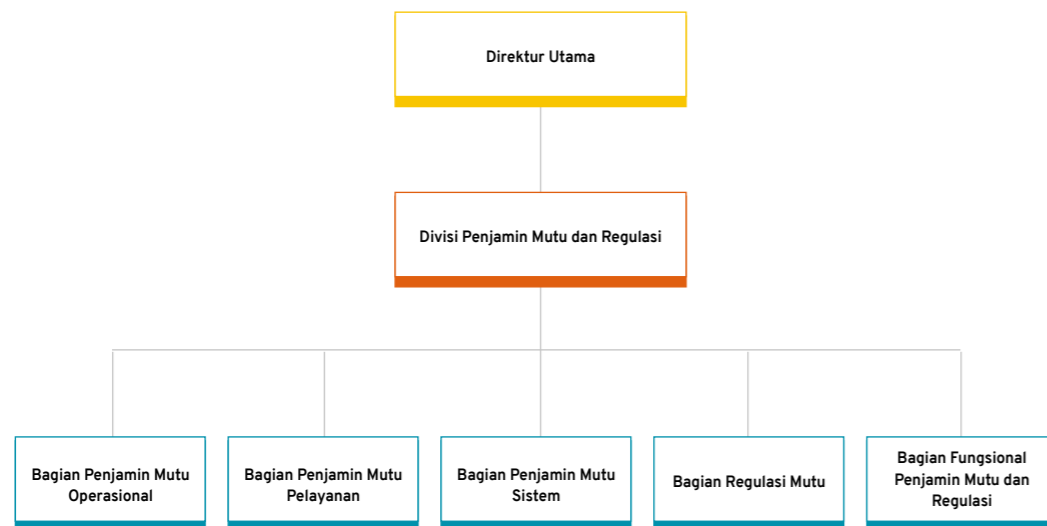
EVALUASI KINERJA INTERNAL AUDIT

Berdasarkan Laporan Analisa Data Pencapaian Indikator Kinerja SM-S10.2 *Monitoring* Tindak Lanjut Semester I Tahun 2017, indikator kinerja diperoleh dari tenggang waktu penyerahan Lembar Rencana Tindak Lanjut (LRTL) dengan Surat Pengantar kepada *auditee* tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. Pencapaian kinerja minimal 90%. Pada semester I tahun 2017, pencapaian kinerja sebesar 100%. Dan berdasarkan Laporan Analisa Data Pencapaian Indikator Kinerja SM-S10.2 *Monitoring* Tindak Lanjut Semester II Tahun 2017, pencapaian kinerja sebesar 100%.

Kinerja SPI dilakukan penilaian oleh KAP pada tanggal 13 April 2015 dan dilaporkan ke dalam Laporan Asesmen Mutu Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Bio Farma (Persero). Tujuan utama dari asesmen SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektif bahwa SPI telah memenuhi standar The Institute of Internal Auditors (The IIA) dan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peluang untuk peningkatan mutu sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit internal serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Berdasarkan hasil asesmen, fungsi SPI PT Bio Farma (Persero) telah sebagian sesuai (*partially conform*) dengan Standar, Kode Etik dan definisi Audit Internal.

PENJAMIN MUTU DAN REGULASI

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI



KEDUDUKAN PENJAMIN MUTU DAN REGULASI DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan Divisi Penjamin Mutu dan Regulasi berada di bawah Direktur Utama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN MUTU DAN REGULASI

Memastikan terjaminnya kualitas dan status lisensi produk melalui strategi, kebijakan dan prosedur sistem mutu (*quality system*) yang efektif guna mendukung terciptanya produk yang berkualitas sesuai dengan persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan persyaratan global lainnya termasuk persyaratan World Health Organization (WHO). Adapun yang menjadi tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjamin kualitas produk sesuai dengan persyaratan CPOB terkini;
- b. Menjaga kepatuhan terhadap persyaratan CPOB terkini;
- c. Memastikan ketersediaan dan pengimplementasian Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas *Quality Management System* (QMS) yang sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku guna mendukung kelancaran kegiatan Perusahaan;
- d. Memastikan pelaksanaan audit sistem mutu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan temuan audit tersebut telah ditindaklanjuti;

- e. Memastikan terpeliharanya regulatory terhadap produk, baik produk Bio Farma yang dipasarkan kepada Pemerintah atau pihak swasta (produk impor atau produk ekspor) maupun produk lain yang dipasarkan oleh Bio Farma sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor;
- f. Memastikan penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI

Tabel Pengembangan Kompetensi Penjamin Mutu dan Regulasi

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Gandjar Trisnasari	Auditor Talks “ <i>Re-Branding Internal Audit</i> untuk Peningkatan Efektivitas Peran di Perusahaan”	25 Oktober 2017, Jakarta
	<i>National Anti Fraud Conference</i> 2017 “ <i>Strategy Anti Fraud</i> berbasis Nilai (<i>Value Based</i>)”	05-08 November 2017, Yogyakarta
Amar Yuliar S	Audit Intern Tingkat Manajerial	28 Agustus - 07 September 2017, Jakarta
	Pelatihan Persiapan Pensiun (<i>Financial Planning Training</i>)	07-08 September 2017, Bandung
Satia Permadi	Laporan Keuangan Konsolidasi	31 Jul - 01 Agustus 2017, Bandung
	<i>National Anti Fraud Conference</i> 2017 “ <i>Strategy Anti Fraud</i> berbasis Nilai (<i>Value Based</i>)”	05-08 November 2017, Yogyakarta
Edi Iskandar	<i>Sharing Session Review Certification</i> (AAPM <i>Indonesian Chapter</i> -Jakarta)	07 Februari 2017, Jakarta
	<i>Information Technology Infrastructure Library</i> V.3 <i>Foundation</i>	25-28 Juli 2017, Jakarta
Sigit Prakosa	Professional Auditor Forum (PAF)	06 Maret 2017, Jakarta
	Pendidikan profesional Berkelanjutan	16-17 Maret 2017, Jakarta
	IAI <i>International Seminar</i>	29 Maret 2017, Jakarta
Johnny H. Gultom	<i>Activity Based Costing</i> (ABC) <i>Method</i>	28-29 Agustus 2017, Bandung
	Pemantapan ERP	25-26 September 2017, Bandung
Leni Lestari	<i>Auditor Talk “Fraud In Procurement : Prevent, Detect and Correct”</i>	05 - 06 Desember 2017, Jakarta
Ai Sukarni	Pelatihan Persiapan Pensiun (<i>Financial Planning Training</i>)	07 - 08 September 2017, Bandung
	<i>Balance Score Card</i>	15 - 16 November 2017, Bandung
	<i>Auditor Talk “Fraud In Procurement : Prevent, Detect & Correct”</i>	05 - 06 Desember 2017, Jakarta
Emillina	<i>Balance Score Card</i>	15 - 16 November 2017, Bandung
Ahmad Agus R	Laporan Keuangan Konsolidasi	31 Jul - 01 Agustus 2017, Bandung
	<i>Activity Based Costing</i> (ABC) <i>Method</i>	28-29 Agustus 2017, Bandung
	PSAK 71 dan Implementasi PerMenBUMN No. PER-09/2013 dan SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang Transaksi Nilai Lindung	28 - 29 November 2017, Bandung
	<i>Training Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE)	06 - 07 Desember 2017, Makassar
Dedi Mulyadi	<i>Balance Score Card</i>	13 - 14 Desember 2017, Bandung
	<i>Training Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE)	29 - 30 November 2017, Bandung
Nurdin Wijaya	<i>Training Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (ACFE)	06 - 07 Desember 2017, Makassar
	<i>Legal Drafting Training</i>	10 - 12 Juli 2017, Jakarta
	<i>Public Training</i> Interpretasi Penilaian KPKU BUMN	26 - 28 Juli 2017, Jakarta
	Penerapan <i>Whistleblower System</i> dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD	28 September 2017, Surabaya
	Pelatihan Audit Internal Tk. Dasar I	23 Oktober - 03 November 2017, Jakarta
	<i>Balance Score Card</i>	29 November 2017, Bandung

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Dani Matias	Pemantapan ERP	25 - 26 September 2017, Bandung
	Penerapan <i>Whistleblower System</i> dalam Penanggulangan Tindak Korupsi di BUMN & BUMD	28 September 2017, Surabaya
	<i>Balance Score Card</i>	18 - 19 Desember 2017, Bandung
Benny Emirald H	PSAK 71 dan Implementasi PerMenBUMN No. PER-09/2013 dan SE BUMN No. 5-388/MBU/07/2017 tentang Transaksi Nilai Lindung	28 - 29 November 2017, Bandung
Yanuar Rasyid	<i>Legal Drafting Training</i>	10 - 12 Juli 2017, Jakarta

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMIN MUTU DAN REGULASI TAHUN 2017

No.	Kegiatan
1.	Pelulusan Produk
2.	<i>Review data monitoring</i> lingkungan (EM)
3.	<i>Review Laporan Analisis Statistik Produk</i> (AS)
4.	<i>Review Protokol dan Laporan Studi Stabilitas</i>
5.	<i>Review Raw Material dan Media</i>
6.	<i>Product Quality Review</i> (PQR)
7.	Pengendalian dokumen mutu, lingkungan dan K3
8.	Inspeksi Diri (Internal QSHE Audit)
9.	Audit Eksternal
10.	Kualifikasi Vendor
11.	Validasi Proses Aseptis
12.	Validasi dan <i>Monitoring Cleaning</i>
13.	Kalibrasi Peralatan
14.	Kualifikasi Instalasi dan Operasional Alat
15.	Validasi Peralatan
16.	Validasi HEPA Ruangan Berkelas dan Alat
17.	Validasi <i>Software</i>
18.	Kualifikasi <i>Gowning</i>
19.	Kualifikasi Operator Inspeksi Visual
20.	Kualifikasi Karyawan dan Operator Aseptis
21.	Penerimaan Monyet
22.	<i>Monitoring Suhu Coldroom dan Freezer</i>
23.	Validasi Proses
24.	Validasi Uji
25.	QA/GMP Patrol
26.	Penanganan Deviasi
27.	Penanganan Keluhan Pelanggan
28.	<i>Change Control Management</i>
29.	<i>Quality Risk Management</i>
30.	<i>Mock Recall</i>

No.	Kegiatan
31.	<i>Water System Monitoring</i>
32.	Obat Pengembangan Baru
33.	Pra Registrasi Variasi
34.	Registrasi Variasi
35.	Pra Registrasi Baru
36.	Registrasi Baru
37.	Registrasi Khusus Ekspor
38.	Renewal
39.	Permohonan Lain
40.	<i>Import Permit</i>
41.	Tender
42.	Penyusunan PQVAR

AKUNTAN PUBLIK

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017 ditetapkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Nomor: RIS-02/RUPS/BF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Di dalam Risalah RUPS, Pemegang Saham menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE PERIODE 5 TAHUN TERAKHIR

Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, fee, dan izin KAP selama 5 tahun terakhir.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode	Fee Jasa Audit (dalam Jutaan Rupiah)*
2017	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Wahyudin Zarkasyi, CPA	4 Tahun	Rp 256.300.000
2016	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma		Rp215.000.000
2015	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma		Rp200.000.000
2014	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma		Rp200.200.000
2013	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono	1 Tahun	Rp200.200.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Tidak ada jasa lain yang diberikan oleh kantor akuntan publik selain dengan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.

MANAJEMEN RISIKO

Kewajiban perusahaan untuk menerapkan Manajemen Risiko terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Manajemen Risiko Korporasi di Bio Farma dituangkan di dalam Manual Bio Farma (MBF-01 dan MBF-02).

Manajemen Risiko Korporat adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin.

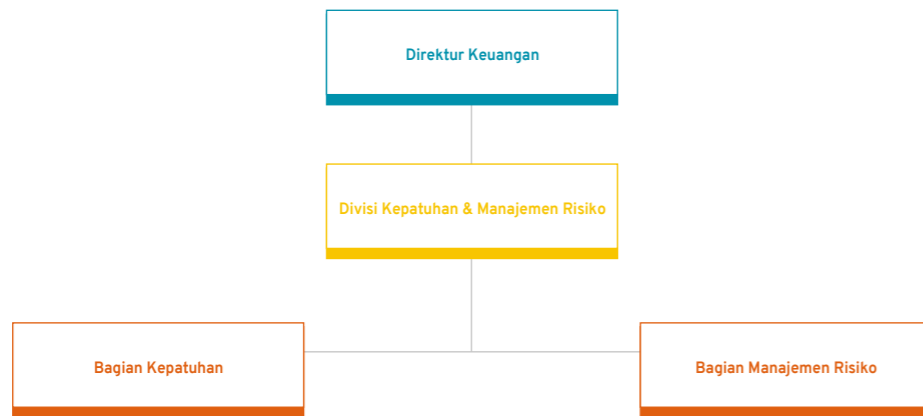
DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan usaha Milik Negara.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 25, Bio Farma menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko adalah memastikan tata kelola dan kepatuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC) secara terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya GCG dan visi Perusahaan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku baik nasional maupun internasional.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi manajemen risiko, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, seminar dan lokakarya baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya
Basuki Harjo	Kepala Bagian	<i>Project Risk Management</i>
		<i>Corporate Portfolio Risk Management "Risk Analysis, Modeling and Optimization"</i>
		<i>Risk Based Bussiness Process Improvement</i>
		Praktik ERM berbasis ISO 31000
		<i>Invitation on Responding to Risks Effectively with Key Risk Indicators</i>
		Pengelolaan Risiko Hukum
		<i>Enterprise Risk Management, Konsep dan Implementasi</i>
		Teknik asesmen risiko EC/ISO 31010
		<i>Integrated Project Management Tingkat Manager</i>
		<i>IT Risk Management Optimize The Hidden Value of IT Risk Management</i>
Mudi Risandi	Kepala Seksi	<i>ISO 31000 International Risk Management Standard</i>
		<i>Governance Risk Compliance (GRC)</i>
		<i>Corporate Portfolio Risk Management "Risk Analysis, Modeling and Optimization"</i>
		Manajemen Risiko Proyek
		<i>Business Continual Management (BCM)</i>
		<i>Risk Based Bussiness Process Improvement</i>
Rian Dwi Oktavian	Staf	<i>ISO 31000 series 1 : ERM fundamental</i>
		<i>Global compliance for computer systems validation-mastering the balance of effectiveness and efficiency with risk and compliance</i>
		<i>Project Risk Management</i>
		<i>Risk Based Bussiness Process Improvement</i>

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Adapun sertifikasi Manajemen Risiko yang pernah diikuti sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi
Basuki Harjo	Kepala Bagian	ERMCP ISO 31000

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Bio Farma menyadari bahwa jalannya operasional Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berada di bawah kendali maupun di luar kendali Perusahaan. Karena itu, risiko tidak boleh diabaikan dan harus dikelola secara integrasi, optimal, dan berkesinambungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktik tata kelola yang baik. Mengelola risiko adalah tanggung jawab setiap orang, sehingga setiap karyawan harus mengenali setiap risiko yang terkait dengan pekerjaannya dan mengelolanya secara proaktif.

Penerapan Manajemen Risiko di Bio Farma bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktivitas dan tindakan bisnis dan/atau dari faktor eksternal yang mengandung risiko, menurunkan potensi kejadian yang dinilai membahayakan yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang, meningkatkan *shareholder value*, serta memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian sehingga pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Bio Farma secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Pada tahun 2017, terdapat 8 (delapan) risiko korporat, yang terbagi atas 6 (enam) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek. Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil



dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan *monitoring* kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma. Adapun rincian risiko korporat tersebut adalah:

No	Jenis Risiko	Pengelolaan Risiko
1	Risiko Aktivitas Rutin	<p>1. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional dan Internasional</p> <p>Pengakuan kualitas produk oleh Badan WHO (<i>World Health Organization</i>) memegang peranan penting dalam kelancaran penjualan produk ekspor Bio Farma. Berdasarkan hal itu, Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan nasional maupun internasional, terutama regulasi dari Badan WHO agar dapat terhindar dari <i>delisting</i> WHO, serta perubahan-perubahan regulasi yang mungkin terjadi di Pemerintah.</p>
		<p>2. Keluar/Pindahnya Karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi</p> <p>Karyawan merupakan aset yang paling berharga dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Setiap perusahaan senantiasa membutuhkan dan mempekerjakan karyawan yang berkualitas, terutama Karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi. Banyak faktor dan penyebab karyawan yang berkualitas meninggalkan perusahaan. Namun apabila karyawan tersebut meninggalkan perusahaan dengan segala kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kinerja bisnis Perusahaan.</p>
		<p>3. Tidak Terserapnya Persediaan Produk</p> <p>Perusahaan secara rutin telah memasok vaksin untuk kebutuhan program imunisasi baik dalam negeri maupun luar negeri melalui institusi internasional dan secara bilateral. Ketersediaan vaksin disesuaikan dengan <i>forecast</i> atau rencana pengiriman produk dari konsumen. Terdapat risiko apabila produk telah diproduksi dan siap dipasarkan, namun produk tidak terserap oleh pasar.</p>
		<p>4. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI</p> <p>Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang sesuai dengan bisnis perusahaan dan telah disepakati dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) antara Pemegang Saham dan Manajemen kemudian akan dijabarkan ke dalam KPI Direktorat, Divisi dan Bagian. Jika realisasinya tidak sesuai atau dibawah standar dari target KPI dalam RKAP, akan menyebabkan risiko menurunnya pendapatan perusahaan.</p>
		<p>5. Pemalsuan Produk Bio Farma</p> <p>Pada tahun 2016, terdapat temuan peredaran vaksin palsu di Indonesia. Walaupun hasil investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada vaksin Bio Farma yang dipalsukan, dan hanya serum yang dipalsukan, namun demikian perusahaan melihat masih terdapat potensi risiko pemalsuan terhadap vaksin. Kasus pemalsuan ini kemungkinan dapat terjadi lagi di masa mendatang dan hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan konsumen akan produk Bio Farma baik vaksin maupun serum yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan.</p>

No	Jenis Risiko	Pengelolaan Risiko
	6. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa <i>Mainstream</i>	Sejalan dengan perubahan, saat ini media tidak hanya membuat berita yang secara bisnis harus menguntungkan dan media tidak hanya sebagai institusi ideologis tetapi juga institusi bisnis. Media juga memiliki prinsip apakah sebuah berita layak siar dan layak jual serta menilai apakah sebuah berita memiliki <i>news value & selling value</i> . Dengan adanya perubahan tersebut, Perusahaan perlu strategi khusus dan lebih berhati-hati terhadap tren media, karena dapat menimbulkan berita negatif tentang Perusahaan, baik di media massa <i>mainstream</i> maupun di media <i>online</i> .
2	Risiko Aktivitas Proyek	<p>7. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek pembangunan</p> <p>Peningkatan kapasitas produksi dan kapabilitas, Perusahaan telah menganggarkan beberapa proyek pembangunan gedung. Dengan adanya proyek pembangunan ini, perlu dilakukan antisipasi atas risiko keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut. Keterlambatan akan menyebabkan jadwal pengoperasian atau penggunaan fasilitas dapat tertunda dan pada akhirnya <i>revenue</i> perusahaan juga tertunda.</p> <p>8. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target</p> <p>Ketersediaan barang hasil produksi dan ketepatan jumlah persediaan menjadi salah satu faktor kunci memenangkan persaingan di pasar. Ketersediaan jumlah hasil produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah bahan baku/penolong yang harus selalu tersedia sesuai kebutuhan, tidak mengalami <i>stock out</i> atau <i>over stock</i>. Untuk tujuan ini, maka Perusahaan telah membuat modul <i>Material Resources Planning</i> (MRP) yang meliputi area produksi.</p> <p>Dalam rangka implementasi modul <i>Material Resources Planning</i> (MRP) tersebut, terdapat potensi risiko implementasi MRP tidak sesuai target atau tidak sesuai jadwal sehingga akan menghambat kinerja Perusahaan.</p>

PENGELOLAAN RISIKO

Bio Farma berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan aktvitasnya dan terus melanjutkan upaya untuk senantiasa melaksanakan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, yang meliputi tindakan:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemerintah dan etika usaha.

KONSEP PENGELOLAAN RISIKO

Konsep pengelolaan risiko Bio Farma berpedoman pada Manual Bio Farma MBF-01 dan MBF-02, Pedoman Manajemen Risiko SM-S.20 serta Prosedur-prosedur Baku/SOP: 235K-SIS-ERM, *Enterprise Risk Management*; 235K-SIS-ORM, *Operational Risk Management*; dan 235K-SIS-KBS, Keuangan, Bisnis dan Strategis.

KOMPONEN PENGELOLAAN RISIKO

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan yaitu:

1. Prinsip-prinsip manajemen risiko.
2. Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko.
3. Kerangka kerja dalam mengelola risiko.
4. Proses pengelolaan risiko.
5. Proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO

1. Meningkatkan kesadaran bahwa semua upaya pencapaian sasaran dan target-target perusahaan mengandung risiko sehingga setiap individu/unit kerja harus dapat mengelola risiko sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko korporat terintegrasi.
2. Meningkatkan kepastian pencapaian sasaran dan target perusahaan dengan cara:
 - a. Menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat kelancaran proses bisnis.
 - b. Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut.

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya untuk mengelola risiko dapat dilakukan melalui:

1. Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengelolaan risiko yang dituangkan dalam laporan tindak lanjut penanganan risiko.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Divisi Pengawasan dan Pengendalian Intern (PPI).

PENGLOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan difokuskan pada upaya peningkatan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi. Selama tahun 2017, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melanjutkan sosialisasi mengenai pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Perusahaan guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan.
4. Melakukan tindakan pencegahan, bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak lain.
6. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Perusahaan, dan menginformasikan setiap perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengelolaan risiko yang dituangkan dalam Laporan Tindak Lanjut Penanganan Risiko.
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pengelolaan ERM Bio Farma terbagi atas ERM Unit Risiko dan ERM Korporat. ERM Unit Risiko disusun oleh seluruh Unit Risiko sesuai dengan Prosedur Baku/SOP 235K-SIS-ERM, yaitu setiap Unit Risiko membuat Laporan ERM Unit Risiko tahunan, dengan format laporan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan, berisi tentang maksud dan tujuan dilakukannya ERM di setiap Unit Risiko, antara lain untuk menggali dan memahami semua risiko yang ada di dalam perusahaan secara menyeluruh sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan.
2. Bab Ruang Lingkup, berisi penjabaran proses bisnis perusahaan.
3. Tabel Risiko (*Risk Register*), menjelaskan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko untuk menentukan kejadian atau risiko yang mungkin timbul/terjadi, kemudian dihitung nilai probabilitas dengan metode Poisson, Binomial, Z-Score, Aproksimasi dan impact dengan *metode Value at Risk (VaR)*, ditentukan Status Risikonya, dibuatkan Peta Risikonya apakah terdapat pada Kuadran I (*Minor/Prevention*) Kuadran II (*Major/Catastrophic/Avoidance*), Kuadran III (*Insignificant/Acceptance*) atau Kuadran IV (*Moderate/Mitigation*).
4. Bab Pembahasan, berisi informasi mengenai:
 - a. Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dan dinyatakan masuk sebagai risiko Unit Risiko.
 - b. Status Risiko yang diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil sebagai dasar prioritas penanganan risiko.
 - c. Risiko-risiko yang masuk kategori *Acceptance, Prevention, Mitigation* ataupun *Avoidance*.
5. Kesimpulan, yang menyimpulkan risiko-risiko yang akan atau masuk menjadi risiko korporat dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menanganinya.
6. Laporan Tindak Lanjut Penanganan Risiko, berupa tabel yang menjelaskan bagaimana cara penanganan atau tindakan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul, berisi:
 - a. Jenis kegiatan penanganan risiko.
 - b. Perkiraan biaya penanganan risiko.
 - c. Waktu pelaksanaan penanganan risiko.
 - d. Penanggung Jawab (PIC).

Sedangkan ERM Korporat disusun oleh Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan melakukan analisa dan rekomendasi atas Laporan ERM Unit Risiko dari seluruh bagian yang selanjutnya diajukan kepada manajemen (Direksi) untuk ditetapkan jumlah/ besaran Profil Risiko Korporat.

TINDAK LANJUT PENANGANAN RISIKO KORPORAT

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan *monitoring* kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit di mana masing-masing Kepala Bagian unit risiko atau Ketua Tim proyek menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di Bio Farma.

Tabel berikut ini menunjukkan kegiatan penanganan risiko dari setiap risiko korporat PT Bio Farma (Persero) yang akan dilakukan pada tahun 2017:

Kegiatan Penanganan Risiko Dari Setiap Risiko Korporat Bio Farma

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
1.	Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pemastian implementasi QMS, cGMP secara <i>company wide</i>: diantaranya <i>review</i> regulasi, pengendalian dokumen, pemantauan pelaksanaan kualifikasi, validasi, kalibrasi, pelaksanaan inspeksi diri dan <i>vendor</i> audit secara berkala berdasarkan analisa risiko, pelatihan GMP secara berkala. Pembahasan sistem mutu secara berkala melalui kegiatan <i>meeting</i> internal, QSHE <i>meeting</i>, MR <i>meeting</i>; • Aktif dalam forum QMS & cGMP skala nasional dan internasional, diantaranya: forum <i>meeting</i>, sosialisasi, pelatihan, <i>workshop</i>, <i>conference</i>, komunikasi yang intensif dengan BPOM dan WHO; • Pemastian pengembangan produk sesuai tuntutan regulasi, diantaranya: <i>design</i> pengembangan produk, pelaksanaan kualifikasi dan validasi; • Pendampingan dan komunikasi dengan konsultan GMP; • Melakukan perbaikan berkesinambungan dalam mempertahankan <i>Quality Management System</i> (misal: penyempurnaan SM dan SOP); • Mengadakan kegiatan tatap muka (<i>face to face meeting</i>) dengan <i>customer</i> secara berkala, seperti: UNICEF dan PAHO, agar kepercayaan dan hubungan baik customer dengan Bio Farma tetap terjaga, serta memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin saat ini dan di masa mendatang, serta regulasi-regulasi terbaru dari pemegang kebijakan global (WHO); • Komunikasi secara intensif dengan customer (UNICEF, PAHO) melalui <i>email</i> maupun <i>teleconference</i>; • Bekerjasama dengan internal Bio Farma dalam mempertahankan QMS: menginfokan adanya keluhan terkait QMS dan menginfokan perubahan regulasi di negara tujuan ekspor; • Mencari konsumen lain untuk mengurangi ketergantungan penjualan bulk hanya ke beberapa konsumen dan mencari konsumen yang tidak mensyaratkan PQ WHO; • Mengganti bahan baku unsur animal dengan non animal origin; • Studi optimasi penyiapan inokulum untuk menggantikan penggunaan darah domba; • Penggunaan casamino acid yang digunakan dengan casamino acid bersertifikasi halal; • Koordinasi dengan Bagian QA dan RA terkait proses registrasi perubahan ke BPOM; • Merevisi semua BPR produksi akhir yang terkait; • Pembangunan fasilitas baru untuk produksi bulk campak 2 (modular) • Mengkaji dan menggunakan <i>xeno free medium</i> untuk produksi seperti penggantian penggunaan Fetal Bovine Serum dengan <i>Fresh Freeze Plasma</i> Manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • QA Service • Penjualan Ekspor Institusi • Penjualan Ekspor Korporasi • <i>Project Integrated Manager</i> • Produksi OPV • Produksi Vaksin Tetanus • Produksi Vaksin Difteri • Produksi Vaksin Pertusis • Formulasi dan Pengisian Vaksin dan Pelarut • sIPV • Produksi Vaksin Campak



Kegiatan Penanganan Risiko Dari Setiap Risiko Korporat Bio Farma

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
2.	Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> Update <i>timeline</i> pembangunan gedung; Koordinasi dengan Bagian Anggaran, CPS, Pengadaan, konsultan perencanaan, konsultan MK, kontraktor, bagian-bagian lain yang terkait dan konsultan gedung; Koordinasi dengan Tim Counterpart pembangunan gedung 43; Perencanaan dan penetapan final layout fasilitas DTV; Pembuatan DeD fasilitas DTV; Seleksi MK dan Review DeD; Lelang konstruksi; Pengawasan pembangunan fasilitas DTV-TCV 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi Vaksin Tetanus Produksi Vaksin Difteri Pengemasan sIPV Pengujian Mutu Kimia Fisika
3.	Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi dari Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi sistem manajemen <i>human capital</i> yang berbasikan kompetensi dan kinerja; Mendesain dan mengimplementasikan integrasi sistem <i>Human Capital Management</i> yang berbasikan pada kompetensi dan kinerja dengan menggunakan teknologi informasi; Mendesain dan mengimplementasikan program <i>retention</i> yang komprehensif untuk "mengikat" karyawan tersebut di perusahaan; Mendesain dan mengimplementasikan program-program pengembangan yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkn dirinya; Mendesain dan mengimplementasikan semacam <i>agreement</i> tertulis yang dapat mengikat Karyawan dan Perusahaan agar dapat saling mengikat 	Manajemen Kinerja
4.	Tidak terserapnya persediaan produk	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pembeli bulk yang baru; Menginformasikan kepada internal terkait perubahan regulasi di negara pembeli; 	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan Ekspor Korporasi Penjualan Ekspor Institusi

Kegiatan Penanganan Risiko Dari Setiap Risiko Korporat Bio Farma

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
5.	Pencapaian Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi sistem manajemen <i>human capital</i> yang berbasikan kompetensi dan kinerja; Mendesain dan mengimplementasikan integrasi sistem <i>Human Capital Management</i> yang berbasikan pada kompetensi dan kinerja dengan menggunakan teknologi informasi; Melakukan <i>monitoring</i> dan pendampingan yang intensif untuk setiap siklus <i>Performance Management Systems</i> mulai dari <i>planning</i>, <i>monitoring</i> dan <i>evaluating</i> dengan menggunakan IT; Memastikan ketersediaan rencana strategis dan bisnis perusahaan yang dapat dikomunikasikan ke seluruh unit kerja 	Manajemen Kinerja
6.	Pemalsuan Produk Bio Farma	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi perihal kekosongan produk Serum dengan Bagian Distribusi, PPIC, QA dan QC. Hal ini dilakukan agar kekosongan produk tidak menimbulkan indikasi produk dipalsukan; Mencari vendor alternatif untuk serum; Pengembangan produksi ADS di Bio Farma 	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan Sektor Swasta Penjualan Ekspor Korporasi
7.	Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream	<p>a. Strategi <i>preventing</i>, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada media dengan format <i>workshop</i> vaksin untuk jurnalis, dan Melakukan media <i>relations</i> yang positif dengan pihak media dari berbagai level dimulai dengan: pemilik media/penerbit; personil editorial (Pemimpin Redaksi, Redaktur, Wartawan); personil komersial (Tim Adverse Event/AE, Marketing). <p>b. Strategi <i>protecting</i>, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan strategi penanganan di masa normal dalam bentuk: <i>Press Conference</i>, <i>Media Gathering</i>, <i>Press Tour</i>, <i>Event</i>, Ralat atau Hak Koreksi, <i>School of Vaccine for Journalist</i> (<i>workshop</i> media); Melakukan strategi penanganan di masa krisis melalui pernyataan pers cepat kepada media, respons cepat tanggap, narasumber yang kompeten, PIC mudah dihubungi <p>c. Strategi <i>promoting</i>, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan media <i>placement</i>, iklan, <i>advertorial</i>, <i>infotorial</i>, <i>TV Commercial</i>; Mendukung dalam bentuk <i>sponsorship event</i> yang dilakukan oleh media dalam bentuk <i>sharing/promosi</i> Perusahaan. 	Corporate Communications
8	Implementasi MRP belum sesuai Target Waktu	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>stock opname</i> barang baik persediaan maupun barang langsung; <i>Soft Live Software</i> MRP; <i>Go Live Software</i> MRP 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Manajemen Persediaan

PENGELOLA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan manajemen risiko, Bio Farma telah membentuk divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan di bawah Direktur Keuangan yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bio Farma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SOSIALISASI DAN BUDAYA MANAJEMEN RISIKO

Sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan Bio Farma dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sosialisasi dan internalisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Insan Bio Farma agar sadar terhadap risiko dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari, sehingga menjadi budaya Perusahaan.

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur *Key Risk Indicator* yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang diluncurkan.
2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatarbelakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.
6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai *road map*. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
- Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
- Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) risiko yang teridentifikasi dari 91 (sembilan puluh satu) unit kerja (Bagian) dan proyek yang terbagi dalam 26 (dua puluh enam) aktivitas (Divisi), kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bio Farma secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh insan Bio Farma, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya laporan Keuangan yang akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan.
5. Penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*).
6. Pelanggaran aspek kehati-hatian.
7. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
8. Keandalan dan kebenaran informasi.
9. Kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan rencana kerja, prosedur dan peraturan perundangan.
10. Penggunaan sumber daya (*resources*) yang ekonomis dan efisien.
11. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program.
12. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

DEWAN KOMISARIS

Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan dibantu oleh Komite-komite yang dimiliki Dewan Komisaris.

DIREKSI

Menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

INSAN BIO FARMA/KARYAWAN

Seluruh karyawan Bio Farma menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengendalian internal dan dalam tugas fungsionalnya sehari-hari wajib mempelajari dan memahami kebijakan sistem pengendalian internal di Perusahaan. Pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Bio Farma memiliki Pengawasan Internal (PI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Pengawasan Internal (PI) senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai secara baik.

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI BIO FARMA

Bio Farma telah melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 26 sebagai berikut:
 - a. Direksi menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset.
 - b. Sistem pengendalian intern di Bio Farma mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian intern di Bio Farma dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
 - Filosofi dan gaya manajemen.
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia
 - » Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - Aktivitas pengendalian, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
 - Sistem informasi dan komunikasi, merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - *Monitoring*, merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 28 sebagai berikut:
 - a. Direksi menyelenggarakan Pengawasan Intern.
 - b. Pengawasan intern dilakukan, dengan:
 - Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - Membuat Piagam Pengawasan Intern.
 - c. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - d. Fungsi pengawasan intern sebagaimana adalah:
 - Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 - e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bio Farma dalam pengendalian intern yang diterapkan oleh unit-unit kerja, Bio Farma mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 05097/DIR/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Kebijakan Umum Pengendalian Internal. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan lingkungan pengendalian intern yang disiplin dan terstruktur.
2. Pelaksanaan kajian dan pengelolaan risiko usaha, meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan secara berkesinambungan.
3. Melakukan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang meliputi proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pemantauan yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk pelibatan fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan.

Kegiatan-kegiatan di atas ditangani secara sinergis dan proporsional lintas Bagian dengan melibatkan aktivitas Pengawasan Internal (PI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Divisi *Quality Assurance* dan bagian terkait lainnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

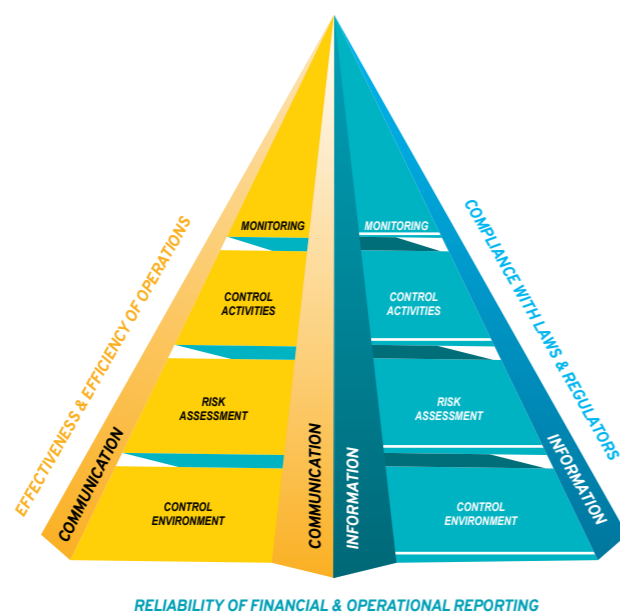
PENGENDALIAN KEUANGAN

Upaya yang dilakukan oleh Bio Farma untuk pengendalian keuangan yaitu:

1. Menyusun rencana kerja yang membahas strategi Bio Farma secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Pengendalian investasi.
3. Alokasi biaya.
4. Memantau RKAP dengan realisasi dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibahas pada rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
5. Perolehan laba agar dapat berjalan sesuai dengan rencana Perusahaan.

PENGENDALIAN OPERASIONAL

Upaya yang dilakukan oleh Bio Farma untuk Pengendalian Operasional yaitu agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien.



1. Pengendalian operasional Perusahaan menggunakan *standard operating procedur* (SOP) yang merinci prosedur kerja setiap aktivitas operasional yang dilakukan oleh Bio Farma terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perusahaan mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.
3. Bio Farma membuat struktur organisasi Perusahaan yang baik, dilengkapi dengan Divisi pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.

Sistem pengendalian di Bio Farma melibatkan seluruh insan Bio Farma, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Kegiatan pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu sebelum diterapkan agar dapat mengendalikan risiko yang mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bio Farma. Kegiatan pengendalian juga mencakup pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bio Farma sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perusahaan.

KAJI ULANG YANG DILAKUKAN BIO FARMA DALAM MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAJI ULANG MANAJEMEN (TOP LEVEL REVIEWS)

Direksi Bio Farma secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan karyawan sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

KAJI ULANG KINERJA OPERASIONAL (FUNCTIONAL REVIEW)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Pengawasan Internal Division dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.

1. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi *Compliance & Risk Management*, Bagian GCG dan ERM.
2. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Divisi *Compliance & Risk Management*, Bagian GCG & ERM
3. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - a. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - b. Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

KAJI ULANG PENGENDALIAN INTERNAL

Kaji ulang pengendalian dimulai dari lingkungan pengendalian melalui:

1. Budaya Perusahaan PITIC (*Professional, Integritas, Teamwork, Innovation, Customer Oriented*), GCG (*Good Corporate Governance*) melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma serta penandatanganan Pakta Integritas, jadi lingkungan pengendalian Bio Farma sudah sesuai dengan kerangka COSO.
2. Management risiko, yaitu risiko dipetakan dan dimitigasi.
3. Pemantauan melalui audit internal yang dilakukan oleh Pengawasan Internal & *Quality Assurance* yang berbasis risiko (*risk based audit*).

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

1. Bio Farma melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari aktivitas dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.
2. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bio Farma dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

PENGENDALIAN ASET FISIK (PHYSICAL CONTROL)

1. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bio Farma.
2. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bio Farma dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

DOKUMENTASI (DOCUMENTATION)

1. Bio Farma sekarang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
2. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bio Farma secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan karyawan.
3. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern dan akuntan publik.
4. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor interen ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

KESESUAIAN DENGAN COSO

Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Bio Farma telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Melalui budaya Perusahaan PITIC (*Profesional, Integritas, Teamwork, Innovation, Customer Oriented*).
 - b. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma.
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas.
 - d. Kompetensi karyawan, peng-organisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi jadi lingkungan pengendalian Bio Farma.
2. Penilaian Risiko

Di Bio Farma Bagian GCG & ERM, Divisi *Compliance & Risk Management* (CRM) yang mengkaji dan pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis dan evaluasi, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan.
3. Prosedur Pengendalian

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan yang sudah diterapkan oleh Bio Farma terkait dengan aktivitas pengendalian:

 - a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan.
 - a. Pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
 - b. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan).
 - c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan Audit Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Internal Audit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP).
4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan *monitoring* diperlukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Pengendalian informasi dan komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bio Farma: Dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, mail moderator, *Website* Perusahaan, intranet, Portal Bio Farma, biolibrary, dan media lain lainnya.
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Dilakukan melalui *performance check* oleh Pembina Teknis, Audit Internal oleh Divisi Pengawasan Internal & *Quality Assurance* dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Review dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern Bio Farma dilakukan pada tingkat entitas dan operasional. *Review* dan evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara berkala oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Divisi Pengawasan Internal (PI) melakukan *review* dan evaluasi pada Bagian-Bagian yang diaudit yang ditetapkan dalam PKPT. Sedangkan secara entitas *review* dan evaluasi dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat pelaksanaan general audit pada setiap tutup buku. Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian intern dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian intern, Perusahaan melakukan *review* dan evaluasi sistem pengendalian intern secara berkala. Tujuan *Review* dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern yaitu:

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian internal untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan lain bahwa penerapan sistem pengendalian internal telah cukup

memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta efisiensi/efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.

2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan sistem pengendalian intern perusahaan di masa yang akan datang (*areas of improvement*).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan bio farma dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam Perusahaan.
2. Menetapkan unit kerja yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bio Farma dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
4. Mengintegrasikan PI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari unit kerja yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Pemberian dana kegiatan sosial dan/atau politik di Bio Farma diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013; Nomor: 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero).

Di dalam *Code of Conduct* tersebut diatur antara lain:

1. Perusahaan membolehkan adanya pengeluaran dana untuk masyarakat dalam bentuk sumbangan (donasi) untuk tujuan sosial/amal dalam batas kepatutan sebagai wujud komitmen dan kepedulian Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
2. Terhadap aktivitas politik, seluruh Insan Bio Farma:
 - a. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
 - b. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atau sumbangan atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun.

- c. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
- d. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan.
- e. Apabila seseorang menduduki jabatan sebagai pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, maka yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri Perusahaan.
- f. Dilarang menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan.

Pemberian dana Kegiatan sosial yang telah di lakukan selama tahun 2017 dapat dilihat pada Bab *Corporate Social Responsibility* pada Laporan Tahunan ini.

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN

Sampai dengan 31 Desember 2017, tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan, baik permasalahan hukum perdata maupun pidana. Tidak ada dampak terhadap kondisi keuangan dan operasional Perusahaan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang pokok perkara/gugatan, status penyelesaian perkara/gugatan.

Hal ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terhadap segala peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan serta komitmen manajemen untuk menegakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2017, tidak pernah ada sanksi administrasi kepada Bio Farma yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bio Farma.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bio Farma telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bio Farma antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut.

Coporate Communication

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia.

Telp +62 22-2033755 (37412)

Fax: +62 22 - 2041306

Contact Center (whatsapp): 082121511511

Email: corcom@biofarma.co.id

Website: www.biofarma.co.id

Twitter: @biofarmaid

Instagram: @biofarmaid

Youtube: @biofarmaid

Facebook: biofarmaid

SIARAN PERS

No.	Judul Press Release	Tanggal	Kategori
1.	Bio Farma Adakan Sosialisasi Kesehatan di Pesantren	25-Jan-16	Corporate
2.	Bio Farma Ambil Bagian PIN 2016	26-Jan-16	Corporate
3.	2/3 kebutuhan Vaksin polio dunia dipenuhi Bio Farma	2-Mar-16	Corporate
4.	Pencanangan PIN POLIO Jabar di Bio Farma	08-Mar-16	Corporate
5.	Laboratorium Bio Farma Raih Akreditasi	11-Mar-16	Corporate
6.	Bio Farma Selenggarakan <i>Customer Gathering</i> Laboratorium Mikrobiologi	17-Mar-16	Corporate
7.	Saudi Arabia Gunakan Vaksin Indonesia	18-Mar-16	Corporate
8.	Bio Farma salurkan dana CSR untuk Jabar	19-Mar-16	CSR
9.	17 Duta Besar Kunjungi Bio Farma	20-Mar-16	Corporate
10.	Bio Farma Raih Penghargaan Wajib Pajak	4-Apr-16	Corporate

No.	Judul Press Release	Tanggal	Kategori
11.	Bio Farma ajak Media kunjungi Sistem Rantai Dingin Vaksin di Mataram	10-Apr-16	Corporate
12.	Bio Farma Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas (Berita Foto)	24-Apr-16	Corporate
13.	Bio Farma Bantu Tingkatkan Produktivitas UMKM	11-May-16	CSR
14.	Bio Farma Raih The Best IGA Award 2016	24-May-16	Corporate
15.	Bio Farma Tebar Kebahagiaan kepada 1126 Anak Yatim dan Gelar Safari Ramadhan 1437 H	21-Jun-16	Corporate
16.	Bio Farma Klarifikasi Temuan Vaksin Palsu	23-Jun-16	Corporate
17.	Bio Farma Partisipasi BUMN Hadir Untuk Negeri	27-Jun-16	Corporate
18.	Penjelasan Bio Farma terkait Vaksin Palsu	30-Jun-16	Corporate
19.	Vaksinasi Ulang Gunakan Produk Berkualitas Global	18-Jul-16	Corporate
20.	Mengenal Proses Produksi dan Pengujian Vaksin yang Canggih di Bio Farma	18-Jul-16	Corporate
21.	Bio Farma Undang Media Nasional Kunjungi Fasilitas Proses Produksi Vaksin	19-Jul-16	Corporate
22.	Penjelasan Bio Farma Terkait Vaksin Palsu	21-Jul-16	Corporate
23.	Badan POM Menjamin Vaksin yang Bermutu untuk Menunjang Program Imunisasi Nasional	24-Jul-16	Corporate
24.	20 Siswa SMA & SMK Jabar Siap Ikuti SMN 2016 di Sulut	24-Jul-16	Corporate
25.	Lima BUMN di Jawa Barat Kirim 20 Siswa Berprestasi Jawa Barat Ke Sulawesi Utara	24-Jul-16	Corporate
26.	Bio Farma Raih Penghargaan Perlindungan Anak dari KPAI	28-Jul-16	Corporate
27.	5 BUMN Jabar Hadir Untuk Masyarakat Jabar	16-Aug-16	Corporate
28.	Rilis 5 BUMN Jabar Serahkan Bantuan Renovasi Rumah Bagi Para Veteran	18-Aug-16	Corporate
29.	Melalui Forum Riset Life Science, Hadirkan Bio Farma setikal Mandiri yang Terjangkau oleh Rakyat Indonesia	23-Aug-16	Corporate
30.	Bio Farma Himpun Sinergi Antar Elemen se-Indonesia Guna Ciptakan Kemandirian Nasional Bidang <i>Life Science</i>	24-Aug-16	Corporate
31.	Bio Farma berperan aktif dalam repatriasi aset dan sosialisasikan <i>Tax Amnesty</i> kepada Karyawan	2-Sep-16	Corporate
32.	Walikota Cimahi Resmikan Taman Vaksinasi	10-Sep-16	Corporate
33.	NPAD – BUMN Centre of Excellence (BCE) Gelar Seminar Pentahelix untuk Kemandirian Bahan Baku Farmasi	16-Sep-16	Corporate
34.	Bio Farma Bantu Warga Garut Korban Banjir Bandang dan Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis	23-Sep-16	Corporate
35.	Bio Farma-Indonesia promotes the CSR activities in Developing Geopark at the UNESCO Conference on Global Geopark in England	26-Sep-16	Corporate
36.	Terus Konsisten, Bio Farma Promosikan Peran BUMN dalam Pengembangan Ciletuh di Konferensi Geopark UNESCO di Inggris	26-Sep-16	Corporate
37.	Terapkan Keterbukaan Informasi Bio Farma Raih Annual Report Award 2015	27-Sep-16	Corporate
38.	Konferensi Geopark UNESCO Di Inggris Angkat Isu Konservasi Geologi, Kesehatan Dan Kesejahteraan	28-Sep-16	Corporate
39.	Depag Validasi Pemantauan Hilal	04/10/2016	Corporate
40.	Rilis Bio Farma Pasok Vaksin HPV ke DKI	06/10/2016	Corporate
41.	Komisi V DPRD Banten Kunjungi Bio Farma	01/11/2016	Corporate
42.	Bio Farma – Indonesia, dipercaya jadi tuan rumah training Vaksin untuk Negara Islam	04/11/2016	Corporate
43.	Kasus Terus Naik, Konsorsium Kejar Kemandirian Vaksin Dengue	09/11/2016	Corporate
44.	Pengelolaan Limbah Vaksin Jadi Isu Penting di Negara Islam	09/11/2016	Corporate
45.	Akselerasi Riset Vaksin dengan Belanja Platform Teknologi Baru	09/11/2016	Corporate
46.	Bio Farma, BUMN Produsen Vaksin dipercaya OKI menjadi Tuan Rumah Program Pelatihan Produksi Vaksin Untuk Negara Islam	11/11/2016	Corporate
47.	Bio Farma, dipercaya menjadi Tuan Rumah <i>Workshop</i> Produksi Vaksin Negara Islam	11/11/2016	Corporate
48.	Vaksin produk yang strategic untuk saat ini dan masa depan	14/11/2016	Corporate
49.	Indonesia Didorong Menjadi <i>Center of Excellence</i> Produk Vaksin Di Negara Islam	16/11/2016	Corporate
50.	Rilis OIC Produsen Vaksin Targetkan Percepatan kerjasama Pusat Riset Produk Halal	17/11/2016	Corporate
51.	Rilis Bio Farma turut serta dalam Pameran di Aljazair	29/11/2016	Corporate
52.	Bio Farma Tanda Tangan MoU Perluasan Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhanratu	02/12/2016	Corporate
53.	Bio Farma Raih Kembali PROPER Emas Untuk Ketiga kalinya	08/12/2016	Corporate
54.	Bio Farma Raih Juara Terbaik Laporan Keberlanjutan 2016	15/12/2016	Corporate



KODE ETIK

POKOK -POKOK KODE ETIK

Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen Bio Farma dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan *stakeholders* lainnya.

Kode Etik Perusahaan memuat:

- Etika Usaha: Cara Perusahaan Melakukan Bisnis
- Etika Kerja : Tata Perilaku Manajemen dan Karyawan.



Etika Kerja, Tata Perilaku Manajemen dan Karyawan

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Kepatuhan Terhadap Hukum</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Benturan Kepentingan</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Cinder Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas lainnya</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian</td></tr> </table>	1	Kepatuhan Terhadap Hukum	2	Benturan Kepentingan	3	Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Cinder Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas lainnya	4	Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	5	Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Perlindungan Informasi Perusahaan</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Perlindungan Aset Perusahaan</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Aktivitas Politik</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Perilaku Asusila, Narkoba, Obat Terlarang dan Perjudian</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>Perilaku Etis Jajaran Manajemen dan Karyawan</td></tr> </table>	6	Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan	7	Perlindungan Informasi Perusahaan	8	Perlindungan Aset Perusahaan	9	Aktivitas Politik	10	Perilaku Asusila, Narkoba, Obat Terlarang dan Perjudian	11	Perilaku Etis Jajaran Manajemen dan Karyawan
1	Kepatuhan Terhadap Hukum																						
2	Benturan Kepentingan																						
3	Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Cinder Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas lainnya																						
4	Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi																						
5	Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian																						
6	Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan																						
7	Perlindungan Informasi Perusahaan																						
8	Perlindungan Aset Perusahaan																						
9	Aktivitas Politik																						
10	Perilaku Asusila, Narkoba, Obat Terlarang dan Perjudian																						
11	Perilaku Etis Jajaran Manajemen dan Karyawan																						

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Seluruh insan Bio Farma (Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan) diwajibkan untuk menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan sehari-harinya. Untuk itu, Bio Farma menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) yang telah di perbaharui dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero).

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman bagi insan Bio Farma dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan demikian, diharapkan lingkungan kerja Bio Farma dapat menjadi lingkungan kerja yang profesional dan menyenangkan sehingga seluruh potensi karyawan dapat dioptimalkan.

KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL DI BIO FARMA

Setiap insan Bio Farma harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan nilai dan budaya di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan Bio Farma wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai dan budaya yang ditetapkan Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan tanggung jawab dari setiap insan Bio Farma di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pada tanggal 6 Maret 2017, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG), Bio Farma telah melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero). Acara yang dihadiri oleh seluruh insan Bio Farma itu diakhiri dengan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan atas Pedoman Perilaku.

Setiap 1 tahun sekali seluruh insan Bio Farma diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kesanggupan menaati dan melaksanakan setiap butir Pedoman Perilaku, yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan yang ditanda tangani oleh setiap insan Bio Farma sebagai salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan perusahaan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Perusahaan melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Perilaku untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku ini.



Sosialisasi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pemberian buku saku kepada setiap insan Bio Farma.
- Sosialisasi dalam bentuk tatap muka secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- *Website* Perusahaan yang menyajikan informasi terkait pedoman pengendalian gratifikasi.
- Pemasangan banner dan poster di area kerja yang sudah tertentu.
- Aplikasi GCG.
- Penyebaran kuesioner secara berkala setiap tahun.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Penegakan dan sanksi bagi pelanggar *Code of Conduct* diatur dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero).

PAKTA INTEGRITAS

Setiap insan Bio Farma wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero).

SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT BIO FARMA (PERSERO)

Perusahaan melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini.

PENGUKURAN PEMAHAMAN KODE ETIK

Untuk mengukur pemahaman kode etik (Pedoman Perilaku), Bio Farma melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan. Dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden Bio Farma didapat kesimpulan bahwa Pedoman Perilaku efektif diterapkan di lingkungan kerja Bio Farma baik dalam berinteraksi dengan *stakeholders* maupun dalam praktik prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, maka insan Bio Farma berkewajiban melaporkan kepada:
 - a. Atasan langsungnya.
 - b. Kotak Pengaduan Pelanggaran/*Whistleblowing System*.
2. Pelaporan dilakukan atas dasar itikad baik dan bukan didasari atas kehendak buruk atau fitnah.
3. Disamping pihak intenal Perusahaan, pelaporan pelanggaran Pedoman Perilaku juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal Perusahaan seperti Pelanggan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya.
4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada pelaporan yang dilakukannya disertai dengan bukti

- pendukung yang relevan atas dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku.
- 5. Perusahaan akan merahasiakan identitas Pelapor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 6. Perusahaan berkewajiban menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan dan/atau dapat merusak citra Perusahaan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

PENANGANAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Kewenangan menangani dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku dilakukan oleh:

Terduga Pelaku Pelanggaran	Pejabat yang Menangani Dugaan Pelanggaran
Insan Bio Farma, selain Kepala Divisi SDM, Dewan Komisaris dan Direksi	- Koordinator : Kepala Divisi SDM - Anggota : Pejabat di Divisi CRM, SPI, Divisi SDM sesuai dengan penugasan dari Direktur SDM/Direktur Utama
Dewan Komisaris, Kepala Divisi SDM	Direktur Utama
Direksi	Dewan Komisaris

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Setiap Insan Bio Farma yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan ketentuan.
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi.
3. Sanksi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila Pemasok, Mitra Bisnis atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan, dan apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
5. Keputusan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Akibat dari tindakan yang dilakukan:
 - a. Melanggar hukum dan peraturan perundangan serta peraturan yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan/atau pihak-pihak lain baik finansial maupun non finansial.
 - c. Mengganggu kelancaran proses atau kegiatan di Perusahaan.
 - d. Mengganggu keamanan dan/atau keselamatan insan Bio Farma atau pihak lainnya.
 - e. Mencemarkan nama baik Perusahaan, insan Bio Farma atau pihak lainnya.
 - f. Melanggar kesusilaan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan/atau melanggar hak-hak dan martabat individu lainnya.
 - 2) Dari derajat kesengajaan:
 - a. Apakah tindakan penyimpangan yang dilakukan merupakan kesengajaan atau bukan.
 - b. Apakah pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebelumnya pernah diingatkan atas tindakan tersebut.
 - c. Motif tindakan: dari tindakan penyimpangan yang dilakukan apakah ada motif finansial atau non finansial.
6. Sanksi pelanggaran kepada Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobot pelanggaran, yaitu pelanggaran kategori ringan, sedang dan berat. Jenis peringatan yang diberikan adalah peringatan lisan, surat peringatan (I, II dan III) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaksanaan PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
7. Sanksi pelanggaran yang dapat dikenakan kepada Karyawan adalah sebagai berikut:
 - a. Potongan *merit* pada komponen gaji.
 - b. Potongan insentif.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan *grade*, penurunan *grade*, demosi.
 - d. Skorsing (pemberhentian sementara).
 - e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
8. Sanksi pelanggaran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobotnya dan akibat yang ditimbulkan. Keputusan pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh karyawan Bio Farma *dimonitoring* dan dievaluasi oleh Divisi SDM dengan kewenangan untuk memberikan *punishment* sesuai dengan Perjanjian Kerja bersama yang berlaku di Perusahaan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran kode etik. Tahun 2017, tidak terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh karyawan Bio Farma.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Sebagai implementasinya adalah larangan bagi setiap Insan Bio Farma untuk memberi dan/atau menerima dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pengendalian Gratifikasi di Bio Farma diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 01236/DIR/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Bio Farma (Persero). Tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah memberikan panduan bagi Insan Bio Farma untuk memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan Gratifikasi, memberikan panduan mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap, dan membentuk lingkungan Perusahaan yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pada tanggal 6 Maret 2017, dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), dan disaksikan oleh Direktur Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen Bio Farma dalam menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Bio Farma (Persero). Dalam pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi dinyatakan bahwa:

1. PT Bio Farma (Persero) tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat;

2. PT Bio Farma (Persero) tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik, atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. PT Bio Farma (Persero) bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan PT Bio Farma (Persero) dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Insan Bio Farma dapat mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah Gratifikasi ilegal/suap atau legal, dapat berpedoman pada motif pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi, hubungan kekuasaan/posisi setara, hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis, potensi benturan kepentingan, metode pemberian, dan kepatutan/kewajaran nilai serta frekuensi pemberian yang diterima.

PENERIMAAN/PEMBERIAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

1. Insan Bio Farma dilarang menerima/memberikan Gratifikasi atas inisiatif sendiri maupun pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, seperti:
 - a. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*);
 - b. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya selama kunjungan dinas;
 - d. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan Karyawan/promosi/transfer karir;
 - e. Menerima uang/barang/fasilitas lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan Bio Farma sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan di Perusahaan;
 - f. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas sebagai tanda terima kasih kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di Perusahaan;
 - g. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan;



- h. Menyupai atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat pada suatu instansi dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - i. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas lainnya kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga yang merupakan Mitra Bisnis Perusahaan seperti Bank, Perusahaan Asuransi, Biro Perjalanan, atau perusahaan/konsultan atas perjanjian/kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - j. Menerima pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena jabatan dan kewenangan dari Insan Bio Farma dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - k. Menerima keuntungan seperti jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Bio Farma karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - l. Menerima makanan, minuman atau hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, karena jabatan atau kewenangan dari Insan Bio Farma yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
 - m. Pemberian hiburan, paket wisata, akomodasi, fasilitas lainnya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Bio Farma di perusahaan pihak ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud dan penugasan Insan Bio Farma tersebut;
 - n. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan Bio Farma dari pihak ketiga atau dari Insan Bio Farma kepada pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
 - o. Pemberian kepada Insan Bio Farma, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari pihak ketiga yang nilai materinya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari masing-masing pihak ketiga;
 - p. Memberi bantuan kepada pihak ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
 - q. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
 - r. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - s. Seluruh Insan Bio Farma dan/atau anggota Keluarga Inti-nya dilarang memberi Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak ketiga tersebut.
2. Perlakuan atas Gratifikasi yang dianggap sebagai suap

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus ditolak, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Bio Farma yang bersangkutan untuk menolaknya.

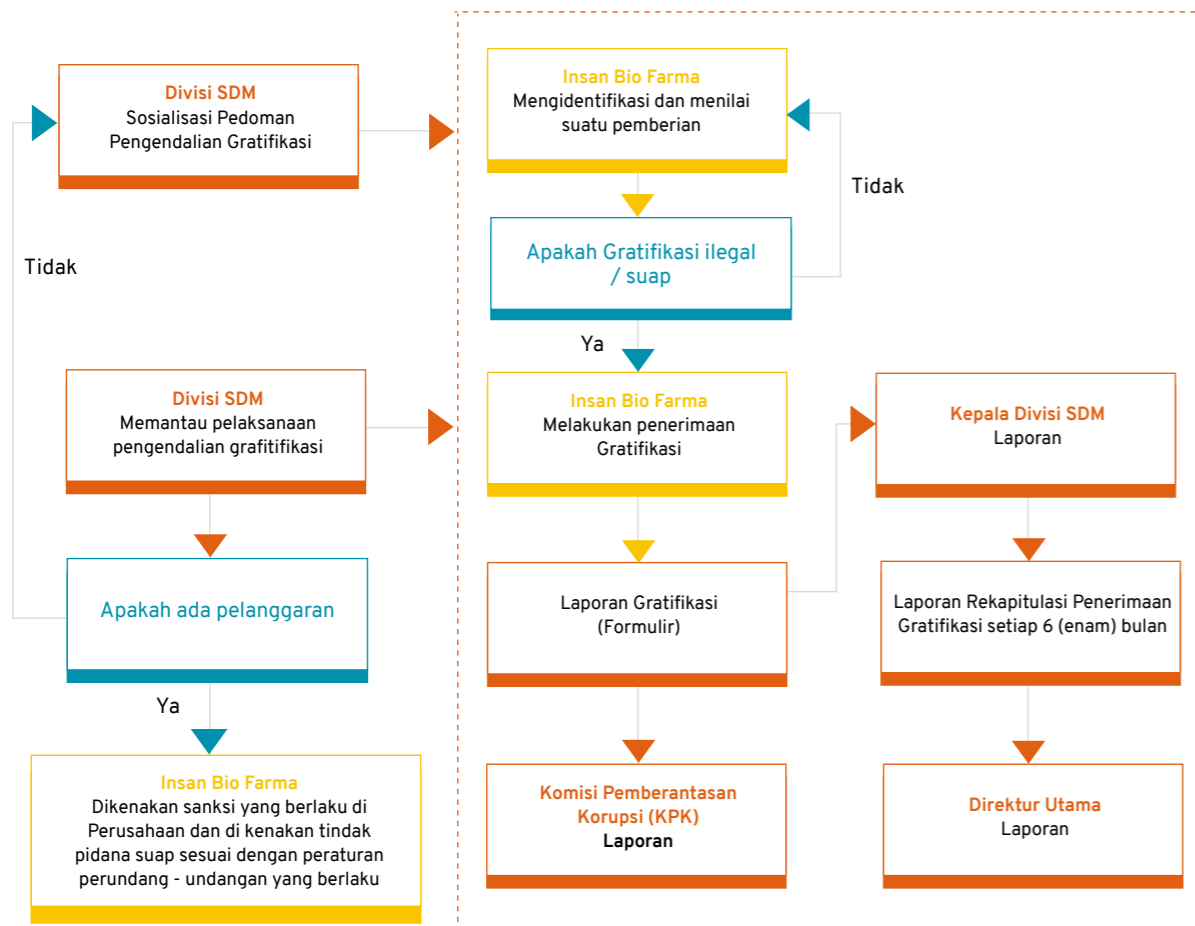
Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

- a. Jika Insan Bio Farma tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta

tidak mengetahui identitas dan alamat pihak ketiga;

- b. Jika tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dengan pihak ketiga yang merupakan Mitra Bisnis Perusahaan, di mana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari masing-masing pihak ketiga.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI BIO FARMA



SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Sosialisasi pengendalian gratifikasi dilakukan melalui media tatap muka yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2017, *email*, banner, poster, intranet dan *website*, video animasi, buletin dan laporan tahunan. Pada saat hari besar keagamaan dilakukan sosialisasi yang melarang untuk menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, baik parcel, bingkisan, uang, dan sebagainya.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2017

Pada tahun 2017, tidak terdapat pelaporan atas penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh Insan Bio Farma. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*), iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* - WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Bio Farma dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Sistem ini dilaksanakan berlandaskan pada nilai budaya perusahaan yang menyatakan bahwa setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen. Dengan demikian, *Whistleblowing System* ini merupakan bukti nyata dilaksanakannya nilai-nilai budaya perusahaan tersebut.

Nilai tambah yang dicapai oleh perusahaan melalui penerapan program ini adalah adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan yang dapat mendeteksi kejadian risiko operasional khususnya kejadian kecurangan (*fraud*) secara dini dan memungkinkan Perusahaan untuk dapat mengatasi kejadian risiko tersebut secara cepat.

DASAR HUKUM PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e. dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
3. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297).
4. Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635).
5. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756).
6. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 4).
7. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556).
8. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
9. Anggaran dasar PT Bio Farma (Persero).
10. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.
11. PKB PT Bio Farma (Persero) dengan Serikat Pekerja Periode Tahun 2012-2014, tanggal 31 Mei 2012.
12. SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. KEP-04/DK/BF/II/2013 - No. 01023/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Penerapan GCG di PT Bio Farma (Persero) *Code of Conduct* PT Bio Farma (Persero) Tahun 2013.
13. Surat Keputusan Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di PT Bio Farma (Persero).

MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.
2. Adanya fasilitas pelaporan pelanggaran yang dinilai lebih aman bagi Pelapor.
3. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
4. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
5. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
6. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.

7. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
8. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
9. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

TUJUAN DITETAPKANNYA KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran dari internal dan eksternal Perusahaan untuk menjamin mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum.
3. Melalui sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) akan muncul persepsi apabila melakukan kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya maka ada potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan sehingga mencegah melakukan pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum keselamatan kerja dan reputasi.

RUANG LINGKUP PENERAPAN KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Kebijakan ini berlaku bagi Insan Bio Farma dengan ketentuan pengaturan sebagai berikut:

1. Pelapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya.
2. Terlapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma yang diduga melakukan pelanggaran.

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila pengaduan/penyimpangan dianggap tidak efektif bila disampaikan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelola WBS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk terduga pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, dimana Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi Koordinator Tim Pengelola WBS dan Pejabat di SPI, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Divisi SDM sebagai anggota Tim.

Tim Pengelola WBS memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima pelaporan pelanggaran dan melakukan verifikasi pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pelapor dan meneruskan kepada:
 - a. Direktur Utama untuk pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Karyawan; atau
 - b. Dewan Komisaris untuk pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Dewan Komisaris untuk pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris;
3. Berkewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor;
4. Melakukan komunikasi dengan Pelapor;
5. Melakukan pemantauan atas penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang dilakukannya;
6. Membuat laporan berkala kepada Direktur Utama mengenai pelaporan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi dan yang telah selesai diproses;
7. Mengadministrasikan kegiatan yang menjadi tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Tim Pengelola WBS, Direksi melalui Surat Keputusan Direksi menunjuk Kepala Bagian Infrastruktur di Divisi Teknologi Informasi sebagai admin pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), dengan tugas sebagai berikut:

1. Menerima, mendaftarkan dan mengadministrasikan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dengan jalur yang ditentukan, yaitu:
 - a. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditujukan kepada Direktur Utama;
 - b. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Tim *Whistleblowing System* (WBS), maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada Direktur Utama;

3. Apabila pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) ditujukan kepada di luar jalur yang ditentukan, maka berkewajiban untuk meneruskan sesuai dengan jalur pelaporan yang ditetapkan;
4. Mengadministrasikan semua pengaduan yang masuk dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Berkewajiban dan bertanggung jawab atas kerahasiaan identitas Pelapor.

MEDIA PELAPORAN

- a. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditujukan kepada Direksi yang disampaikan melalui :
 - *Email* ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
 - Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:
Direksi PT Bio Farma (Persero)
Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
 - *Drop Box* di kantor Perusahaan
 - Aplikasi yang dikembangkan Perusahaan (Aplikasi GCG)
- b. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui:
 - *Email* ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
 - Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:
Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)
Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
 - *Drop Box* di kantor Perusahaan
 - Aplikasi yang dikembangkan Perusahaan (Aplikasi GCG)

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penyampaian laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan perusahaan yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengaduan pelanggaran pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu atasan langsung dan fungsi terkait yaitu Divisi SDM dan SPI. Akan tetapi, apabila Pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS).
2. Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) adalah : korupsi, kecurangan, pencurian, menyuap dan atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, melanggar hukum dan kebijakan/prosedur Perusahaan. Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Pelaporan pelanggaran adalah Karyawan (Pihak Internal) akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat).
4. Pelapor pelanggaran dapat bertindak menjadi Saksi apabila ia melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan Terlapor.
5. Pelapor harus memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti. Untuk mempercepat dan mempermudah proses penanganan pelaporan pelanggaran, maka Pelapor:
 - 1) Pelapor dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dapat mencantumkan identitas mengenai data diri yang memuat alamat rumah/kantor, alamat *email*, faksimili, nomor kontak yang dapat dihubungi; atau dapat juga tanpa mencantumkan data diri (anonim);
 - 2) Harus disertai dengan bukti pendukung atas laporan pelanggaran yang disampaikannya, meliputi:
 - a) Pokok masalah yang diadukan;
 - b) Pihak-pihak yang terlibat yaitu siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran yang diadukan termasuk pihak-pihak yang dirugikan/diuntungkan dari kasus yang terjadi;
 - c) Waktu dan Lokasi kejadian yaitu kapan kasus pelanggaran terjadi dan di unit atau fungsi mana di Perusahaan kasus pelanggaran yang diadukan terjadi;
 - d) Kronologis kasus;
 - e) Dokumen pendukung atas kasus yang diadukan.



PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sebagai berikut:

- a. Perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor;
- b. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor;
- c. Perlindungan dari pemecatan, penurunan jabatan atau *grade*, penundaan kenaikan *grade* atau berkala, tekanan, tindakan fisik;
- d. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
- e. Informasi mengenai proses tindak lanjut yang sedang dilakukan, informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal Perusahaan.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah :

- a. Korupsi;
- b. Kecurangan (*Fraud*);
- c. Pencurian;
- d. Menyuap dan/atau menerima suap;
- e. Gratifikasi;
- f. Benturan Kepentingan;
- g. Melanggar hukum dan kebijakan/prosedur Perusahaan.

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

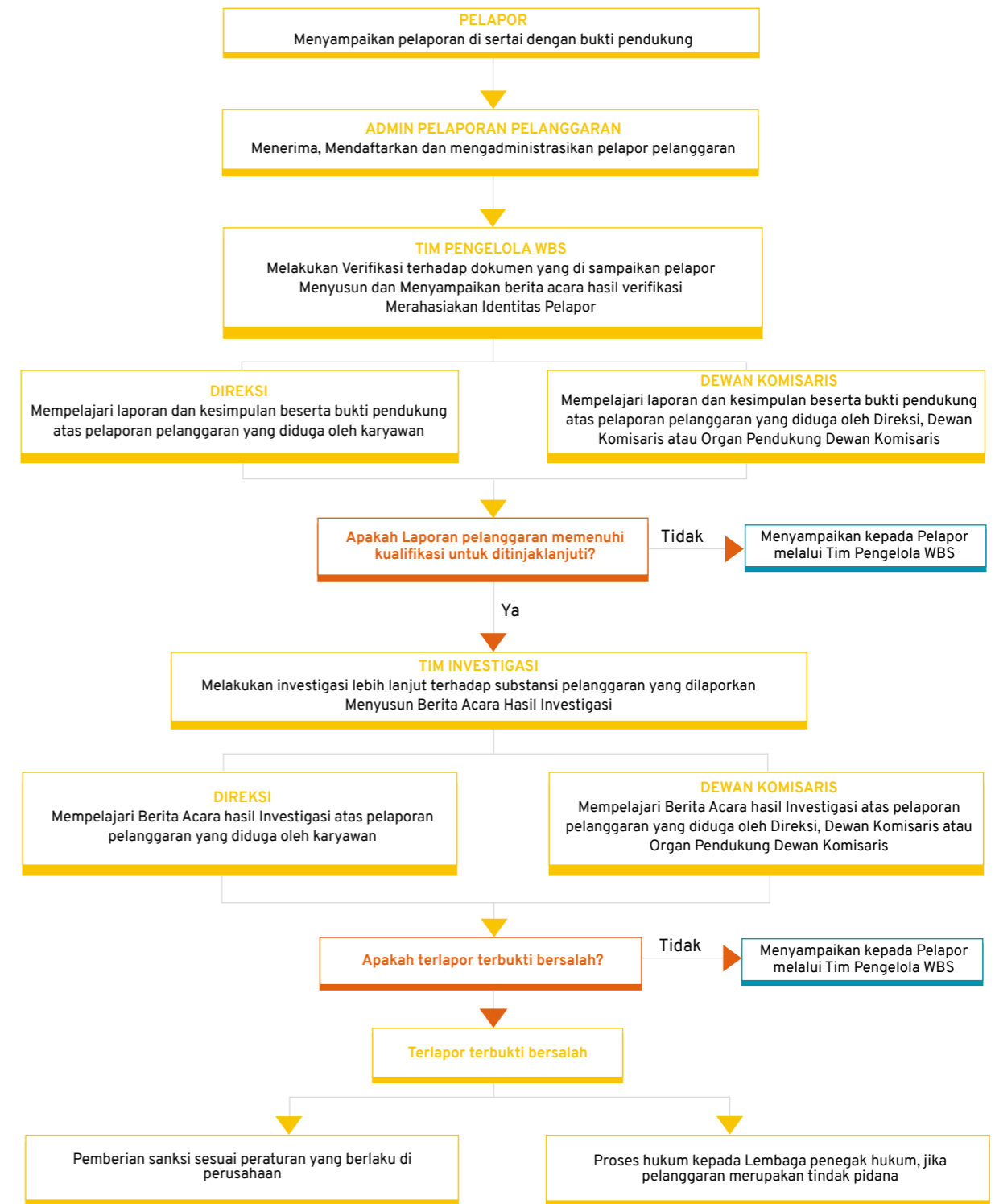
Di tahun 2016, Bio Farma mulai membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis *Website*.

Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di PT Bio Farma (Persero) diatur di dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013. Tim Pengelola WBS dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor: 00049/DIR/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) untuk Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Karyawan. Penetapan Admin WBS diatur didalam SK Direksi Nomor: 00056/DIR/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) PT Bio Farma (Persero).

Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya Bio Farma untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan.

Pelapor dapat melaporkan secara *online* melalui sistem berbasis web dengan alamat <http://bioapp1.biofarma.co.id/GCG/Views/Application/PageHome.aspx>

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN



SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh Insan Bio Farma untuk memberikan pemahaman atas kebijakan Pelaporan Pelanggaran (WBS). Sosialisasi dilakukan juga kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya melalui situs (*website*) Perusahaan.

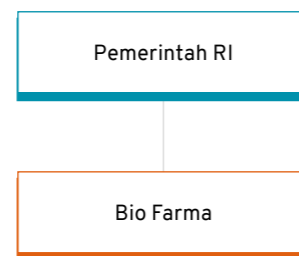
JUMLAH PENGADUAN DI TAHUN 2017 DAN TINDAK LANJUTNYA

Pada tahun 2017, Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen maupun Insan Bio Farma sehingga belum ada yang harus ditangani di tahun berjalan.

Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan *Good Corporate Governance* yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penerapan terhadap *Whistleblowing System* akan selalu terus ditingkatkan dan akan dilaksanakan secara berkala penyempurnaan sistem dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang Saham utama Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki 100% saham Perusahaan. Dengan demikian, Bio Farma tidak memiliki pemegang saham utama pengendali individu.



PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Bio Farma memiliki Kebijakan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur di dalam SK Direksi PT Bio Farma (Persero) tanggal 14 Februari 2014 Nomor: 00693/DIR/I/2014 tentang Penetapan Karyawan di Lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan User Aplikasi Wajib LHKPN.

Kebijakan tersebut mengatur bahwa karyawan di lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi. LHKPN disampaikan pada saat baru pertama kali menjabat, mengalami promosi atau transfer karir, dan mengakhiri jabatan atau pensiun. Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dalam bentuk surat peringatan.

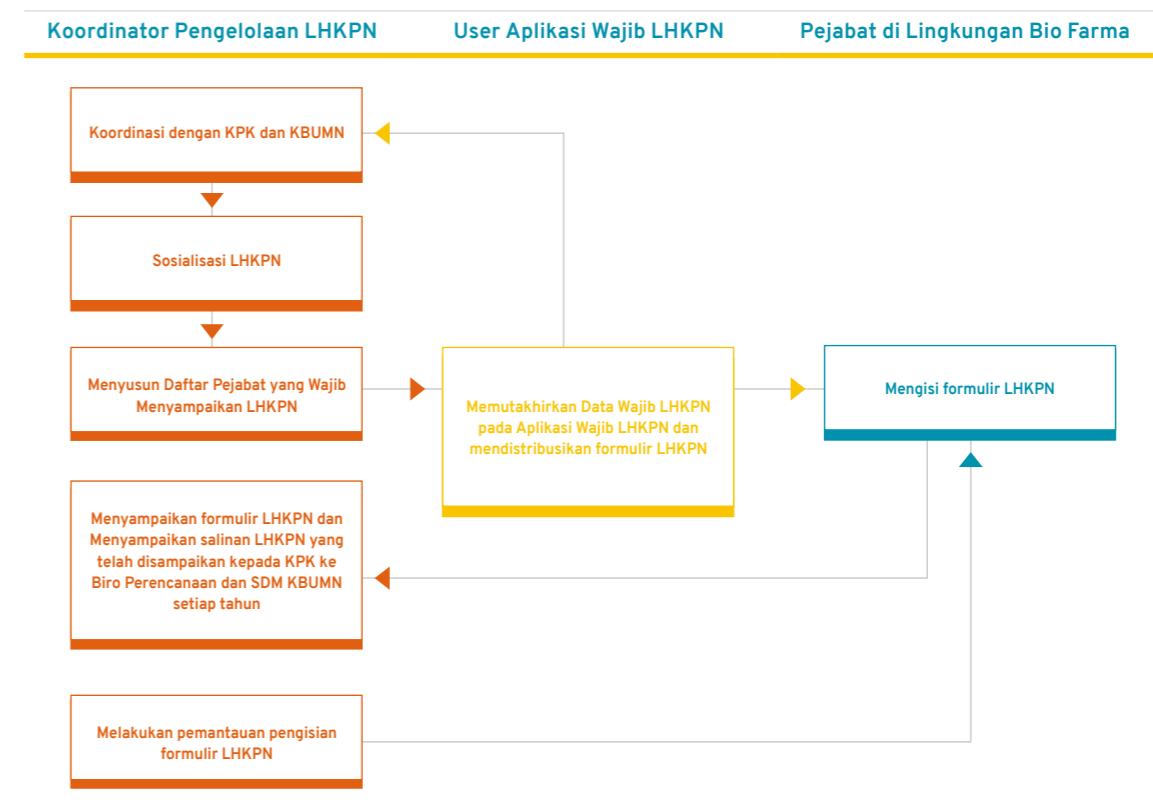
Kebijakan tersebut menunjuk *Head of Human Capital Division* sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam pendistribusian Formulir LHKPN, pemantauan pengisian dan penyampaian formulir LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN;
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Negara BUMN dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN;
3. Menyusun daftar pejabat di lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN;
4. Menyampaikan salinan LHKPN di lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang telah disampaikan kepada KPK kepada Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia, Kementerian BUMN setiap tahun;
5. Memberikan informasi dan/atau akses kepada KPK mengenai LHKPN di lingkungan PT Bio Farma (Persero);
6. Memberikan data dan informasi mengenai perubahan jabatan dari jabatan yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan PT Bio Farma (Persero);
7. Membantu KPK dalam melakukan penyebaran formulir gratifikasi dan pemantauan pengisian gratifikasi di lingkungan PT Bio Farma (Persero).

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2017 Perusahaan telah melaporkan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga mengatur mengenai LHKPN bagi Dewan Komisaris di dalam SK Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) tanggal 18 Maret 2016 Nomor: SK-04/DK/BF/03/2016 Tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN DI BIO FARMA




BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi di mana Insan Bio Farma memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diatur di dalam SK Direksi Nomor : 07882/DIR/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015, dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi Insan Bio Farma memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan, dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Terkait ketentuan tersebut, seluruh anggota Direksi Bio Farma telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan dengan isian sebagai berikut sebagai berikut:




PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Bio Farma (Persero), maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairnes di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bandung, 6 Maret 2017
DIREKSI
PT BIO FARMA (PERSERO)



PRAMUSTI INDRASCARYO
DIREKTUR KEUANGAN



Sepanjang tahun 2017, belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

BENTUK-BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk jabatan lainnya, yang ada hubungannya dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
5. Situasi dimana Insan Bio Farma memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengawasi atau yang diawasi;
7. Situasi dimana melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari insan Bio Farma yang bersangkutan;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang;
9. Situasi dimana memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk

memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;

10. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (*moonlight/outside employment*).

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bio Farma wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung
Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah insan Bio Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah insan Bio Farma atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* di Perusahaan.

Pada Tahun 2017, tidak terdapat laporan yang masuk melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* terkait potensi adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh insan Bio Farma.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

“

Bio Farma berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi vaksin dan antisera (serum) yang saat ini bertransformasi menjadi perusahaan *lifescience*, Bio Farma sangat memahami betapa pentingnya menjaga, meningkatkan dan menjamin kepuasan konsumen dengan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas produk dan pelayanan secara terus-menerus. Bio Farma menyadari bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Parameter keberhasilan bagi Bio Farma adalah dengan mengedepankan prinsip moral dan etis dalam setiap praktik bisnis yang kami jalankan, yakni menggapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Bio Farma berkeyakinan bahwa perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.



Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki makna strategis bagi Bio Farma sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang merupakan program semua negara di dunia, termasuk pemerintah Indonesia telah meratifikasinya.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kesadaran Bio Farma sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Kepedulian Bio Farma terhadap tanggung jawab sosial tidak terlepas pula dari kenyataan bahwa dimensi sosial memberikan pengaruh terhadap setiap aktivitas bisnis, dimensi sosial bukan sesuatu yang terpisah melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan proses bisnis perusahaan.

Bio Farma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi vaksin dan antisera (serum) yang saat ini bertransformasi menjadi perusahaan *lifescience*, oleh karena itu Kami sangat memahami betapa pentingnya menjaga, meningkatkan dan menjamin kepuasan konsumennya dengan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas produk dan pelayanan secara terus-menerus.

Sebagai perusahaan vaksin dengan taraf internasional, Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada masyarakat sekitar dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi setiap perusahaan.



PENDEKATAN HOLISTIK TERINTEGRASI DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BIO FARMA

Bio Farma menyadari bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kami berkomitmen bahwa dengan atau tanpa aturan hukum, Bio Farma senantiasa menjunjung tinggi moralitas. Sehingga, parameter keberhasilan adalah dengan mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Kami menganut prinsip yang mengajarkan agar suatu pihak memperlakukan pihak lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan demikian, Kami berkeyakinan bahwa perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan CSR Bio Farma berpedoman pada ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Dalam ISO 26000, CSR meliputi 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 1) *Organizational Governance*, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Ketenagakerjaan, 4) Lingkungan Hidup, 5) Praktik Kegiatan Institusi yang Adil, 6) Isu Konsumen, dan 7) Partisipasi dan Pengembangan Masyarakat. Bio Farma menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang merujuk pada panduan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perusahaan.

Gambar Pelaksanaan CSR Secara Holistik



Sumber: ISO 26000: 2010 *Guidance of Social Responsibility*

DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bio Farma senantiasa berusaha menaati setiap regulasi dan perundang-undangan serta aturan lain yang berlaku di Indonesia dalam hal implementasi kegiatan CSR, antara lain:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 87 ayat (2).
10. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
11. Keputusan Direksi Nomor 01923/DIR/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pembentukan Panitia P2K3.
12. Surat Tugas No. 00897/DIR/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang penugasan karyawan untuk implementasi Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN

Bio Farma memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan yang pro lingkungan. Dalam setiap proses pembuatan keputusan, dampak lingkungan akibat operasi perusahaan merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan. Bio Farma mendukung komitmen warga

dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menyusun berbagai langkah strategis dalam program mitigasi emisi GRK, baik yang dilakukan dalam kegiatan operasional Perusahaan maupun yang dilakukan di luar kegiatan operasional Perusahaan seperti program penanaman pohon. Program pengurangan emisi dari kegiatan operasional Perusahaan dilakukan dengan efisiensi dan inovasi proses produksi di samping melakukan penghematan energi.

Dalam konteks *green company*, Bio Farma telah merumuskan kebijakan kelestarian lingkungan, yang dibagi ke dalam 5 (lima) area utama. Pertama; *Green Process*, yaitu menerapkan prinsip *green* pada seluruh proses bisnis mulai dari pemilihan bahan baku melalui seleksi *vendor* yang peduli lingkungan sampai proses produksi, formulasi, pengisian, pengemasan hingga penanganan produk jadi. Kedua; efisiensi dalam penggunaan energi. Ketiga; efisiensi dan konservasi air dengan menerapkan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*). Keempat; pengelolaan limbah dan pemilahan sampah ke dalam 5 (lima) kategori. Kelima; upaya melibatkan karyawan dan keluarga mereka, agar memiliki budaya dan sikap kerja yang peduli terhadap lingkungan.

TARGET KEGIATAN

Bio Farma terus berupaya untuk melakukan efisiensi penggunaan energi pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan melalui berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Perusahaan menargetkan untuk selalu melakukan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan improvisasi peralatan, melakukan *redesign* proses produksi dan pengaturan pola operasi produksi. Selain melalui inovasi proses produksi, juga berupaya untuk terus melakukan pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengurangan konsumsi listrik di fasilitas pendukung, serta peningkatan kinerja pengelolaan kendaraan operasional.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

PENGELOLAAN AIR MELALUI PROGRAM 3R (REDUCE, RECYCLE, REUSE)

Bio Farma menyadari bahwa air merupakan bahan baku utama produk sehingga diperlukan pengelolaan air secara optimal. Adanya peluang untuk memanfaatkan air hasil sisa proses/kegiatan akan dapat memberikan nilai tambah terutama dapat menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Bio Farma menerapkan program 3R untuk pengelolaan air, dengan beberapa program diantaranya yaitu optimalisasi sistem *Water Treatment Plant* dengan mengganti *resin based ion exchanger* ke *Electro De Ionization (EDI) system*, efisiensi *Blow Down Boiler*, pengolahan air buangan dari mesin *washing*, *recycle air drainase* untuk dapat digunakan sebagai *raw water* serta program-program lainnya.

Dilakukan juga kegiatan *recovery* air tanah dengan pembuatan 2 (dua) Sumur Resapan di Lingkungan Bio Farma, sebagai salah satu teknik konservasi air.

DAMPAK KUANTITATIF PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

Usaha penghematan air melalui program 3R, dapat menghasilkan penghematan air sekitar 35.002 m³ pada tahun 2017 atau setara dengan pencapaian persentase efisiensi sekitar 17,26 % terhadap total pemakaian air. Persentase efisiensi tahun ini lebih baik dari 2016 yang hanya mencapai 16,43%.

Tabel Volume dan Air

Uraian	2017	2016	2015	2014
Volume penggunaan Air (m ³)	202.753	207.635	195.795	190.226
Volume Air Limbah (m ³)	25.775	25.788	24.502	12.334

PENGHEMATAN ENERGI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Bio Farma berupaya melakukan efisiensi penggunaan energi pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan melalui berbagai kebijakan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, melakukan improvisasi peralatan, melakukan *redesign* proses produksi dan pengaturan pola operasi produksi. Selain melalui inovasi proses produksi, Bio Farma juga melakukan berbagai kebijakan untuk pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengurangan konsumsi listrik di fasilitas pendukung, serta peningkatan kinerja pengelolaan kendaraan operasional.

Program efisiensi energi dilakukan bukan saja pada aktivitas manufaktur namun semua unit kerja pendukung memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan program ini. Kegiatan yang telah dilakukan dalam Program Efisiensi Energi sepanjang tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. *Recovery condensate* jalur *steam* Gedung *Pilot Scale and Filling Line 2*;
2. Pemasangan *Selective Control* pada *elevator* di Gedung Administrasi 1;
3. Pemasangan Lampu LED dan *Solar Cell* di gedung Administrasi 2;
4. Pemasangan *Solar Cell* di Gedung Distribusi dan Pemasaran; dan
5. Pemanfaatan air kondensat di AHU (*Air Handling Unit*) Gedung 36 (Fasilitas Produksi Vaksin Polio, Pertusis dan Hib).

Bio Farma melakukan program-program penghematan energi dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Industri membutuhkan energi yang diperoleh dari proses pembangkitan energi melalui pembakaran bahan bakar. Program penghematan energi yang dilakukan akan mengurangi konsumsi energi yang secara tidak langsung berdampak pada penghematan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang timbul akibat kegiatan pembangkitan energi.

DAMPAK KUANTITATIF PENGHEMATAN ENERGI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Salah satu penyumbang penurunan emisi gas rumah kaca yaitu adanya produk Vaksin Pentabio yang telah diproduksi sejak tahun 2013. Dengan adanya produk kombinasi lima antigen dalam satu kemasan memberikan kontribusi penghematan dalam berbagai aspek seperti pemakaian listrik dan air, penggunaan kemasan, dan penghematan *waste* (biaya jarum suntik/dosis, penghematan biaya *cold chain/vial*). Bio Farma berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari tahun ke tahun seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
Ton CO ² Eq.	2.166,66	2.168,72	2.097,81	2.090,40	2.030,01

PENERAPAN PROGRAM PAPERLESS OFFICE

Bio Farma menerapkan program *paperless office* secara bertahap yang diinisiasi oleh internal perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap usaha perlindungan lingkungan dan sebagai salah satu bentuk usaha penerapan konsep *Green Industry*. Program *paperless office* tidak memerlukan anggaran dalam pembuatannya, investasi berupa pengetahuan dan pelatihan bagi personil yang bertanggung jawab membuat dan menjalankan sistem. Penerapan aplikasi/*software* yang diimplementasikan di unit-unit kerja selain mempermudah berjalannya sistem perusahaan juga berimbas terhadap pengurangan jumlah penggunaan kertas yang secara langsung dapat mengurangi timbul limbah kertas.

DAMPAK KUANTITATIF PENERAPAN PROGRAM PAPERLESS OFFICE

Dengan adanya program *paperless office* yang menerapkan sistem berbasis teknologi Informasi (TI) akan merubah proses administrasi yang selama ini dilakukan secara manual. Hal ini secara langsung dapat mengurangi penggunaan kertas. Dengan adanya program ini, Bio Farma pada periode tahun 2016 - 2017 dapat menghemat penggunaan kertas lebih dari 23.500 kg.



PENGELOLAAN LIMBAH SECARA BERTANGGUNG JAWAB

Limbah minyak pelumas bekas yang dihasilkan dari kegiatan Bio Farma seluruhnya (100%) diproses dan dimanfaatkan kembali melalui kerjasama dengan Pihak ketiga. Daur ulang minyak pelumas dilakukan dengan cara memurnikan kembali kandungan dasar minyak pelumas (*base oil*) sehingga dapat digunakan lagi sebagai bahan dasar minyak pelumas baru. Daur ulang limbah minyak pelumas bekas selain merupakan salah satu alternatif dalam rangka efisiensi dan penghematan konsumsi minyak bumi juga dapat mengurangi pencemaran. Energi yang diperlukan untuk pengolahan oli bekas hanyalah sepertiga dari yang dibutuhkan untuk mengolah minyak mentah menjadi pelumas yang baik. Rasio rata-rata pemanfaatan minyak pelumas bekas terhadap timbulan periode 2017 sebesar 5,44%.

PROGRAM SUBSTITUSI DEIONISASI DARI RESIN BASED ION EXCHANGER MENJADI CONTINUOUS ELECTRO DE-IONIZATION (CEDI)

Bio Farma dalam kegiatan operasionalnya melakukan pengolahan air baku untuk menghasilkan air yang memiliki kualitas sesuai dengan standar produksi vaksin (disebut juga WFI atau *water for injection*). Proses pengolahan air tersebut dilakukan di 8 (delapan) buah instalasi *Water Treatment Plant* (WTP).

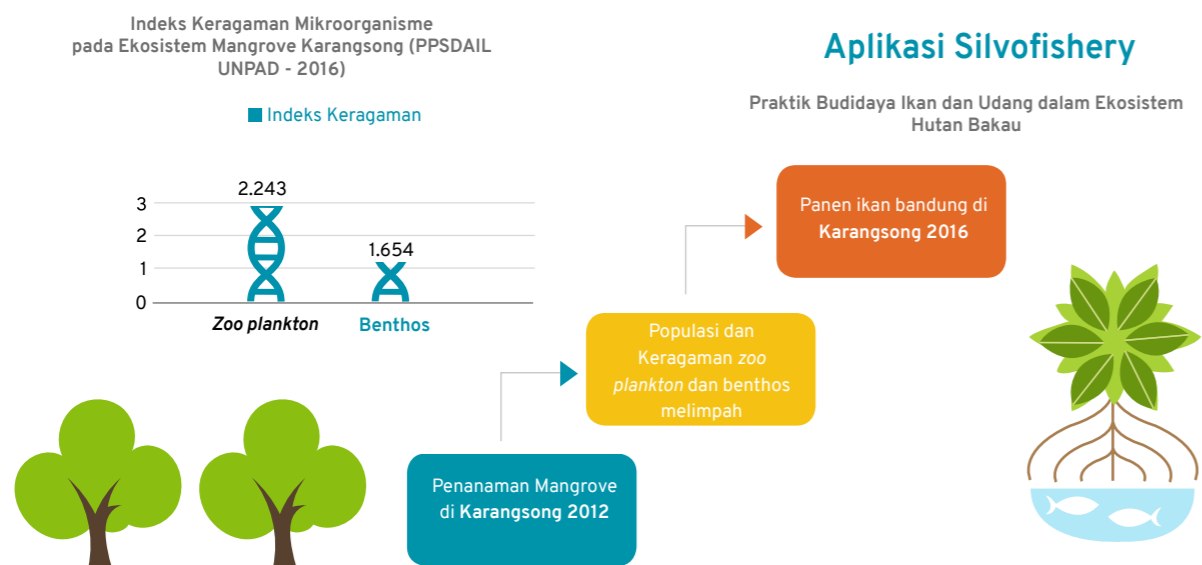
Salah satu tahap dalam pengolahan air tersebut adalah proses deionisasi dengan menggunakan resin penukar ion (*ion exchanger*) untuk menyisihkan partikel yang tidak diinginkan sehingga dapat memenuhi persyaratan mutu WFI. Tangki reaktor deionisasi dilengkapi dengan resin penukar ion positif dan negatif.

Mulai tahun 2010, dilakukan substitusi sistem penukaran ion dari *resin based ion exchanger* menjadi *Electro De Ionization* (EDI) *system* secara bertahap. Sistem ini tidak menggunakan resin sehingga dapat mengurangi limbah resin yang sebelumnya dihasilkan. Untuk mendukung kegiatan perusahaan, Bio Farma melakukan investasi kembali dengan menambah satu unit EDI Pada 2017.

DAMPAK KUANTITATIF PENGELOLAAN LIMBAH SECARA BERTANGGUNG JAWAB

Program substitusi deionisasi berhasil mengeliminasi timbulan limbah B3 resin bekas setiap periode *maintenance* (2 tahun sekali). Dari penggantian sistem ini, pada tahun 2016 dicapai eliminasi jumlah timbulan limbah B3 resin bekas sebesar 60 % dari total jumlah timbulan limbah B3 resin bekas pada tahun 2010 (sebagai *baseline*). Karena tahun 2017 bukan tahun periode *maintenance*, maka jumlah eliminasi limbah B3 resin bekas akan dapat dihitung pada tahun 2018, saat dilaksanakan *maintenance*.

KEGIATAN KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



Sebagai perusahaan yang memiliki visi untuk "Menjadi Perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang memiliki daya saing global", maka Bio Farma mengarusutamakan konsep *Inclusive and Sustainable Industrial Development* yang menetapkan bahwa pengembangan industri yang inklusif dan berkesinambungan mengandung dua pilar, yaitu *creating shared prosperity* dan *safeguarding the environment*.



Sejak 2012, Bio Farma telah melakukan program pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati melalui program konservasi mangrove dan fauna yang bekerja sama dengan LSM "Siklus" di Kabupaten Indramayu, Himpunan Pencinta Alam "Ilalang" di Kabupaten Pangandaran, POKMASI MANDRAJAYA NUSANTARA dan Pusat Perlindungan Satwa Cikananga di Kabupaten Sukabumi.

Lahan bakau dijadikan tempat budidaya ikan dan udang, bekerjasama dengan LSM Siklus Indramayu. Dalam 5 tahun, Bio Farma berhasil mengadopsi dan merehabilitasi 15 spesies fauna sebanyak 304 ekor. Ada 18 ekor dari 6 spesies primata berhasil dikembalikan ke habitat asli dengan 2 spesies berstatus *Critical Endangered* dan 2 spesies merupakan fauna endemik khas Indonesia.

Komitmen Bio Farma untuk pelestarian lingkungan juga ditunjukkan melalui keterlibatan Bio Farma dalam program konservasi dan rehabilitasi primata selama tahun 2013-2017, yang bekerja sama dengan Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Sukabumi. Pada tahun 2016 - 2017 kami bekerja sama lebih spesifik lagi dengan PPSC Cikananga yaitu dengan menjalankan program Pelepas Liaran di Hutan Cikepuh Kabupaten Sukabumi, kegiatan ini dibantu oleh PAPSU (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) selaku mitra CSR Bio Farma (Persero) di Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu. Berikut adalah jenis hewan yang telah dilepasliarkan:

- Elang Ular Bido
- Berang - berang
- Kucing Hutan
- Mencek
- Ular Sanca Kembang

DAMPAK KUANTITATIF KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Program konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati juga berdampak pada bertambahnya kawasan konservasi mangrove. Penambahan kawasan konservasi mangrove ini bukan hanya dilakukan pada wilayah Kabupaten Indramayu dan wilayah Pangandaran. Pada tahun 2017, perusahaan mampu menambah lahan seluas 9 hektar untuk dikembangkan sebagai area konservasi mangrove di wilayah Mandrajaya, Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Total luas lahan konservasi mangrove yang dimiliki oleh perusahaan di kawasan ini pada tahun 2017 telah mencapai 14 hektar dengan peningkatan seluas 6,5 hektar dibandingkan tahun 2016.

PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Komitmen Bio Farma terhadap lingkungan hidup tercermin dengan diperolehnya beberapa penghargaan selama 2017, sebagai berikut:

1. Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. *Top CSR 2017 on Pharmaceutical Industry*.
3. *Iskandar as a Top Leader on CSR Commitment*.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Sampai dengan saat ini, Bio Farma telah memperoleh serifikasi terkait lingkungan antara lain ISO 14001:2004 mengenai Standar Sistem Manajemen Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lloyd's Register Quality Assurance Limited, United Kingdom (LRQA - UK).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEBIJAKAN

Bio Farma berkomitmen dalam penerapan asas kesetaraan dalam memperlakukan setiap insan Bio Farma, dengan tidak membedakan karyawan Bio Farma berdasarkan jenis kelamin, agama, suku dan ras. Komitmen tersebut diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan SDM dimulai dengan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengembangan karir serta pemberian remunerasi.

TARGET KEGIATAN

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai, sepanjang tahun 2017 Perusahaan telah menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

- Terjaminnya kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam PKB;
- Terjaminnya kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai;
- Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Perusahaan.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

KESETARAAN *GENDER* DALAM KESEMPATAN KERJA

Dalam melakukan perekrutan pegawai, Bio Farma senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Bio Farma tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja. Secara bertahap, mulai tahun 2015 Bio Farma telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang difabel. Proses rekrutmen bersifat terbuka dan bebas diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

KESETARAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai, Bio Farma secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. Bio Farma menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Program Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan di sepanjang 2017 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Perusahaan selalu berupaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain praktik kesetaraan *gender* dalam kesempatan bekerja, Perusahaan juga senantiasa menggunakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

REMUNERASI

Remunerasi yang diterima oleh karyawan Bio Farma merupakan formulasi sistem remunerasi dalam peringkat (*grade*) dan *level* jabatan tertentu. Perusahaan menjamin bahwa minimum *grade* 17 telah mendapatkan upah minimum kota di atas Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, dan pemeringkatan (*grading*) yang ditetapkan. Dalam sistem remunerasi yang diterapkan, Perusahaan menetapkan standar gaji pokok yang relatif tinggi dibandingkan standar upah minimum. Selain itu, Bio Farma juga tidak membedakan perlakuan remunerasi terhadap karyawan pria dan wanita di seluruh *level* jabatan.

Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah Bio Farma selama tahun 2017.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	6:1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1:1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1:1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,7:1



KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Bio Farma memberikan kesejahteraan di luar dari gaji dan tunjangan yang bersifat tetap (*Take Home Pay*), seperti memberikan tunjangan lain sebagai bagian dari remunerasi kepada karyawan, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Kesejahteraan, uang cuti tahunan, uang cuti panjang, uang pakaian dinas dan bonus (jasa produksi). Selain tunjangan, kepada karyawan diberikan pula fasilitas seperti pengobatan (rawat jalan dan rawat inap). Perusahaan juga memberikan tunjangan hari tua, antara lain dalam bentuk iuran pasti dengan *benefit* diperoleh pada saat pensiun berupa penghasilan bulanan, tabungan hari tua, asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan pensiunan (Prokespen).

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam membangun harmonisasi hubungan industrial antara para karyawan dengan pimpinan manajemen perusahaan, dilakukan melalui komunikasi dan konsultasi di Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang anggotanya merupakan wakil dari Serikat Pekerja dan wakil Perusahaan. Berbagai hal terkait implementasi hak/kewajiban karyawan dan Perusahaan, sampai dengan penyelesaian pelanggaran disiplin karyawan yang ketentuannya telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bio Farma telah membentuk Susunan Pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit terdiri dari perwakilan Perusahaan dan perwakilan karyawan, sesuai dengan SK Direksi No.:

01395/DIR/III/2013. Dengan pembentukan LKS Bipartit dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk keberlangsungan, pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan, termasuk kesejahteraan karyawan.

Pengurus LKS Bipartit telah melakukan pertemuan secara periodik dan mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan aspirasi karyawan. LKS juga menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada pihak Perusahaan dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.

Himpunan karyawan Bio Farma (HIKA) telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 250/HIKA-BF/CTT.28-Disnaker/2005 tanggal 1 Agustus 2005. HIKA berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia.

DAMPAK KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Dampak dari pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial terkait dengan ketenagakerjaan adalah rendahnya tingkat *turnover* pegawai dan tingginya tingkat *engagement* karyawan. Pada tahun 2017 tingkat *turnover* karyawan tercatat sebesar 0,51%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 0,09%. Sedangkan untuk mengetahui tingkat *engagement* pegawai, Perusahaan telah melakukan pengukuran di tahun 2017 dengan perolehan nilai sebesar 60%.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat *engagement* pegawai, Perusahaan telah melakukan pengukuran di tahun 2017 dengan perolehan nilai sebesar 60%.

KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN

Untuk menjamin kesehatan karyawan, dilakukan pemantauan kesehatan yang diatur di dalam Prosedur Baku 100K-SIS-08 tentang Pemantauan Kesehatan Karyawan, yang diterapkan untuk mengeliminasi potensi sumber kontaminasi yang berasal dari karyawan dan juga untuk melindungi karyawan dari hal-hal yang membahayakan selama berada di lingkungan Bio Farma.

Selain pemantauan kesehatan karyawan, dilakukan juga pemantauan catering makanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan makan karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tata cara tersebut diatur dengan Prosedur Baku 236K-MonC-01. Pengukuran lingkungan kerja dilakukan di seluruh area perusahaan. Parameter yang diukur adalah kebisingan dan intensitas cahaya.

Bio Farma memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawan meliputi promotif dan preventif berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan penyakit, pemberian vaksinasi, pelaksanaan *General Check Up*, konsultasi kesehatan, dan pengembangan fasilitas olahraga.

Bio Farma juga memberikan fasilitas layanan pengobatan melalui penyediaan poliklinik perusahaan serta bekerjasama dengan berbagai rumah sakit negeri dan swasta di sekitar wilayah perusahaan, sebagai bagian dari upaya kuratif dan rehabilitatif.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS KESEHATAN

Program fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada tingkat angka produktivitas pegawai. Pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik oleh Perusahaan sepanjang tahun 2017 telah berdampak pada tingkat produktivitas karyawan Bio Farma. Pada 2017 produktivitas karyawan Perusahaan tercatat sebesar Rp2.539.267.058 per karyawan meningkat sebesar 27% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1.997.081.801 per karyawan.

KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai perusahaan dengan visi global, Bio Farma telah menerapkan standar *Occupational Health and Safety Management Systems* (OHSAS) 18001:2007, yaitu standar Internasional dalam membangun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memenuhi persyaratan dari WHO. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikelola oleh Bagian Lingkungan dan Keselamatan di bawah Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Bio Farma (Persero). Bagian ini berfungsi memantau implementasi sistem manajemen K3 dan lingkungan di Bio Farma. Di samping itu Bio Farma juga membentuk Tim Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) serta Tim Tanggap Darurat (TTD).

Untuk melihat efektivitas sistem tanggap darurat, maka prosedur penanganan keadaan darurat secara berkala diujicobakan, dengan maksud agar dimengerti, dipahami dan seluruh karyawan mampu menjalankannya apabila terjadi keadaan darurat. Simulasi tanggap darurat (*Emergency Drill and Simulation*) dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan melibatkan seluruh personil yang ada di perusahaan dan masyarakat sekitar Perusahaan.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Sepanjang tahun 2017, Bio Farma tidak mencatat adanya kecelakaan kerja (*zero accident*) dalam kegiatan operasional Perusahaan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang/Regional. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

STRUKTUR PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berada di bawah Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Bio Farma (Persero). Manajemen memberikan dukungan penuh terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diantaranya dengan mengeluarkan keputusan Direksi yaitu:

- Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor : 03019/DIR/VIII/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; dan
- Keputusan Direksi No. 04599/DIR/XII/2016 tentang Program *Corporate Social Responsibility*.



KEBIJAKAN

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Bio Farma antara lain memberikan hibah melalui Program Bina Lingkungan. Sesuai dengan Surat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, sumber dana program Bina Lingkungan 2017 berasal dari biaya yang dianggarkan Perusahaan serta menggunakan dana dari saldo penyisihan laba.

TARGET KEGIATAN

Melalui kegiatan Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, Bio Farma berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat marginal yang dilaksanakan melalui program kemitraan dan bina lingkungan.

KEGIATAN DAN DAMPAK

KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA GEOWISATA CILETUH

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Bio Farma harus dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi para pemangku kepentingan di samping berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia. Sebagai Perusahaan yang memiliki visi untuk "Menjadi Perusahaan *Lifescience* kelas dunia yang memiliki daya saing global", maka Bio Farma menempatkan konsep *Inclusive and Sustainable Industrial Development* yang dari UNIDO (*United Nation for Industrial Development Organization*) menjadi *mainstream* pola bisnisnya. Ada empat nilai yang harus dipraktikkan oleh perusahaan yang berstandar global antara lain; *Green Industry*, *World Class Corporate Social Responsibility*, *Governance Risk Management*, dan *Compliance*. Prinsip inilah yang menjadi landasan Bio Farma berbuat lebih bagi lingkungan dan masyarakat melalui kegiatan CSR perusahaan.

Geopark: "It's not just about rocks, it's about peoples" merepresentasikan urgensi penciptaan peluang ekonomi dalam sebuah upaya penyelamatan lingkungan berbasis konservasi. Konsep *geopark* merupakan model dan instrumen alternatif untuk pembangunan berkelanjutan dengan filosofi memuliakan warisan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Dalam konsep *geopark*, potensi keanekaragaman hayati, warisan geologi, warisan budaya harus dilindungi dan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu Program CSR Bio Farma yang merupakan manifestasi konsep *Geopark* adalah Program Pembesaran Sidat di Desa Mandrajaya, Kawasan Ciletuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Program Pembesaran Sidat di Desa Mandrajaya menyelaraskan antara kebutuhan ekonomi lokal dengan faktor kelestarian lingkungan. Program yang dijalankan oleh perusahaan berkontribusi pada Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelamatan Lingkungan. Urgensi pengembangan program ekonomi berbasis industri perikanan sesuai dengan karakteristik Desa Mandrajaya yang merupakan wilayah pesisir. Salah satu potensi sumber daya perikanan adalah pembesaran ikan sidat. Tingginya permintaan pasar ekspor terhadap ikan Sidat menjadikan produk ini sebagai komoditas prospektif. Namun, masih terdapat hambatan yakni tingkat mortalitas yang tinggi serta kebutuhan air. Cara pembesaran konvensional mereduksi kualitas lingkungan dengan praktik eksploitasi terhadap

sumber daya air. Penggunaan Teknik *Bio Secure* merupakan solusi tepat untuk mengurangi tingkat mortalitas sidat sekaligus mengurangi konsumsi air untuk kebutuhan kolam pembesaran. Dengan sistem *Bio Secure*, air kolam dikelola agar lebih higienis sehingga ikan sidat dapat terhindar dari kondisi yang menyebabkan kematian.

Pada Juli – Agustus 2017, Tim Asesor UNESCO *Global Geopark* yaitu Alexandru Andrassanu dari Rumania dan Soo Jae Lee dari Korea Selatan telah melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan kelayakan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu menjadi UNESCO *Global Geopark*. Berdasarkan hasil pertemuan UNESCO *Global Geoparks Council* yang dilaksanakan di Zhijindong UNESCO *Global Geopark*, China, *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu diusulkan kepada Dewan Eksekutif UNESCO untuk ditetapkan menjadi UNESCO *Global Geopark*. Hal ini menjadikan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu menjadi *Geopark* Indonesia pertama yang proses pengajuan UNESCO *Global Geopark*-nya tidak melalui penundaan. Proses penetapan oleh Dewan Eksekutif UNESCO akan dilaksanakan pada Sidang Umum di Bulan April 2018. Bio Farma selaku perusahaan swasta satu satunya yang terlibat langsung dalam Pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh-Palabuhanratu, melakukan pendampingan ketika dilaksanakan penilaian atau verifikasi oleh asesor dari UNESCO yaitu, Mr. Soo Jae lee dan Mr. Andrasanu Alexandru.

Bio Farma mendorong agar Kawasan *Geopark* Ciletuh yang berada di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, mendapatkan perhatian khusus dari UNESCO *Global Geoparks* sehingga Kawasan *Geopark* Ciletuh dapat menjadi bagian dari UNESCO *Global Geoparks*. Untuk mencapai hal tersebut maka Kawasan *Geopark* Ciletuh harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam *Guideline* yang ditetapkan oleh UNESCO, termasuk diantaranya adalah penyusunan *dossier* pengajuan.

DAMPAK KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA GEOWISATA CILETUH

Program *community development* yang dilaksanakan oleh Bio Farma pada Pengembangan Kawasan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu telah membawa dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2017 warga yang beralih profesi dari penambang emas aktif sebanyak 28 orang (72%). Sebanyak 8 orang (30%) warga telah beralih profesi menjadi pemasok rebon dan sidat dari perambah hutan dan pemburu benur lobster. Di Kawasan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu lapangan kerja baru sebagai pemandu wisata mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 149 orang. Pada tahun



2017 pengunjung juga mengalami kenaikan menjadi 12.000 orang. Untuk jumlah *homestay* pada tahun 2017 menjadi 40 unit.

Selain itu juga, seiring dengan Program CSR yang dilakukan oleh Bio Farma di Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh Palabuhanratu dan pendampingan secara terus menerus untuk dapat masuk UNESCO *Global Geopark* dan pada akhirnya sudah dikunjungi oleh *assessor* dari UNESCO *Global Geopark*, kini Kawasan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu menjadi salah satu destinasi wisata baru yang *hits*. Program *community development* terhadap masyarakat Kawasan *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu khususnya di Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, membuat masyarakat lebih siap untuk menghadapi kondisi wilayahnya menjadi kawasan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.

KEGIATAN PROGRAM MEMBANGUN KAMPUNG PEMULIAAN DOMBA GARUT

Sebagai indukan domba garut, telah didapat 20 ekor indukan domba garut jantan dan betina yang memiliki morfologi domba garut unggul. Selain itu, dilakukan analisis DNA pada

seluruh indukan untuk mengetahui potensi genetik unggul domba garut. Berdasarkan hasil analisis DNA tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indukan domba jantan dan betina yang berada di Kampung Pemuliaan Domba Garut merupakan domba garut dengan kategori unggul secara genetik. Sehingga telah diketahui bahwa domba-domba tersebut unggul secara fenotip dan genotip.

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak CSR Bio Farma dilakukan melalui metode pendampingan, diantaranya adalah dengan Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peternak di Desa Wanajaya terkait sumber daya alam dan manusia yang ada di Desa Wanajaya, Menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen pemeliharaan domba garut kepada pegawai kandang, dan Memberikan transfer pengetahuan kepada peternak mengenai pembibitan ternak domba. Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat membentuk kelompok inti dan plasma peternak domba garut, meningkatnya keinginan peternak untuk melakukan usaha pembibitan karena sebelumnya kebanyakan peternak hanya melakukan penggemukan dengan alasan penggemukan lebih cepat menghasilkan keuntungan dibanding pembibitan, dan tersedianya pasar baik untuk penjualan bibit domba unggul maupun untuk produk utama domba (daging dan kulit).

Telah dilakukan kerjasama Bio Farma dengan akademisi, BPPT, Pemerintah Provinsi Jawa barat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa terkait dengan Pengembangan Program membangun Kampung Pemuliaan Domba Garut diantaranya:

1. Karakterisasi Genetik menggunakan penanda DNA Mikrosatelit;
2. Terbentuknya kelompok wanita tani yang memproduksi kompos;
3. Pengembangan kelompok plasma.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka pemuliaan domba garut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Kesehatan Ternak Secara Rutin;
2. Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak;
3. Pemberdayaan kepada Ibu – ibu dan Pemuda dalam mengolah kompos dari kotoran ternak;
4. Pelaksanaan Pelatihan kepada Peternak.

DAMPAK KEGIATAN PROGRAM MEMBANGUN KAMPUNG PEMULIAAN DOMBA GARUT

Beberapa dampak yang dirasakan oleh peternak melalui program Membangun Kampung Pemuliaan Domba Garut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengetahuan peternak sehingga dapat meminimalisir penurunan kualitas galur murni domba garut. Sampai saat ini sudah terdapat total populasi sebanyak 52 ekor ternak domba yang terdiri dari 19 ekor sebagai turunan F0 (Indukan), 28 ekor keturunan F1 dan 5 ekor keturunan F2.
2. Peningkatan kesadaran peternak untuk memperhatikan manajemen kesehatan ternak, budidaya ternak, dan manajemen pemberian pakan ternak.
3. Peningkatan kapasitas Kelompok Wanita Tani untuk dapat mengolah hasil olah samping domba Garut berupa pengolahan pupuk kompos dan pengolahan produk hasil peternakan berupa daging rendang beku dan pengolahan produk hasil pertanian berupa aneka macam keripik sayuran.
4. Peningkatan kondisi ekonomi peternak domba Garut, meluasnya pengetahuan yang diberikan kepada peternak lain sehingga akan membentuk jejaring kebermanfaatn yang lebih luas jangkauannya, adanya desa percontohan untuk pengembangan atau budidaya domba garut yang baik.
5. Terbentuknya kelembagaan ternak baru untuk menjadi ruang yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan peternak. Kelompok baru. Kelembagaan yang terbentuk terdiri dari kelompok inti (Kelompok Berkah Jaya), kelompok plasma (Kelompok Samakan Jaya) dan kelompok wanita tani (KWT Jaya Asri Terpadu). Ketiga kelompok tersebut sudah terdaftar legalitas hukum.

KEGIATAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang dilakukan melalui Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk; (1) Bantuan peningkatan kesehatan, (2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, (3) Bantuan pelestarian alam, (4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, (5) Bantuan sarana ibadah, (6) Bantuan korban bencana alam, (7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan (8) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Adapun uraian singkat mengenai kegiatan program bina lingkungan yang telah disalurkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

BANTUAN BENCANA ALAM

Bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut.

BANTUAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

Bantuan sarana pendidikan berupa perlengkapan untuk kegiatan Sekolah, sarana untuk kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah serta bantuan beasiswa SMART DKM An-Nuur Bio Farma.

BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN

Bantuan kesehatan antara lain berupa kegiatan pemberian pengobatan gratis, vaksinasi gratis, dan bantuan sarana kesehatan berupa posyandu.

BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA/ PRASARANA UMUM

Bantuan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum antara lain bantuan pembangunan kantor RW, bantuan pembuatan dan perbaikan drainase di Kecamatan Andir Kota Bandung, bantuan sarana MCK dan air bersih di Kota Bandung, pembangunan jembatan di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA IBADAH

Bantuan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana ibadah serta bantuan peralatan untuk kegiatan ibadah lainnya.



BANTUAN PELESTARIAN ALAM

Bantuan pelestarian alam berupa bantuan bibit pohon di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan program pelepasliaran satwa di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Kabupaten Sukabumi.

BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bantuan sosial kemasyarakatan berupa kegiatan mudik gratis Tahun 2017 dengan tujuan Kota Semarang dan Solo Jawa Tengah dan bantuan pemasangan listrik rumah tangga bagi keluarga yang tidak mampu.

BANTUAN DIKLAT, PEMASARAN DAN PROMOSI MITRA

Bantuan pengembangan usaha kreatif kepada Kelompok usaha serta kegiatan budidaya ikan sidat di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan Bantuan pendidikan dan pelatihan, pemasaran dan promosi berupa pelatihan kewirausahaan UKM dan koperasi mitra binaan serta kegiatan pameran mitra binaan di DKI Jakarta.

DAMPAK KEGIATAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pelaksanaan program Bina Lingkungan yang telah dijalankan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2017 diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada target penerima bantuan.

Dampak yang dirasakan antara lain:

1. Meringankan beban para korban bencana alam dan longsor yang terjadi selama kurun waktu 2017;
2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui bantuan pengobatan gratis, vaksinasi gratis dan pemberian bantuan sarana kesehatan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat sekitar melalui perbaikan/renovasi sarana pendidikan, pemberian fasilitas sarana pendidikan dan pemberian beasiswa;
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum untuk masyarakat berupa pembangunan/renovasi sarana dan prasarana umum, pembuatan dan perbaikan drainase dan pembangunan jembatan;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas beribadah;
6. Melestarikan alam untuk wilayah masyarakat sekitar melalui kegiatan pemberian bibit pohon dan program pelepasliaran satwa;
7. Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian kendaraan bermotor melalui kegiatan mudik gratis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program elektrifikasi rumah tangga untuk keluarga tidak mampu;
8. Peningkatan *capacity building* bagi mitra – mitra kelompok usaha melalui bantuan pelatihan, diklat, pendidikan, pemasaran dan promosi.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp9.378.847.784. Jumlah tersebut menurun sebesar 30%. Adapun rincian mengenai dana penyaluran bantuan program kemitraan dan bina lingkungan adalah sebagai berikut.

Tabel Biaya Bantuan Program Bina Lingkungan

Kategori Bantuan	2017	2016
Bantuan Bencana Alam	130.880.000	354.984.171
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.608.549.821	2.522.466.454
Bantuan Peningkatan Kesehatan	366.602.035	1.618.837.944
Bantuan Pengembangan Sarana/Prasarana Umum	1.203.016.262	1.809.412.714
Bantuan Pengembangan Sarana Ibadah	2.585.379.300	2.331.206.500
Bantuan Pelestarian Alam	70.600.000	266.595.524
Bantuan Sosial Kemasyarakatan	1.413.820.366	4.081.594.500
Bantuan Diklat, Pemasaran dan Promosi Mitra	-	453.010.740
Jumlah	9.378.847.784	13.438.108.547

Selain berasal dari anggaran Program Bina Lingkungan, kegiatan CSR Bio Farma juga dibiayai dari biaya Program CSR yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk disalurkan untuk kegiatan CSR pada Pilar Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup. Adapun rincian jumlah penyaluran bantuan Program CSR pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel Biaya Bantuan Program CSR

Kategori Bantuan	2017	2016
Bantuan Sektor Kesehatan	Rp 2.395.731.012	Rp 248.329.502
Bantuan Sektor Pendidikan	Rp 405.511.400	Rp 1.842.073.398
Bantuan Sektor Ekonomi	Rp 303.987.000	Rp 119.234.000
Bantuan Sektor Lingkungan Hidup	Rp 338.668.667	Rp 503.170.430
Jumlah	Rp 3.443.898.079	Rp 2.712.807.330

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

KEBIJAKAN

Bio Farma menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan konsumen dan persyaratan/peraturan yang tertuang dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Praktek Manufaktur yang Baik (*Good Manufacturing Practices - GMP*) ASEAN, WHO GMP dan persyaratan produk yang tertuang dalam Seri Acuan dari WHO diantaranya Laporan Teknis (*Technical Report Series*), Praktik Laboratorium yang Baik (*Good Laboratory Practices - GLP*), Praktik Klinis yang Baik (*Good Clinical Practices - GCP*), Praktik Distribusi yang Baik (*Good Distribution Practices - GDP*), sistem manajemen mutu ISO 9001, Manajemen Risiko Perusahaan (*Corporate Risk Management - CRM*), ISO 17205 khusus untuk laboratorium pengujian di Divisi Imunisasi dan Klinik, serta sistem dan regulasi lain yang terkait dengan perbaikan kinerja Bio Farma.

TARGET KEGIATAN

Sebagai perusahaan dengan taraf internasional, Perusahaan berkomitmen untuk selalu memastikan setiap produk yang diterima oleh konsumen telah memenuhi standar-standar keamanan yang berlaku dan tersedianya informasi yang akurat terkait produk yang dipasarkan. Terkait dengan keluhan konsumen, Perusahaan memastikan setiap keluhan tertangani dengan baik sesuai dengan *standar level agreement* yang ditentukan.

KEGIATAN DAN DAMPAK

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

INFORMASI PRODUK

Bio Farma memastikan bahwa konsumen akan selalu memperoleh data akurat perihal informasi produk di setiap jenis produk. Informasi tersebut merupakan data yang telah mendapatkan persetujuan dari BPOM dan WHO. Konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi produk pada laman situs Perusahaan yang dapat diakses kapanpun. Informasi lain yang terkait kesehatan dapat didiskusikan secara langsung melalui media sosial yang dikelola oleh karyawan yang kompeten di bidangnya.

MUTU DAN KEAMANAN PRODUK

Penjaminan dan pemastian mutu produk dilakukan sejak awal, dimulai dari pemilihan pemasok bahan baku. Pemasok yang terlibat langsung dalam produk akhir harus menerapkan minimal standar mutu, lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Bio Farma secara berkala melakukan audit pemasok untuk menjamin implementasi penerapan standar tersebut diterapkan dengan baik. Sehingga kami dapat memastikan kualitas bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Di dalam tahapan proses formulasi pembuatan produk, kami juga menerapkan pengawasan di tengah proses (*inprocess control*). Sebelum dipasarkan, produk akhir kami diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk yang ada di masyarakat adalah produk yang telah lulus uji BPOM, memenuhi standar mutu dan sesuai dengan spesifikasi Nasional dan Internasional.

LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Bio Farma menyediakan layanan pengaduan konsumen yang mampu menjawab dan menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan konsumen, dengan mekanisme antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Bio Farma terus melakukan sosialisasi melalui distributor, dokter dan petugas kesehatan untuk memanfaatkan mekanisme pelaporan KIPI sehingga apabila terjadi, tim independen yang telah ditunjuk akan bergerak untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen tersebut, sehingga segala keluhan dapat segera diatasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini tidak pernah menerima keluhan mengenai pelanggaran dalam menyediakan informasi produk maupun pelanggaran kekeluargaan pribadi.

AKSES KOMUNIKASI KONSUMEN (*CUSTOMER GATHERING*)

Bio Farma melakukan pertemuan dan berbagi informasi (*sharing*) secara rutin dengan konsumen di berbagai daerah. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Subdit Imunisasi, Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, Promosi Kesehatan, serta berbagai organisasi terkait kesehatan antara lain Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi). Hal ini ditujukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit melalui vaksin untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pertemuan ini juga berguna untuk para Peserta yang hadir terdiri dari praktisi kesehatan, bidan, juru imunisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, penggerak

posyandu serta masyarakat umum sebagai sarana edukasi terhadap pentingnya vaksin sebagai bagian dari pencegahan penyakit bagi masyarakat.

Pada tahun 2017 Bio Farma telah melakukan berbagai kegiatan Temu Konsumen di berbagai wilayah kota dan kabupaten di 34 provinsi Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan pelanggan, sosialisasi produk maupun *monitoring* vaksin. Melalui berbagai kegiatan tersebut Bio Farma mendapatkan umpan balik (*feedback*) berupa evaluasi pelayanan yang telah diberikan, peningkatan kompetensi tenaga pengelola vaksin mengenai pengelolaan vaksin yang baik serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional.

DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen telah berdampak pada tingkat kepuasan konsumen yang secara berkala diukur oleh Bio Farma. Bio Farma melakukan kegiatan pengumpulan informasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyediakan informasi perkembangan kebutuhan, keinginan, harapan, preferensi, perilaku dan kepuasan konsumen agar dapat digunakan untuk menetapkan dan merealisasikan kebijakan perusahaan, perbaikan berkesinambungan serta menyempurnakan kinerja sistem mutu Bio Farma.

Pelanggan memiliki peran besar, seperti halnya sumber-sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kepuasan pelanggan. Agar survei kepuasan pelanggan mendapatkan data yang akurat, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam suatu pedoman dan prosedur baku perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Bagian Manajemen Produk (*Product Management Department*). Untuk hasil yang akurat dan menyeluruh, survei tersebut dilakukan oleh suatu lembaga independen dan melibatkan pelanggan nasional dan internasional. Pada tahun 2017, hasil Survei Kepuasan Pelanggan Bio Farma sebesar 82.74 berada dalam kategori sangat baik (> 80%), angka kepuasan pelanggan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 79.64.



GLOBAL GEOPARKS NETWORK

International Association on Geoparks

CELEBRATING EARTH HERITAGE – SUSTAINING LOCAL COMMUNITIES
Haute Provence Geopark, Musée Promenade,
10 Montée Bernard Dellecasagrande,
BP 156, 04005 Cedex Digne les Bains – France.
Téléphone : 06 79 87 36 22

www.globalgeoparksnetwork.org

January 3, 2018

Guy Martini
General Secretary

TO:

President Director
PT Bio Farma (Persero)
Jl. Pasteur 28
Bandung, West Java
Republic of Indonesia

Dear Mr President Director,

I would like to highlight the great contribution, during the last years, of Bio Farma in the development of the Ciletuh-Palabuhanratu Aspiring Geopark.

The development of a Geopark project can not be succeeded without synergies between the Geopark authority and the main stakeholders in the region. Ciletuh-Palabuhanratu Geopark is one of the good examples in Geopark development, integrating stakeholder's involvement in Geoparks management together with the government, academics, private sector, and the local community.

As General Secretary of the Global Geopark Network, I would like to express my sincere appreciation to Bio Farma for supporting UNESCO Global Geopark project in Indonesia. The idea of private sector partnership with local authorities through active participation in developing Geopark project is truly needed,

The partnership between Bio Farma and Ciletuh-Palabuhanratu Geopark can be used as one model of private sector involvement towards the creation and development of healthy Geoparks in Indonesia.

With all my congratulation for this excellent partnership and all my best regards.



Guy Martini
GGN General Secretary





Laporan Keuangan

Financial Reports

“

Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
dan Laporan Auditor Independen

For The Years That Ended December
31, 2017 and 2016
and Independent Auditors' Report

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman :

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 425/LAI.17.BF-6/DWR/2018

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BIO FARMA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan)

Nomor : 425/LAI.17.BF-6/DWR/2018

Laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. **Pengujian atas kepatuhan** terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit Nomor 62 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami Nomor 073A/LAK.17.BF-6/DWR/2018 dan Nomor 073B/LAK.17.BF-6/DWR/2018 tanggal 13 Februari 2018.

Partner,

Wahyudin Zarkasyi, CPA
NRAP: AP.0198

Bandung, 13 Februari 2018

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

ASET	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.e., 2.f., 3	369.546.131.323	447.950.326.268
Piutang Usaha (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp365.343.156 pada 31 Desember 2017 dan Rp346.011.041 pada 31 Desember 2016)	2.e., 2.g., 4	313.138.277.507	288.626.423.903
Piutang Lain-Lain (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp1.302.637.458 pada 31 Desember 2017 dan 2016)	5	121.769.028	446.140.212
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp4.310.484.907 pada 31 Desember 2017 dan Rp5.053.143.454 pada 31 Desember 2016)	2.i., 6	712.911.960.933	708.564.467.943
Uang Muka	2.e., 7	27.734.362.805	54.052.291.312
Pajak Dibayar Dimuka	2.n., 8.a.	359.948.026.140	298.816.989.377
Biaya Dibayar Dimuka	2.l., 9	12.473.630.758	12.136.509.861
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	2.l., 10	13.994.095	800.058.011
Aset Lancar Lainnya	11	168.198.388.626	38.162.196.231
Jumlah Aset Lancar		1.964.086.541.215	1.849.555.403.118
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Pajak Tangguhan	2.n., 8.e.	30.213.960.819	23.585.022.896
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.133.301.850.570 pada 31 Desember 2017, Rp984.824.550.647 pada 31 Desember 2016)	2.j., 12	4.394.230.961.112	3.998.187.096.331
Aset Takberwujud (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp28.212.412.101 pada 31 Desember 2017 Rp18.918.302.793 pada 31 Desember 2016)	2.k., 13	32.522.393.190	38.633.597.058
Aset Tidak Lancar Lainnya (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp5.688.770.125 pada 31 Desember 2017 dan Rp3.869.122.375 pada 31 Desember 2016)	14	28.395.092.292	12.493.203.788
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.485.362.407.413	4.072.898.920.073
JUMLAH ASET		6.449.448.948.628	5.922.454.323.191

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2.e, 15	371.252.524.473	259.234.466.062
Utang Pajak	2.n., 8.b.	57.801.114.118	47.624.361.238
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.e., 2.l., 16	107.859.074.686	113.405.208.247
Pendapatan Diterima Dimuka	2.e., 2.l., 17	1.007.776.471	44.130.371
Liabilitas Lancar Lainnya	2.e., 18	41.635.031.977	32.860.809.624
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		579.555.521.725	453.168.975.542
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja	2.o.,19	219.937.069.439	167.133.074.162
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		219.937.069.439	167.133.074.162
JUMLAH LIABILITAS		799.492.591.164	620.302.049.704
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar 8.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2017 dan 2016. Nominal Rp.1.000.000 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 pada 31 Desember 2017 dan 2016			
	20	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Komponen Ekuitas Lainnya	21	1.874.048.520.876	1.901.287.047.062
Saldo Laba (Rugi)			
Dicadangkan			
	22	1.250.552.226.426	899.824.236.342
Laba Periode Berjalan			
		525.355.610.162	501.040.990.083
JUMLAH EKUITAS		5.649.956.357.464	5.302.152.273.488
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6.449.448.948.628	5.922.454.323.191

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	2017	2016
PENJUALAN BERSIH			
Produk Perusahaan	23	1.872.113.076.150	1.927.724.334.427
Produk <i>Partnership</i>	24	1.111.028.033.574	358.955.600.436
<i>Trading Partnership</i>	25	20.119.589.100	23.763.822.750
Jasa	26	8.310.031.520	5.315.256.510
Jumlah Penjualan Bersih		3.011.570.730.344	2.315.759.014.122
BEBAN POKOK PENJUALAN			
Produk Perusahaan	27	(923.185.406.019)	(763.398.053.702)
Produk <i>Partnership</i>	28	(710.317.953.702)	(215.497.255.410)
<i>Trading Partnership</i>	29	(16.765.732.180)	(21.437.297.459)
Beban Jasa	30	(6.861.250.646)	(4.961.523.057)
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa		(1.657.130.342.547)	(1.005.294.129.628)
LABA (RUGI) KOTOR		1.354.440.387.797	1.310.464.884.495
Penghasilan Lain-lain	31	115.158.413.202	164.727.714.782
Beban Administrasi dan Umum	33	(409.734.449.135)	(402.001.646.756)
Beban Penjualan	32	(137.478.250.141)	(133.996.397.992)
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	2.m.,34	(124.570.343.182)	(114.481.354.438)
Beban Lain-Lain	35	(84.181.898.552)	(139.745.154.390)
Jumlah		(640.806.527.808)	(625.496.838.793)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		713.633.859.989	684.968.045.701
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2.n., 8.c.	(194.907.187.750)	(185.425.250.000)
Pajak Tanggahan	2.n., 8.e.	6.628.937.923	1.498.194.382
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(188.278.249.827)	(183.927.055.618)
LABA (RUGI) BERSIH		525.355.610.162	501.040.990.083
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi			
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	21	(27.238.526.186)	(8.313.228.628)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak		(27.238.526.186)	(8.313.228.628)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		498.117.083.976	492.727.761.455

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
		Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Saldo Awal per 1 Januari 2016	1.650.000.000.000	816.422.044.549	668.109.191.794	1.909.600.275.690	5.044.131.512.033
Pembagian Laba :					
Dividen	-	-	(234.707.000.000)	-	(234.707.000.000)
Cadangan	-	435.885.891.245	(435.885.891.245)	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-	-	-
Kapitalisasi Cadangan ke Setoran Modal	350.000.000.000	(350.000.000.000)	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(8.313.228.628)	(8.313.228.628)
Konversi Cadangan Akibat Penerapan PSAK 24	-	(2.483.699.451)	2.483.699.451	-	-
Laba (Rugi) tahun 2016	-	-	501.040.990.083	-	501.040.990.083
Saldo Akhir per 31 Desember 2016	2.000.000.000.000	899.824.236.342	501.040.990.083	1.901.287.047.062	5.302.152.273.488
Saldo Awal per 1 Januari 2017	2.000.000.000.000	899.824.236.342	501.040.990.083	1.901.287.047.062	5.302.152.273.488
Pembagian Laba :					
Dividen	-	-	(150.313.000.000)	-	(150.313.000.000)
Cadangan	-	350.727.990.083	(350.727.990.083)	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-	-	-
Kapitalisasi Cadangan ke Setoran Modal	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(27.238.526.186)	(27.238.526.186)
Laba (Rugi) tahun 2017	-	-	525.355.610.162	-	525.355.610.162
Saldo Akhir per 31 Desember 2017	2.000.000.000.000	1.250.552.226.426	525.355.610.162	1.874.048.520.876	5.649.956.357.464

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.111.408.452.396	2.334.948.019.707
Penerimaan Pajak (Restitusi)	167.612.639.609	124.792.315.311
Penerimaan Bunga	3.557.788.614	7.960.352.307
Pembayaran Bunga	(8.071.427.633)	(9.342.500.000)
Penerimaan Hibah/ Donasi WHO	1.917.254.546	13.588.013.999
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	613.488.648	1.238.151.952
Pembayaran Tantiem	(11.020.999.997)	(14.750.000.000)
Pembayaran Pajak	(537.334.513.445)	(391.829.178.802)
Klaim Asuransi	575.233.401	-
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(2.362.897.930.651)	(1.519.679.069.057)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	366.359.985.488	546.926.105.418
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(293.309.273.980)	(393.169.903.706)
Pembelian Aset Takberwujud	(3.245.057.927)	(11.172.646.329)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(296.554.331.907)	(404.342.550.035)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	-	235.000.000.000
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	(235.000.000.000)
Pembayaran Dividen	(150.313.000.000)	(234.707.000.000)
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(150.313.000.000)	(234.707.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(80.507.346.419)	(92.123.444.617)
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	2.103.151.474	(15.865.487.408)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	447.950.326.268	555.939.258.294
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	369.546.131.323	447.950.326.268

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bio Farma (Persero) "Perusahaan", pada awalnya bernama "Parc Vaccinogene" yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.14 tanggal 6 Agustus 1890. Mulai tahun 1955, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 14 tahun 1955 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pasteur. Pada tahun 1961, Perusahaan berubah menjadi PN Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum, status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1997, Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, dan Akta No. 30 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Maret 1998 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), serta sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-.AH.01.03-0109923 tanggal 21 Desember 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

b. Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi dan alat kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- a. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- b. Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- c. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik;
- e. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a,b, c, dan d.

Sifat usaha Perusahaan adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut :

- a. Pasar Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu Vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan Vaksin DTP-HB-Hib.
- b. Pasar swasta nasional, yaitu melayani para distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)) dan PPD 2 TU.
- c. Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan institusi lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu vaksin TT, Td, BioTT, DTP, Polio, Campak, Pentabio, *bulk* Polio, *bulk* Difteri, *bulk* Pertusis, dan *bulk* Tetanus.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama ¹⁾	: Prof. DR. Ahmad Ramli, SH, MH	Prof. DR. Ahmad Ramli, SH, MH
Komisaris ²⁾	: -	Drs. Paruli Lubis, MBA
Komisaris ⁵⁾	: Dr. H. Mohamad Subuh	Dr. H. Mohamad Subuh
Komisaris ³⁾	: -	dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)
Komisaris ⁴⁾	: Ihsan Setiadi Latief, M.Si	Ihsan Setiadi Latief, M.Si
Komisaris ¹⁾	: dr. Heridadi, M.Sc	dr. Heridadi, M.Sc
Komisaris Independen ⁵⁾		
	: -	Drs. Paruli Lubis, MBA
	: dr. Heridadi, M.Sc	dr. Heridadi, M.Sc
Direksi ⁶⁾		
Direktur Utama	: Drs. Juliman, MM.	Drs. Iskandar, Apt. MM
Direktur Pemasaran	: M. Rahman Roestan, S.Si., Apt., MBA.	Drs. Mahendra Suhardono, Apt, MM
Direktur Produksi	: Drs. Juliman, MM	Drs. Juliman, MM
Direktur Keuangan	: Drs. Pramusti Indrascaryo, MM	Drs. Pramusti Indrascaryo, MM
Direktur Perencanaan & Pengembangan	: Drh. Sugeng Raharso, MM	Drh. Sugeng Raharso, MM
Direktur SDM ⁷⁾	: Disril Revolin Putra, SH.,MH.	Drs. Andjang Kusumah, MM
Komite Audit ⁹⁾		
Ketua	: -	Drs. Paruli Lubis, MBA
Wakil Ketua	: Ihsan Setiadi Latief, M.Si	Ihsan Setiadi Latief, M.Si
Anggota ⁸⁾	: Drs. Asawir Harahap Ak, CA	Drs. Asawir Harahap Ak, CA
Anggota ¹⁰⁾	: Priyatno, S.H	Drs. Abu Bakar Ak, CA
Komite Pengembangan, Risiko dan GCG ⁹⁾		
Ketua	: dr. Heridadi, M.Sc	dr. Heridadi, M.Sc
Wakil Ketua I	: -	dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)
Wakil Ketua II	: Dr. H. Mohamad Subuh	Dr. H. Mohamad Subuh
Anggota	: dr. Judi Jaenudin Endjun Sp.OG	Dadang Epi Sukarsa, SH., MH
Anggota	: Afrizal, SE.Msi.Ak	Afrizal, SE.Msi.Ak

¹⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-17/MBU/2014, tanggal 23 Januari 2014.

²⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP 392/MBU/2012, tanggal 5 November 2012.

³⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK 204/MBU/2012, tanggal 28 Mei 2012.

⁴⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK 235/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013.

⁵⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-97/MBU, tanggal 22 Juni 2015.

⁶⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017.

⁷⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.

⁸⁾ Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 03 Juli 2017.

⁹⁾ Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016, tanggal 4 Februari 2016.

¹⁰⁾ Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No KEP-04/DK/BF/05/2017 bulan Mei 2017.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Direksi Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 86 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17236 tanggal 3 Mei 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero), sedangkan susunan Dewan Komisaris Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0949789 tanggal 9 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero).

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing 1.186 dan 1.171 karyawan.

d. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perincian gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Dewan Komisaris	12.754.173.358	12.754.354.575
Direksi	26.560.545.754	29.612.080.261
Jumlah	<u>39.314.719.112</u>	<u>42.366.434.836</u>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (*accrual basis*), kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Pada tahun 2016 dan 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen beberapa PSAK, serta mengesahkan SAK dan ISAK yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 sebagai berikut :

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017.
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Selain itu, perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (lanjutan)

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen, Interpretasi, dan Penyesuaian standar, serta SAK yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi, mengamandemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif, mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing. Berlaku efektif 1 Januari 2019, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 69: Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 73: Sewa, menetapkan prinsip pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

d. Penentuan Tingkat Materialitas Suatu Pos

Berdasarkan SM-S15 Pedoman Akuntansi Keuangan, sebagai ukuran objektif suatu akun dinyatakan material dan karenanya harus disajikan tersendiri di dalam laporan keuangan jika:

- 5 % dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset;
- 5 % dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban;
- 5 % dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas;
- 10 % dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi; dan
- 10 % dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, sebagai berikut :

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Dollar Amerika Serikat (USD)	13.548,00	13.436,00
EURO (EUR)	16.173,62	14.161,55
Dollar Singapore (SGD)	10.133,53	9.298,92
Dollar Australia (AUD)	10.557,29	9.724,31
Yen Jepang (JPY)	120,22	115,4
Poundsterling Inggris (GBP)	18.218,01	16.507,51
Danish Krone Denmark (DKK)	2.172,34	1.905,09
Frank Swiss (CHF)	13.842,15	13.177,76

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada 31 Desember 2017, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Pencatatan atas penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan pada setiap triwulan. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat tertagih.

Pada 31 Desember 2017, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain.

(iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- (a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- (b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- (c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2017, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode yang tidak ditentukan, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas, atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan (beban) komprehensif lain dan disajikan tersendiri pada bagian ekuitas hingga terealisasi, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dibawah nilai perolehan yang bersifat non-temporer dan keuntungan (kerugian) yang timbul dari perubahan nilai tukar.

Pada 31 Desember 2017, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori :

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan mempunyai utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian (*quoted price*) pada tanggal pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu yang meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi nilai wajar instrumen keuangan lainnya yang serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut. Peristiwa yang merugikan tersebut dapat diestimasi secara handal dan berdampak negatif pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang bersangkutan.

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi penurunannya diukur dari selisih antara nilai tercatat dan nilai kini estimasi arus kas di masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

h. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Perusahaan, Perusahaan dan BUMN lainnya yang memiliki hubungan afiliasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah.
- Perusahaan menempatkan dana atau memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN/D dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Mempunyai anggota, pengurus yang sama dengan Entitas Anak, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada Entitas Anak.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain maupun Entitas Anak BUMN serta badan/lembaga-lembaga Pemerintah.

i. Persediaan

1. Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau rata-rata sederhana bergantung pada jenis persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

2. Biaya Perolehan Persediaan

Biaya perolehan (*acquisition cost*) persediaan meliputi harga beli, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*), kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu :

- Produk dalam proses untuk barang curah (*bulk*) penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
- Produk dalam proses untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase produk *reject* saat dikemas, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direksi No.07841/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Persediaan Bahan Baku, Penolong dan Perlengkapan

Persediaan bahan baku, penolong dan perlengkapan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Persediaan (lanjutan)

4. Persediaan Produk Dalam Proses

Biaya persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.

Persediaan produk dalam proses terdiri dari :

- *Bulk* (barang curah) hasil produksi yang telah lulus uji (*quality control*) dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan siap untuk dijual sebelum dilakukan pengemasan.
- Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah (botol/ampul/vial/uniject blank) dan telah lulus uji (*quality control*) sebelum diberi etiket, leaflet dan dimasukkan ke dalam dus.

5. Persediaan Produk Jadi

Persediaan produk jadi terdiri dari persediaan produk perusahaan dan persediaan *trading partnership*. Biaya persediaan produk Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, sedangkan biaya persediaan *trading partnership* ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

6. Persediaan Dalam Perjalanan

Persediaan dalam perjalanan merupakan persediaan bahan baku/bahan penolong/perengkapan/*trading partnership* yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Perusahaan. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".

7. Persediaan dalam Karantina

Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku/penolong/perengkapan/*trading partnership* yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di Perusahaan, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus pengujian. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke kelompok Aset Lancar Lainnya.

8. Penurunan Nilai Persediaan

Penurunan nilai persediaan dari biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban dalam periode terjadinya pemulihan.

Persentase penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Persentase ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

j. Aset Tetap

1. Pengukuran Aset Tetap Selain Tanah

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap, kecuali Tanah, disusutkan sesuai tabel berikut :

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan	Manfaat Keekonomian	Tarif Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus	10 - 20 tahun	5 % - 10 %
Inventaris Pabrik & Mesin	Saldo Menurun	8 - 16 tahun	12,5 % - 25 %
Inventaris Kantor	Saldo Menurun	4 - 8 tahun	25 % - 50 %
Inventaris Lainnya	Saldo Menurun	8 - 16 tahun	12,5 % - 25 %
Kendaraan Bermotor	Saldo Menurun	4 - 5 tahun	25 % - 50 %

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dalam rangka menjaga manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dalam jumlah yang material setelah perolehan awal suatu aset dan dapat meningkatkan manfaat keekonomian di masa yang akan datang, dikapitalisasi.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

2. Perubahan Model Pengukuran Aset Tetap Tanah.

Kebijakan akuntansi untuk aset tetap kelompok Tanah didasarkan model revaluasi secara prospektif. Nilai Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar jumlah revaluasian yang dilakukan pada 31 Desember 2015. Selisih yang timbul akibat revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi akan dialihkan ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

3. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan disajikan tersendiri di dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

4. Aset Tetap Tidak Produktif

Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau usang dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan disajikan pada pos aset tetap tidak produktif dalam kelompok aset tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Jika akan dijual dalam periode pendek maka aset tersebut disajikan dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Penghapusbukuan dilakukan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau Dewan Komisaris.

k. Aset Takberwujud

1. Biaya yang berhubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur yang dapat diidentifikasi, dikendalikan serta memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 4 (empat) tahun.

2. Biaya pengembangan Upstream Vaksin Flu yaitu biaya-biaya yang terkait dengan penemuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan bulk, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut yang dilakukan oleh pihak eksternal. Biaya pengembangan Upstream Vaksin Flu ini akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

m. Beban Penelitian, Pengembangan dan *Surveilans*

Biaya - biaya yang dikeluarkan dari tahapan penelitian (atau tahapan penelitian pada proyek internal) uji klinis, *surveilans* produk dan lingkungan serta pemantauan produk yang sudah dijual di pasar.

n. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Pajak kini diakui berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

o. Imbalan Kerja

Perusahaan melaksanakan imbalan manfaat karyawan dan menyelenggarakan program pensiun/imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program pensiun karyawan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan membukukan imbalan manfaat karyawan lainnya untuk karyawan sesuai dengan Undang - Undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2003.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Perhitungan beban jasa kini, jasa lalu dan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "*projected unit credit*".

Perusahaan mengakui komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut :

- a. Biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti dalam laba rugi; dan
- b. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan imbal hasil atas aset program dalam penghasilan komprehensif lain.

Selain imbalan manfaat karyawan, Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dan karyawan kontrak. Program ini memberikan imbalan manfaat karyawan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Pendanaan dana pensiun berdasarkan ketentuan terakhir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Himpunan Karyawan (HIKA) periode 2015-2017 pasal 66, yaitu 15% dari gaji dasar dengan komposisi 60% ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 40% ditanggung oleh karyawan masing-masing.

p. Pendapatan Hibah

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan melakukan penerapan lebih awal terhadap PSAK 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah" sehubungan dengan diberlakukannya PPSAK 6 : perihal Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2: Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemegang Saham dan ISAK 3: Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. Penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif.

Hibah terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat aset. Hibah terkait dengan penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dalam pos umum seperti "penghasilan lain-lain" atau alternatif pengurang dalam beban terkait. Hibah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum, mensyaratkan manajemen untuk memakai estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan dalam periode mendatang mungkin didasarkan atas jumlah-jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi", yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud dan penyisihan untuk piutang. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

3. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Kas	183.925.904	189.469.748
Bank		
Pihak Berelasi		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	97.880.105.993	4.652.564.844
PT Bank Jabar Banten Tbk	1.013.938.428	356.476.633
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.285.645.071	963.195.298
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	141.582.538	702.082.538
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	51.861.052.904	4.192.935.828
Valas		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2017 : USD 10.050.343,8	136.162.057.802	
2016 : USD 5.833.970,3		78.385.224.951
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2017 : EUR 744.988,86	12.049.166.726	
2016 : EUR 5.596.645,06		79.257.168.849
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
2017 : USD 2.045.219,81	27.708.637.986	
2016 : USD 45.068,76		605.543.859
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
2017 : USD 89.836,57	1.217.105.850	
2016 : USD 439.669,57		5.907.400.343
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
2017 : EUR 27.149,4	439.104.079	
2016 : -		-
PT Bank BRI (Persero) Tbk		
2017 : USD 53.043,67	718.635.641	
2016 : USD 51.196,53		687.876.577
	<u>334.477.033.019</u>	<u>175.710.469.720</u>
Sub Jumlah Kas dan Bank	<u>334.660.958.923</u>	<u>175.899.939.468</u>
Setara Kas		
Pihak Berelasi		
<i>Deposit on call</i> - Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	87.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	49.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	10.000.000.000
PT Bank BTN Syariah (Persero) Tbk	15.000.000.000	-
Deposito Berjangka - Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.500.000.000	50.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000.000	24.000.000.000
PT BTN Syariah (Persero) Tbk	-	20.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	-	7.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Taspen Pos	-	5.000.000.000
Deposito Berjangka - Valas		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2017 : USD 471.300,	6.385.172.400	
2016 : USD 471.300,		6.332.386.800
PT Bank Jabar Banten Tbk		
2016 : USD 500.000,		6.718.000.000
jumlah deposito dipindahkan	<u>34.885.172.400</u>	<u>265.050.386.800</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
jumlah deposito pindahan	34.885.172.400	265.050.386.800
Pihak Ketiga		
Deposito Berjangka - Rupiah		
PT Bank Mega	-	7.000.000.000
Sub Jumlah Setara Kas	<u>34.885.172.400</u>	<u>272.050.386.800</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>369.546.131.323</u>	<u>447.950.326.268</u>
Tingkat Bunga Deposito :		
- <i>Deposit On Call</i> - Rupiah	3,50% - 4,00 %	4,25 % - 5,50 %
- Deposito Berjangka : Rupiah	6,00%	6,75% - 8,75%
Valas	0,50 %- 1,50 %	0,50% - 1,25%

4. PIUTANG USAHA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pelanggan Dalam Negeri		
Pihak Berelasi		
PT Rajawali Nusantara Indonesia	5.307.142.900	6.991.961.405
PT Indofarma Global Medika	3.561.885.745	5.288.616.407
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	345.444.602	898.855
Jumlah	<u>9.214.473.247</u>	<u>12.281.476.667</u>
Pihak Ketiga		
PT Merapi Utama Pharma	8.406.421.739	9.184.354.665
PT Sagi Capri	8.287.776.967	5.207.137.650
PT Pamor Baru	225.000.000	250.000.000
Aventis Pharma	464.200.400	137.220.000
Jumlah	<u>17.383.399.106</u>	<u>14.778.712.316</u>
Sub Jumlah	<u>26.597.872.353</u>	<u>27.060.188.983</u>
Pelanggan Luar Negeri		
Pihak Ketiga		
UNICEF		
2017 : USD 5.816.952,50	78.808.072.470	
2016 : USD 955.950,00		12.844.144.200
Bionet		
2017 : USD 13.219.267,15	179.094.631.348	
2016 : USD 18.061.019,50		242.667.858.002
Universal - Exim		
2017 : USD 1.682.450,00	22.793.832.600	
2016 : USD 425.950,00		5.723.064.200
BIOLOGICAL E LIMITED		
2017 : USD 403.760,00	5.470.140.480,00	-
PANACEA		
2017 : USD 115,00	1.558.020,00	-
Sub Jumlah	<u>286.168.234.918</u>	<u>261.235.066.402</u>
J a s a	<u>737.513.392</u>	<u>677.179.559</u>
Jumlah	<u>313.503.620.663</u>	<u>288.972.434.944</u>
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai	365.343.156	346.011.041
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>313.138.277.507</u>	<u>288.626.423.903</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tahun) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sampai dengan 1 Tahun	313.137.291.250	288.580.853.841
> 1 s.d. 2 Tahun	17.816.260	18.037.702
> 2 s.d. 3 Tahun	225.492.710	281.137.679
> 3 s.d. 4 Tahun	29.796.419	83.874.024
Lebih dari 4 Tahun	93.224.024	8.531.697
Jumlah	313.503.620.663	288.972.434.944

Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Awal	346.011.041	312.622.025
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	19.456.433	49.865.427
Penghapusan Tahun Berjalan	(124.318)	(16.476.412)
Saldo Akhir	365.343.156	346.011.041

Piutang usaha senilai Rp35 miliar dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/38/2017 tanggal 15 Juni 2017 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juni 2018 (catatan 38.m).

Piutang usaha senilai Rp 250 miliar dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit modal kerja (KMK) yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 19 Desember 2017 dan surat No. R.II.126-ADK.DKR-2/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 untuk jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2018 (catatan 38.o).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang.

Adanya hubungan berelasi mungkin mengakibatkan persyaratan transaksi tersebut di atas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pihak Berelasi :		
Piutang PT Iglas (Persero)	1.302.637.458	1.302.637.458
Pihak Ketiga :		
Piutang Lainnya	121.769.028	446.140.212
Jumlah	1.424.406.486	1.748.777.670
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai	(1.302.637.458)	(1.302.637.458)
Jumlah Piutang Lain-Lain	121.769.028	446.140.212

6. PERSEDIAAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Bahan Baku/ Penolong	212.600.886.226	272.003.212.496
Perlengkapan	767.989.350	756.064.386
Produk Dalam Proses	461.660.017.021	357.924.068.324
Produk Jadi	39.939.698.457	81.857.215.656
Trading Partnership	2.253.854.786	1.077.050.535
Jumlah	717.222.445.840	713.617.611.397
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	4.310.484.908	5.053.143.454
Jumlah Persediaan-Bersih	712.911.960.933	708.564.467.943

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Awal	5.053.143.454	5.891.672.358
Pembebanan Tahun Berjalan	4.396.564.267	3.366.831.466
Pemulihan Tahun Berjalan	(5.139.222.813)	(4.205.360.370)
Saldo Akhir	4.310.484.908	5.053.143.454

Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kedaluwarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan-aktual dibebankan ke beban (penghasilan) lain. Penyisihan dilakukan atas saldo persediaan yang telah dikurangkan dengan yang rusak atau kedaluwarsa.

Persediaan tahun 2017 telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Polis No.017-E/T/BmdBdg/III2017); PT Mandiri AXA General Insurance (Polis No. CN/PAR/BDG-00248/032017/NDN), PT Asuransi Jasa Tania (Polis No. 000037/KP/KCDBG/III/2017), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Polis No.01/BF/PAR-PRS/III/2017) terhadap semua risiko kecuali gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu untuk periode pertanggungan 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2018 dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp365.591.333, Rp111.186.417, Rp246.860.574 dan Rp232.773.678. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian.

Persediaan barang senilai Rp 60 miliar dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/38/2017 tanggal 15 Juni 2017 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juni 2018.

Persediaan barang senilai Rp 300 miliar dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit modal kerja (KMK) yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk jangka waktu sampai dengan 19 Desember 2017 dan No. R.II.126-ADK.DKR-2/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 untuk jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2018 (catatan 38.n & 38.o).

7. UANG MUKA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pembelian Lokal	3.547.564.020	2.205.788.311
Pembelian Barang Impor	22.119.373.593	42.995.436.451
Impor Dalam Penyelesaian	566.425.191	7.471.766.551
Uang Muka Kaca Mata	-	1.700.000
Uang Muka Monitoring	1.410.000.000	1.250.000.000
Uang Muka Diklat	67.000.000	90.500.000
Uang Muka Lainnya	24.000.000	37.100.000
Jumlah	27.734.362.805	54.052.291.312

Uang Muka pembelian lokal sebesar Rp3.547.564.020 terutama dari Pembangunan Fasilitas *Downstream* Produksi Vaksin BCG sebesar Rp1.617.525.420 dan Pembangunan Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan Produk Dalam Kemasan Profile Syringe di Area sebesar Rp1.174.530.000.

Uang muka pembelian barang impor terdiri dari :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- <i>Freeze Alert Profile 157; 20,000 pcs Vaxalert Type 1 & 10,000 pcs Type 2</i>	6.071.454.912	-
- CS 40 With U Caps -Case Of 2 Pieces - Getinge singapore	4.466.369.160	-
- <i>20% for one (1) set Filling Syringe Machine_Inv 170370 PO-14060</i>	4.085.456.412	-
- HEATmarker VVM30 Dot	1.578.125.232	-
- <i>Underpayment of Service Fee Invoice</i>	1.382.844.510	-
- 30% of 2.008 liters CS-IF-1D Iron Fortified Calf-Serum etc	1.371.100.954	-
- Autoclave Sterilizations for SPF Animal	1.696.506.639	1.122.510.680
- Vaksin MENINGITIS ACYW 0,5 ML	-	4.010.527.763
- Fermentor 150 L (volume 207 L) Complete With Accessories	-	3.835.010.608
jumlah dipindahkan	20.651.857.819	8.968.049.051

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

7. UANG MUKA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Uang muka pembelian barang impor terdiri dari :		
jumlah dipindahkan	20.651.857.819	8.968.049.051
- 20% of Upstream Tetanus Toxoid Vaccine Production Equipment	-	24.046.311.900
- Heatmarker VVM2 for OPV-Temptime	-	2.080.865.701
- Antibody to Poliovirus Type1-3	-	4.039.000.000
- Pembelian lainnya (dibawah 1 miliar)	1.467.515.775	3.861.209.799
	<u>22.119.373.593</u>	<u>42.995.436.451</u>

Uang Muka Impor dalam penyelesaian sebesar Rp 566.425.191 merupakan pembayaran biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya inkling, dan pajak terkait proses penanganan barang impor dari pelabuhan dalam negeri ke lokasi

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	199.225.676.163	225.907.519.874
Pungutan/Potongan PPN Keluaran WAPU	5.561.014.882	-
PPH Pasal 22	-	467.020.625
Estimasi PPh Badan	155.161.335.095	72.442.448.878
Jumlah	<u>359.948.026.140</u>	<u>298.816.989.377</u>

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2017 sebesar Rp199.225.676.163 setelah memperhitungkan restitusi PPN Masa pajak Bulan Februari Tahun 2017 sebesar Rp6.859.852.977 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80358/051-00358-2017 tanggal 9 November 2017, restitusi PPN Masa pajak Bulan Maret Tahun 2017 sebesar Rp11.441.397.822 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80358/051-00359-2017 tanggal 9 November 2017, restitusi PPN Masa pajak Bulan April Tahun 2017 sebesar Rp3.230.018.592,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80358/051-00360-2017 tanggal 9 November 2017, restitusi PPN Masa pajak Bulan Mei Tahun 2017 sebesar Rp10.750.315.827 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80358/051-00367-2017 tanggal 16 November 2017, restitusi PPN Masa pajak Bulan Juni Tahun 2017 sebesar Rp18.730.817.739,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80358/051-00361-2017 tanggal 10 November 2017, restitusi PPN Masa Maret 2015 sebesar Rp26.819.788.146 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 00060/407/15/051/16 tanggal 22 Desember 2016, restitusi PPN Masa pajak Juni 2015 sebesar Rp31.758.428.878 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 00005/407/15/051/17 tanggal 25 Januari 2017, restitusi PPN Masa pajak Oktober – Desember 2017 Rp33.512.573.869 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor.80162/051-00162-2017 dan restitusi PPN Masa pajak Juli – September 2017 Rp24.509.445.759 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor.80133/051-00133-2017.

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2016 sebesar Rp225.907.519.874,07 setelah memperhitungkan restitusi PPN Masa pajak Juli sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp41.919.562.727,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80054/051-00054-2016 tanggal 4 Januari 2016; restitusi PPN Masa pajak Januari sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp40.195.806.361,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80055/051-00055-2016 tanggal 10 Pebruari 2016; restitusi PPN Masa pajak September 2014 sebesar Rp17.784.958.518,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.00019/4071/14/051/2016 tanggal 21 Maret 2016 dan restitusi PPN Masa pajak Desember 2014 sebesar Rp24.891.987.705,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80392/051-00392-2016 tanggal 13 September 2016.

b. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
PPN Wapu	12.985.314.722	8.578.384.336
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)	261.872.244	302.413.308
Pajak Penghasilan Pasal 21	43.541.965.863	17.987.801.926
Pajak Penghasilan Pasal 22	702.243.000	407.189.034
Pajak Penghasilan Pasal 23	309.718.290	183.631.313
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	20.164.941.321
Jumlah	<u>57.801.114.118</u>	<u>47.624.361.238</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pajak Kini	(194.907.187.750)	(185.425.250.000)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	6.628.937.923	1.498.194.382
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(188.278.249.827)	(183.927.055.618)

d. Rekonsiliasi antara laba komersial dan laba fiskal :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	713.633.859.989	684.968.045.702
Beda Waktu		
Beban imbalan pasca kerja	25.565.469.092	6.797.917.415
Penyisihan penurunan nilai piutang	19.332.115	33.389.016
Penyisihan nilai persediaan	930.950.483	(838.528.904)
Jumlah Beda Waktu	26.515.751.690	5.992.777.527
Beda Permanen		
Tantiem	14.782.500.218	13.275.000.000
Koreksi pajak dan denda pajak	5.576.669.070	10.924.295.638
Penghargaan dalam bentuk barang	1.054.924.200	1.112.146.820
Sumbangan sosial masyarakat	7.247.403.752	13.358.249.158
Bantuan sosial karyawan, Direksi dan Dekom	7.937.060.217	10.530.780.335
Beban HUT Perusahaan, olah raga & paket ramadhan	2.896.408.604	4.166.338.898
Tunjangan Komunikasi Direksi (50%)	38.374.123	58.684.399
Beban Jamuan Tamu Perusahaan	2.081.747.859	3.691.586.542
Company Profile, Kalender, Agenda & Peliputan	354.649.525	-
Langganan perpustakaan & surat kabar	95.525.000	85.896.000
Beban promosi yang tidak dapat dibiayakan	620.277.273	401.303.977
Bunga jasa giro dan deposito yang dikenakan PPh Final	(3.108.077.683)	(6.820.215.334)
Penyusutan Mobil Non Direksi	133.114.746	177.486.328
Sewa ruangan dan bagi hasil yang dikenakan PPh Final	(231.437.500)	(221.375.000)
Jumlah Beda Permanen	39.479.139.404	50.740.177.761
Laba Kena Pajak	779.628.751.084	741.701.000.989
Taksiran Beban Pajak Penghasilan Badan		
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	779.628.751.000	741.701.000.000
25 % x Rp781.587.787.000	194.907.187.750	
25 % x Rp741.701.000.000		185.425.250.000
Jumlah	194.907.187.750	185.425.250.000
Dikurangi : Pajak Dibayar Dimuka		
Pasal 22	32.913.093.693	15.825.799.593
Pasal 23	56.504.162	62.603.433
Pasal 25	244.656.476.112	241.979.295.852
	277.626.073.967	257.867.698.878
Estimasi Pajak Penghasilan Badan (Lebih) Kurang Bayar	(82.718.886.217)	(72.442.448.878)

e. Pajak Tangguhan

Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% dari laba akuntansi sebelum taksiran beban (manfaat) pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 :

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)
e. Pajak Tangguhan

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	713.633.859.989	684.968.045.701
Beban Pajak dengan Tarif Pajak Maksimum	178.408.464.997	171.242.011.425
Pengaruh Pajak atas Beda Permanen	<u>9.869.784.830</u>	<u>12.685.044.193</u>
Beban Pajak Perusahaan	188.278.249.827	183.927.055.618
Beban Kini	<u>194.907.187.750</u>	<u>185.425.250.000</u>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	<u>(6.628.937.923)</u>	<u>(1.498.194.382)</u>

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dari dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan sebagai berikut:

	Dibebankan ke		Dibebankan ke		
	2015	Laba Rugi Komprehensif	2016	Laba Rugi Komprehensif	
Aset Pajak Tangguhan					
Imbalan Kerja	20.210.095.554	1.699.479.354	21.909.574.908	6.391.367.273	28.300.942.181
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	403.814.871	8.347.254	412.162.125	4.833.029	416.995.153
Penyisihan Persediaan	1.472.918.089	(209.632.226)	1.263.285.863	232.737.621	1.496.023.484
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	<u>22.086.828.515</u>	<u>1.498.194.382</u>	<u>23.585.022.896</u>	<u>6.628.937.923</u>	<u>30.213.960.819</u>

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Asuransi	7.385.114.091	3.120.461.278
Sewa	5.088.516.667	9.016.048.583
Jumlah	<u>12.473.630.758</u>	<u>12.136.509.861</u>

Asuransi dibayar dimuka terdiri dari :

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
- asuransi karyawan	346.208.417	156.937.288
- asuransi persediaan	159.402.100	175.199.558
- asuransi kebakaran bangunan & aset tetap didalamnya	6.851.822.718	2.780.127.930
- asuransi kendaraan	<u>27.680.856</u>	<u>8.196.503</u>
	<u>7.385.114.091</u>	<u>3.120.461.278</u>

Saldo Sewa dibayar di muka per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.088.516.666,92 terutama berasal dari bagian lancar sewa dibayar dimuka yang jatuh tempo di tahun 2017 atas lahan Barang Milik Negara (BMN) aset eks BPPN di Jasinga Bogor sebesar Rp20.821.344.000 dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun. Perusahaan berencana menggunakan tanah tersebut sebagai persiapan rencana pengembangan bisnis perusahaan ke arah life science. Perusahaan melakukan kegiatan CSR di wilayah Jasinga sebagai jaring pengaman sosial seperti access to medicine dan pengolahan air bersih, sehingga diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat menerima keberadaan PT Bio Farma (Persero).

Berdasarkan analisis lebih lanjut, Perusahaan menghentikan rencana pengambilalihan lahan Jasinga dengan pertimbangan:

- Terdapat pihak-pihak yang menggarap dan menguasai lahan tersebut secara ilegal, sehingga Perusahaan akan sulit dalam melakukan penguasaan lahan.
- Aspek teknis lahan terutama ketersediaan air yang rendah dan belum memenuhi kebutuhan sebagai life science park.
- Proses perizinan yang sulit didapatkan dan kemungkinan munculnya risiko hukum lainnya.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum memenuhi persyaratan sebagai kawasan industri, sehingga sulit untuk mendapatkan izin industri.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

Asuransi dibayar di muka tersebut merupakan saldo premi asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), BNI Life, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

10. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Bunga Deposito	13.994.095	463.705.026
Sewa dan Bagi hasil	-	221.375.000
Pendapatan Lainnya YMA diterima	-	114.977.985
	13.994.095	800.058.011

11. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Persediaan dalam Perjalanan	-	3.235.039.000
Persediaan dalam Karantina	166.520.427.315	34.387.620.196
Persediaan Dalam Proses Penggantian	1.677.961.312	539.537.034
Jumlah	168.198.388.626	38.162.196.231

Persediaan dalam karantina berasal dari pembelian bahan baku vaksin dan sera dan bahan perkemasan yang sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masih dalam status karantina karena sedang dalam proses pengujian (lihat catatan 2i).

Persediaan Dalam Proses Penggantian per 31 Desember 2017 terutama dari persediaan bahan kemasan yang dinyatakan tidak lulus uji.

12. ASET TETAP

	31 Desember 2017				Saldo Akhir 31 Desember 2017
	Saldo Awal 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	
Biaya Perolehan					
Tanah	2.059.183.000.000	40.267.724.575	-	-	2.099.450.724.575
Bangunan	631.496.070.678	210.100.000	-	92.927.616.780	724.633.787.458
Peralatan Mesin & Pabrik	1.277.104.717.501	51.840.821.026	-	45.395.716.834	1.374.341.255.360
Peralatan Kantor	130.023.223.543	12.664.403.205	-	780.000.000	143.467.626.748
Peralatan Utilitas	98.139.095.695	810.909.000	-	7.378.393.100	106.328.397.795
Kendaraan Bermotor	4.700.933.750	-	-	-	4.700.933.750
Aset dalam Pembangunan					
Bangunan	281.524.373.167	51.126.018.984	-	(92.927.616.780)	239.722.775.371
Peralatan Mesin, Pabrik Kantor dan Utilitas	500.840.232.644	342.859.930.794	-	(53.554.109.934)	790.146.053.504
Aset Tetap dalam Perjalanan					
Peralatan Mesin, Pabrik, Kantor dan Utilitas	-	44.741.257.122	-	-	44.741.257.122
Jumlah	4.983.011.646.978	544.521.164.705	-	-	5.527.532.811.682
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai					
Bangunan	178.620.094.413	33.930.942.056	-	-	212.551.036.469
Peralatan Mesin & Pabrik	668.202.004.521	88.196.169.891	-	-	756.398.174.412
Peralatan Kantor	92.179.926.332	18.571.481.697	-	-	110.751.408.029
Peralatan Utilitas	41.617.915.932	7.569.778.498	-	-	49.187.694.430
Kendaraan Bermotor	4.204.609.449	208.927.780	-	-	4.413.537.230
Jumlah	984.824.550.647	148.477.299.923	-	-	1.133.301.850.570
Nilai Buku	3.998.187.096.331				4.394.230.961.112

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2016				
	Saldo Awal 1 Januari 2017 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	Saldo Akhir 31 Desember 2016
Biaya Perolehan					
Tanah	2.059.183.000.000	-	-	-	2.059.183.000.000
Bangunan	557.669.974.701	-	-	73.826.095.977	631.496.070.678
Peralatan Mesin & Pabrik	1.186.837.114.721	81.796.646.030	-	8.470.956.750	1.277.104.717.501
Peralatan Kantor	110.847.807.836	15.055.718.100	-	4.119.697.607	130.023.223.543
Peralatan Lainnya	70.318.621.945	1.426.000.000	-	26.394.473.750	98.139.095.695
Kendaraan Bermotor	4.670.890.000	30.043.750	-	-	4.700.933.750
Aset dalam Pembangunan					
Bangunan	241.052.601.947	114.297.867.194	-	(73.826.095.977)	281.524.373.167
Peralatan Mesin, Pabrik, Kantor dan Utilitas	219.971.521.489	319.853.839.260	-	(38.985.128.107)	500.840.232.644
Jumlah	4.450.551.532.639	532.460.114.334	-	-	4.983.011.646.978
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai					
Bangunan	148.287.188.859	30.332.905.554	-	-	178.620.094.413
Peralatan Msin & Pabrik	587.905.586.503	80.296.418.018	-	-	668.202.004.521
Peralatan Kantor	70.918.026.467	21.261.899.865	-	-	92.179.926.332
Peralatan Lainnya	34.201.520.496	7.416.395.436	-	-	41.617.915.932
Kendaraan Bermotor	3.702.196.345	502.413.104	-	-	4.204.609.449
Jumlah	845.014.518.670	139.810.031.977	-	-	984.824.550.647
Nilai Buku	3.605.537.013.969				3.998.187.096.331

Rincian Aset Dalam Pelaksanaan :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Bangunan Dalam Pelaksanaan :		
Gedung Fasilitas Produksi Vaksin & Pengemasan	184.575.974.155	183.611.624.155
Fasilitas Downstream Vaksin BCG	20.909.603.900	-
Sentral Hewan Laboratorium - Animal House 2 (SHL-AH2) Building	7.677.061.500	7.677.061.500
Piping & Utilities Fasilitas Vaksin Rekombinan (Gedung 16)	7.280.133.300	-
Pembangunan Fasprod Vaksin Dan Pengemasan <i>Prefilled Syringe</i>	6.323.525.000	-
Bangunan Utility untuk Proyek Modular Campak Biofarma - Cisarua	3.886.220.000	-
Gedung Fasilitas Gedung No.3 (Media, Surveillance, Pengujian Mutu)	2.589.471.250	1.329.758.750
Gedung Produksi Vaksin Dan Pengemasan Tahap II	2.310.138.636	-
Pembangunan Fasilitas Pengembangan Produk Pilot Scale (Gd No.34)	1.571.187.500	-
Building Control System Gedung No.16	1.423.142.100	-
Gedung Fasilitas Vaksin Rekombinan Berbasis Yeast (Gedung No. 16)	-	27.327.274.842
Gedung Learning and Development Center	1.037.715.095	-
Ruang Penyimpanan Barang dan Spareparts Produksi Vaksin Campak	-	1.020.964.200
Fasilitas Downstream Vaksin BCG	-	1.516.467.750
Renovasi Gedung Distribusi	-	48.370.120.838
Renovasi Ruang BSL2	-	8.957.375.500
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	138.602.934	1.713.725.632
jumlah	239.722.775.371	281.524.373.167

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Mesin, Pabrik, dan Utility Dalam Pelaksanaan :		
Integrated Filling Line 3	191.131.123.914	-
Filling Line BCG	119.400.375.374	119.362.615.929
Integrated WTP	101.996.896.326	101.996.896.326
Upstream Integrasi Tetanus	73.279.800.675	-
Downstream Tetanus	60.640.610.404	-
Integrated Filling Line For Filling Line 4	51.880.090.181	51.723.952.481
Utilitas Listrik Gedung Vaksin dan Pengemasan	42.307.948.720	35.042.536.070
Packaging Line	36.135.620.717	36.348.107.363
Autoclave	23.090.505.560	13.086.111.746
Vial Ampoule Packaging Line	18.407.202.364	18.349.032.204
Fermentor	17.583.040.459	-
Formulation Equipment	13.974.936.470	-
Separator	10.773.631.000	-
CEDI+Tangki Feed dan Permeated RO	5.928.351.242	-
Isolator	4.129.665.128	4.129.665.128
Upgrade mixing Vessel	3.286.392.272	-
Bioreactor 150L	3.261.929.763	3.261.929.763
Integrated Continous Monitoring Particle & Remote Microbia	3.051.000.000	-
Peremajaan Listrik Gedung 33	2.100.080.000	-
URS SIPV	1.568.756.550	1.568.756.550
Aset Pabrik/ Mesin/ Utility/ Kantor Eks. IHU	1.441.702.625	1.441.702.625
FFF URS Documents FPVP	1.063.601.200	1.063.601.200
Integrated Filling Line 3 Vial For Lyo (M) MR Vaccinne (Gedung 43)	-	93.475.499.356
Sistem Kromatografi Kolom	-	8.001.000.000
Water Chiller	-	5.977.245.025
TFF System	-	1.855.000.000
Gardu Hubung PLN	-	1.673.341.150
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	3.712.792.558	2.483.239.728
jumlah	790.146.053.504	500.840.232.644

Bangunan Dalam Pelaksanaan berupa Gedung Learning and Development Center (LDC) senilai Rp1.037.715.095,00 merupakan Pekerjaan Konsultan Perencana yang sudah mencapai 85%. Berdasarkan prioritas dan fungsi strategis maka pelaksanaan pembangunan Gedung LDC dilakukan penundaan atau reschedule.

Pada tahun 2009 perusahaan menyediakan lahan untuk digunakan sebagai fasilitas vaksin flu burung oleh Departemen Kesehatan RI. Lahan tersebut berlokasi di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat seluas 5.145 m² dan di Jalan Pasteur seluas 3.953 m². Sejak tahun 2011 proyek tersebut terhenti dan sampai dengan tanggal laporan ini lahan tersebut masih tertutup dan belum dapat digunakan oleh Perusahaan.

Sebagian aset tetap yang terdiri atas mesin, inventaris dan peralatan pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung senilai Rp180.000.000.000 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berdasarkan berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No.PBD/SP3/38/2017 tanggal 15 Juni 2017 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juni 2018 (catatan 38.m.)

Sebagian aset tetap yang terdiri atas mesin, inventaris, dan peralatan pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung senilai Rp265.000.000.000,00 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas KMK sub limit non cash loan dan fasilitas non cash loan untuk penerbitan LC impor/SKDN (Sight, Usance & UPAS)/BG dengan sub limit trust receipt, fasilitas treasury line dan purchasing line dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.CB1/SPPK/SPD.003/2016 tanggal 24 Mei 2016 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Agustus 2017 (catatan 38.k.)

Sebagian aset tetap yang terdiri atas mesin, inventaris, dan peralatan pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung senilai Rp 430.000.000.000,00 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit modal kerja ekspor (KMKE) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.WBG.CB1/SPPK/016/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Agustus 2018 (catatan 38.l.)

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset takberwujud terdiri atas aset takberwujud dalam penyelesaian dan aset takberwujud setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengembangan Upstream Vaksin Flu dicatat sebagai aset takberwujud sesuai Nota Dinas No.09698/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang sampai dengan tanggal laporan masih dalam penyelesaian. Biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan penerapan temuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan bulk, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut.

Biaya Pengembangan Upstream Vaksin Flu Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.031.886706,31 merupakan biaya yang terkait dengan transfer teknologi upstream flu dengan BIKEN - Jepang yang meliputi aktivitas pengembangan vaksin flu pada skala pilot (5000 telur), optimalisasi proses produksi pada skala pilot untuk menghasilkan yield (hasil) yang ekonomis, produksi preclinical lot, uji pra klinis (uji immunogenisitas pada hewan coba mencit), hingga produksi clinical lot untuk vaksin flu pre-pandemik, ujiantang (challenge study) pada hewan uji ferret dan uji preklinis immunogenicity.

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018 untuk vaksin flu (pre-pandemik) meliputi Uji klinis fase 2 dan 3 serta lisensi/registrasi produk ke BPOM.

Biaya pengembangan Upstream Vaksin Flu ini akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun sejak vaksin tersebut diproduksi secara komersial.

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Beban Tangguhan	9.024.791.000	9.024.791.000
Dikurangi :		
Akumulasi Amortisasi Beban Tangguhan	(5.688.770.125)	(3.869.122.375)
Jumlah Beban Tangguhan Bersih	3.336.020.875	5.155.668.625
Setoran Jaminan	3.288.940.496	3.288.940.496
Sewa Dibayar Dimuka	-	4.048.594.667
Persediaan tidak produktif	1.673.609.030	-
Dikurangi :		
Akumulasi Amortisasi Persediaan Tidak Produktif	(1.673.609.030)	-
Persediaan Bulk OPV Tipe 2	21.770.130.921	-
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya Bersih	<u>28.395.092.292</u>	<u>12.493.203.788</u>

Beban tangguhan merupakan biaya sistem jaringan listrik PLN ditangguhkan yang diamortisasi selama 4 tahun.

Setoran jaminan merupakan jaminan yang diberikan untuk penambahan daya listrik, jaminan sewa gedung Pakarti Center (Kantor Perwakilan Perusahaan) dan jaminan gas elpiji.

Pada tanggal pelaporan 31 Desember 2017 seluruh nilai tercatat persediaan OPV tipe 2 dalam bentuk bulk (2.882,5 liter, setara 568.200.000 dosis) direklasifikasi dari akun persediaan sehubungan dengan keputusan World Health Organization (WHO) yang mendeklarasikan penghentian, penggunaan, pengedaran, penyimpanan dan produksi vaksin polio tipe 2 (trivalent Oral Polio Vaccine/tOPV) secara global dan menggantinya dengan bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Atas putusan tersebut Manajemen telah mengambil langkah-langkah menghentikan produksi tOPV dan bulk OPV tipe 2 serta menarik dari peredaran dan menggantinya dengan bOPV. Manajemen menetapkan untuk tetap menyimpan persediaan bulk OPV tipe 2 hingga daluwarsa dan mencatatnya sebesar biaya perolehan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Adanya permintaan dari Unicef kepada PT Bio Farma untuk menyimpan OPV tipe 2 sebanyak 500 juta dosis.
- b. Sebagai cadangan untuk mendukung program Pemerintah jika terjadi outbreak atau wabah polio tipe 2, mengingat Indonesia masih berisiko tinggi terjadi outbreak atau wabah polio tipe 2.
- c. Untuk keperluan produksi sIPV pada tahun 2021 dan pengembangan vaksin Polio Oral baru menggunakan strain baru virus Polio tipe 2 (nOPV2);
- d. Berdasarkan kajian pengukuran nilai persediaan pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan aspek kegunaan (butir a sampai dengan d) serta nilai transaksi-transaksi yang dilakukan Unicef dalam tahun 2017, disimpulkan bahwa nilai tercatat sebesar biaya perolehan Rp21.770.130.921 telah mencerminkan nilai realisasi netonya.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan bulk OPV tipe 2 sebesar Rp21.770.130.921,20 telah mencerminkan nilai realisasi bersih (netto) setelah mempertimbangkan aspek kegunaan dan mengkaji jumlah kebutuhannya di masa depan sesuai dengan butir a, b, c, dan d di atas.

15. UTANG USAHA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pihak Berelasi		
Bahan Baku/Penolong	14.188.380.308	14.523.438.820
Investasi	3.361.697.625	10.581.424.945
	<u>17.550.077.933</u>	<u>25.104.863.765</u>
Pihak Ketiga		
Bahan Baku/Penolong	227.735.251.361	98.449.962.062
Investasi	118.052.474.259	122.288.208.901
Pengadaan Jasa	7.914.720.921	13.391.431.334
	<u>353.702.446.540</u>	<u>234.129.602.297</u>
Jumlah Utang Usaha	<u>371.252.524.473</u>	<u>259.234.466.062</u>
Rincian Pihak Berelasi	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Bahan Baku/Penolong		
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	7.160.314.918	12.735.214.926
PT Pertamina (Persero)	3.405.240.000	-
CV Karya Cahya Abadi	2.078.620.517	1.627.232.908
PT Telkom (Persero) Tbk.	1.350.000.000	-
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	194.204.873	160.990.986
Jumlah	<u>14.188.380.308</u>	<u>14.523.438.820</u>
Investasi		
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	3.019.432.690	2.133.994.250
CV Karya Cahya Abadi	342.264.935	25.000.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	-	8.351.209.045
PT INTI	-	71.221.650
Jumlah	<u>3.361.697.625</u>	<u>10.581.424.945</u>
Rincian Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rincian Utang Bahan Baku/Penolong - Rupiah		
PT Sagi Capri	32.763.500.000	-
PT ELO KARSA UTAMA	4.864.938.625	-
CV Sinar Gemilang	3.684.009.200	1.992.623.000
CV Surya Tehnik	3.568.802.442	1.488.584.780
PT Sabil Huda Utama	3.315.101.214	1.631.131.916
CV EMS	2.345.830.801	3.475.630.740
PT INQUATEX	1.857.600.000	-
CV POP GRAFIKA	1.853.986.000	2.715.756.250
PT Bakti Mega Lestari	1.625.000.000	4.447.207.500
PT Pall Filtration Indonesia	1.570.420.295	2.285.820.700
PT TRAKINDO UTAMA	1.550.307.422	-
PT Schott Igar Glass	-	1.034.760.436
PT Sciencewerke	1.368.520.010	-
PT Global Satria Aji	1.326.353.140	-
PT Fluida Teknik	1.055.995.050	-
PT Daisitek Manufaktur	1.053.263.270	-
jumlah dipindahkan	<u>63.803.627.469</u>	<u>19.071.515.322</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rincian Utang Bahan Baku/Penolong (lanjutan)		
jumlah pindahan	63.803.627.469	19.071.515.322
Monang Sianipar	1.003.160.150	-
SANOFI	-	3.000.000.000
PT Menjangan Sakti	-	1.124.937.755
PT INQUATEX	-	1.324.400.000
PT MGI ASIA PACIFIC	-	4.937.337.045
PT Merck Sharp & Dohme Indonesia	-	5.507.502.934
PT MES PROPHARMA	-	1.552.865.700
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	17.793.681.890	15.718.548.998
Jumlah - Rupiah	<u>82.600.469.509</u>	<u>52.237.107.754</u>
Rincian Utang Bahan Baku/Penolong - Valas		
Janssen Vaccine Corp		
2017 : USD 9.375.124,4	127.014.185.371	
2016 : USD 1.543.017,94		20.731.989.042
BioNet-Asia HONG KONG		
2017 : USD 1.200.000,	16.257.600.000	
BIONET-ASIA CO., LTD.		
2017 : USD 120.000,	1.625.760.000	
Bio Laboratories		
2017 : USD 11.296,48	153.044.711	
NIBSC		
2017 : GBP 2.436,	44.379.072	
BE Vaccines Pte. Ltd.		
2017 : USD 1.680,	22.760.640	
BioReliance		
2017 : GBP 936,	17.052.057	
Temptime		
2016 : USD 123.629,32		1.661.083.544
Sanofi		
2016 : USD 819.000.00		11.004.084.000
Jangsung		
2016 : USD 178,858.80		2.403.146.837
Olympic Star		
2016 : USD 298,491.20		4.010.527.763
Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd		
2016 : EUR 200,000		2.832.310.000
Samsung Medical Rubber Co., Ltd		
2016 : USD 105,500		1.417.498.000
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	-	2.152.215.122
Jumlah - Mata Uang Asing	<u>145.134.781.852</u>	<u>46.212.854.308</u>
Jumlah Pihak Ketiga - Bahan Baku/Penolong	<u>227.735.251.361</u>	<u>98.449.962.062</u>
	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rincian Utang Investasi/Pembelian Aset		
Rupiah		
CV Bhakti Mega Lestari	7.145.660.000	3.329.062.000
PT MGI Asia Pacific	5.113.850.725	-
PT Trakindo Utama	5.016.900.000	-
jumlah dipindahkan	<u>17.276.410.725</u>	<u>3.329.062.000</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

Rincian Utang Investasi/Pembelian Aset (lanjutan)	31 Desember 2017	31 Desember 2016
jumlah pindahan	17.276.410.725	3.329.062.000
PT Niagaraasri Karyatama	4.967.150.977	-
PT Sinar Inti Panel	4.701.880.000	-
PT Chandra Karya Nusa	3.532.955.700	1.462.636.423
PT Catudaya Data Prakasa	2.510.989.000	-
PT Azbil Berca Indonesia	1.923.142.100	-
PT Karunia Alamindo Utama	1.906.100.000	-
PT Vision Teknik	1.875.000.000	-
PT CELCO TEKNIK INDUSTRI	1.856.255.000	-
PT Prima Instrument Analitika	1.756.000.000	-
PT Sabil Huda Utama	1.152.065.225	5.713.952.750
PT Santosa Jatisari Kusumah	-	5.064.150.000
CV Sinar Gemilang	-	5.343.660.500
PT Sigma Bimed	-	2.041.485.000
PT Fluida Teknik	-	2.118.722.500
PT Multi Artha Sehati	-	4.195.000.250
CV Gratia Tifarindo	-	2.997.300.000
PT Pall Filtration	-	1.325.000.000
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	9.833.983.234	7.761.084.605
Jumlah - Rupiah	<u>53.291.931.961</u>	<u>41.352.054.028</u>
Valas		
MARCHESINI GROUP S.P.A		
2017 : EUR 1.701.364,46	27.517.222.258	
Adam Fabrivwek P Ltd		
2017 : USD 1.098.000,	14.875.704.000	
Applikon Biotechnology		
2017 : EUR 806.175,	13.038.768.104	
Pneumatic Scale Angelus		
2017 : USD 505.750,	6.851.901.000	
Getinge		
2017 : EUR 69.670,	1.126.816.105	
PURETECH PROCESS SYSTEM LTD.		
2017 : GBP 34.000,	619.412.340	
Zirbus Technology GmbH		
2017 : EUR 33.131,35	535.853.865	
MGI		
2017 : EUR 12.048,30	194.864.626	
2016 : EUR 4.671.596,11		66.073.254.231
Azbil Telstar Technologies, S.L.U		
2016 : EUR 797.500,		11.293.836.125
Melchers Techexport GmbH		
2016 : CHF 270.840		3.569.064.517
Jumlah - Mata Uang Asing	<u>64.760.542.297</u>	<u>80.936.154.874</u>
Jumlah Pihak Ketiga - Investasi	<u>118.052.474.259</u>	<u>122.288.208.901</u>
Pengadaan Jasa		
Jasa Audit Manajemen dan Riset	6.738.630.725	8.262.850.330
Biaya Impor	1.176.090.196	5.128.581.004
Jumlah Pengadaan Jasa	<u>7.914.720.921</u>	<u>13.391.431.334</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Karyawan dan lainnya	5.142.407.893	19.663.061.885
Jasa Produksi Karyawan	79.080.306.646	75.290.000.000
Beban Angkutan dan Embalage	2.639.339.438	2.449.122.398
Jasa Profesional	1.036.774.754	1.358.453.255
Keagenan Ekspor, Royalti & Insentif Penjualan Kantor	10.706.534.275	7.985.174.769
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	9.253.711.680	5.689.177.303
	-	970.218.637
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	107.859.074.686	113.405.208.247

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Swasta	97.054.169	44.130.371
Ekspor	910.722.301	-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	1.007.776.471	44.130.371

18. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Titipan Potongan Karyawan	-	165.872.829
Tantiem	30.538.249.501	18.849.515.000
Taksasi Ongkos Angkut dan Embalage	10.490.052.968	12.937.959.640
Lainnya	606.729.508	907.462.156
Jumlah Liabilitas Lancar Lainnya	41.635.031.977	32.860.809.624

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menerapkan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Selain itu Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan kontrak ke dalam program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya.

Uraian berikut ini merupakan rangkuman perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tahun 2017 dan 2016 yang diakui pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan per 31 Desember 2017 dilakukan berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2017 yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria dalam laporannya tanggal 29 Desember 2017 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Beban Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Jasa Kini	14.394.931.921	10.891.724.096
Beban Bunga	13.064.543.848	13.833.995.459
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian Pembayaran GSH (beban langsung)	-	(12.436.507.984)
	-	5.041.776.979
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	27.459.475.769	17.330.988.550

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja	167.133.074.162	152.021.928.119
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	-	(12.436.507.984)
Dampak Perubahan Asumsi Aktuarial	31.811.337.218	10.121.564.306
Beban Jasa Kini	14.394.931.921	10.891.724.096
Beban Bunga	13.064.543.848	13.833.995.459
Pembayaran GSH	-	(5.491.294.156)
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Periode Berjalan	(1.894.006.678)	-
Laba (Rugi) aktuarial atas kewajiban	(4.572.811.032)	(1.808.335.678)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	219.937.069.439	167.133.074.162

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
Perubahan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Awal	167.133.074.162	152.021.928.119
Beban Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	27.459.475.769	17.330.988.550
Pembayaran Pensiun	(1.894.006.678)	(3.750.178.135)
Pembayaran GSH (sesuai cadangan)	-	(1.741.116.021)
Pembayaran GSH (beban langsung)	-	(5.041.776.979)
Penghasilan Komprehensif Lain	27.238.526.186	8.313.228.628
Saldo Akhir	219.937.069.439	167.133.074.162

Asumsi Utama Yang Digunakan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Usia Pensiun Normal	50 & 58	56 Tahun
Tingkat Diskonto	7,50%	9,10%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8%	8%
Tabel Mortalita	TMI III - 2011	TMI III 2011
Tingkat Cacat	1% dari Mortalita	1% dari Mortalita
Tingkat Pengunduran Diri	0,00	0% - 2%

20. MODAL SAHAM

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Modal ditempatkan dan disetor pada awal tahun	8.000.000.000.000	8.000.000.000.000
Kapitalisasi Cadangan ke Modal Disetor	(6.000.000.000.000)	(6.000.000.000.000)
Modal ditempatkan dan disetor	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No 34, tanggal 14 Desember 2016, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), modal dasar Perseroan meningkat dari semula Rp5.000.000.000.000,00 (terdiri dari 5.000.000 lembar saham) menjadi Rp8.000.000.000.000,00 (terdiri dari 8.000.000 lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp1.650.000.000.000 (terdiri dari 1.650.000 lembar saham) menjadi Rp2.000.000.000.000 (terdiri dari 2.000.000 lembar saham) dengan mengkapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp350.000.000.000.

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Surplus Revaluasi Aset Tetap	1.980.781.821.592	1.980.781.821.592
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial		
Saldo Awal	(79.494.774.530)	(71.181.545.902)
Penambahan tahun berjalan	(27.238.526.186)	(8.313.228.628)
jumlah	(106.733.300.716)	(79.494.774.530)
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya	1.874.048.520.876	1.901.287.047.062

22. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA

a. Saldo Laba - Dicadangkan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo pada awal tahun	899.824.236.342	816.422.044.549
Pembentukan Cadangan	350.727.990.083	435.885.891.245
Kapitalisasi Cadangan ke Setoran Modal	-	(350.000.000.000)
Penerapan PSAK 24	-	(2.483.699.451)
Saldo laba dicadangkan akhir tahun	1.250.552.226.426	899.824.236.342

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

22. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA (lanjutan)

Sesuai dengan PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan mengalokasikan dana cadangan untuk bina lingkungan.

b. Saldo Laba - Belum Dicadangkan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Laba pada awal tahun	501.040.990.083	668.109.191.794
Pembagian Laba		
Dividen	(150.313.000.000)	(234.707.000.000)
Cadangan	(350.727.990.083)	(435.885.891.245)
Konversi Cadangan Akibat Penerapan PSAK 24 Tahun 2015	-	2.483.699.451
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	525.355.610.162	501.040.990.084
Saldo laba belum dicadangkan akhir tahun	525.355.610.162	501.040.990.083

c. Penggunaan Laba

Pembagian atas laba bersih tahun 2016 dan 2015 ditetapkan dalam RUPS tentang persetujuan laporan keuangan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, dan pembagian laba bersih tahun buku 2016 dan 2015 pada tanggal 10 Mei 2017 dan 10 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

	Laba Tahun Buku 2016		Laba Tahun Buku 2015	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Dividen	150.313.000.000	30,00%	234.707.000.000	35,00%
Cadangan	350.727.990.083	70,00%	435.885.891.245	65,00%
Jumlah	501.040.990.083	100%	670.592.891.245	100,00%

23. PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

	31 Desember 2017			
	Pemerintah	Swasta	Ekspor	Jumlah
Vaksin Bakteri	46.830.834.000	15.238.641.615	124.795.782.701	186.865.258.316
Vaksin Virus	137.983.668.000	45.137.436.034	1.118.103.714.876	1.301.224.818.910
Vaksin Kombinasi	306.291.210.000	17.509.693.665	9.519.244	323.810.422.909
Sera & Diagnostika	-	76.073.806.650	-	76.073.806.650
jumlah	491.105.712.000	153.959.577.964	1.242.909.016.820	1.887.974.306.784
Dikurangi :				
Potongan Penjualan	-	(15.861.230.634)	-	(15.861.230.634)
Penjualan Produk Bersih	491.105.712.000	138.098.347.330	1.242.909.016.820	1.872.113.076.150

	31 Desember 2016			
	Pemerintah	Swasta	Ekspor	Jumlah
Vaksin Bakteri	91.703.448.400	8.244.545.889	143.650.102.476	243.598.096.765
Vaksin Virus	274.617.304.400	57.955.635.954	1.103.824.537.618	1.436.397.477.972
Vaksin Kombinasi	185.243.559.000	15.451.346.226	-	200.694.905.226
Sera & Diagnostika	-	63.411.578.500	-	63.411.578.500
jumlah	551.564.311.800	145.063.106.569	1.247.474.640.094	1.944.102.058.463
Dikurangi :				
Potongan Penjualan	-	(16.377.724.036)	-	(16.377.724.036)
Penjualan Produk Bersih	551.564.311.800	128.685.382.533	1.247.474.640.094	1.927.724.334.427

24. PENJUALAN PRODUK PARTNERSHIP

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pemerintah		
Vaksin MR 10DS	650.647.830.000	-
IPV	130.326.496.000	64.365.025.000
Vaksin BCG Impor	87.200.000.000	65.446.543.000
Sub Jumlah dipindahkan	868.174.326.000	129.811.568.000

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

24. PENJUALAN PRODUK PARTNERSHIP (lanjutan)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sub Jumlah pindahan	868.174.326.000	129.811.568.000
Swasta		
HJ Vaksin Meningitis/Menivax ACWY (0.5 ml/vial)	227.782.836.375	223.820.571.125
HJ. Vaksin PPD	10.444.130.220	11.284.358.400
HJ Live Attenuated JE	8.607.780.000	-
HJ BD VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) 5 DS	715.600.000	-
HJ BD Vaksin Measles Rubella (MR) 10 DS	854.100.000	-
Sub Jumlah	248.404.446.595	235.104.929.525
Jumlah	1.116.578.772.595	364.916.497.525
Dikurangi : Potongan Penjualan	(5.550.739.021)	(5.960.897.089)
Penjualan Produk Partnership Bersih	1.111.028.033.574	358.955.600.436

25. PENJUALAN TRADING PARTNERSHIP

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Swasta		
Polyvalent snake Anti Venom	1.983.447.000	1.125.360.000
Human Papilloma Virus - Gardasil	15.355.050.000	22.803.750.000
HJ Difttheria Antitoxin	2.898.360.000	-
HJ Live Attenuated JE 1ds	110.500.000	-
Jumlah	20.347.357.000	23.929.110.000
Dikurangi : Potongan Penjualan	(227.767.900)	(165.287.250)
Jumlah Penjualan Trading Partnership	20.119.589.100	23.763.822.750

26. PENJUALAN JASA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Imunisasi	7.047.018.650	1.660.380.480
Laboratorium	1.695.687.637	3.974.742.832
Jumlah	8.742.706.287	5.635.123.312
Dikurangi : Potongan Penjualan	(432.674.767)	(319.866.802)
Jumlah Bersih	8.310.031.520	5.315.256.510

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium.

Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah statusnya menjadi Strategic Business Unit (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi lalu berdasarkan SK Direksi Nomor 04276/DIR/XII/2017 tentang struktur organisasi PT Bio Farma terjadi penggantian nama menjadi Unit Klinik dan Imunisasi.

27. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Produksi		
Pemakaian Bahan baku	357.218.375.992	328.370.014.672
Pemakaian Bahan Penolong	185.157.807.918	169.623.828.954
Pegawai	185.227.576.626	176.057.198.069
Sosial Karyawan	6.450.248.204	6.516.956.525
Perjalanan Dinas	3.339.827.992	3.880.814.195
Jasa Profesional	5.562.337.525	2.205.416.798
Pemeliharaan dan Perbaikan	148.022.825.768	150.225.162.776
Asuransi	3.967.633.607	2.372.476.078
Penyusutan dan Amortisasi	104.704.854.926	99.906.185.480
Kantor	9.143.705.323	10.662.356.362
Peningkatan & Pengembangan SDM	2.947.002.960	3.654.482.732
Total Beban Produksi Tidak Langsung	1.011.742.196.840	953.474.892.641

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

27. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN (lanjutan)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Beban Produksi	1.011.742.196.840	953.474.892.641
Persediaan Produk Dalam Proses		
Awal Tahun	357.924.068.324	222.475.046.209
Akhir Tahun	(461.660.017.021)	(357.924.068.324)
Beban Pokok Produksi	<u>908.006.248.143</u>	<u>818.025.870.526</u>
Persediaan Produk Jadi		
Awal Tahun	77.727.356.075	31.981.742.296
Kadaluarsa/Rusak	(3.755.261.785)	(6.396.852.325)
Promosi, Disumbangkan	(330.416.527)	(191.315.866)
Penggantian dan Pemakaian Sendiri	(337.541.327)	(1.625.740.401)
Reklasifikasi ke Persediaan Lain-lain	(21.770.130.921)	-
Beban Pokok Barang Tersedia untuk Dijual	<u>959.540.253.659</u>	<u>841.793.704.230</u>
Dijual untuk Imunisasi	(904.119.432)	(668.294.453)
Akhir Tahun	(35.450.728.207)	(77.727.356.075)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produk	<u><u>923.185.406.019</u></u>	<u><u>763.398.053.702</u></u>

28. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PARTNERSHIP

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Beban produksi		
Pemakaian Bahan baku	713.271.342.990	218.470.228.358
Persediaan Produk Dalam Proses		
Ditambah : PDP awal tahun	-	-
Dikurangi : PDP akhir	-	-
Beban Pokok Produksi	<u>713.271.342.990</u>	<u>218.470.228.358</u>
Persediaan Produk Jadi		
Ditambah : Persediaan Awal Produk	4.129.859.581	1.179.964.471
Dikurangi : Produk rusak/Kadaluarsa	(1.786.655.458)	-
Dikurangi : Pemakaian Produk Sendiri	(793.179.172)	(11.796.572)
Dikurangi : Promosi Produk	(1.913.076)	(961.692)
BP Produk Siap Jual	<u>714.819.454.865</u>	<u>219.637.434.566</u>
Dikurangi : Persediaan Produk Jadi Akhir	(4.488.970.250)	(4.129.859.581)
Dikurangi : Beban Pokok Produk untuk Imunisasi	(12.530.913)	(10.319.575)
BP Penjualan Produk Jadi Partnership	<u><u>710.317.953.702</u></u>	<u><u>215.497.255.410</u></u>

29. BEBAN POKOK PENJUALAN TRADING PARTNERSHIP

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Persediaan Awal Tahun	1.077.050.535	2.010.514.545
Pembelian	20.680.487.803	22.306.954.293
Tersedia untuk Dijual	21.757.538.338	24.317.468.838
Kadaluarsa/rusak	(532.905.285)	(469.961.502)
Digunakan untuk Promosi, Penggantian, Pemakaian Sendiri dan Disumbangkan	(378.090.231)	(907.950.034)
Digunakan untuk Imunisasi	(1.826.955.855)	(425.209.308)
Persediaan Akhir Tahun	(2.253.854.786)	(1.077.050.535)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Trading Partnership	<u><u>16.765.732.180</u></u>	<u><u>21.437.297.459</u></u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

30. BEBAN JASA

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Penjualan Produk Jadi Perusahaan untuk imunisasi	904.119.432	678.614.028
Penjualan Produk Jadi Partnership untuk imunisasi	12.530.913	425.209.308
Penjualan Trading Partnership untuk imunisasi	1.826.955.855	-
Pemakaian Bahan Baku dan Penolong	21.795.553	80.542.435
Karyawan	3.490.437.848	2.492.880.473
Perjalanan Dinas	76.145.000	171.205.907
Jasa Profesional	73.217.000	410.402.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	121.015.368	150.922.812
Penyusutan Aset Tetap	116.962.134	175.203.364
Asuransi	4.261.212	2.012.006
Beban Kantor	202.788.450	273.151.725
Peningkatan & Pengembangan SDM	11.021.880	101.379.000
Jumlah	<u>6.861.250.646</u>	<u>4.961.523.057</u>

31. PENGHASILAN LAIN-LAIN

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Penjualan Sampingan	448.844.848	437.723.305
Pendapatan Bunga Deposito	2.390.541.148	6.100.342.074
Pendapatan Jasa Giro	720.209.013	719.873.260
Hasil Sewa Ruangan dan Bagi Hasil	231.437.500	221.375.000
Pendapatan Denda dari Pemasok dan Pelanggan	1.744.798.043	1.382.822.931
Pendapatan Klaim Asuransi	575.233.401	-
Keuntungan Selisih Kurs	86.500.603.564	98.339.421.776
Potongan Pembelian Tunai	868.008.072	-
Pendapatan Hibah	2.005.440.189	42.086.241.496
Pemulihan Penyisihan Piutang	124.318	16.476.412
Pemulihan Penyisihan Persediaan	3.465.613.784	4.206.854.370
Penghasilan Lainnya (di bawah Rp 1 milyar)	16.207.559.323	11.216.584.159
Jumlah	<u>115.158.413.202</u>	<u>164.727.714.782</u>

32. BEBAN PENJUALAN

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pemakaian Bahan Baku & Penolong	126.000	6.484.609
Karyawan	27.980.806.494	26.338.936.758
Perjalanan Dinas	2.587.115.407	2.569.626.461
Jasa Profesional	91.515.600	1.585.800.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	572.513.947	1.904.745.936
Asuransi	51.632.657	34.209.742
Penyusutan Aset Tetap	7.109.850.616	5.278.049.188
Beban Kantor	3.875.745.936	3.514.079.743
Peningkatan dan Pengembangan SDM	249.016.921	469.372.279
Keagenan Ekspor	-	3.121.962.336
Ongkos Angkut & Embalage	52.019.220.941	48.307.423.816
Promosi dan Periklanan	15.634.426.421	18.182.334.592
Monitoring Produk	9.732.928.505	10.918.268.981
Royalti & Insentif Penjualan	16.207.869.473	9.566.643.368
Jaminan dan Kerugian Penjualan	1.365.481.224	1.994.250.717
Pajak	-	204.209.466
Jumlah	<u>137.478.250.141</u>	<u>133.996.397.992</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

33. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Karyawan	214.386.016.524	190.329.122.692
Dewan Komisaris dan Direksi	39.314.719.112	42.366.434.836
Beban Kantor	47.473.842.440	45.866.546.121
Pemeliharaan dan Perbaikan	27.009.466.724	31.413.171.647
Sosial Karyawan	11.122.746.763	12.015.618.046
Penyusutan Aset Tetap	22.249.807.269	22.253.869.462
Peningkatan dan Pengembangan SDM	8.491.504.654	12.308.462.663
Perjalanan Dinas	3.649.999.918	6.255.459.573
Jasa Profesional	8.976.897.266	11.670.053.213
HUT Perusahaan dan Olahraga	3.121.033.604	4.166.338.898
Jamuan Tamu	2.397.876.959	3.691.586.542
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan	4.763.576.834	2.732.650.737
Asuransi	695.823.263	373.656.854
Amortisasi Beban Tangguhan & Aset Takberwujud	3.077.717.103	3.084.343.350
Kemitraan dan Bina Lingkungan	12.822.702.113	10.686.678.646
Lain-lain	180.718.589	2.787.653.477
Jumlah	409.734.449.135	402.001.646.756

34. BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN SURVEILANS

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	37.148.956.510	26.850.010.656
Jasa Profesional	26.633.091.812	35.114.038.007
Karyawan	26.930.763.992	24.787.380.972
Penyusutan Aset Tetap	22.331.864.932	18.492.210.647
Pemeliharaan dan Perbaikan	4.584.743.214	4.008.787.093
Perjalanan Dinas	2.687.082.347	2.189.323.192
Beban Kantor	2.950.701.329	459.907.143
Peningkatan dan Pengembangan SDM	682.785.552	2.261.971.272
Asuransi	620.353.495	317.725.454
Jumlah	124.570.343.182	114.481.354.438

35. BEBAN LAIN-LAIN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kerugian Selisih Kurs	68.944.343.868	115.652.270.297
Koreksi Pajak dan Denda Pajak	5.576.669.070	10.924.295.638
Beban Bunga Pinjaman	8.071.427.633	9.342.500.000
Beban Hibah	1.175.911.572	-
Beban Lainnya (di bawah Rp 1 milyar)	413.546.409	3.826.088.455
Jumlah	84.181.898.552	139.745.154.390

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset	31 Desember 2017		31 Desember 2016		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	
Kas dan Setara Kas	USD	12.709.743,85	172.191.609.679,80	7.341.205,16	98.636.432.529,76
	EUR	772.138,26	12.488.270.804,68	5.596.645,06	79.257.168.849,44
Piutang Usaha	USD	21.122.544,65	286.168.234.918,20	19.442.919,50	261.235.066.402,00
Uang Muka	USD	1.018.633,20	13.800.442.593,60	784.815,17	10.544.776.624,12
	EUR	512.396,27	8.287.302.560,40	1.902.085,28	26.936.475.796,98
	GBP	-	-	68.892,00	1.137.235.378,92
	JPY	263.088,00	31.628.439,36	37.928.497,24	4.376.948.581,50
Jumlah Aset		492.967.488.996,04		482.124.104.162,72	

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	31 Desember 2017		31 Desember 2016		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	
Liabilitas					
Uang Muka Penjualan	USD	67.221,90	903.193.448,40	-	-
Utang Usaha	USD	11.830.199,22	160.275.539.032,56	3.322.164,16	44.636.597.653,76
	EUR	1.966.514,11	31.805.651.939,78	5.789.274,81	81.985.104.685,56
	GBP	37.372,00	680.843.469,72	1.692,00	27.930.706,92
	JPY	-	-	602.488,00	69.527.115,20
	CHF	-	-	270.840,00	3.569.064.518,40
	AUD	-	-	19.000,00	184.761.890,00
	SGD	-	-	52.026,00	483.785.611,92
Biaya YMH Dibayar	USD	62.400,00	845.395.200,00	28.800,00	386.956.800,00
Liabilitas Lancar Lainnya	USD	315.347,64	4.272.329.826,72	218.797,23	2.939.759.582,28
Jumlah Liabilitas			198.782.952.917,18		134.283.488.564,04
Aset (Liabilitas) Bersih			294.184.536.078,86		347.840.615.598,69

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Berikut adalah saldo akun dengan pihak-pihak berelasi:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah Aset	Jumlah	% terhadap jumlah Aset
Kas dan Setara Kas	369.362.205.418,52	5,73%	440.760.856.520,38	7,52%
Piutang Usaha	9.214.473.247,32	0,14%	12.281.476.667,02	0,21%
Piutang Lain-lain	1.302.637.458,00	0,02%	1.302.637.458,00	0,02%
Uang Muka Pembelian Lokal	-	0,00%	834.000.000,00	0,01%
Pendapatan yang Masih akan diterima	13.994.095,00	0,00%	221.375.000,00	0,004%
Utang Usaha				
Koperasi Karyawan Bio Farma	10.179.747.608,00	0,16%	14.869.209.175,93	0,25%
CV Karya Cahya Abadi	2.420.885.452,00	0,04%	1.652.232.908,17	0,03%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	0,00%	8.351.209.044,81	0,14%
PT Pertamina (Persero)	3.405.240.000,00	0,05%	-	0,00%
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	194.204.873,00	0,00%	160.990.986,00	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.350.000.000,00	0,02%	-	0,00%
PT INTI	-	0,00%	71.221.650,00	0,00%
Jumlah	397.443.388.151,84	6,16%	480.505.209.410,31	8,19%

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Sifat Hubungan

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan dengan Perusahaan</u>	<u>Sifat Saldo Akun /Transaksi</u>
Bank Milik Negara/ Daerah	Entitas Sepengendali	Kas dan setara kas
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Indofarma Global Medika (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Iglas (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Lain-lain
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
Koperasi Karyawan Bio Farma	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
CV Karya Cahya Abadi	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
Pihak Berelasi Lainnya	Entitas Sepengendali	Lain-lain dengan transaksi masing-masing dibawah Rp 1

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

- a. a. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/040-PK-2017 tanggal 8 Februari 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2017 senilai Rp636.576.481.200,00 (termasuk PPN). Rincian jenis dan nilai vaksin sebagai berikut:

No	Jenis Vaksin	Kemasan	Kuantum	Harga Satuan	Jumlah Rp.
1	BCG	20 ds/amp	1.794.300	54.500	97.789.350.000
2	DT	10 ds/vial	754.800	16.180	12.212.664.000
3	Campak	10 ds/vial	297.700	25.640	7.633.028.000
4	b-OPV	10 ds/vial	3.876.000	18.140	70.310.640.000
5	Hep. B 0.5 ml	1 ds/pouch	3.160.000	19.000	60.040.000.000
6	DTP-HB-Hib	5 ds/vial	4.416.600	69.350	306.291.210.000
7	Td	10 ds/vial	1.461.800	15.000	21.927.000.000
8	sIPV	5 ds/vial	18.000	139.000	2.502.000.000
Total					578.705.892.000
PPN 10 %					57.870.589.200
Total + PPN 10 %					636.576.481.200

- b. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/265-PK/2017 tanggal 3 Juli 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2017 (Vaksin Measles Rubella (MR)) senilai Rp374.505.054.000,00 (termasuk PPN). Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No	Provinsi	Vaksin MR (vial@10 dosis)					
		Jumlah Kebutuhan Kampanye	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah Kebutuhan Produksi	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	DKI Jakarta	146.470	149.820	Rp 21.944.135.400,00	29.330	149.820	Rp 4.394.220.600,00
2	Jawa Barat	725.090	149.820	Rp 108.632.983.800,00	145.220	149.820	Rp 21.756.860.400,00
3	Jawa Tengah	469.300	149.820	Rp 70.310.526.000,00	88.220	149.820	Rp 13.217.120.400,00
4	DI Yogyakarta	46.440	149.820	Rp 6.957.640.800,00	9.080	149.820	Rp 1.360.365.600,00
5	Jawa Timur	506.970	149.820	Rp 75.954.245.400,00	94.620	149.820	Rp 14.175.968.400,00
6	Banten	198.880	149.820	Rp 29.796.201.600,00	40.080	149.820	Rp 6.004.785.600,00
Jumlah		2.093.150		Rp313.595.733.000,00	406.550		Rp 60.909.321.000,00
Grand Total		Rp					374.505.054.000,00

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- c. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/234-PK.GAVI-2017 tanggal 3 Juli 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin Measles Rubella (MR), ADS dan Safety Box Bersumber Dana Hibah GAVI Tahun 2017 (Vaksin MR) senilai Rp310.188.690.000,00 (tidak termasuk PPN). Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No	Provinsi	Vaksin MR			
		Alokasi (Vial)	Harga Satuan	Penyedia	Jumlah Harga
1	DKI Jakarta	159.360	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 21.704.832.000,00
2	Jawa Barat	788.940	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 107.453.628.000,00
3	Jawa Tengah	510.620	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 69.546.444.000,00
4	DI Yogyakarta	50.510	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 6.879.462.000,00
5	Jawa Timur	551.620	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 75.130.644.000,00
6	Banten	216.400	Rp 136.200,00	PT. Bio farma	Rp 29.473.680.000,00
	Total	2.277.450			Rp 310.188.690.000,00

- d. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/359-PK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2017 (Vaksin IPV) senilai Rp5.552.021.904,00 (termasuk PPN). Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No	Provinsi	Vaksin IPV (vial@5 dosis)			
		Alokasi Distribusi	Harga Satuan	Penyedia	Jumlah Harga
1	<i>Buffer Stok Pusat</i>	36.114	Rp 153.736,00	PT Bio Farma	Rp 5.552.021.904,00
	Total	36.114			Rp 5.552.021.904,00

- e. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/163-PK.GAVI-2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin IPV, ADS dan Safety Box Bersumber Dana Hibah GAVI Tahun 2017 (Vaksin IPV) senilai Rp51.892.888.000,00 (tidak termasuk PPN). Rekapitulasi

No	Provinsi	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
1	Jawa Tengah	41.900	Rp 139.760,00	Rp 5.855.944.000,00
2	Jawa Timur	45.000	Rp 139.760,00	Rp 6.289.200.000,00
3	Jawa Barat	69.000	Rp 139.760,00	Rp 9.643.440.000,00
4	DKI Jakarta	13.900	Rp 139.760,00	Rp 1.942.664.000,00
5	Kep. Riau	3.350	Rp 139.760,00	Rp 468.196.000,00
6	Kep. Bangka Belitung	2.100	Rp 139.760,00	Rp 293.496.000,00
7	Sulawesi Utara	3.250	Rp 139.760,00	Rp 454.220.000,00
8	Kalimantan Utara	1.100	Rp 139.760,00	Rp 153.736.000,00
9	Kalimantan Timur	5.600	Rp 139.760,00	Rp 782.656.000,00
10	Kalimantan Selatan	6.300	Rp 139.760,00	Rp 880.488.000,00
11	Kalimantan Tengah	4.100	Rp 139.760,00	Rp 573.016.000,00
12	Kalimantan Barat	7.850	Rp 139.760,00	Rp 1.097.116.000,00
13	NTT	10.300	Rp 139.760,00	Rp 1.439.528.000,00
14	NTB	8.000	Rp 139.760,00	Rp 1.118.080.000,00
15	Lampung	12.000	Rp 139.760,00	Rp 1.677.120.000,00
16	Sumatera Selatan	12.600	Rp 139.760,00	Rp 1.760.976.000,00
17	Bengkulu	2.900	Rp 139.760,00	Rp 405.304.000,00
18	Jambi	5.100	Rp 139.760,00	Rp 712.776.000,00
	jumlah dipindahkan			Rp 35.547.956.000,00

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

e.

No	Provinsi	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
jumlah pindahan				Rp 35.547.956.000,00
19	Riau	11.900	Rp 139.760,00	Rp 1.663.144.000,00
20	Sumatera Barat	8.600	Rp 139.760,00	Rp 1.201.936.000,00
21	Sumatera Utara	23.950	Rp 139.760,00	Rp 3.347.252.000,00
22	Papua	5.300	Rp 139.760,00	Rp 740.728.000,00
23	Aceh	9.100	Rp 139.760,00	Rp 1.271.816.000,00
24	Papua Barat	1.600	Rp 139.760,00	Rp 223.616.000,00
25	Maluku Utara	2.200	Rp 139.760,00	Rp 307.472.000,00
26	Maluku Utara	3.300	Rp 139.760,00	Rp 461.208.000,00
27	Sulawesi Barat	2.450	Rp 139.760,00	Rp 342.412.000,00
28	Gorontalo	1.800	Rp 139.760,00	Rp 251.568.000,00
29	Sulawesi Tenggara	4.750	Rp 139.760,00	Rp 663.860.000,00
30	Sulawesi Selatan	13.100	Rp 139.760,00	Rp 1.830.856.000,00
31	Selawesi Tengah	4.800	Rp 139.760,00	Rp 670.848.000,00
32	Bali	5.100	Rp 139.760,00	Rp 712.776.000,00
33	Banten	19.000	Rp 139.760,00	Rp 2.655.440.000,00
Total				Rp 51.892.888.000,00

- f. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/271-PK.GAVI-2017 tanggal 8 Agustus 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Vaksin IPV, ADS dan Safety Box Bersumber Dana Hibah GAVI Tahap II Tahun 2017 (Vaksin IPV) senilai Rp35.580.939.360,00 (tidak termasuk PPN). Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No	Provinsi	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
1	Aceh	6.250	Rp 139.760,00	Rp 873.500.000,00
2	Sumatera Utara	16.400	Rp 139.760,00	Rp 2.292.064.000,00
3	Sumatera Barat	5.900	Rp 139.760,00	Rp 824.584.000,00
4	Riau	8.150	Rp 139.760,00	Rp 1.139.044.000,00
5	Jambi	3.500	Rp 139.760,00	Rp 489.160.000,00
6	Sumatera Selatan	8.650	Rp 139.760,00	Rp 1.208.924.000,00
7	Bengkulu	2.000	Rp 139.760,00	Rp 279.520.000,00
8	Lampung	8.250	Rp 139.760,00	Rp 1.153.020.000,00
9	Kep. Bangka Belitung	1.450	Rp 139.760,00	Rp 202.652.000,00
10	Kep. Riau	2.300	Rp 139.760,00	Rp 321.448.000,00
11	DKI Jakarta	9.550	Rp 139.760,00	Rp 1.334.708.000,00
12	Jawa Barat	47.286	Rp 139.760,00	Rp 6.608.691.360,00
13	Jawa Tengah	28.750	Rp 139.760,00	Rp 4.018.100.000,00
14	Jawa Timur	30.800	Rp 139.760,00	Rp 4.304.608.000,00
15	Banten	13.050	Rp 139.760,00	Rp 1.823.868.000,00
16	Bali	3.500	Rp 139.760,00	Rp 489.160.000,00
17	NTB	5.450	Rp 139.760,00	Rp 761.692.000,00
18	NTT	7.100	Rp 139.760,00	Rp 992.296.000,00
19	Kalimantan Barat	5.350	Rp 139.760,00	Rp 747.716.000,00
jumlah dipindahkan				Rp 29.864.755.360,00

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

No	Provinsi	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
jumlah pindahan				Rp 29.864.755.360,00
20	Kalimantan Tengah	2.800	Rp 139.760,00	Rp 391.328.000,00
21	Kalimantan Selatan	4.300	Rp 139.760,00	Rp 600.968.000,00
22	Kalimantan Timur	3.850	Rp 139.760,00	Rp 538.076.000,00
23	Kalimantan Utara	800	Rp 139.760,00	Rp 111.808.000,00
24	Sulawesi Utara	2.200	Rp 139.760,00	Rp 307.472.000,00
25	Sulawesi Tengah	3.300	Rp 139.760,00	Rp 461.208.000,00
26	Sulawesi Selatan	9.000	Rp 139.760,00	Rp 1.257.840.000,00
27	Sulawesi Tenggara	3.250	Rp 139.760,00	Rp 454.220.000,00
28	Gorontalo	1.250	Rp 139.760,00	Rp 174.700.000,00
29	Sulawesi Barat	1.650	Rp 139.760,00	Rp 230.604.000,00
30	Maluku	2.250	Rp 139.760,00	Rp 314.460.000,00
31	Maluku Utara	1.550	Rp 139.760,00	Rp 216.628.000,00
32	Papua Barat	1.100	Rp 139.760,00	Rp 153.736.000,00
33	Papua	3.600	Rp 139.760,00	Rp 503.136.000,00
Total				Rp 35.580.939.360,00

- g. PT Bio Farma (Persero) mengadakan penandatanganan kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tentang vaksin regular Tahun 2017 (Vaksin IPV) pada tanggal 14 September 2017 dengan nomor kontrak : KN.01.01/6/412-PK/2017. Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga satuan	Total Harga
				Rp	Rp
Produk <i>Partnership</i>					
1	Vaksin IPV 5ds (APBN) Buffer Pusat 2	Vial	252.600	139.760	35.303.376.000
Jumlah (-PPN 10%)					35.303.376.000
Jumlah (+PPN 10%)					38.833.713.600

- h. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: KN.01.01/6/566-PK/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk melaksanakan Penyediaan Obat Buffer Bencana/KLB/Penanganan Darurat/Emergency Dalam Rangka ORI Difteri Tahun 2017 senilai Rp2.312.002.000,00 (termasuk PPN). Rekapitulasi vaksin sebagai berikut:

No.	Provinsi	Vaksin DT (10 dosis)			
		Alokasi Distribusi	Harga Satuan	Penyedia	Jumlah Harga
1	DKI Jakarta	7.725	Rp 17.798,00	PT. Bio Farma	Rp 137.489.550,00
2	Jawa Barat	17.461	Rp 17.798,00	PT. Bio Farma	Rp 310.770.878,00
3	Banten	9.814	Rp 17.798,00	PT. Bio Farma	Rp 174.669.572,00
Jumlah		35.000			Rp 622.930.000,00
		Vaksin Td (10 dosis)			
1	DKI Jakarta	23.407	Rp 16.500,00	PT. Bio Farma	Rp 386.215.500,00
2	Jawa Barat	49.357	Rp 16.500,00	PT. Bio Farma	Rp 814.390.500,00
3	Banten	29.604	Rp 16.500,00	PT. Bio Farma	Rp 488.466.000,00
Jumlah		102.368			Rp 1.689.072.000,00
Total					Rp 2.312.002.000,00

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- i. Perusahaan melakukan perjanjian dengan distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk kepada konsumen swasta dalam negeri, melalui:
 1. Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 00009/DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
 2. Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Merapi Utama Pharma Nomor: 00010/DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
 3. Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Rajawali Nusindo Nomor: 00012/DIR/I/201; Nomor: 02/S.Pj/Nus.01/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
 4. Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Indofarma Global Medika Nomor: 00012/DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
 5. Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Sagi Capri Nomor: 00013/DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.

- j. Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli produk-produk Perusahaan dengan beberapa pelanggan di luar negeri sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 04394/DIR/VI/2010 dengan Universal Exim tentang Perjanjian Pemasaran, yang meliputi penjualan Monovalent Poliomyelitis Bulk dan DTP Bulk, yang berlaku hingga 31 Maret 2014. Pada tanggal 12 Juli 2013 dilakukan amendement IX atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 03975/DIR/VII/2013, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Maret 2016. Pada tanggal 17 Desember 2013 dilakukan amendement X atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 06724/DIR/XII/2013, yang memperbaharui nilai perjanjian. Pada tanggal 9 Maret 2015 dilakukan amendement XI atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 01512/DIR/III/2015 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Maret 2019 dan nilai perjanjian.
 2. Pada tanggal 7 November 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 06384/DIR/XI/2011 dengan BioNet Asia Ltd. tentang penjualan DPT Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Pada tanggal 14 Mei 2012 dilakukan amendement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 03098/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 17 November 2014 dilakukan amendement III atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 05664/DIR/XI/2014, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
 3. Pada tanggal 7 November 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 06383/DIR/XI/2011 dengan BioNet Asia Ltd. tentang penjualan Monovalent Poliomyelitis Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Pada tanggal 14 Mei 2012 dilakukan amendement I atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 03097/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2017. Pada tanggal 30 September 2013 dilakukan amendement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 05265/DIR/IX/2013, yang memperbaharui nilai perjanjian. Pada tanggal 17 November 2014 dilakukan amendement III atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.05663/DIR/XI/2014, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
 4. Pada tanggal 10 Desember 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 09439/DIR/XII/2009 dengan BioNet Asia Ltd. tentang Pemasaran Produk Bio Farma, berupa Bulk dan Finished Product (Vaccine), yang berlaku hingga 31 Desember 2014. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan amendement II atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 02956/DIR/V/2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan amendement VI atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 04948/DIR/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
 5. Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 02051/DIR/III/2010 dengan BioNet Asia Ltd. tentang Penjualan Poliomyelitis Bulk, yang berlaku hingga 30 Maret 2013. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan amendement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 02957/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan amendement III atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 04949/DIR/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

6. Pada tanggal 8 April 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 02305/DIR/IV/2010 dengan BioNet Asia Ltd. tentang penjualan DPT Bulk, yang berlaku hingga 8 April 2013. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan amendement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 02958/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan amendement III atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 04950/DIR/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
7. Pada tanggal 20 Desember 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 07444/DIR/XII/2012 dengan BioNet Asia Ltd. tentang Penjualan Ready-to-fill Final Bulk Td Vaccine, yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal registrasi dari produk akhir di wilayah Thailand.
8. Pada tanggal 16 Maret 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 01391/DIR/III/2013 dengan Biological E Limited tentang Penjualan Measles Bulk, yang berlaku hingga 5 tahun mendatang (16 Maret 2018). Pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan amendement I atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 06511/DIR/XII/2013, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2018.
9. Pada tanggal 3 Desember 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 05887/DIR/XI/2014 dengan Propharm (M) SDN. BHD tentang Penjualan Finished Product (Vaccine), yang berlaku hingga 30 April 2018.
10. Pada tanggal 19 Januari 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 05900/DIR/XI/2014 dengan Arabio tentang Penjualan Produk, Bulk Final dan vaksin yang berlaku hingga 31 Desember 2024.
11. Pada tanggal 25 April 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 03001/DIR/VIII/2016 dengan Serum Institute of India Private Limited dan BioNet Asia Ltd. tentang Suplai Bulk Campak yang berlaku hingga 31 Desember 2021.
12. Pada tanggal 6 September 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 03347/DIR/VIII/2016 dengan BioNet Asia Ltd. tentang penjualan Bulk Difteri dan Tetanus, yang berlaku hingga 31 Desember 2019.
13. Perusahaan mengadakan perjanjian (Long Term Arrangement/LTA) dengan UNICEF untuk pengadaan vaksin-vaksin berikut ini, yang ditandatangani pada tanggal :
 - i. 18 Maret 2016, untuk supply Vaksin DTP - 10 ds dari tahun 2016 sampai 2018.
 - ii. 7 April 2016, untuk supply Vaksin TT - 10 ds dan Td - 10 ds, dari tahun 2016 sampai 2017.
 - iii. 16 September 2016 - LTA Variation 11 No. 42104359 untuk supply bOPV-20 ds tahun 2017.
 - iv. 8 November 2016 - LTA Variation 4 No. 42104330 untuk supply Vaksin Measles-10 ds tahun 2017.
 - v. 3 Februari 2017 - LTA Variation 3 No. 42105646 untuk supply Vaksin DTP-10 ds tahun 2017.
 - vi. 24 Mei 2017 - LTA Variation 14 No. 42104359 untuk supply bOPV 10 ds tahun 2017.
 - vii. 5 September 2017 - LTA Variation 4 No. 42105646 untuk penambahan supply Vaksin DTP-10 ds tahun 2017 melalui UNICEF, yang semula 376.000 vial menjadi 562.000 vial.
14. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengembangan produk dengan pihak ketiga yaitu University of Melbourne, Artes Biotechnology GmbH, PATH Vaccine Solution (PVS), The International Vaccine Institute (IVI), Lipotek Pty. Ltd., Iwate Medical University dan Japan Poliomyelitis Research Institute (JPRI).
- k. Perusahaan melakukan penandatanganan perpanjangan & peningkatan plafond Fasilitas Pembiayaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) dengan rincian fasilitas sebagaimana tercantum pada SPPK No. WBG.CB I/SPPK/010/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang meliputi :
 - Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Sub Limit NCL
 - Limit : RP 250.000.000.000,00
 - Jenis Fasilitas : KMK Revolving Non Rekening Koran
 - Suku Bunga : 9 % p.a
 - Jangka Waktu : Sejak penandatanganan perjanjian kredit s.d. tanggal 14 Agustus 2017
 - Tujuan : Modal Kerja Operasional
 - Fasilitas Non Cash Loan untuk penerbitan LC Impor/SKDN (Sight, Usance & UPAS)/BG dengan sub limit Trust Receipt, Fasilitas Treasury Line, dan Purchasing Line.
 - Jaminan Fidusia atas Mesin, Inventaris, dan Peralatan Pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar IDR 265.000.000.000.

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- l. Perusahaan melakukan penandatanganan Penambahan Fasilitas Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) dengan rincian fasilitas sebagaimana tercantum pada SPPK No. WBG.CB1/SPPK/016/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang meliputi :
- • Fasilitas Kredit Modal kerja (KMK)
 - Limit : RP 400.000.000.000,00
 - Jenis Fasilitas : Revolving Non Cash Loan
 - Suku Bunga : 9,25% p.a untuk utilisasi dalam IDR; 5,6% p.a untuk utilisasi dalam USD
 - Jangka Waktu : Sejak penandatanganan perjanjian kredit s.d. tanggal 14 Agustus 2018
 - Tujuan : Modal kerja operasional
 - Jaminan :
 - Fasilitas Non Cash Loan untuk penerbitan LC Impor/SKDN (Sight, Usance & UPAS)/BG
 - Jaminan Fidusia atas Mesin, Inventaris, dan Peralatan Pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar IDR 430.000.000.000.
- m. Perusahaan melakukan penandatanganan perpanjangan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sesuai dengan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/38/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang meliputi:
- Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan Pembukaan LC Sight/Usance/UPAS dan/atau Pembukaan SKBDN Sight/Usance/UPAS dan/atau Pembiayaan LC dan/atau Pembiayaan SKBDN.
 - Limit : RP 250.000.000.000,00
 - Jenis Fasilitas : KMK Revolving Non Rekening Koran
 - Suku Bunga : 9,25% p.a untuk utilisasi dalam IDR; 5,6% p.a untuk utilisasi dalam USD
 - Jangka Waktu : Sejak penandatanganan perjanjian kredit s.d. tanggal 25 Juni 2018
 - Tujuan : Modal kerja operasional
 - Jaminan :
 - Fidusia atas Mesin, Inventaris, dan Peralatan Pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No. 28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar Rp 180 miliar.
 - Fidusia atas persediaan barang berlokasi di Jl. Pasteur No. 28 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 60 miliar.
 - Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp 35 miliar.
- n. Perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sesuai dengan surat No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang meliputi:
- Fasilitas Kredit Modal Kerja Max Co. Tetap (Fasilitas KMK)
 - Limit : RP 250.000.000.000,00
 - Jenis Fasilitas : *Rekening Koran dengan Max Co. Tetap. Interchangeable dengan fasilitas Penanguhan Jaminan Impor (PJI) (LC/SKBDN), Fasilitas Trade Line, Fasilitas Comercial Line dan Fasilitas Forex Line.*
 - Suku Bunga : 9 % p.a
 - Jangka Waktu : Sejak penandatanganan perjanjian kredit s.d. tanggal 19 Desember 2017
 - Tujuan : Modal kerja operasional
 - Jaminan :
 - Fidusia atas persediaan barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp 300 miliar (cross collateral dengan KMK W/A periode Juni 2017).
 - Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp 250 miliar (cross collateral dengan KMK W/A periode Juni 2017).
- o. Perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sesuai dengan surat No. R.II.126-ADK.DKR-2/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, yang meliputi:
- Fasilitas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Max Co. Tetap (Fasilitas KMK)
 - Limit : RP 250.000.000.000,00

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

38. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2013 PT Iglas (Persero) mengirimkan surat ke PT Bio Farma (Persero) dengan surat No.0489/D-12-2013 perihal Kewajiban PT Iglas (Persero) yang menyatakan bahwa pembayaran PT Iglas (Persero) ke PT Bio Farma (Persero) tahun 2013 adalah benar sebesar Rp25.000.000,00 dan belum dapat melakukan pembayaran kewajiban pada PT Bio Farma (Persero) tepat waktu sesuai kesepakatan.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan melalui surat no.03307/TUK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dan surat no.04581/TUK/IX/2014 tanggal 30 September 2014, dan telah ditanggapi oleh PT Iglas (Persero) melalui surat No.0328/D-10-2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa saat ini PT Iglas (Persero) masih berupaya memperbaiki mesin-mesin baik secara mandiri maupun dalam rencana dikerjasamakan dengan PT Petrosida Gresik dengan cara Kerjasama Operasi (KSO) sehingga belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada PT Bio Farma (Persero).

PT Bio Farma (Persero) mengirimkan surat penagihan ke PT Iglass (Persero) dengan surat No.04442/TUK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 perihal konfirmasi penagihan atas penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut..

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan ke PT Iglass (Persero) melalui surat No. 07769/TUK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal konfirmasi lebih lanjut atas penyelesaian kewajiban pembayaran setelah dilakukannya perbaikan dan pemasangan mesin – mesin di pabrik PT Iglass (Persero) berdasarkan jawaban surat PT Iglass (Persero) sebelumnya No.0313/D-07/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- a. PT Iglass (Persero) telah melakukan perbaikan dan pemasangan kembali mesin Emhart di line Dapur G-1.
- b. Melalui PPA telah merencanakan untuk memberikan pinjaman dana untuk pembelian /pembangunan Dapur G-2 beserta mesin – mesin lainnya.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan ke PT Iglass (Persero) melalui surat No.01372/TUK/IV/2016, tanggal 7 April 2016 perihal konfirmasi lebih lanjut atas penyelesaian kewajiban pembayaran dan berdasarkan tanggapan yang diterima tanggal 20 April 2016 sesuai surat No.0104/D-4- 2016 PT Iglass (Persero) menyatakan telah menghentikan kegiatan operasional Perusahaan sejak 31 Oktober 2015 dan di tahun 2016 oleh KBUMN telah dimasukkan dalam program Privatisasi Tahunan, sehingga belum bisa memastikan rencana pembayaran maupun penyelesaian kewajiban.

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas.

(i). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko atas penjualan kredit, Perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan:

	Konsentrasi Risiko Kredit		Exposure Maksimum
	Institusi	Lain-lain	
Piutang Usaha	313.138.277.507,32	-	313.138.277.507,32
Piutang Lain-lain	1.302.637.458,00	121.769.028,34	1.424.406.486,34
	<u>314.440.914.965,32</u>	<u>121.769.028,34</u>	<u>314.562.683.993,66</u>

PT BIO FARMA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Angka dinyatakan dalam Rupiah penuh)

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii). Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Disamping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa yang datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga Perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif dibanding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (*natural hedging*) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan (*long position*) serta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka Perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar di atas, Perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan Vendor Luar Negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

(iii). Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

	31 Desember 2017			Jumlah
	Suku Bunga Mengambang Kurang dari satu tahun	Suku Bunga Tetap Kurang dari satu tahun	Tidak dikenakan bunga	
Aset				
Kas dan Setara Kas	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304
Jumlah Efek	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304
Jumlah gap suku bunga	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304

(iv) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

b. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms-length*.

Perusahaan memperhitungkan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya, sebagai dampak pendiskontoannya yang tidak signifikan.

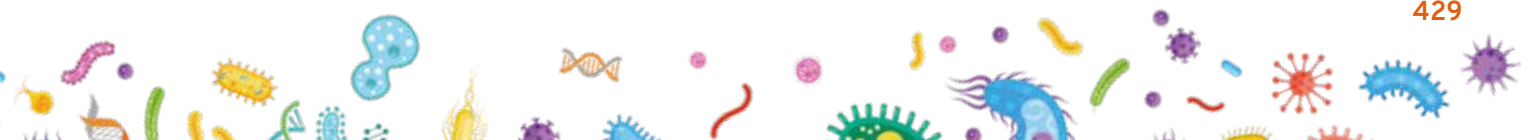
Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasi pada nilai kini arus kas masa depan pada tingkat bunga yang Pada 31 Desember 2017, tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka panjang.

40. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 13 Februari 2018.

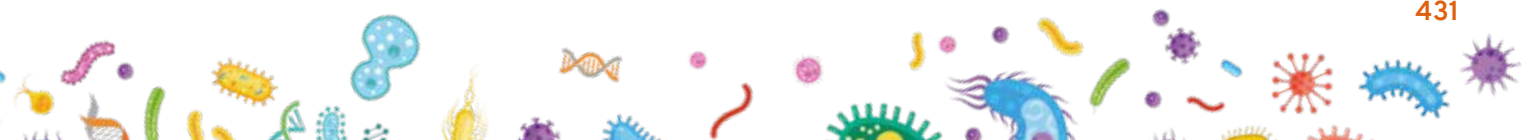
Referensi Kriteria Otoritas Jasa Keuangan dan Annual Report Award

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	✓
Ikhtisar Data Keuangan Penting		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	24
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	22-23
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	26



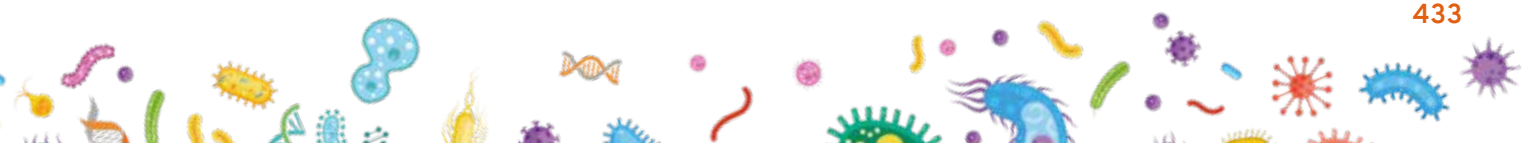
Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham yang beredar; Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	29
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	<p>Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); Tingkat bunga/imbalance; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk tahun 2016 dan 2017. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	29
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) dipusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 	41-44
Laporan Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan strategis; Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; Analisis tentang prospek usaha; Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 	47-51

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. 	54-55
Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>email</i> , dan <i>website</i> .	58-59
Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	60-61
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. 	64; 65-67
Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	70-71
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan. 	72-73
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. 	74-81
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. 	82-89



Kriteria	Penjelasan	Halaman
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. 	90-93
Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p> <p>Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan institusi lokal; Kepemilikan institusi asing; Kepemilikan individu lokal; Kepemilikan individu asing. 	94
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 	94
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	94
Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p>	94
Kronologi penerbitan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; Nilai penawaran efek lainnya; Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan Peringkat efek. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.</p>	95
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. 	95

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	96-102
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	104
Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	104
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti) 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	105-109
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	148-158
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	160-178



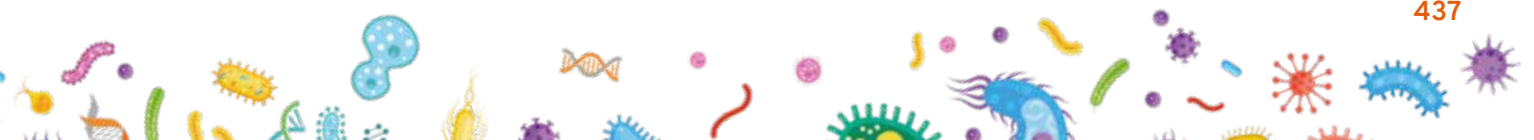
Kriteria	Penjelasan	Halaman
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	178-180
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	180-181
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	181-184
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan padatahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	184-186
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai(realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	187-189
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	189-190
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	158-159
Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i> ; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	190-192

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku /	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i>. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	192
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	192
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	192-193
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	193
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	193-195
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Asesmen manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan asesmen. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	195
Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 	239-240



Kriteria	Penjelasan	Halaman
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	250-251
Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	263
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2017 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2017 agar diungkapkan.	209-221
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	225-226, 280-282
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan) Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	251-254, 275-280
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	350

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	248-249, 272-273
Komite Audit	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 	291-301
Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ataremunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/ataremunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. 	308-310
Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 	301-308
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. 	310-312



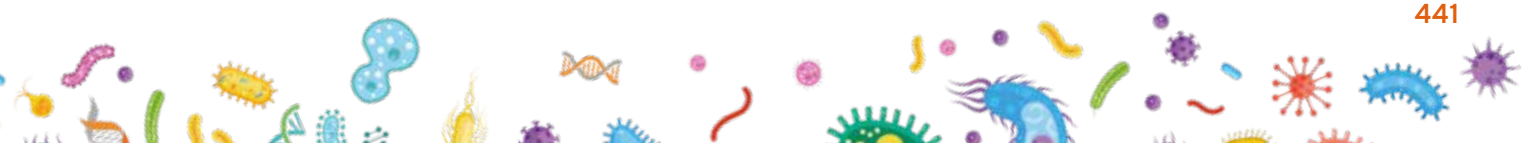
Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. 	312-318
Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p>	321
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 	322-330
Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan system pengendalian intern pada tahun buku. 	330-335
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2017 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan <p>Terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 	358-361
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2017 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut <p>Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.</p>	362-364

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2017 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	364-370
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2017 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	370-371
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dalainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	335
Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i> , buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	336-337
Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	338-342
Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i>; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	344-350
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	246-248, 271-272



Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi Keuangan / Financial Statements		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi
Opini auditor independen atas laporan keuangan		LK Halaman i
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan tanda tangan; Tanggal Laporan Audit; dan Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. 	LK Halaman i-ii
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: <ol style="list-style-type: none"> Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). 	LK Halaman 1-48
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	LK Halaman 3
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 	LK Halaman 5
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; Pajak penghasilan; Imbalan kerja; dan Instrumen Keuangan. 	LK Halaman 8-15
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. 	LK Halaman 38-39

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 	LK halaman 20-22
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 	LK Halaman 13-14
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 	LK Halaman 33-38
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif 	LK Halaman 47-48
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi



Laporan
Tahunan
2017



PT Bio Farma (Persero)

Jl. Pasteur No. 28, Bandung
40161, Indonesia.
Telp +62 22-2033755
Fax: +62 22 - 2041306
email: mail@biofarma.co.id

www.biofarma.co.id